



VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

Salah satu misi Pemerintah Indonesia yang juga sejalan dengan tujuan *Millenium Development Goals* (MDGs) saat ini adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih dengan upaya konkret adalah mendorong dan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas bagi setiap pengelola keuangan daerah dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Sejalan dengan misi tersebut, Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah mengatur proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Hal ini dimaksudkan agar tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diwujudkan.

Dalam kerangka manajemen pemerintahan, proses penyelenggaraan pemerintahan daerah akan berujung pada tahapan evaluasi dan pelaporan yang dalam konteks pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan pada saat pemerintah daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal ini sejalan dengan ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 31 dan 32 UU Nomor 17 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, Laporan tersebut setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah yang penyajiannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Beberapa ketentuan pelaksanaan dari UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah memberikan penjelasan secara teknis dan normatif atas pengelolaan keuangan daerah antara lain Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang pada intinya mengamanatkan bahwa "Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)". Hal ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Permendagri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Sejalan dengan ketentuan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengatur Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. Secara teknis normatif Standar Akuntansi Berbasis Akrua telah di-*breakdown* melalui Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 yang menjelaskan bahwa Penyajian laporan keuangan terdiri atas: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. Neraca; d. Laporan Operasional; e. Laporan Arus Kas; f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan g. Catatan Atas Laporan Keuangan. Akuntansi dengan basis akrual ini dianggap lebih baik daripada basis kas, karena akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik.

Berpijak pada landasan hukum tersebut diatas maka Pemerintah Kabupaten Manggarai berkewajiban untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai wujud dari komitmen Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyusunan laporan keuangan ini didasarkan pada beberapa ketentuan teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan standar penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.

1.1. Maksud dan Tujuan

1.1.1. Maksud

Sesuai dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi (desentralisasi), dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas pada dasarnya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, dan daya saing daerah.

Selanjutnya sesuai dengan peraturan perundangan bidang pengelolaan keuangan negara, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan seiring dengan paradigma penyelenggaraan pemerintah saat ini, upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik merupakan suatu tuntutan sehingga sudah menjadi komitmen bersama yang harus dibangun segenap komponen pemerintahan agar pelayanan pada masyarakat dapat dioptimalkan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah harus memperhatikan tingkat efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dengan memperhatikan hubungan pemerintah pusat-daerah, antar pemerintah daerah serta potensi daerah itu sendiri. Salah satu diantaranya yang memegang peranan penting adalah aspek keuangan daerah. Aspek keuangan daerah meliputi penggalan potensi,



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

fungsi alokasi, kualitas pengelolaan dan penatausahaan, serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas serta efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian setiap entitas laporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan, untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen transparan, dan kesinambungan antargenerasi dengan pengertian sebagai berikut.

- a. Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan secara periodik;
- b. Manajemen adalah membantu para pengguna untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, serta kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat;
- c. Transparan adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan; dan
- d. Kesinambungan antar generasi (*intergenerational equity*) adalah membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang, diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran yang dilakukan saat ini.

1.1.2. Tujuan

Pelaporan keuangan pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan meliputi:

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber pencrimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

- a. Aset;
- b. Kewajiban;
- c. Ekuitas;
- d. Pendapatan;
- e. Belanja;
- f. Transfer;
- g. Pembiayaan;
- h. Arus Kas;
- i. Perubahan Saldo Anggaran Lebih; dan
- j. Perubahan Ekuitas.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeleenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. UU Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- f. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- g. UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- h. PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- i. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- k. PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
- l. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- m. PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- n. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. PP Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- p. PP Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
- q. PP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
- r. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
- s. Perpres Nomor 71 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) Tahun Anggaran 2025;
- t. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
- u. Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- v. Permendagri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
- w. Permendagri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua;



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- x. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- y. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- z. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 53 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas PMK Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Pemerintah;
- aa. PMK Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU);
- bb. PMK Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Insentif Fiskal (DIF) atas Pencapaian Kinerja Daerah;
- cc. PMK Nomor 102 Tahun 2024 tentang Indikator Tingkat Kinerja dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (e-DAU) Tahun Anggaran 2025;
- dd. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal BUMD;
- ee. Perda Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- ff. Perda Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah (Perda) Kabupaten Manggarai Nomor 065);
- gg. Perda Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Tahun 2021 s.d. 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 Nomor 03);
- hh. Perda Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 09);
- ii. Perda Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- jj. Perda Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- kk. Perda Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2025;
- ll. Peraturan Bupati (Perbup) Manggarai Nomor 72 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai;
- mm. Perbup Manggarai Nomor 73 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai;



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- nn. Perbup Manggarai Nomor 74 Tahun 2023 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- oo. Perbup Manggarai Nomor 271 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
- pp. Perbup Manggarai Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2025.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- 2.4. *Mandatory Spending* dalam Penyusunan APBD

Bab III Iktisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Iktisar Pencapaian Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala Capaian Kinerja Keuangan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

Bab V Penjelasan Pos-Pos Keuangan

- 5.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
- 5.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca
- 5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)
- 5.5 Penjelasan Pos-Pos Arus Kas (LAK)
- 5.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Ekuitas (LPE)

Bab VI Pengungkapan atas Informasi-informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

BAB II

**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

2.1. Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah adalah salah satu bentuk meningkatnya indikator makro ekonomi, dengan kata lain salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolak ukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi. Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi pemerintah daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025 mengacu pada indikator sosial ekonomi pemerintah daerah tahun 2024 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Manggarai yaitu (minimal):

- a. Tingkat kemiskinan pada tahun 2025 sebesar 0,91%;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 2,24%;
- c. *Gini ratio* pada tahun 2025 sebesar 0,23%;
- d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 70,10%;
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,09%;
- f. Tingkat inflasi sebesar 2,39%;
- g. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku tahun 2025 senilai Rp6.379,84 miliar rupiah; dan
- h. PDRB atas dasar harga konstan tahun 2025 senilai Rp232,73 miliar rupiah.

Gini Ratio dan inflasi tidak dapat diuraikan sebagai bagian dari kinerja Ekonomi Makro Kabupaten Manggarai dengan pertimbangan :

- a. Kota-kota di dalam wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menjadi lokasi atau obyek survei inflasi adalah Kota Kupang, Kota Maumere dan Kota Waingapu. Inflasi NTT 2025 berada di bawah target nasional, Pemerintah Provinsi NTT berhasil menekan angka inflasi lebih rendah dari inflasi secara nasional pada 2025. Inflasi di NTT mencapai 2,39% pada Desember 2025, sedangkan secara nasional mencapai 2,5%.
- b. Indikator *gini ratio* tidak tersedia dalam data BPS Kabupaten Manggarai, sedangkan data BPS Provinsi NTT dan BPS Nasional hanya menyediakan data terbatas untuk indikator *gini ratio* Provinsi NTT dan *gini ratio* Nasional.

2.1.1. Tingkat Kemiskinan

Mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh *Worldbank*. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil persentase penduduk miskin (P_0). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*- P_1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index*- P_2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Tabel 2.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Manggarai

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Nalk/turun (%)
1	Kabupaten Manggarai (%)	19,69%	19,01%	18,10%	0,91
2	Kabupaten Manggarai (jiwa)	70,00	68,39	65,81	2,58
3	Provinsi NTT (%)	19,96%	19,02%	18,10%	0,92
4	Nasional (%)	9,36%	9,03%	8,47%	0,56
5	Peringkat Provinsi	14	19	14	5
6	Peringkat Nasional	434	410	58	352

Sumber Dokumen: BPS Nasional, BPS NTT, dan BPS Kabupaten Manggarai

Persentase penduduk miskin Kabupaten Manggarai pada tahun 2023 s.d 2025 menunjukkan perbaikan atau secara umum dapat dikatakan tren kemiskinan terus mengalami penurunan dimana angka kemiskinan tercatat di tahun 2023 (19,69%) dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 70,00 (ribu jiwa), tahun 2024 (19,01%) jumlah penduduk miskin sebanyak 68.39 (ribu jiwa) dan tahun 2025 (18,10%) jumlah penduduk miskin sebanyak 65.81 (ribu jiwa) sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2021-2026 yakni 18,88%, maka capaian tahun 2025 ini berada di bawah target RPJMD. Persentase penduduk miskin Kabupaten Manggarai tahun 2025 ini lebih baik dari keadaan Provinsi NTT namun masih di atas angka Nasional, sehingga dalam perencanaan dan penganggaran pada tahun-tahun mendatang harus tetap menjadi prioritas dan memastikan agar program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan lebih tepat sasaran dan tepat kegiatan agar persentase/angka kemiskinan ini dapat terus ditekan hingga mencapai persentase/angka yang minimal.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 2.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Manggarai

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Manggarai (%)	4,63	2,88	3,57	(0,69)
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi NTT (%)	3,33	3,41	3,35	0,06
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional (%)	1,53	1,36	1,36	0,17
4	Peringkat Provinsi	14	11	13	(2)
5	Peringkat Nasional	39	39	33	6

Sumber Dokumen: BPS Nasional, BPS NTT, dan BPS Kabupaten Manggarai

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) Kabupaten Manggarai pada tahun 2023 s.d. 2025 menunjukkan tren perbaikan, dimana rata-rata pengeluaran penduduk miskin berada di bawah garis kemiskinan. Selama 2023 s.d. 2025, angka ini fluktuatif namun diusahakan turun dimana pengentasan kemiskinan di tingkat kabupaten terus diupayakan untuk menurunkan kesenjangan yang berarti penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan.

Pada tahun 2023 s.d. 2024 upaya Pemerintah Kabupaten Manggarai difokuskan pada penguatan daya beli melalui sektor pertanian dan UMKM, guna menekan angka kemiskinan dengan faktor penentu adalah perbaikan indeks yang sangat dipengaruhi oleh stabilitas harga kebutuhan pokok dan efektivitas bantuan sosial yang diberikan Pemerintah.

Tabel 2.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Manggarai

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab. Manggarai (%)	1,48	0,66	1,00	(0,34)
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi NTT (%)	0,80	0,85	0,84	0,01
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional (%)	0,23	0,35	0,32	0,03
4	Peringkat Provinsi	8	17	10	7
5	Peringkat Nasional	4	4	7	(3)

Sumber Dokumen: BPS Nasional, BPS NTT, dan BPS Kabupaten Manggarai

Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) mengukur ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Pada tahun 2023 s.d. 2025 Kabupaten Manggarai terus menunjukkan perubahan dimana Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) pada tahun 2023 adalah sebesar 1,48%, tahun 2024 sebesar 0,66%, dan tahun 2025 1,00%. Nilai ini menandakan kesenjangan antara penduduk miskin semakin mengecil meskipun rata-rata pengeluaran penduduk masih jauh di bawah garis kemiskinan.

2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, (iii) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada BPS Kabupaten Manggarai, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Manggarai, sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Manggarai

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Manggarai (%)	2,44	1,17	1,56	(0,39)
2	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi (%)	3,14	3,02	3,31	(0,3)
3	Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional (%)	5,32	4,91	4,85	0,06
4	Peringkat Provinsi	17	21	20	1
5	Peringkat Nasional	254	254	254	0

Sumber Dokumen: BPS Nasional, BPS NTT dan BPS Kabupaten Manggarai

TPT di Kabupaten Manggarai Tahun 2023 sebesar 2,44% mengalami penurunan pada tahun 2024 sebesar 1,17% dan pada tahun 2025 naik menjadi 1,56%, yang berarti dari 100 orang usia kerja terdapat 1-2 orang yang berstatus pengangguran. TPT Kabupaten Manggarai pada tahun 2023 lebih rendah dari TPT Provinsi NTT yaitu sebesar 3,14%, tahun 2024 sebesar 3,02% dan tahun 2025 sebesar 3,31% walaupun masih lebih rendah dibanding TPT Nasional pada tahun 2023 adalah sebesar 5,32%, tahun 2024 sebesar 4,91%, dan tahun 2025 sebesar 4,85%.

2.1.3. Gini Ratio

Indeks gini atau *gini ratio* merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari indeks gini berkisar antara 0 dan 1, dimana:

- Indeks gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama; dan
- Indeks gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada BPS Kabupaten Manggarai, realisasi pencapaian *Gini Ratio* Kabupaten Manggarai Tahun 2025 adalah:

Tabel 2.5 Tingkat Gini Ratio Kabupaten Manggarai

No.	Gini Ratio	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kabupaten/Kota	0.291	0.274	0,230	0,044
2	Tingkat Provinsi	0,325 (per Semester 1)	0,315 (per Triwulan 3)	0,322 (per September 2025)	(0,007)



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Gini Ratio	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/Turun (%)
3	Tingkat Nasional	0,388 (per Semester 1)	0,381 (per Triwulan 3)	0,363 (per September 2025)	0,018
4	Peringkat Provinsi	18	22	13	9
5	Peringkat Nasional	15	24	20	4

Sumber Dokumen: BPS Nasional, BPS NTT dan BPS Kabupaten Manggarai

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperkenalkan oleh *United Nation Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Sesuai dengan UNDP, indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- Rendah (< 60);
- Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$);
- Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$); dan
- Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada BPS Kabupaten Manggarai, realisasi pencapaian IPM Kabupaten Manggarai tahun 2023 sebesar 68,48 poin, tahun 2024 mencapai 69,35 poin dengan kategori sedang, sementara di tahun 2025 turun mencapai 70,10 poin dengan kategori tinggi, sebagaimana digambarkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.6 Indeks Pembangunan Manusia

No.	IPM (Tingkat)	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/Turun (%)
1	Kabupaten/Kota	68,48	69,35	70,10	(0,75)
2	Provinsi	66,48	69,14	69,89	(0,75)
3	Indonesia/Nasional	73,55	75,02	75,90	(0,88)
4	Peringkat Provinsi	8	8	8	Tetap
5	Peringkat Nasional	494	494	494	Tetap

Sumber Dokumen: BPS Nasional, BPS NTT, dan BPS Kabupaten Manggarai

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Manggarai pada tahun 2024, mengalami peningkatan sebesar 0,87 poin dibandingkan dengan pencapaian tahun 2023, dan tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 0,75 poin dibandingkan dengan pencapaian tahun 2024. Capaian ini mencerminkan adanya kemajuan nyata dalam pembangunan manusia di Kabupaten Manggarai baik dari aspek kesehatan, pendidikan maupun ekonomi. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan standar hidup, berkaitan dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Umur harapan hidup saat lahir Kabupaten Manggarai pada tahun 2025 mencapai 67,89 tahun lebih lama 0,25 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

pada tahun 2024 mencapai 67,63 tahun. Kemudian, Rata-rata Lama Sekolah mencapai 8,17 tahun dengan harapan lama sekolah 13,74 tahun.

IPM Kabupaten Manggarai pada saat ini berada pada urutan 8 dari 22 Kab/Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan berada pada urutan 494 di tingkat nasional dari 548 Kab/Kota yang ada di Indonesia pada tahun 2025.

2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Manggarai

No	Uraian	Kabupaten/Kota		
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	PDRB (harga konstan 2010) (dalam miliar Rp)	2.391,36	3.399,33	3.572,34
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,79	3,93	5,09
3	Peringkat Provinsi	13	13	13
4	Peringkat Nasional (Indonesia)	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Nasional, BPS NTT, dan BPS Kabupaten Manggarai

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren positif. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi berada pada angka 3,79%, meningkat menjadi 3,93% pada tahun 2024, dan mencapai 5,09% pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi daerah mengalami perkembangan yang semakin baik dari tahun ke tahun.

2.1.6. Produk Domestik Regional Bruto

Sesuai dengan data pada BPS Kabupaten Manggarai, Inflasi Kabupaten Manggarai tahun 2025 adalah sebesar 1,19%. Salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu daerah dalam satu periode secara makro dapat digambarkan dari PDRB. Besaran PDRB dapat digunakan sebagai indikator dalam menilai kinerja perekonomian suatu wilayah tertentu, terutama yang dikaitkan dengan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. PDRB terdiri dari: (1) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan (2) PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB ADHB menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun perhitungan. PDRB ADHK dihitung menggunakan harga pada tahun perhitungan. PDRB ADHK dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB ADHB Kabupaten Manggarai Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 2.8 Rincian Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku

No.	Jonis Pengeluaran	PDRB Kabupaten Manggarai Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Milliar Rupiah)		
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3.632,49	3.633,54	4.064,92
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	250,67	284,11	290,00
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.352,24	1.412,68	1.473,14
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.419,42	2.517,89	2.572,65
5	Perubahan Investasi	56,28	61,67	61,74
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	(2.213,13)	(2.186,75)	(2.082,61)
PDRB		5.498,22	5.923,14	6.379,84

Sumber Dokumen: Kabupaten Manggarai Dalam Angka 2026

Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa PDRB ADHB Kabupaten Manggarai Tahun 2023 s.d. 2025 mengalami peningkatan. PDRB ADHB pada tahun 2023 adalah senilai Rp5.498,22, pada tahun 2024 naik menjadi senilai Rp5.923,14, dan tahun 2025 naik menjadi senilai Rp6.379,84. PDRB ADHK Kabupaten Manggarai Tahun 2023 s.d. 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.9 Rincian Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan

No.	Jenis Pengeluaran	PDRB Kabupaten Manggarai Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (Milliar Rupiah)		
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2.368,47	2.439,86	2.541,52
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	151,25	166,98	167,78
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	776,85	804,95	831,33
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.440,62	1.483,20	1.477,34
5	Perubahan Investasi	40,02	42,87	40,87
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	(1.507,27)	(1.537,88)	(1.486,51)
PDRB		3.269,94	3.398,36	3.572,34

Sumber Dokumen: Kabupaten Manggarai Dalam Angka 2026

Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa PDRB ADHK Kabupaten Manggarai Tahun 2023 s.d. 2025 mengalami peningkatan. PDRB ADHK Tahun 2023 senilai Rp3.269,94, pada tahun 2024 naik menjadi senilai Rp3.398,36 dan tahun 2025 naik menjadi senilai Rp3.572,34.

2.1.7. Struktur Perekonomian Kabupaten Manggarai

Struktur perekonomian Kabupaten Manggarai dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.10 PDRB seri 2010 ADHB Menurut Lapangan Usaha (dalam Milliar Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	A-Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan	1.204,95	1.263,49	1.350,16
2	B-Pertambangan Dan Penggalian	138,39	146,62	145,79
3	C-Industri Pengolahan	21,68	25,40	30,04
4	D-Pengadaan Listrik Dan Gas	6,99	8,06	7,86



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uralan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
5	E-Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang	6,41	6,84	7,20
6	F-Konstruksi	800,12	822,99	835,23
7	G-Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor	570,99	634,17	718,56
8	H-Transportasi Dan Pergudangan	197,68	228,10	244,72
9	I-Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	23,48	27,91	29,56
10	J-Informasi Dan Komunikasi	566,66	608,27	651,55
11	K-Jasa Keuangan Dan Asuransi	392,48	410,91	448,36
12	L-Real Estate	116,05	121,63	133,50
13	M,N-Jasa Perusahaan	7,31	8,00	8,91
14	O-Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	761,50	885,75	979,92
15	P-Jasa Pendidikan	406,05	411,84	453,14
16	Q-Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	114,92	125,95	137,99
17	R,S,T,U-Jasa Lainnya	172,54	187,26	197,34
18	Produk Domestik Regional Bruto	5.502,194.5	5.923,14	6.379,84
19	Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas	0,00	0,00	0,00
20	PDRB Provinsi	72.695.280,00	0,00	0,00
21	PDRB Nasional	11.710.397.800,00	0,00	0,00
22	Peringkat Provinsi	13	0,00	0,00
23	Peringkat Nasional	0,00	0,00	0,00

Sumber Dokumen: Kabupaten Manggarai Dalam Angka 2025

2.1.8. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Manggarai

Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha tahun 2022 s.d. 2025, perekonomian Kabupaten Manggarai menunjukkan perkembangan yang cukup positif dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, serta jasa perusahaan. Sektor akomodasi dan makan minum juga tetap tumbuh meskipun mengalami perlambatan pada tahun 2025. Di sisi lain, beberapa sektor mengalami kontraksi, seperti pertambangan dan penggalian, pengadaan listrik dan gas, serta konstruksi pada tahun 2025. Secara umum, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai didorong oleh meningkatnya aktivitas perdagangan, jasa, dan industri yang terus berkembang dari tahun ke tahun

Selanjutnya per masing-masing sektor sebagai sebuah indikator untuk menilai pertumbuhan sektor-sektor potensial, cepat maju dan cepat tumbuh dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 2.11 Laju Pertumbuhan Sektor PDRB Kabupaten Manggarai (%)

No.	Lapangan Usaha	2022	2023	2024	2025
1	A-Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan	4,48	1,27	0,87	3,35
2	B-Pertambangan Dan Penggalian	2,28	5,31	7,08	-0,93
3	C-Industri Pengolahan	4,84	7,17	7,57	11,96
4	D-Pengadaan Listrik Dan Gas	9,08	11,28	15,07	-5,35
5	E-Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang	1,42	5,63	5,49	4,14
6	F-Konstruksi	-0,05	7,84	1,24	-0,39
7	G-Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor	8,76	7,07	8,84	12,53
8	H-Transportasi Dan Pergudangan	3,34	4,68	5,55	6,35
9	I-Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	19,03	14,04	15,17	5,96
10	J-Informasi Dan Komunikasi	5,00	4,01	2,12	5,40
11	K-Jasa Keuangan Dan Asuransi	1,21	0,74	3,49	6,50
12	L-Real Estate	3,49	4,09	3,64	1,80
13	M,N-Jasa Perusahaan	4,63	4,68	7,43	8,15
14	O-Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,10	1,31	9,14	6,43
15	P-Jasa Pendidikan	-0,15	4,89	2,65	7,79
16	Q-Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	3,02	5,14	3,32	4,54
17	R,S,T,U-Jasa Lainnya	0,91	2,97	1,60	1,44

Sumber Dokumen: Kabupaten Manggarai Dalam Angka 2025

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada beberapa prinsip antara lain partisipatif atau melibatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan kegiatan pembangunan, transparansi, dapat dipertanggungjawabkan, disiplin anggaran dan keadilan anggaran, serta memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran. Di samping itu kebijakan pengelolaan keuangan daerah juga memperhatikan berbagai temuan aparat pemeriksa baik internal maupun eksternal sebagai referensi untuk memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan daerah. Secara umum kebijakan keuangan daerah adalah sebagai berikut.

2.2.1. Pendapatan Daerah

Penetapan pendapatan daerah dilakukan melalui perkiraan pendapatan yang dapat dicapai, terukur dan rasional dengan mempertimbangkan potensi Kabupaten Manggarai dan realisasi penerimaan tahun 2025. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 dan realisasi penerimaan PAD tahun 2025, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
- 2) Tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Manggarai;
- 3) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah;
- 4) Penerimaan atas jasa layanan kesehatan masyarakat yang dananya bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh SKPD telah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Pendapatan Retribusi Daerah, obyek Pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- 5) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Manggarai pada bank telah memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan tujuan penyertaan modal dimaksud;
- 6) Penerimaan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, telah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis lain-lain PAD yang sah, obyek hasil pengelolaan dana bergulir, dan rincian obyek hasil pengelolaan dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima; dan
- 7) Penerimaan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana, dan Cadangan sesuai peruntukannya.

b. Pendapatan Transfer

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana transfer dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025. Peraturan Presiden tersebut mengatur tentang penganggaran dana Perimbangan sebagai berikut.

- 1) Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2025;
- 2) Rincian Alokasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2025;
- 3) Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2025;
- 4) Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2025;
- 5) Rincian Alokasi Dana Alokasi Insentif Daerah Tahun Anggaran 2025; dan



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

6) Rincian Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan TA 2025.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 pada Pasal 46 s.d. 48, menjelaskan bahwa uraian penganggaran atas Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah sebagai berikut.

- 1) Dana darurat, merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Penganggaran penerimaan hibah Kabupaten Manggarai tahun 2025 bersumber dari Hibah Indeks Pembangunan Daerah Mandiri – Infrastruktur Pemerintahan (IPDM-IP), Hibah Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) dan Hibah Air Minum Pedesaan yang bersumber dari APBN yang telah didasari pada Perjanjian; dan
- 3) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan antara lain Pendapatan Hibah Dana BOS, dan Pendapatan Pengembalian Hibah tahun sebelumnya.

2.2.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Manggarai yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang selanjutnya terdistribusi pada beberapa SKPD. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

a. Belanja Operasi

Penganggaran Belanja Operasi memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Belanja Pegawai

- a) Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- c) Penyediaan dana penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi PNSD yang dibebankan pada APBD berpedoman pada UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- d) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah atas persetujuan DPRD Kabupaten Manggarai sejalan dengan Ketentuan pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- e) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- f) Penganggaran tunjangan profesi guru PNSD, dana tambahan penghasilan guru PNSD, dan tunjangan khusus guru dianggarkan setelah dipastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Manggarai mendapatkan alokasi dana tunjangan profesi dan tambahan penghasilan guru dan tunjangan khusus guru dari APBN.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain. Pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD. Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

3) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 09).

b. Belanja Modal

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah Kabupaten Manggarai memperhatikan hal-hal, yaitu alokasi Belanja Modal dalam APBD Kabupaten Manggarai digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang telah terdistribusi pada seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai berdasarkan prioritas Pembangunan Daerah. Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam, dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun 2025, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

d. Belanja Transfer

Penganggaran Belanja Transfer berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2023, kelompok Belanja Transfer dirinci atas jenis:

1) Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Provinsi kepada Kabupaten/Kota atau pendapatan Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa atau pendapatan Pemerintah Daerah tertentu kepada Pemerintah Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Manggarai menganggarkan Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa serta beberapa Peraturan Pemerintah antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Merujuk pada beberapa ketentuan tersebut diatas, pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Manggarai telah mengalokasikan anggaran untuk dana Alokasi Dana Desa sebesar 10% dari dana Transfer setelah dikurangi dana DAK, serta mengalokasikan dana transfer Desa dari APBN sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku.

2.2.3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

Penganggaran Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan realisasi anggaran Tahun 2025 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun 2026 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun (SiLPA) Tahun 2025 sebesar Rp19.713.973.767,59.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Penganggaran Pengeluaran Pembiayaan berpedoman pada PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk : 1) pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo, 2) Penyertaan Modal Daerah, 3) pembentukan Dana Cadangan, 4) Pemberian



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Pinjaman Daerah, 5) pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

2.3.1. Capaian Target Pendapatan Daerah

Pemerintah Kabupaten Manggarai menetapkan anggaran Pendapatan Tahun 2025 senilai Rp1.274.043.867.398,00. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025, Pendapatan telah terealisasi sebesar 95,26% atau senilai Rp1.213.625.887.733,12 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.12 Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah TA 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PENDAPATAN	1.274.043.867.398,00	1.213.625.887.733,12	95,26
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	147.764.184.380,00	131.018.868.299,47	89,28
Pendapatan Pajak Daerah	45.155.336.207,00	30.283.622.354,00	67,07
Pendapatan Retribusi Daerah	12.360.998.398,00	7.137.076.788,00	57,74
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.511.802.797,00	5.511.802.797,00	100,00
Lain-lain PAD yang Sah	84.736.046.078,00	88.086.367.360,47	105,02
PENDAPATAN TRANSFER	1.107.757.414.708,00	1.083.460.240.190,00	96,00
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.073.572.574.591,00	1.035.084.390.432,00	96,41
Dana Perimbangan	950.206.945.591,00	913.326.906.732,00	96,12
Dana Desa	123.365.629.000,00	121.768.483.700,00	98,70
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	34.184.840.117,00	28.375.849.758,00	83,01
Pendapatan Bagi Hasil	34.184.840.117,00	28.175.849.758,00	82,42
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0,00	200.000.000,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	18.522.268.310,00	18.246.779.243,65	98,51
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	18.522.268.310,00	18.246.779.243,65	98,51

2.3.2. Realisasi Belanja

Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2025 mengalokasikan dana untuk Belanja dan Transfer Daerah senilai Rp1.295.248.407.633,00, telah terealisasi 93,81% atau senilai Rp1.215.129.985.077,63 per 31 Desember 2025, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.13 Target dan Realisasi Belanja Daerah TA 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
BELANJA	1.295.248.407.633,00	1.215.129.985.077,63	93,81
BELANJA OPERASI	960.626.734.805,00	893.875.499.612,79	93,05
Belanja Pegawai	613.112.892.177,56	564.374.149.667,00	92,05
Belanja Barang dan Jasa	307.526.423.889,44	289.962.561.608,85	94,29
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	37.279.727.000,00	36.910.383.160,94	99,01



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Uralan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Bantuan Sosial	2.707.691.738,00	2.628.405.176,00	97,07
BELANJA MODAL	133.732.377.967,00	124.990.675.843,84	93,46
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.733.533.650,00	16.722.365.759,06	94,30
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.980.360.023,00	10.214.672.090,78	93,03
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	97.076.650.894,00	90.112.302.024,00	92,83
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.791.833.400,00	7.791.485.970,00	99,99
Belanja Modal Aset Lainnya	150.000.000,00	149.850.000,00	99,90
BELANJA TIDAK TERDUGA	1.325.000.000,00	1.254.970.300,00	94,71
Belanja Tidak Terduga	1.325.000.000,00	1.254.970.300,00	94,71
BELANJA TRANSFER	199.564.294.861,00	195.008.839.321,00	97,71
Belanja Transfer/Bagi Hasil ke Desa	5.750.633.461,00	2.802.323.221,00	48,73
Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	193.813.661.400,00	192.206.516.100,00	99,17

2.4. *Mandatory Spending* dalam Penyusunan APBD

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara/daerah yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Data kinerja *mandatory spending* dalam postur APBD seperti diantaranya persentase belanja wajib untuk pendidikan, kesehatan, pengawasan, perlindungan sosial dampak pandemi, kenaikan inflasi dan kenaikan BBM, serta penjelasan atas capaiannya. Data kinerja *mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah Kabupaten Manggarai meliputi hal-hal sebagai berikut.

2.4.1 *Mandatory Spending* Fungsi Pendidikan

Sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah sebesar 20%.

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi pendidikan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan yang berada di wilayah Kabupaten Manggarai. Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi pendidikan di wilayah Kabupaten Manggarai adalah adanya kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan guru, kegiatan operasional sekolah melalui dana BOS, pembangunan gedung sekolah negeri, rehabilitasi dan renovasi gedung sekolah, dan pembangunan gedung perpustakaan daerah.

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Pendidikan untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penandaan rincian belanja pendidikan untuk evaluasi pemenuhan belanja wajib dalam APBD dilakukan sesuai dengan sub kegiatan yang telah ditentukan.

Berdasarkan penandaan sub kegiatan belanja pendidikan, perhitungan alokasi anggaran Belanja Fungsi Pendidikan APBD Perubahan TA 2025 Kabupaten Manggarai dialokasikan senilai Rp483.862.843.792,00 dan nilai belanja daerah



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

senilai Rp1.295.248.407.633,00 atau sebesar 37,36% sedangkan Rcalisasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan TA 2025 sebesar Rp421.263.458.363,00 dari Realisasi belanja daerah senilai Rp1.215.129.985.077,63 atau sebesar 34,67%, Rincian Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut

Tabel 2.14 Mandatory Spending Fungsi Pendidikan Kabupaten Manggarai Tahun 2025

Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Reallsasi (Rp)	%
1. BELANJA			
a. Belanja pada Dinas Pendidikan	460.530.863.619,00	421.263.458.363,00	92,07
1) Belanja Operasi	435.557.515.463,00	396.789.996.145,94	92,08
Belanja Pegawai	347.003.300.526,00	319.154.085.995,00	91,97%
Belanja Barang dan Jasa	61.350.037.927,00	49.059.113.040,00	96,64%
Belanja Hibah	35.974.177.000,00	27.347.296.910,94	76,02%
Belanja Bantuan Sosial	1.230.000.000,00	1.229.500.200,00	99,96%
2) Belanja Modal	24.973.348.166,00	24.473.462.217,06	98,00%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.446.941.885,00	9.407.974.077,06	99,69%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.117.225.753,00	6.656.775.573,00	93,53%
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	682.347.128,00	681.879.167,00	99,93%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.726.833.400,00	7.726.833.400,00	100,00%
b. Belanja Diluar Dinas Pendidikan yang Menunjang Pelaksanaan Fungsi Pendidikan	23.331.980.173,00	-	0,00%
Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	483.862.843.792,00	421.263.458.363,00	87,06%
Total Belanja Daerah	1.295.248.407.633,00	1.215.129.985.077,63	93,81%
Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan terhadap Belanja Daerah	37,36%	34,67%	

2.4.2 Mandatory Spending Fungsi Infrastruktur Pelayanan Publik

Berdasarkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa.

Tujuan dari *Mandatory Spending* Fungsi infrastruktur adalah meningkatkan infrastruktur yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar-daerah yang berbeda di wilayah Kabupaten Manggarai.

Adapun capaian dari *Mandatory Spending* fungsi Infrastruktur di wilayah Kabupaten Manggarai adalah adanya perubahan pembangunan jalan ruas Kabupaten yang bersumber dari DAK, pembangunan jaringan irigasi kabupaten dan pemeliharaan jalan dan jembatan.

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Dacrah, penandaan rincian belanja infrastruktur pelayanan publik untuk evaluasi pemenuhan belanja wajib dalam APBD dilakukan sesuai dengan sub kegiatan yang telah ditentukan.

Berdasarkan penandaan sub kegiatan belanja infrastruktur pelayanan publik, perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Infrastruktur Pelayanan Publik APBD Perubahan TA 2025 Kabupaten Manggarai dialokasikan senilai Rp273.171.913.173,44 dan nilai belanja daerah senilai Rp1.295.248.407.633,00 atau sebesar 24,93% dengan Realisasi Anggaran Belanja Fungsi Infrastruktur Pelayanan Publik TA 2025 sebesar Rp263.054.089.194,53 dari Realisasi belanja dacrah senilai Rp1.215.129.985.077,63 atau sebesar 25,79%. Rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut

Tabel 2.15 Mandatory Spending Fungsi Infrastruktur Pelayanan Publik Kabupaten Manggarai Tahun 2025

No	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Total Belanja Daerah	1.295.248.407.633,00	1.215.129.985.077,63	93,81%
2	Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah dan/atau Desa:			
	a) Belanja Bagi Hasil	5.750.633.461,00	2.802.323.221,00	48,73%
	b) Belanja Bantuan Keuangan	193.813.661.400,00	192.206.516.100,00	99,17%
	Jumlah (a+b)	199.564.294.861,00	195.008.839.321,00	97,72%
3	Selisih (1-2)	1.095.684.112.772,00	1.020.197.241.518,63	93,11%
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	438.273.645.108,80	408.078.896.607,45	93,11%
5	Belanja Infrastruktur Daerah			
	a. Belanja Operasi	145.724.432.178,44	143.290.357.705,75	98,33%
	1) Belanja Pegawai	2.876.680.200,00	2.617.438.454,00	90,99%
	2) Belanja Barang dan Jasa	142.847.751.978,44	140.672.919.251,75	98,48%
	b. Belanja Modal	120.966.460.995,00	112.781.208.514,90	93,23%
	1) Tanah	0,00	0,00	0,00%
	2) Peralatan dan Mesin	9.437.633.899,00	10.371.967.250,12	109,90%
	3) Bangunan dan Gedung	11.365.876.502,00	8.447.965.641,78	74,33%
	4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan	97.007.900.594,00	90.876.575.523,00	93,68%
	5) Aset Tetap Lainnya	3.155.050.000,00	3.084.700.100,00	97,77%
	6) Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00%
	c. Belanja Hibah	6.141.020.000,00	6.782.922.773,88	110,45%
	d. Belanja Bantuan Sosial	340.000.000,00	199.600.200,00	58,71%
6	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (a+b+c+d)	273.171.913.173,44	263.054.089.194,53	96,30%
7	Rasio Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur Daerah (7:3)	24,93%	25,79%	103,43%

2.4.3 Mandatory Spending Fungsi Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Khusus. Tujuan dari *mandatory spending* ADD adalah untuk membantu pemerintah desa dalam menjalankan fungsi pelayanan, dan bantuan kepada pemerintah desa.

Perhitungan alokasi anggaran Belanja ADD dalam APBD Tahun 2025 Kabupaten Manggarai dialokasikan senilai Rp73.696.936.000,00 atau sebesar 10,00% dari nilai Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) senilai Rp736.969.360.000,00. Selanjutnya, alokasi anggaran Belanja ADD dalam APBD Perubahan Tahun 2025 Kabupaten Manggarai dialokasikan senilai Rp70.448.032.400,00 atau sebesar 10,00% dari nilai Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK dan DBH CHT senilai Rp704.717.379.000,00.

Realisasi anggaran *mandatory spending* fungsi ADD Tahun 2025 senilai Rp70.448.032.400,00 atau 10,31% dari realisasi Dana Perimbangan dikurangi DAK dan DBH CHT senilai Rp683.141.298.995,00. Rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.16 Mandatory Spending Fungsi ADD Kabupaten Manggarai Tahun 2025

No	Komponen Perhitungan	APBD (Rp)	APBD Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Alokasi Dana Desa	73.696.936.000,00	70.448.032.400,00	70.448.032.400,00
2	Perhitungan Dana Perimbangan – Dana Alokasi Khusus	736.969.360.000,00	704.717.379.000,00	683.141.298.995,00
3	Persentase Alokasi ADD	10,00%	10,00%	10,31%

2.4.4 Mandatory Spending Fungsi Pengawasan

Berdasarkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 disebutkan bahwa alokasi anggaran fungsi pengawasan Kabupaten/Kota dengan nilai APBD diatas Rp1.000.000.000.000,00 s.d. Rp2.000.000.000.000,00 paling sedikit 0,75% dari total belanja daerah.

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi pengawasan adalah untuk mendukung program pengawasan oleh Inspektorat Daerah yang meliputi kegiatan pengawasan rutin, pengawasan prioritas nasional, pengawalan reformasi birokrasi dan penegakan integritas.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi pengawasan di wilayah Kabupaten Manggarai adalah Inspektorat Kabupaten Manggarai memiliki kegiatan berupa Penyelenggaraan Pengawasan Internal, Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pengawasan APBD Perubahan TA 2025 Kabupaten Manggarai dialokasikan senilai Rp810.980.739,00 dan nilai belanja daerah senilai Rp1.295.248.407.633,00 atau sebesar 0,06% dengan Realisasi Anggaran Belanja Fungsi Pengawasan TA 2025 sebesar Rp735.981.359,75 dari Realisasi belanja daerah senilai Rp1.215.129.985.077,63 atau sebesar 0,06%. Rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 2.17 Mandatory Spending Fungsi Pengawasan Kabupaten Manggarai Tahun 2025

Komponen Perhitungan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
a. Belanja Pada Inspektorat		810.980.739,00	735.981.359,75	92,97
1)	Belanja Operasi	793.480.739,00	718.498.859,75	92,68
	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00%
	Belanja Barang dan Jasa	793.480.739,00	718.498.859,75	90,55%
	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00%
	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00%
2)	Belanja Modal	17.500.000,00	17.482.500,00	99,90%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.500.000,00	17.482.500,00	99,90%
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00%
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00%
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00%
b. Belanja Diluar Inspektorat yang Menunjang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan		0,00	0	0,00%
Anggaran Fungsi Pengawasan (a+b)		810.980.739,00	735.981.359,75	90,75%
Total Belanja Daerah		1.295.248.407.633,00	1.215.129.985.077,63	93,81%
Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Pengawasan terhadap Belanja Daerah		0,06%	0,06%	

2.4.5 Mandatory Spending Belanja Pegawai

Berdasarkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 disebutkan bahwa alokasi anggaran belanja pegawai paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD termasuk untuk ASN, Kepala Daerah, dan Anggota DPRD, serta tidak termasuk untuk TPG, TKG, Tamsil Guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.

Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Pegawai APBD Perubahan TA 2025 Kabupaten Manggarai dialokasikan senilai Rp495.639.273.577,56 dan nilai belanja daerah senilai Rp1.295.248.407.633,00 atau sebesar 38,27% dengan Realisasi Anggaran Belanja Pegawai TA 2025 sebesar Rp460.022.703.442,00 dari Realisasi belanja daerah senilai Rp1.215.129.985.077,63 atau sebesar 37,86%. Rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.18 Mandatory Spending Belanja Pegawai Kabupaten Manggarai Tahun 2025

No	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pengalokasian Belanja Pegawai		
	a Jumlah Belanja Pegawai	613.112.892.177,56	564.374.149.667,00
	b Tunjangan Profesi Guru	106.821.517.100,00	95.644.736.990,00
	c Tunjangan Khusus Guru	8.023.889.000,00	6.686.989.997,00
	d Tambahan Penghasilan Guru	2.628.212.500,00	2.019.719.238,00
	e Tunjangan Sejenis Lainnya (Belanja Pegawai BOS dan BLUD)	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	Jumlah Belanja Pegawai Diluar Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, Tambahan Penghasilan Guru dan Tunjangan Lainnya yang Bersumber dari TKD yang Telah Ditentukan Penggunaanya (a-b-c-d-e)	495.639.273.577,56	400.022.703.442,00
2	Total Belanja Daerah	1.295.248.407.633,00	1.215.120.085.077,63
3	Rasio Alokasi Anggaran Belanja Pegawai	38,27%	37,86%

2.4.6 Mandatory Spending Hasil Penerimaan PKB dan Opsen PKB

Berdasarkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 disebutkan bahwa Penggunaan atas hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

Pada APBD Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2025, PKB dan Opsen PKB dialokasikan pada sub kegiatan Rehabilitasi Jalan pada Dinas PUPR Kabupaten Manggarai senilai Rp5.000.000.000,00 dan nilai total PKB dan Opsen PKB yang dianggarkan senilai Rp8.682.132.026,00 atau sebesar 57,59%, sedangkan realisasi sebesar Rp5.000.000.000,00 dari realisasi penerimaan PKB dan Opsen PKB senilai Rp5.204.495.069,00 atau sebesar 96,07%. Rincian Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.19 Mandatory Spending Hasil Penerimaan PKB dan Opsen PKB Kabupaten Manggarai Tahun 2025

No.	Uraian Subkegiatan	Anggaran Belanja atas PKB pada APBD TA 2025 (Rp)	Realisasi Belanja atas PKB pada APBD TA 2025 (Rp)
1	Rehabilitasi Jalan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
Total Belanja atas PKB		5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
Total Opsen PKB pada APBD TA 2025		8.682.132.026,00	5.204.495.069,00
% Belanja PKB/Opsen PKB		57,59%	96,07%

2.4.7 Mandatory Spending Hasil Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik

Berdasarkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 disebutkan bahwa hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.

Pada APBD Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2025, PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan pada sub kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai senilai Rp1.246.528.500,00 dan nilai total PBJT atas Tenaga Listrik yang dianggarkan senilai Rp6.850.000.000,00 atau sebesar 18,20% sedangkan realisasi sebesar Rp1.204.853.500,00 dari realisasi penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik senilai



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Rp6.690.726.742,00 atau sebesar 18,01%. Rincian Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.20 Mandatory Spending Hasil Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik Kabupaten Manggarai Tahun 2025

No.	Uraian Subkegiatan	Anggaran Belanja atas PBJT pada APBD TA 2025 (Rp)	Realisasi Belanja atas PBJT pada APBD TA 2025 (Rp)
1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1.246.528.500,00	1.204.853.500,00
	Belanja Barang dan Jasa	1.246.528.500,00	1.204.853.500,00
Total Belanja atas PBJT		1.246.528.500,00	1.204.853.500,00
Total PBJT pada APBD TA 2025		6.850.000.000,00	6.690.726.742,00
% Belanja atas PBJT/PBJT		18%	18%

2.4.8 Mandatory Spending Hasil Penerimaan Pajak Rokok

Berdasarkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 disebutkan bahwa hasil penerimaan pajak rokok dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum. Untuk pelayanan kesehatan, pajak rokok digunakan untuk pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) dari realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak provinsi/kabupaten/kota atau ekuivalen sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen).

Pada APBD Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2025, pajak rokok dialokasikan pada sub kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai senilai Rp7.838.432.650,00 dan nilai total pajak rokok yang dianggarkan senilai Rp18.067.255.856,00 atau sebesar 43,38% sedangkan realisasi sebesar Rp7.838.432.650,00 dari Realisasi penerimaan pajak rokok senilai Rp17.465.782.931,00 atau sebesar 44,88%. Rincian Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.21 Mandatory Spending Hasil Penerimaan Pajak Rokok Kabupaten Manggarai Tahun 2025

No.	Uraian	Anggaran Belanja atas Pajak Rokok pada APBD TA 2025 (Rp)	Realisasi Belanja atas Pajak Rokok pada APBD TA 2025 (Rp)
1	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	7.838.432.650,00	7.838.432.650,00
–	Belanja Barang dan Jasa	7.838.432.650,00	7.838.432.650,00
Total Belanja atas Pajak Rokok		7.838.432.650,00	7.838.432.650,00
Total Pajak Rokok pada APBD TA 2025		18.067.255.856,00	17.465.782.931,00
% Belanja atas Pajak Rokok		43%	45%

2.4.9 Mandatory Spending Hasil Penerimaan Pajak Air Tanah (PAT)

Berdasarkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 disebutkan bahwa hasil penerimaan PAT dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Pada APBD Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2025, PAT dialokasikan pada sub kegiatan Penanganan sampah melalui pengangkutan pada Dinas PUPR Kabupaten Manggarai senilai Rp180.000.000,00 dan nilai total PAT yang dianggarkan senilai Rp200.101.000,00 atau sebesar 89,95% sedangkan realisasi sebesar Rp180.000.000,00 dari realisasi penerimaan PAT senilai Rp323.106.060,00 atau sebesar 55,71%. Rincian Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.22 *Mandatory Spending* Hasil Penerimaan Pajak Air Tanah Kabupaten Manggarai Tahun 2025

No.	Uraian Subkegiatan sesuai KMK RI Nomor 22/KM.7/2024	Anggaran Belanja atas PAT pada APBD TA 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Belanja atas PAT pada APBD TA 2025 (Rp)
1.	Penanganan sampah melalui pengangkutan	180.000.000,00	180.000.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	180.000.000,00
Total Belanja atas PAT		180.000.000,00	180.000.000,00
Total PAT pada APBD TA 2025		200.101.000,00	323.106.060,00
% Belanja atas PAT/PAT		89,95%	55,71%



BAB III

IKTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Bagian ini akan menjelaskan keberhasilan pencapaian target kinerja APBD yang dicerminkan melalui indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun pelaporan menurut urusan Pemerintah Daerah. Kabupaten Manggarai pernah mendapatkan penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas prestasinya dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 dengan predikat Nilai B. Penghargaan tersebut diberikan melalui Surat Nomor B/358/AA.05/2024, tanggal 3 September 2024, perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Indonesia Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 dimana nilai AKIP Pemerintah Kabupaten Manggarai sebesar 64,81 atau bertambah 0,43 nilai dari tahun 2023 sebesar 64,38 dengan kategori B. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi hasil pada Pemerintah Kabupaten Manggarai menunjukkan hasil yang baik.

Hasil evaluasi tahun 2025 “tidak diperbandingkan” dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kinerja penilaiannya, Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemda maupun level perangkat daerah.

2.4.1 Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2025 mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Manggarai sebagai penerjemahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Manggarai sebagaimana ditetapkan dalam Perda Kabupaten Manggarai Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2025. RPJP ini menjadi kerangka dasar pengelolaan pembangunan daerah yang bersifat aspiratif terhadap kehendak masyarakat Kabupaten Manggarai yang memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah.

RPJMD Kabupaten Manggarai tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Berpijak pada permasalahan pembangunan, serta berbagai dinamika yang terjadi, Kabupaten Manggarai menghadapi isu strategis dalam bidang sumber daya manusia, ekonomi, infrastruktur, tata kelola pemerintahan dan



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

lingkungan hidup. Isu strategis tersebut disusun dengan memperhatikan permasalahan daerah di berbagai urusan pemerintahan dan dinamika isu strategis di tingkat internasional, nasional dan Provinsi NTT.

Uraian isu strategis Kabupaten Manggarai sesuai RPJMD 2021-2026 sebagai berikut.

- a. Masih rendahnya kesejahteraan sosial;
- b. Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan;
- c. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- d. Belum optimalnya kualitas lingkungan hidup;
- e. Belum optimalnya infrastruktur dasar yang berkelanjutan; dan
- f. Belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan.

2.4.2 Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja diwujudkan dalam pelaporan kinerja melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja sehingga dapat diketahui capaian kinerjanya, sumber daya yang mendukung keberhasilan atau ketidakberhasilan serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja.

Pelaporan kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai tahun 2025 yang juga merupakan pelaporan kinerja ketiga periode RPJMD 2021-2026, menyajikan pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Manggarai telah mendorong ketaatan setiap perangkat daerah dalam mengumpulkan data kinerja dalam aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Manggarai. Selain itu juga telah disusun rencana aksi seluruh perangkat daerah sebagai dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi dalam memantau progress realisasi atas target yang diperjanjikan oleh setiap perangkat daerah, namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja, diantaranya sebagai berikut.

1. Pelaksanaan pengukuran kinerja belum dilakukan dengan aplikasi SAKIP Kabupaten Manggarai. Aplikasi masih digunakan untuk pengumpulan data kinerja dan dokumen SAKIP saja;
2. Rencana aksi yang disusun sudah mulai digunakan untuk menjadi dasar monitoring dan evaluasi, namun monitoring dan evaluasi yang dilakukan masih berorientasi pada penyerapan anggaran sehingga hasil pelaksanaannya belum diketahui Tingkat ketercapaian dan kualitasnya; dan
3. Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan belum dimanfaatkan secara optimal dalam penentuan strategi, aktivitas, penyesuaian antara kinerja dan anggaran jangka pendek, serta pemberian *reward and punishment* baik kepada individu maupun perangkat daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

2.4.3 Pelaporan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Manggarai telah melakukan perbaikan dalam penyajian informasi dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan laporan kinerja seluruh perangkat daerah dengan melakukan penguatan informasi yang perlu disampaikan dalam laporan penyelenggaraan pemerintah maupun laporan kinerja seluruh perangkat daerah. Selain itu, dalam mendukung keterbukaan informasi publik, Pemerintah Kabupaten Manggarai telah mengunggah dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan kinerja seluruh perangkat daerah pada *website* Pemerintah Kabupaten Manggarai. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja diantaranya sebagai berikut.

- Laporan kinerja belum cukup menyampaikan informasi memadai diantaranya tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan belum menginformasikan secara lengkap terkait hasil analisis penyebab keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian kinerja, data *benchmark* kinerja atas indikator kinerja yang diukur baik oleh Provinsi NTT maupun nasional, serta upaya yang dilakukan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala untuk mencapai kinerja; dan
- Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal tersebut ditunjukkan pada target kinerja lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya tanpa penjelasan yang cukup.

2.4.4 Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Kinerja Sasaran

Analisis efektivitas dan efisiensi dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2025 dilakukan untuk melihat sejauh mana sumber daya (anggaran) yang digunakan cukup efisiensi untuk mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan dalam mencapai visi misi Bupati dan Wakil Bupati Manggarai, khususnya pada tahun 2025. Adapun analisis efektivitas dan efisiensi sebagai berikut.

- Efektif apabila target kinerja sasarannya tercapai; dan
- Efisien apabila terdapat sisa anggaran yang tidak terserap dalam pencapaian kinerja yang efektif atau perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja dengan persentase penyerapan anggaran. Ketika rata-rata capaian kinerja lebih tinggi dari persentase penyerapan anggaran maka dikategorikan efisien dan sebaliknya ketika rata-rata capaian kinerja lebih rendah dari persentase penyerapan anggaran maka dikategorikan tidak efisien.

2.4.5 Realisasi Pendapatan Daerah

Ikhtisar realisasi Pendapatan Daerah pada tabel berikut untuk melihat pencapaian kinerja keuangan untuk pendapatan.

Tabel 3.1 Ikhtisar Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai TA 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PENDAPATAN	1.274.043.887.388,00	1.213.625.887.733,12	95,20
PENDAPATAN ASLI DAERAH	147.704.184.380,00	131.918.888.289,47	89,28



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan Pajak Daerah	45.155.336.207,00	30.283.622.354,00	67,07
Pendapatan Retribusi Daerah	12.360.998.398,00	7.137.075.788,00	57,74
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.511.802.797,00	5.511.802.797,00	100,00
Lain-lain PAD yang Sah	84.736.046.978,00	88.986.367.360,47	105,02
PENDAPATAN TRANSFER	1.107.757.414.708,00	1.063.460.240.190,00	96,00
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.073.572.574.591,00	1.035.084.390.432,00	96,41
Dana Perimbangan	950.206.945.591,00	913.325.906.732,00	96,12
Dana Desa	123.365.629.000,00	121.758.483.700,00	98,70
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	34.184.840.117,00	28.375.849.758,00	83,01
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	34.184.840.117,00	28.175.849.758,00	82,42
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0,00	200.000.000,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	18.522.268.310,00	18.246.779.243,65	98,51
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan	18.522.268.310,00	18.246.779.243,65	98,51

Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2025 direncanakan senilai Rp1.274.043.867.398,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah senilai Rp147.764.184.380,00, Pendapatan Transfer senilai Rp1.107.757.414.708,00, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah senilai Rp18.522.268.310,00. Realisasi pendapatan Kabupaten Manggarai pada tahun 2025 senilai Rp1.213.625.887.733,12 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah senilai Rp131.918.868.299,47, Pendapatan Transfer senilai Rp1.063.460.240.190,00, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah senilai Rp18.246.779.243,65.

2.4.6 Realisasi Belanja Daerah

Ikhtisar realisasi Belanja Daerah pada tabel berikut untuk melihat pencapaian kinerja keuangan untuk belanja.

Tabel 3.2 Ikhtisar Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Manggarai TA 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja dan Transfer	1.295.248.407.633,00	1.215.129.985.077,63	93,81
Belanja Operasi	960.626.734.805,00	893.875.499.612,79	93,05
Belanja Pegawai	613.112.892.177,56	564.374.149.667,00	92,05
Belanja Barang dan Jasa	307.526.423.889,44	289.962.661.608,85	94,29
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	37.279.727.000,00	36.910.383.160,94	99,01
Belanja Bantuan Sosial	2.707.691.738,00	2.628.405.176,00	97,07
Belanja Modal	133.732.377.967,00	124.890.675.843,84	93,46
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.733.533.650,00	16.722.365.759,06	94,30



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Uralan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.980.360.023,00	10.214.672.090,78	93,03
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	97.076.650.894,00	90.112.302.024,00	92,83
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.791.833.400,00	7.791.485.970,00	99,99
Belanja Aset Lainnya	150.000.000,00	149.850.000,00	99,90
Belanja Tidak Terduga	1.325.000.000,00	1.254.970.300,00	94,71
Belanja Tidak Terduga	1.325.000.000,00	1.254.970.300,00	94,71
Belanja Transfer	199.564.294.861,00	195.008.839.321,00	97,72
Belanja Bagi Hasil	5.750.633.461,00	2.802.323.221,00	48,73
Belanja Bantuan Keuangan	193.813.661.400,00	192.206.516.100,00	99,17

Anggaran Belanja dan Transfer Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2025 direncanakan senilai Rp1.295.248.407.633,00 yang terdiri dari Belanja Operasi senilai Rp960.626.734.805,00, Belanja Modal senilai Rp133.732.377.967,00, Belanja Tidak Terduga senilai Rp1.325.000.000,00. Belanja Transfer senilai Rp199.564.294.861,00.

Realisasi Belanja dan Transfer Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2025 senilai Rp1.215.129.985.077,63 yang terdiri dari Belanja Operasi senilai Rp893.875.499.612,79, Belanja Modal senilai Rp124.990.675.843,84, Belanja Tidak Terduga senilai Rp1.254.970.300,00, Belanja Transfer senilai Rp195.008.839.321,00.

2.4.7 Realisasi Pembiayaan Daerah

Ikhtisar realisasi Pembiayaan Daerah pada tabel berikut untuk melihat pencapaian kinerja keuangan untuk pembiayaan.

Tabel 3.3 Ikhtisar Realisasi Pembiayaan Neto Daerah Kabupaten Manggarai TA 2025

Uralan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pembiayaan Daerah	21.204.540.235,00	21.218.071.112,10	100,06
Penerimaan Pembiayaan	21.204.540.235,00	21.218.071.112,10	100,08
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	21.204.540.235,00	21.218.071.112,10	100,06
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00

Anggaran Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2025 senilai Rp21.204.540.235,00 yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan senilai Rp21.204.540.235,00 dikurangi Pengeluaran Pembiayaan senilai Rp0,00. Realisasi Pembiayaan senilai Rp21.218.071.112,10 yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan senilai Rp21.218.071.112,10 dikurangi Pengeluaran Pembiayaan senilai Rp0,00.



3.2. Hambatan dan Kendala Capaian Kinerja Keuangan

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan antara lain sebagai berikut.

3.2.1 Pendapatan Daerah

Secara umum penyerapan pencapaian target kinerja keuangan khususnya Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai yaitu sebesar 95,26%. Namun bila dilihat dari realisasi per komponen pendapatan daerah maka terdapat beberapa komponen pendapatan daerah yang tidak mencapai target, hal ini disebabkan oleh beberapa hambatan antara lain sebagai berikut.

- a. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak khususnya pajak yang sifatnya *self assessment*;
- b. Belum diterapkan sepenuhnya system pembayaran pajak dan retribusi *online*;
- c. Adanya penghapusan Perda untuk tarif Retribusi Terminal dan Retribusi Pengujian Kendaraan pada Dinas Perhubungan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera ulang pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian; dan
- d. Kurang optimalnya pengawasan pengelolaan penerimaan dari hasil retribusi daerah, dalam rangka meminimalisir penyimpangan atas hasil penerimaan retribusi tersebut.

3.2.2 Belanja Daerah dan Transfer

Penyerapan belanja dan transfer daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai TA 2025 adalah sebesar 93,81%. Sisa Belanja Daerah yang tidak terserap disebabkan antara lain:

- a. Tidak terealisasinya beberapa kegiatan pembangunan dengan sumber dananya adalah DAK;
- b. Kurang adanya konsistensi pada kalender kerja daerah; dan
- c. Kurang cermat dalam proses perencanaan kegiatan.

3.2.3 Pembiayaan Daerah

Realisasi pengeluaran pembiayaan yang lebih besar dari penerimaan itu disebabkan karena adanya pengembalian pinjaman daerah, sedangkan realisasi penerimaan pembiayaan daerah khususnya penerimaan kembali investasi non permanen lainnya sangat rendah. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dalam pengembalian peminjam.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Pengakuan, pengukuran dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam kebijakan akuntansi yang khusus.

Laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan dengan basis akrual. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna diantaranya adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman serta pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi). Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kabupaten Manggarai, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai, tidak termasuk Perusahaan Daerah. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual. Namun, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan basis kas.

4.1. Entitas Akuntansi dan entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Informasi Keuangan disajikan dalam laporan keuangan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undangan, satu organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban. Satuan organisasi jika di pemerintah daerah disebut juga SKPD dan mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan dapat disebut dengan entitas. Entitas yang menyusun laporan terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.

- a. Entitas Akuntansi adalah seluruh Kepala SKPD Kabupaten Manggarai yang mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan pada masing-masing SKPD sesuai dengan tanggung jawabnya. Laporan keuangan SKPD terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan, yang untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD untuk digabungkan menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah. Terdapat sebanyak 43 SKPD yang terdiri dari 21 Dinas, 6 Badan, 1 RSUD, 2 Sekretariat, 12 Kecamatan, dan 1 Inspektorat, dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 4.1 Daftar Entitas Akuntansi Kabupaten Manggarai TA 2025

No.	SKPD
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	Dinas Kesehatan
3	RSUD. Ben Mbol
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Dinas Sosial
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11	Dinas Lingkungan Hidup
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
15	Dinas Perhubungan
16	Dinas Komunikasi dan Informatika
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
20	Dinas Perikanan
21	Dinas Peternakan
22	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
23	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
24	Sekretariat Daerah
25	Sekretariat Dewan
26	Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah
28	Badan Pendapatan Daerah
29	Badan Kepegawalan, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
30	Inspektorat
31	Kecamatan Langke Rembong
32	Kecamatan Ruteng
33	Kecamatan Satar Mese
34	Kecamatan Reok
35	Kecamatan Cibal
36	Kecamatan Wae Ri'i
37	Kecamatan Satar Mese Barat
38	Kecamatan Rahong Utara
39	Kecamatan Lelak
40	Kecamatan Reok Barat
41	Kecamatan Cibal Barat
42	Kecamatan Satar Mese Utara
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

Struktur SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai di Tahun 2023 mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai. Perangkat daerah yang mengalami perubahan yakni Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

- b. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, dalam hal ini entitas pelaporan adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah). Laporan keuangan dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Manggarai menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan SAP yang telah ditetapkan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar Pengukuran Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam SAP

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan tahun 2025 telah mengacu pada SAP. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini sesuai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Manggarai. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan Akuntansi yang penting digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai adalah sebagai berikut.

4.4.1. Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset terdiri dari Aset Lancar dan Aset Non Lancar. Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang dan Persediaan. Aset non lancar adalah aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria aset lancar yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar meliputi Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset Lainnya.

Secara umum pengakuan aset dilakukan (1) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; atau (2) pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau pengenguasaannya berpindah.

a. Aset Lancar

1) Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank penerimaan, Kas terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas di Bendahara BOS, dan Setara Kas.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas setara bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara Kas terdiri dari simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan, dan investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

Kas dan Setara Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Saldo Kas dan Setara Kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos Kas dan Setara Kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris Laporan Arus Kas.

2) Investasi Jangka Pendek

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. Pengeluaran kas menjadi Investasi Jangka Pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria:



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- a) Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali; dan
- b) Nilai perolehan atau nilai wajar Investasi Jangka Pendek dapat diukur secara memadai karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya/nilai dana yang ditempatkan.

Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan pemerintah daerah.

Untuk Investasi Jangka Pendek dalam bentuk surat berharga, apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya, dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Investasi Jangka Pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya. Investasi Jangka Pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.

3) Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.

Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.

4) Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. Beban Dibayar Dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban. Pengukuran Beban Dibayar Dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/dibayarkan. Beban Dibayar Dimuka tidak dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Beban Dibayar Dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi.

5) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

Persediaan dicatat dengan menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan yang dilakukan setiap terjadi transaksi perolehan/penerimaan dan pengeluaran barang persediaan. Pengukuran persediaan pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan menggunakan metode masuk pertama keluar pertama (*First In, First Out/FIFO*).

6) Aset untuk Dikonsolidasikan

Aset untuk Dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi SKPD dan entitas akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Aset ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi antara SKPD dengan PPKD. Aset untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu Rekening Koran SKPD (R/K SKPD). Akun ini digunakan oleh entitas akuntansi PPKD sepanjang mempunyai transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD.

Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD. Pengukuran aset untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi yang terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi. Aset untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi Aset Lancar. Aset ini disajikan hanya pada entitas akuntansi PPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini akan tereliminasi.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

b. Aset Non Lancar

Aset Non Lancar terdiri dari Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya.

1) Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Permanen dan Investasi Non Permanen. Investasi Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Permanen dapat berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara/daerah, dan Investasi Permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam Investasi Permanen, yaitu investasi yang dimaksudkan untuk tidak dimiliki secara berkelanjutan yang berarti kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai Investasi Jangka Panjang apabila memenuhi kriteria kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah dan nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai /andal (*reliable*). Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa dividen tunai; dan/atau dividen saham.

Investasi Jangka Panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu Metode Biaya, Metode Ekuitas, dan Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan. Metode Ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Metode Biaya digunakan jika kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Investasi Jangka Panjang disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK. Perlu diungkapkan metode penilaian dan jenis investasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

2) Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dengan batasan pengertian tersebut maka Pemerintah Kabupaten Manggarai harus mencatat Aset Tetap yang dimilikinya meskipun Aset Tetap tersebut digunakan oleh pihak ketiga.

Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terbagi dalam klasifikasi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Konstruksi dalam Pengerjaan.

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut.

- a) Berwujud;
- b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- f) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

Tabel 4.2 Batasan Minimal Kapitalisasi Aset Tetap

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/ Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	0,00
2	Peralatan dan Mesin	500.000,00
3	Gedung dan Bangunan	5.000.000,00
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.000.000,00
5	Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan	100.000,00
6	Aset Tetap Lainnya-Bahan Bercorak Kesenian/Kebudayaan	500.000,00
7	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Biaya perolehan dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan minimum kapitalisasi (*capitalization threshold*).

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) adalah pengeluaran yang terjadi setelah perolehan awal suatu aset tetap



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(*subsequent expenditures*) yang dapat berakibat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan (dikapitalisasi) pada nilai tercatat pada aset yang bersangkutan. Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria (a) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara bertambah masa manfaat, dan/atau bertambah kapasitas, dan/atau bertambah kualitas/efisiensi, dan atau bertambah mutu produksi/kinerja, dan/atau bertambah volume, serta (b) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan (*capitalization thresholds*).

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

$$\text{Penyusutan Per Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan perhitungan penyusutan adalah nilai yang dapat disusutkan atau seluruh nilai perolehan aset dikurangi nilai sisa (residu). Periode penghitungan penyusutan dilakukan per tahun. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai Aset Tetap. Penyusutan Aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a) Tanah;
- b) Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- c) Aset Tetap Lainnya selain Barang Bercorak; Kesenian/Kebudayaan;
- d) Aset Tetap dalam renovasi yang tidak menambah masa manfaat.

Aset Tetap yang direklasifikasi ke Aset Lainnya karena Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah, Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Suatu Aset Tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan di masa yang akan datang setelah ada keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.

Aset Tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap yaitu (a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(*carrying amount*), (b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: Penambahan, Pelepasan, Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai jika ada; dan Mutasi aset tetap lainnya, serta informasi penyusutan, meliputi nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

3) Properti Investasi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- a) Digunakan dalam kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, atau untuk tujuan administratif; atau
- b) Dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada Masyarakat.

Properti Investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap).

Properti Investasi diakui sebagai aset jika:

- a) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- b) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi yang mengatur tentang penyusutan Aset Tetap.

Karena sifat pengklasifikasian Properti Investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat menjual apabila kenaikan nilai atas Properti Investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang.

4) Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan maupun peruntukkan dana cadangan akan diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukkan yang lain. Peruntukkan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga. Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukkan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukkan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

Dana Cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana cadangan. Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

yang diklasifikasikan ke dana cadangan. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam CaLK. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan dicatat sebagai Pendapatan- LRA dalam pos Pendapatan Asli Daerah Lainnya, kemudian ditambahkan dalam Dana Cadangan dengan mekanisme pembentukan Dana Cadangan dengan nilai sebesar hasil yang diperoleh dari pengelolaan tersebut. Hal ini juga perlu diungkapkan dalam CaLK.

5) Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. Aset lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Aset Lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Secara umum Aset lainnya disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non-Lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam CaLK. Aset Lainnya dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

Amortisasi adalah pengurangan nilai Aset Lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. Pengakuan amortisasi Aset Lainnya dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau padasaat aset tersebut akan dipindahtangankan kepemilikannya. Pengukuran jumlah amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus. Masa manfaat amortisasi dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak. Masa manfaat Aset Lainnya ditetapkan sebagai berikut.

Tabel 4.3 Masa Manfaat Aset Lainnya

No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	Software Komputer	10
2	Lisensi	10
3	Franchise	10
4	Paten Biasa	10
5	Merek	10
6	Detailed Engineering Design	10

Amortisasi aset lainnya diungkapkan dalam Neraca dalam akun "Akumulasi Amortisasi" yang akan mengurangi nilai buku dari aset lainnya tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam Laporan Operasional sebagai "Beban Amortisasi".



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

4.4.2. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah, yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 (dua belas) bulan. Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga, Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari Utang Dalam Negeri, Utang Luar Negeri dan Utang Jangka Panjang Lainnya. Utang Dalam Negeri adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diperoleh dari sumber-sumber dalam negeri. Yang dimaksud dengan Utang Dalam Negeri diantaranya adalah Utang kepada Pemerintah Pusat, Utang kepada Lembaga Keuangan Bank, Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Utang kepada Masyarakat (obligasi). Utang Luar Negeri atau biasa dikenal dalam istilah pemerintah sebagai pinjaman luar negeri merupakan salah satu instrument yang diambil oleh pemerintah daerah dalam upaya menanggulangi defisit anggaran. Utang Jangka Panjang Lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam dan Utang Luar Negeri, Utang Kemitraan. Sesuai dengan paragraf 21 PSAP 9 tentang Kewajiban disebutkan bahwa kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Sesuai Paragraf 32 PSAP 9 tentang Kewajiban, Utang dicatat sebesar nilai nominal. Utang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs Tengah Bank Indonesia) pada tanggal neraca.

4.4.3. Kewajiban Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (R/K PPKD) diakomodasi pada rincian akun kewajiban untuk dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K SKPD ada pada klasifikasi aset untuk dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban. Dengan tidak diakomodasinya akun Ekuitas untuk dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban. Pengukuran atas Ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban. Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam CaLK.

4.4.4. Kewajiban Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah pendapatan yang mencakup:

- a. Semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah;
- b. Pendapatan kas yang diterima oleh Bendahara Penerimaan sebagai Pendapatan Daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD;
- c. Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk disahkan dan diakui sebagai pendapatan daerah; dan
- d. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan-LRA terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LRA, Pendapatan Transfer-LRA, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LRA.

PAD-LRA adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan mencerminkan kemandirian daerah. PAD bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang Sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah).

Pendapatan Transfer-LRA adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN maupun APBD yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah-LRA dan Pendapatan Transfer-LRA.

Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah-LRA, Dana Darurat-LRA, dan Pendapatan Lainnya-LRA.

Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening RKUD sebagai salah satu tempat penampungannya. Pendapatan-LRA diakui menjadi Pendapatan Daerah pada saat:

- 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
- 2) Kas atas pendapatan tersebut diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetor ke RKUD;



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- 3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dilakukan pengesahan;
- 4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan
- 5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan - LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan adalah penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus, penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan Pendapatan Daerah dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.5. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga, serta Belanja Transfer.

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

- a. Belanja Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai, baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal;
- b. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan;
- c. Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda;

- d. Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat;
- e. Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah provinsi, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- f. Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial;
- g. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain Belanja Modal untuk perolehan Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan, dan Aset Tidak Berwujud. Nilai yang dianggarkan dalam Belanja Modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan;
- h. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah; dan
- i. Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil;
- c. Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum;
- d. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah; dan
- e. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer, dan dijelaskan dalam CaLK.



4.4.6. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan, dan Pengeluaran Pembiayaan.

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan RKUD antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Transaksi Penerimaan Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai PPKD.

Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima di RKUD. Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran RKUD antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Transaksi Pengeluaran Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh SKPKD yang berfungsi sebagai PPKD.

Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari RKUD. Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto. Pembiayaan disajikan dalam LRA dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

Saldo Anggaran Lebih adalah gabungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Akun ini secara umum bukan merupakan bagian dari akun pembiayaan.

Dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, akun ini ada dalam kategori Ekuitas SAL. Kebijakan akuntansi ini memasukkan akun SAL dalam akun pembiayaan namun bukan merupakan bagian dari pembiayaan dengan pertimbangan bahwa akun ini merupakan akun nominal bukan akun riil.

Selain itu, akun ini tidak akan mempengaruhi penyajian Laporan Neraca interim. Akun ini akan bernilai 0 (nol) pada akhir tahun atau pada saat tanggal pelaporan. Saldo Anggaran Lebih terdiri dari Surplus/Defisit-LRA, Pembiayaan Neto, SiLPA/SiKPA (tahun berkenaan), dan Perubahan SAL.



4.4.7. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized).

Pada saat penyusunan laporan keuangan, Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dan Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas.

- a. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang diterbitkan dengan metode *official assessment* atau Perbup) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan; dan
- b. Apabila dalam hal proses transaksi Pendapatan Daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun Pendapatan Diterima Dimuka.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LO disajikan dalam LO sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS). Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

4.4.8. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan LO. Beban diklasifikasikan menjadi: Beban Operasi, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Transfer, dan Beban Tidak Terduga.

- a. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, dan Beban Bantuan Sosial;
- b. Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu;
- c. Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan; dan



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- d. Beban Tidak Terduga adalah beban berupa pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, saat terjadinya konsumsi aset, dan saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Pengakuan beban pada periode berjalan pada pemerintah daerah dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.

Beban diukur sesuai dengan (1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah; (2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya. Beban disajikan dalam LO. Rincian dari Beban dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi ekonomi; dan (3) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain pengeluaran beban tahun berkenaan, pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja, dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.9. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan

Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas menerapkan kebijakan ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan. Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program, atau kegiatan yang lain. Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain. Penyajian kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos di dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode pemerintah daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru.

a. Koreksi Kesalahan

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada LPE dan diungkapkan dalam CaLK.

c. Perubahan Estimasi Akuntansi

Agar memperoleh laporan keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat Aset Tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat Aset Tetap tersebut. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam CaLK. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

d. Operasi yang Tidak Dilanjutkan

Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah daerah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada CaLK.

e. Peristiwa Luar Biasa

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas pemerintah daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

tingkatan pemerintah yang lain. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan: (a) Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas; (b) Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang; (c) Berada di luar kendali atau pengaruh entitas; dan (d) Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5.1.1. Pendapatan Daerah

<u>Anggaran TA 2025</u>	<u>Realisasi TA 2025</u>	<u>Realisasi TA 2024</u>
<u>Rp1.274.043.867.398,00</u>	<u>Rp1.213.625.887.733,12</u>	<u>Rp1.289.104.308.257,38</u>

Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan anggaran dan realisasi TA 2025 sebagai berikut.

Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	147.764.184.380,00	131.918.868.299,47	89,28	109.307.352.589,08
2	Pendapatan Transfer	1.107.757.414.708,00	1.063.460.240.190,00	96,00	1.163.065.281.980,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	18.622.268.310,00	18.246.779.243,65	98,51	16.731.673.688,30
Jumlah		1.274.043.867.398,00	1.213.625.887.733,12	95,26	1.289.104.308.257,38

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2025 senilai Rp1.213.625.887.733,12 atau 95,26% dari anggaran senilai Rp1.274.043.867.398,00. Rincian realisasi masing-masing pos Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut.

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

<u>Anggaran TA 2025</u>	<u>Realisasi TA 2025</u>	<u>Realisasi TA 2024</u>
<u>Rp147.764.184.380,00</u>	<u>Rp131.918.868.299,47</u>	<u>Rp109.307.352.589,08</u>

Realisasi PAD TA 2025 senilai Rp131.918.868.299,47 atau 89,28% dari anggaran senilai Rp147.764.184.380,00. Rincian realisasi masing-masing pos PAD adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2 Anggaran dan Realisasi PAD TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	45.155.336.207,00	30.283.622.354,00	67,07	21.270.967.323,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	12.360.998.398,00	7.137.076.788,00	57,74	7.155.916.070,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.511.802.797,00	5.511.802.797,00	100,00	3.579.443.275,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	84.736.046.978,00	88.986.367.360,47	105,02	77.301.026.921,08
Jumlah		147.764.184.380,00	131.918.868.299,47	89,28	109.307.352.589,08



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

<u>Anggaran TA 2025</u>	<u>Realisasi TA 2025</u>	<u>Realisasi TA 2024</u>
<u>Rp45.155.336.207,00</u>	<u>Rp30.283.622.354,00</u>	<u>Rp21.270.967.323,00</u>

Pendapatan Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Perda. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Manggarai selama TA 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pajak Hotel	742.730.206,00	613.958.000,00	82,68	754.750.053,00
2	Pajak Restoran	3.284.000.000,00	2.729.598.083,00	83,12	2.558.530.061,00
3	Pajak Hiburan	11.000.000,00	11.892.000,00	108,11	0,00
4	Pajak Reklame	223.248.600,00	210.821.400,00	94,34	228.977.181,00
5	Pajak Penerangan Jalan	6.850.000.000,00	6.680.726.742,00	97,67	6.926.708.317,00
6	Pajak Air Tanah	200.101.000,00	323.106.080,00	161,47	248.838.358,00
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	10.810.549.567,00	5.275.940.493,00	48,80	5.010.318.955,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	6.665.085.501,00	5.109.212.084,00	76,66	4.670.822.047,00
9	Pajak Bea Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.862.417.038,00	1.120.822.663,00	60,18	870.021.351,00
10	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	6.882.132.028,00	5.204.485.088,00	59,94	0,00
11	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	5.824.071.168,00	2.993.253.760,00	51,39	0,00
Jumlah		45.155.336.207,00	30.283.622.354,00	67,07	21.270.967.323,00

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2025 senilai Rp30.283.622.354,00 atau 67,07% dari anggaran senilai Rp45.155.336.207,00. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp9.012.655.031,00 jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Daerah TA 2024.

5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

<u>Anggaran TA 2025</u>	<u>Realisasi TA 2025</u>	<u>Realisasi TA 2024</u>
<u>Rp12.360.998.398,00</u>	<u>Rp7.137.075.788,00</u>	<u>Rp7.155.915.070,00</u>

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Perda. Pendapatan Retribusi Daerah dikelola oleh masing-masing perangkat daerah dengan realisasi selama TA 2025 adalah sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.082.755.000,00	444.727.500,00	41,07	449.318.950,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	800.000.000,00	532.578.000,00	66,57	485.126.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	375.593.300,00	264.566.000,00	70,44	284.398.000,00
4	Retribusi Pemakalan Kekayaan Daerah	1.870.901.900,00	1.019.990.600,00	54,52	1.291.509.500,00
5	Retribusi Paser Grosir dan/atau Pertokoan	3.904.585.773,00	3.186.636.870,00	81,61	3.167.517.435,00
6	Retribusi Tempat Pelelangan	0,00	0,00	0,00	4.620.000,00
7	Retribusi Rumah Potong Hewan	165.000.000,00	296.280.000,00	179,56	257.240.000,00
8	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan	34.120.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	14.150.475,00	5.320.952,00	37,60	5.678.420,00
10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	39.391.950,00	1.000.000,00	2,54	330.719.000,00
11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	3.674.500.000,00	864.160.000,00	23,52	823.537.500,00
12	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga	400.000.000,00	375.359.000,00	93,84	0,00
13	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0,00	146.456.866,00	0,00	56.250.265,00
Jumlah		12.360.998.398,00	7.137.075.788,00	57,74	7.155.915.070,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2025 senilai Rp7.137.075.788,00 atau 57,74% dari anggaran senilai Rp12.360.998.398,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp18.839.282,00 jika dibandingkan dengan TA 2024. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh masing-masing SKPD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Menurut SKPD Pengelola TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	1.082.755.000,00	444.727.500,00	41,07	449.318.950,00
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.082.755.000,00	444.727.500,00	41,07	449.318.950,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.100.000.000,00	257.759.200,00	23,43	362.464.137,00
	Retribusi Pemakalan Kekayaan Daerah	1.100.000.000,00	257.759.200,00	23,43	325.846.000,00
	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	36.618.137,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
3	Dinas Perhubungan	389.743.775,00	269.886.952,00	69,25	290.076.420,00
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	375.593.300,00	264.566.000,00	70,44	284.398.000,00
	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	14.150.475,00	5.320.952,00	37,60	5.678.420,00
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.000.000,00	10.600.000,00	106,00	10.895.000,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	10.000.000,00	10.600.000,00	106,00	10.895.000,00
5	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	400.000.000,00	375.359.000,00	93,84	329.299.000,00
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	329.299.000,00
	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga	400.000.000,00	375.359.000,00	93,84	0,00
6	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	300.000.000,00	213.400.000,00	71,13	181.587.500,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	300.000.000,00	213.400.000,00	71,13	176.587.500,00
7	Dinas Peternakan	2.739.500.000,00	735.840.000,00	26,86	553.390.000,00
	Retribusi Rumah Polong Hewan	165.000.000,00	296.280.000,00	179,56	257.240.000,00
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	2.574.500.000,00	439.560.000,00	17,07	296.150.000,00
8	Dinas Perikanan	873.511.950,00	212.200.000,00	24,29	356.840.000,00
	Retribusi Tempat Pelelangan	0,00	0,00	0,00	4.620.000,00
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	39.391.950,00	1.000.000,00	2,54	1.420.000,00
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	800.000.000,00	211.200.000,00	26,40	350.800.000,00
	Retribusi Tempat Pelelangan	34.120.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	800.000.000,00	532.578.000,00	66,57	485.126.000,00
	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	800.000.000,00	532.578.000,00	66,57	485.126.000,00
10	Badan Pendapatan Daerah	4.665.487.673,00	4.084.725.136,00	87,55	4.136.918.063,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	760.901.900,00	751.631.400,00	98,78	949.768.500,00
	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	3.904.585.773,00	3.186.636.870,00	81,61	3.167.517.435,00
	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0,00	146.456.866,00	0,00	19.632.128,00
Jumlah		12.360.998.398,00	7.137.075.788,00	57,74	7.155.915.070,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
Rp5.511.802.797,00	Rp5.511.802.797,00	Rp3.579.443.275,00

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian atas laba perusahaan milik daerah/dividen atas penyertaan modal dari PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (BPD NTT) dan kontribusi PDAM Tirta Komodo. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2025 senilai Rp5.511.802.797,00 atau terealisasi 100% dari anggaran senilai Rp5.511.802.797,00. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA.2025 mengalami kenaikan senilai Rp1.932.359.522,00 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024.

Rincian realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2025 adalah sebagai berikut.

1. Dividen atas penyertaan modal dari PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (BPD NTT) senilai Rp4.511.802.797,00; dan
2. Kontribusi PDAM Tirta Komodo kepada PAD senilai Rp1.000.000.000,00.

5.1.1.1.4. Lain-lain PAD yang Sah

Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
Rp84.736.046.978,00	Rp88.986.367.360,47	Rp77.301.026.921,08

Lain-lain PAD yang Sah merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap maupun rutin, dengan realisasi TA 2025 sebagai berikut.

Tabel 5.6 Anggaran dan Realisasi Lain – Lain PAD yang Sah TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.840.320.000,00	262.083.000,00	14,24	0,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	7.680.000,00	0,00	0,00
3	Jasa Giro	2.376.487.504,00	828.644.309,96	34,87	731.050.640,60
4	Pendapatan Bunga	1.500.000.000,00	719.690.745,14	47,98	265.523.889,00
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	507.276.567,00	2.673.250.509,96	526,98	648.205.077,07
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	189.264.623,00	19.344.433,00	10,22	893.564.289,00
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	226.379.427,00	0,00	0,00
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	8.940,00	0,00	0,00
9	Pendapatan dari Pengembalian	8.322.698.284,00	6.656.067.876,26	79,97	870.689.407,72
10	Pendapatan BLUD	70.000.000.000,00	77.593.218.119,15	110,85	73.891.993.617,69
	Jumlah	84.736.046.978,00	88.986.367.360,47	105,02	77.301.026.921,08



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah TA 2025 senilai Rp88.986.367.360,47 atau 105,02% dari anggaran senilai Rp84.736.046.987,00. Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp11.685.340.439,39 jika dibandingkan dengan TA 2024. Rincian realisasi Lain-Lain PAD yang Sah TA 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pendapatan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan tahun 2025 senilai Rp262.083.000,00 atau 14,24% dari anggaran senilai Rp1.840.320.000,00 merupakan pendapatan dari hasil penjualan alat angkutan darat bermotor;
2. Jasa giro tahun 2025 senilai Rp828.644.309,96 atau 34,87% dari yang dianggarkan senilai Rp2.376.487.504,00 merupakan jasa giro atas seluruh rekening milik pemerintah daerah;
3. Pendapatan bunga tahun 2025 senilai Rp719.690.745,14 atau 47,98% dari yang dianggarkan senilai Rp1.500.000.000,00 merupakan pendapatan bunga deposito senilai Rp719.451.999,14 dan remunerasi TDF senilai Rp238.746,00;
4. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah tahun 2025 senilai Rp2.673.250.509,96 atau 526,98% dari yang dianggarkan senilai Rp507.276.567,00;
5. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tahun 2025 senilai Rp19.344.433,00 atau 10,22% dari yang dianggarkan senilai Rp189.264.623,00;
6. Pendapatan Denda Pajak Daerah tahun 2025 senilai Rp226.379.427,00 dan Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2025 senilai Rp8.940,00;
7. Pendapatan dari Pengembalian tahun 2025 senilai Rp6.656.067.876,26 atau 79,97% dari yang dianggarkan senilai Rp8.322.698.284,00; dan
8. Pendapatan BLUD pada BLUD RSUD Ruteng tahun 2025 senilai Rp77.593.218.119,15 atau sebesar 110,85% dari anggaran senilai Rp70.000.000.000,00 yang merupakan Pendapatan Jasa Layanan, Pendapatan Hasil Kerjasama dan Pendapatan BLUD yang sah. Pendapatan BLUD dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 5.7 Rincian Pendapatan BLUD TA 2025

No.	Jenis Pendapatan	Realisasi 2025 (Rp)
1	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	77.329.970.301,00
2	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain	136.351.433,00
3	Pendapatan BLUD dari Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	126.896.385,15
Jumlah		77.593.218.119,15

5.1.1.2. Pendapatan Transfer

Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
Rp1.107.757.414.708,00	Rp1.063.460.240.190,00	Rp1.163.065.281.980,00

Pendapatan Transfer berasal dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah dengan realisasi untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

<u>Anggaran TA 2025</u>	<u>Realisasi TA 2024</u>	<u>Realisasi TA 2024</u>
<u>Rp950.206.945.591,00</u>	<u>Rp913.325.906.732,00</u>	<u>Rp995.681.227.037,00</u>

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak, Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan realisasi untuk TA 2025 sebagai berikut.

5.1.1.2.1.1. Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak

<u>Anggaran TA 2025</u>	<u>Realisasi TA 2025</u>	<u>Realisasi TA 2024</u>
<u>Rp5.438.624.000,00</u>	<u>Rp5.076.342.100,00</u>	<u>Rp5.824.669.000,00</u>

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak pada TA 2025 senilai Rp5.078.223.100,00 dari anggaran senilai Rp5.438.624.000,00 atau 93,34% yang dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.8 Anggaran dan Realisasi DBH Pajak TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.901.382.000,00	1.784.524.400,00	93,85	2.778.028.000,00
2	DBH PPh Pasal 21	3.258.984.000,00	2.917.583.700,00	89,52	2.742.770.000,00
3	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	278.258.000,00	374.234.000,00	134,49	303.871.000,00
Jumlah		5.438.624.000,00	5.076.342.100,00	93,34	5.824.669.000,00

5.1.1.2.1.2. Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam

<u>Anggaran TA 2025</u>	<u>Realisasi TA 2025</u>	<u>Realisasi TA 2024</u>
<u>Rp2.371.169.000,00</u>	<u>Rp2.289.108.000,00</u>	<u>Rp2.589.809.000,00</u>

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) pada TA 2025 senilai Rp2.289.108.000,00 dari anggaran senilai Rp2.371.169.000,00 atau 96,54% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.9 Anggaran dan Realisasi DBH SDA TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	DBH SDA Minyak Bumi	9.100.000,00	0,00	0,00	0,00
2	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	1.145.110.000,00	1.075.548.000,00	93,93	960.853.000,00
3	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	35.211.000,00	33.770.000,00	95,91	23.265.000,00
4	DBH SDA Perikanan	1.170.961.000,00	1.170.961.000,00	100,00	1.605.691.000,00
5	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	0,00	1.864.000,00	0,00	0,00
6	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	2.058.000,00	6.965.000,00	338,44	0,00
7	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DT)	8.729.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		2.371.169.000,00	2.289.108.000,00	96,54	2.589.809.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.1.1.2.1.3. Dana Alokasi Umum (DAU)

<u>Anggaran TA 2025</u>	<u>Realisasi TA 2025</u>	<u>Realisasi TA 2024</u>
Rp697.185.844.000,00	Rp676.150.082.895,00	Rp677.515.472.202,00

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Pemerintah Kabupaten Manggarai TA 2025 direalisasikan senilai Rp676.150.082.895,00 atau 96,98% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp697.185.844.000,00. Realisasi DAU dibagi menjadi dua kategori yaitu Dana *Specific Grant* (DAU yang ditentukan penggunaannya) dan Dana *Block Grant* (DAU yang tidak ditentukan penggunaannya) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.10 Anggaran dan Realisasi DAU TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
A	DAU <i>Specific Grant</i>	125.206.706.000,00	104.401.550.288,00	83,38	160.750.807.202,00
1	Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	23.072.804.000,00
2	Bidang Kesehatan	12.281.151.000,00	12.281.151.000,00	100,00	42.094.287.000,00
3	Bidang Pendidikan	60.891.101.000,00	60.891.101.000,00	100,00	72.472.290.000,00
4	Pendanaan Kelurahan	5.200.000.000,00	5.200.000.000,00	100,00	5.200.000.000,00
5	Penggalan Formasi PPPK	46.834.454.000,00	28.020.307.288,00	66,58	11.243.044.202,00
6	Dana Alokasi Umum Tunjangan Hari Raya	0,00	0,00	0,00	12.073.010.000,00
B	DAU <i>Block Grant</i>	571.979.138.000,00	571.748.523.607,00	99,98	510.758.605.000,00
1	Dana Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya	571.979.138.000,00	571.748.523.607,00	99,98	510.708.605.000,00
	Jumlah	697.185.844.000,00	676.150.082.895,00	96,98	677.515.472.202,00

5.1.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

<u>Anggaran TA 2025</u>	<u>Realisasi TA 2025</u>	<u>Realisasi TA 2024</u>
Rp245.211.308.591,00	Rp229.810.373.737,00	Rp309.751.276.835,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Pemerintah Kabupaten Manggarai TA 2025 direalisasikan senilai Rp229.810.373.737,00 atau 93,72% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp245.211.308.591,00. Rincian realisasi DAK adalah sebagai berikut.

1. DAK Fisik

<u>Anggaran TA 2025</u>	<u>Realisasi TA 2025</u>	<u>Realisasi TA 2024</u>
Rp19.579.526.000,00	Rp18.922.609.585,00	Rp114.943.944.920,00

Realisasi DAK Fisik untuk Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2025 direalisasikan senilai Rp18.922.609.585,00 atau 96,64% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp19.579.526.000,00. Rincian realisasi DAK Fisik adalah sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.11 Anggaran dan Realisasi DAK Fisik TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan	1.857.204.000,00	1.844.402.402,00	99,31	19.847.536.159,00
2	DAK Fisik-Bidang Pertanian	0,00	0,00	0,00	12.779.433.000,00
3	DAK Fisik-Bidang Jalan	0,00	0,00	0,00	38.192.213.993,00
4	DAK Fisik-Bidang Air Minum	8.223.152.000,00	7.834.637.880,00	95,28	3.399.814.058,00
5	DAK Fisik-Bidang Sanitasi	6.541.714.000,00	6.541.714.000,00	100,00	9.774.105.000,00
6	DAK Fisik-Bidang Irigasi	0,00	0,00	0,00	6.199.949.850,00
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB	2.957.456.000,00	2.701.855.303,00	91,36	19.977.028.110,00
8	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah	0,00	00,00	0,00	4.480.925.400,00
9	DAK Fisik-Bidang Pariwisata	0,00	0,00	0,00	292.939.350,00
Jumlah		19.579.526.000,00	18.922.609.585,00	96,64	114.943.944.920,00

2. DAK Non Fisik

<u>Anggaran TA 2025</u>	<u>Realisasi TA 2025</u>	<u>Realisasi TA 2024</u>
Rp225.631.782.591,00	Rp210.887.764.152,00	Rp194.807.331.915,00

Realisasi DAK Non Fisik untuk Pemerintah Kabupaten Manggarai TA 2025 direalisasikan senilai Rp210.887.764.152,00 atau 93,46% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp225.631.782.591,00. Realisasi DAK Non Fisik dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 5.12 Anggaran dan Realisasi DAK Non Fisik TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	DAK Non Fisik-BOS Reguler	68.327.142.000,00	68.142.190.237,00	99,73	69.785.662.348,00
2.	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.415.000.000,00	1.415.000.000,00	100,00	1.425.000.000,00
3.	DAK Non Fisik-TPG PNSD	106.731.879.000,00	95.489.005.628,00	89,47	68.999.158.000,00
4.	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.236.750.000,00	799.062.500,00	64,61	3.996.250.000,00
5.	DAK Non Fisik-TKG PNSD	8.015.534.000,00	6.678.634.997,00	83,32	6.711.732.000,00
6.	DAK Non Fisik-BOP PAUD	6.857.900.000,00	6.741.282.150,00	98,30	6.108.975.000,00
7.	DAK Non Fisik-BOP	1.785.080.000,00	1.779.282.800,00	99,68	1.621.780.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
	Pendidikan Kesetaraan				
8.	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK	24.340.047.593,00	22.920.855.842,00	94,17	27.696.746.016,00
9.	DAK Non Fisik- BOKKB- Pengawasan Obat dan Makanan	314.209.000,00	314.209.000,00	100,00	0,00
10.	DAK Non Fisik- BOKKB-BOKB	6.080.240.998,00	6.080.240.998,00	100,00	4.120.818.117,00
11.	DAK Non Fisik- Dana Pelayanan Kepariwisata	0,00	0,00	0,00	783.701.000,00
12.	DAK Non Fisik- PK2UMK	0,00	0,00	0,00	995.775.934,00
13.	DAK Non Fisik- Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	528.000.000,00	528.000.000,00	100,00	842.731.500,00
14.	DAK Non Fisik- Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	0,00	0,00	0,00	1.719.002.000,00
Jumlah		225.631.782.591,00	210.887.764.152,00	93,47	194.807.331.915,00

5.1.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

<u>Anggaran TA 2025</u>	<u>Realisasi TA 2025</u>	<u>Realisasi TA 2024</u>
Rp123.365.629.000,00	Rp121.758.483.700,00	Rp129.061.909.000,00

Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya berasal dari Dana Desa dengan rincian sebagai berikut.

5.1.1.2.2.1. Dana Desa

<u>Anggaran TA 2025</u>	<u>Realisasi TA 2025</u>	<u>Realisasi TA 2024</u>
Rp123.365.629.000,00	Rp121.758.483.700,00	Rp129.061.909.000,00

Realisasi Dana Desa untuk TA 2025 senilai Rp121.758.483.700,00 atau 98,70% dari anggaran senilai Rp123.365.629.000,00 untuk 145 Desa yang ada di Kabupaten Manggarai. Realisasi Dana Desa tahun 2025 mengalami penurunan senilai Rp7.303.425.300,00 dibandingkan tahun 2024 senilai Rp129.061.909.000,00.

5.1.1.2.3. Pendapatan Transfer Antar Daerah

<u>Anggaran TA 2025</u>	<u>Realisasi TA 2025</u>	<u>Realisasi TA 2024</u>
Rp34.184.840.117,00	Rp28.375.849.758,00	Rp38.322.145.943,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2025 direalisasikan senilai Rp28.375.849.758,00 atau 83,01% dari anggaran senilai Rp34.184.840.117,00. Pendapatan Transfer Antar



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Daerah berasal dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi dengan rincian sebagai berikut.

5.1.1.2.3.1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak

<u>Anggaran TA 2025</u>	<u>Realisasi TA 2025</u>	<u>Realisasi TA 2024</u>
<u>Rp34.184.840.117,00</u>	<u>Rp28.175.849.758,00</u>	<u>Rp38.322.145.943,00</u>

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi untuk TA 2025 senilai Rp28.175.849.758,00 atau 82,42% dari anggaran senilai Rp34.184.840.117,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.13 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	3.282.709.526,00	0,00	0,00	6.827.758.929,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	3.242.548.236,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	12.758.038.880,00	10.660.928.100,00	83,56	11.344.476.488,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Alr Permukaan	76.835.855,00	49.138.727,00	63,95	32.670.113,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	18.067.255.856,00	17.465.782.931,00	96,67	16.874.892.177,00
Jumlah		34.184.840.117,00	28.175.849.758,00	82,42	38.322.145.943,00

5.1.1.2.3.2. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi

<u>Anggaran TA 2025</u>	<u>Realisasi TA 2025</u>	<u>Realisasi TA 2024</u>
<u>Rp0,00</u>	<u>Rp200.000.000,00</u>	<u>Rp0,00</u>

Terdapat penerimaan berupa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi senilai Rp200.000.000,00 yang tidak dianggarkan di tahun 2025. Penerimaan Bantuan Keuangan tersebut sesuai dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 482/KEP/HK/2025 tentang Pemerintah Kabupaten/Kota Penerima Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.

5.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

<u>Anggaran TA 2025</u>	<u>Realisasi TA 2025</u>	<u>Realisasi TA 2024</u>
<u>Rp18.522.268.310,00</u>	<u>Rp18.246.779.243,65</u>	<u>Rp16.731.673.688,30</u>

Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah untuk TA 2025 senilai Rp18.246.779.243,65 atau 98,51% dari anggaran senilai Rp18.522.268.310,00. Realisasi pendapatan Lain-lain Pendapatan yang Sah untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.1.1.3.1. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan

Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
Rp18.522.268.310,00	Rp18.246.779.243,65	Rp16.731.673.688,30

Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan TA 2025 senilai Rp18.246.779.243,65 atau 98,51% dari anggaran senilai Rp18.522.268.310,00. Realisasi tersebut merupakan pendapatan dana kapitasi pada 25 Puskesmas dan satu Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama senilai Rp14.748.967.317,00, pendapatan prolanis pada delapan Puskesmas senilai Rp414.201.500,00, pendapatan non kapitasi pada 24 puskesmas dan satu Rumah sakit Umum Daerah Kelas D Pratama senilai Rp2.622.221.600,00, pendapatan pengembalian temuan BPK senilai Rp48.203.037,65 dan pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi senilai Rp413.185.789,00. Realisasi tersebut dapat dijelaskan pada rincian berikut.

a. Pendapatan Dana Kapitasi pada FKTP TA 2025

Pendapatan Dana Kapitasi pada 24 Puskesmas dan satu Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama senilai Rp14.748.967.317,00 sebagai berikut.

Tabel 5.14 Rincian Pendapatan Dana Kapitasi pada FKTP TA 2025

No.	Nama Puskesmas	Pendapatan Dana Kapitasi JKN 2025 (Rp)
1	Anam	393.046.967,00
2	Bangka Kenda	583.554.628,00
3	Bea Mese	432.699.680,00
4	Cancar	1.051.854.775,00
5	Dintor	535.820.697,00
6	Iteng	720.918.954,00
7	Ketang	499.627.083,00
8	Kota	1.599.445.260,00
9	Langgo	130.222.210,00
10	Langke Majok	526.099.265,00
11	La'o	1.069.640.420,00
12	Loce	310.080.485,00
13	Nanu	492.284.769,00
14	Narang	543.147.752,00
15	Pagal	1.050.404.645,00
16	Ponggeok	619.547.886,00
17	Reo	844.533.962,00
18	Timung	448.874.838,00
19	Todo	316.258.850,00
20	Wae Codi	581.485.161,00
21	Wae Kajong	328.219.675,00
22	Wae Mbeleng	515.568.325,00
23	Wangko	608.448.688,00
24	Watu Alo	322.361.353,00
25	RS Pratama Reo	224.822.989,00
Jumlah		14.748.967.317,00

b. Pendapatan Prolanis pada FKTP TA 2025

Pendapatan Prolanis pada delapan puskesmas yang ada di Kabupaten Manggarai senilai Rp414.201.500,00 sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.15 Pendapatan Prolanis pada FKTP TA 2025

No.	Nama Puskesmas	Pendapatan Dana Prolanis 2025 (Rp)
1	Bangka Kenda	697.100,00
2	Cancar	89.975.900,00
3	Kota	34.976.800,00
4	Pagal	97.143.800,00
5	Reo	5.126.400,00
6	Timung	44.827.800,00
7	Wae Mbeleng	66.190.900,00
8	Wangko	75.262.800,00
Jumlah		414.201.500,00

c. Pendapatan Non Kapitasi pada FKTP TA 2025

Pendapatan Non Kapitasi pada 24 Puskesmas dan 1 RSUD Kelas D Pratama senilai Rp2.622.2221.600,00 sebagai berikut.

Tabel 5.16 Pendapatan Non Kapitasi pada FKTP TA 2025

No.	Nama Puskesmas	Pendapatan Non Kapitasi 2025 (Rp)
1	Anam	124.209.400,00
2	Bangka Kenda	40.800.000,00
3	Bea Mese	82.332.600,00
4	Cancar	83.034.600,00
5	Dintor	55.266.000,00
6	Iteng	108.886.000,00
7	Ketang	122.782.800,00
8	Kola	112.660.000,00
9	Langgo	164.070.000,00
10	Langke Majok	104.872.400,00
11	La"o	51.431.000,00
12	Loce	118.315.000,00
13	Nanu	57.259.000,00
14	Narang	265.894.600,00
15	Pagal	191.824.200,00
16	Ponggeok	271.867.000,00
17	Reo	90.725.000,00
18	Timung	36.169.000,00
19	Todo	92.565.400,00
20	Wae Codi	71.303.300,00
21	Wae Kajong	67.208.300,00
22	Wae Mbeleng	54.475.000,00
23	Wangko	60.255.000,00
24	Watu Alo	29.815.000,00
25	RS Pratama	164.282.200,00
	Admin Transfer Bank	(81.200,00)
Jumlah		2.622.221.600,00

d. Pendapatan Pengembalian Temuan BPK

Pendapatan pada Bendahara Dana Kapitasi pada FKTP atas pengembalian temuan BPK senilai Rp48.203.037,65 sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.17 Rincian Pendapatan Pengembalian Temuan BPK TA 2025

No.	Nama Puskesmas	Pengembalian Temuan Pemeriksaan BPK (Rp)
1	Anam	0,00
2	Bangka Kenda	2.498.125,96
3	Bea Mese	0,00
4	Cancar	0,00
5	Dintor	1.249.887,22
6	Iteng	10.006.379,72
7	Ketang	0,00
8	Kota	8.170.936,43
9	Langgo	0,00
10	Langke Majok	10.015.707,62
11	La'o	0,00
12	Loce	1.167.011,04
13	Nanu	1.548.767,16
14	Narang	0,00
15	Pagal	0,00
16	Ponggeok	0,00
17	Reo	8.693.745,94
18	Timung	2.013.037,60
19	Todo	0,00
20	Wae Codi	1.619.035,27
21	Wae Kajong	0,00
22	Wae Mbeleng	0,00
23	Wangko	0,00
24	Watu Alo	1.220.403,69
25	RS Pratama Reo	0,00
Jumlah		48.203.037,65

e. Bonus Produksi Panas Bumi

Bonus produksi panas bumi merupakan kewajiban keuangan berupa pembayaran uang tunai yang wajib disetor oleh pengembang panas bumi langsung ke pemerintah daerah penghasil atas pemanfaatan sumber daya panas bumi di wilayahnya. Pengembang atau pemegang kuasa panas bumi Ulumbu yang berada di Kabupaten Manggarai adalah PT. PLN. Realisasi bonus produksi panas bumi TA 2025 senilai Rp413.185.789,00.

5.1.2. Belanja Daerah

<u>Anggaran TA 2025</u>	<u>Realisasi TA 2025</u>	<u>Realisasi TA 2024</u>
<u>Rp1.295.248.407.633,00</u>	<u>Rp1.215.129.985.077,63</u>	<u>Rp1.236.705.881.370,13</u>

Pada TA 2025, terdapat 43 SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai yang merupakan pengguna anggaran. Berdasarkan jenis kelompoknya, Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Jumlah realisasi Belanja Daerah TA 2025 senilai Rp1.215.129.985.077,63 atau 93,81% dari anggaran senilai Rp1.295.248.407.633,00, dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.18 Anggaran dan Realisasi Belanja dan Transfer TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Operasi	960.626.734.805,00	893.875.499.612,79	93,05	874.604.336.520,03
2	Belanja Modal	133.732.377.967,00	124.990.675.843,84	93,46	159.732.790.450,10
3	Belanja Tidak Terduga	1.325.000.000,00	1.254.970.300,00	94,71	667.330.200,00
4	Belanja Transfer	199.564.294.861,00	195.008.839.321,00	97,72	201.701.424.200,00
	Jumlah	1.295.248.407.633,00	1.215.129.985.077,63	93,81	1.236.705.881.370,13

5.1.2.1. Belanja Operasi

<u>Anggaran TA 2025</u>	<u>Realisasi TA 2025</u>	<u>Realisasi TA 2024</u>
<u>Rp960.626.734.805,00</u>	<u>Rp893.875.499.612,79</u>	<u>Rp874.604.336.520,03</u>

Belanja Operasi Kabupaten Manggarai meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dengan realisasi pada TA 2025 senilai Rp893.875.499.612,79 atau sebesar 93,05% dari yang dianggarkan pada APBD senilai Rp960.626.734.805,00. Secara umum rencana Belanja Operasi tidak terealisasi secara keseluruhan karena adanya upaya rasionalisasi dan penghematan disesuaikan dengan kemampuan dan ketersediaan kas di pemerintah daerah dan selanjutnya hal tersebut ditempuh dengan prinsip anggaran belanja yang direncanakan adalah pagu tertinggi sehingga tidak harus direalisasikan semua.

Realisasi Belanja Operasi senilai Rp893.875.499.612,79 atau sebesar 93,05% dari anggaran senilai Rp960.626.734.805,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.19 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Pegawai	613.112.892.177,56	564.374.149.667,00	92,05	491.977.680.014,10
2	Belanja Barang dan Jasa	307.526.423.889,44	289.962.561.608,85	94,29	299.480.727.145,13
3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	2.504.451.584,80
4	Belanja Hibah	37.279.727.000,00	36.910.383.160,94	99,01	72.645.506.776,00
5	Belanja Bantuan Sosial	2.707.691.738,00	2.628.405.176,00	97,07	7.995.971.000,00
	Jumlah	960.626.734.805,00	893.875.499.612,79	93,05	874.604.336.520,03

Rincian realisasi Belanja Operasi adalah sebagai berikut.

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

<u>Anggaran TA 2025</u>	<u>Realisasi TA 2025</u>	<u>Realisasi TA 2024</u>
<u>Rp613.112.892.177,56</u>	<u>Rp564.374.149.667,00</u>	<u>Rp491.977.680.014,10</u>

Realisasi Belanja Pegawai senilai Rp564.374.149.667,00 atau 92,05% dari anggaran senilai Rp613.112.892.177,56, dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.20 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	461.877.401.480,56	427.814.346.684,00	92,63	385.672.046.730,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	131.320.911.828,00	116.944.826.968,00	89,05	6.345.620.500,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	82.545.356.610,10
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	18.879.150.373,00	18.586.085.836,00	98,45	16.691.988.164,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	224.062.051,00	220.223.738,00	98,29	173.087.198,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	763.816.445,00	763.816.441,00	99,99	500.630.812,00
7	Belanja Pegawai BLUD	47.550.000,00	44.850.000,00	94,32	48.950.000,00
Jumlah		613.112.892.177,56	564.374.149.667,00	92,05	491.977.680.014,10

Adapun rincian Belanja Pegawai masing-masing SKPD disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.21 Rincian Belanja Pegawai per SKPD TA 2025

No.	Nama Organisasi Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	317.769.342.895,00
2	Dinas Kesehatan	119.925.863.532,00
3	RSUD Ruteng	44.850.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.558.602.304,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Portanahan	2.564.123.626,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2.739.990.744,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.647.954.980,00
8	Dinas Sosial	1.825.086.300,00
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	1.762.704.602,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.160.994.035,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	4.417.882.178,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.026.095.877,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.859.573.493,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.956.788.528,00
15	Dinas Perhubungan	3.856.346.102,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.023.487.741,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.647.675.680,00
18	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2.866.913.692,00
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.618.657.865,00
20	Dinas Perikanan	2.250.829.318,00
21	Dinas Peternakan	2.930.747.383,00
22	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	9.675.413.552,00
23	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2.608.804.358,00
24	Sekretariat Daerah	9.533.020.886,00
25	Sekretariat DPRD	20.533.555.156,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Nama Organisasi Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2.798.406.116,00
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.912.732.741,00
28	Badan Pendapatan Daerah	2.834.342.627,00
29	Badan Kepegawalan dan Pengembangan SDM	2.272.064.981,00
30	Inspektorat	3.152.321.224,00
31	Kec. Langke Rembong	9.578.037.567,00
32	Kec. Ruteng	1.205.884.521,00
33	Kec. Satar Mese	1.241.312.473,00
34	Kec. Reok	2.287.638.424,00
35	Kec. Cibal	754.850.334,00
36	Kec. Wae Rii	1.077.008.379,00
37	Kec. Satar Mese Barat	732.923.936,00
38	Kec. Rahong Utara	704.225.697,00
39	Kec. Lelak	757.831.078,00
40	Kec. Reok Barat	848.798.340,00
41	Kec. Cibal Barat	1.900.579.876,00
42	Kec. Satar Mese Utara	872.144.273,00
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	1.637.942.253,00
Jumlah		564.374.149.667,00

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
Rp307.526.423.889,44	Rp289.962.561.608,85	Rp299.480.727.145,13

Realisasi Belanja Barang dan Jasa senilai Rp289.962.561.608,85 atau sebesar 94,29% dari anggaran senilai Rp307.526.423.889,44, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.22 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2025 dan TA 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	90.384.265.380,44	84.963.197.461,00	94,00	46.266.500.961,50
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	77.783.000,00	81.422.600,00	104,68	1.800.000,00
3	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.366.731.200,00	1.249.307.211,00	91,41	823.808.180,00
4	Belanja Jasa Kantor	66.261.082.262,00	61.165.117.667,10	92,31	67.215.976.980,54
5	Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi	13.203.121.221,00	12.493.225.975,75	94,62	6.176.196.924,00
6	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.592.220.625,00	1.418.595.825,00	89,10	285.342.547,00
7	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	344.650.000,00	299.490.000,00	86,90	718.220.454,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uralan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
8	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	752.000.000,00	752.000.000,00	100,00	0,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00	0,00	0,00	106.850.000,00
11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00	0,00	63.000.000,00
12	Belanja Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.313.883.778,00	1.267.440.609,00	96,47	1.643.671.000,00
13	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.505.814.787,00	1.322.468.660,00	87,82	945.054.500,00
14	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.116.257.381,00	979.021.741,00	87,71	626.496.954,00
15	Belanja Pemeliharaan Jalan Jaringan, dan Irigasi	37.685.000,00	30.103.900,00	79,88	30.000.000,00
16	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	51.526.800,00	1.026.366.850,00	1.991,91	0,00
17	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	37.255.750.904,00	31.221.742.756,00	83,80	33.746.965.462,00
18	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat	907.850.000,00	747.970.000,00	82,39	13.142.100.000,00
19	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat	1.804.155.000,00	1.760.166.214,00	97,56	1.809.234.152,00
20	Belanja Barang dan Jasa BLUD	71.243.403.646,00	73.650.372.513,00	103,38	79.322.941.989,00
21	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	41.229.654.618,19
22	Belanja Barang dan	340.883.944,00	0,00	0,00	436.139.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uralan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
	Jasa BOSP-BOS				
23	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	161.161,00	0,00	0,00	202.695.600,00
24	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	33.000,00	0,00	0,00	71.818.000,00
25	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	17.967.164.800,00	15.534.551.626,00	86,46	14.589.369.822,90
Jumlah		307.526.423.889,44	289.962.561.608,85	94,29	299.480.727.145,13

Rincian Belanja Barang dan Jasa masing-masing SKPD disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.23 Rincian Belanja Barang dan Jasa per SKPD TA 2025

No.	Nama Organisasi Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	49.327.184.415,00
2	Dinas Kesehatan	62.250.528.061,10
3	RSUD Ruteng	74.160.817.591,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.907.275.750,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	1.499.357.258,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1.508.311.212,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	400.164.504,00
8	Dinas Sosial	300.924.972,00
9	Dinas Koperasi	1.167.012.379,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	640.512.784,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	3.075.466.267,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	849.327.429,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.850.727.061,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.566.620.309,00
15	Dinas Perhubungan	1.116.328.957,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	980.642.691,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	336.463.053,00
18	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	19.478.002.048,00
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	743.885.721,00
20	Dinas Perikanan	1.296.825.621,00
21	Dinas Peternakan	2.081.629.755,00
22	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	10.945.110.567,00
23	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	563.993.900,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Nama Organisasi Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
24	Sekretariat Daerah	9.802.067.692,00
26	Sekretariat DPRD	12.772.105.596,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	1.839.543.244,00
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.472.363.029,00
28	Badan Pendapatan Daerah	1.669.280.840,00
29	Badan Kepegawalan dan Pengembangan SDM	1.493.808.690,00
30	Inspektorat	718.498.859,75
31	Kec. Langke Rembong	2.222.613.180,00
32	Kec. Ruteng	175.000.000,00
33	Kec. Satar Mese	130.016.350,00
34	Kec. Reok	565.964.147,00
35	Kec. Cibai	147.000.000,00
36	Kec. Wae Rii	128.036.000,00
37	Kec. Satar Mese Barat	144.505.000,00
38	Kec. Rahong Utara	163.301.750,00
39	Kec. Lelak	157.872.976,00
40	Kec. Reok Barat	126.869.200,00
41	Kec. Cibai Barat	293.553.500,00
42	Kec. Satar Mese Utara	182.890.000,00
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	710.160.250,00
Jumlah		289.962.561.608,85

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2025 pada Dinas Kesehatan senilai Rp62.250.528.061,10 termasuk belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi pada FKTP dan Dana BOK Puskesmas masing-masing senilai Rp14.695.043.922,10 dan Rp18.106.940.080,00, serta realisasi belanja RSUD Kelas D Pratama Reo senilai Rp907.377.611,00.

Secara umum rencana Belanja Barang dan Jasa tidak terealisasi secara keseluruhan karena adanya upaya rasionalisasi dan penghematan disesuaikan dengan kemampuan dan ketersediaan Kas di Pemerintah Daerah dan selanjutnya hal tersebut ditempuh dengan prinsip anggaran belanja yang direncanakan adalah pagu tertinggi sehingga tidak harus direalisasikan semua.

5.1.2.1.3. Belanja Bunga

<u>Anggaran TA 2025</u>	<u>Realisasi TA 2025</u>	<u>Realisasi TA 2024</u>
Rp0,00	Rp0,00	Rp2.504.451.584,80

Realisasi Belanja Bunga TA 2025 direalisasikan senilai Rp0,00 dari anggaran senilai Rp0,00. Hal ini dikarenakan pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Manggarai tidak



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

memiliki Pinjaman Daerah kepada Lembaga Perbankan (Bank NTT), meskipun pada TA 2024 terdapat Realisasi Bunga Bank senilai Rp2.504.451.584,80.

5.1.2.1.4. Belanja Hibah

Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
Rp37.279.727.000,00	Rp36.910.383.160,94	Rp72.645.506.776,00

Realisasi Belanja Hibah senilai Rp36.910.383.160,94 atau sebesar 99,01% dari anggaran senilai Rp37.279.727.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.24 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2025 dan TA 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	38.700.000.000,00
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	6.261.350.000,00	6.186.348.620,94	98,80	3.210.791.398,00
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	323.000.000,00	222.600.000,00	68,92	590.000.000,00
4	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	60.000.000,00	50.000.000,00	83,33	100.000.000,00
5	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	287.000.000,00	287.000.000,00	100,00	132.000.000,00
6	Belanja Hibah Dana BOS	21.264.797.000,00	21.201.348.290,00	99,70	21.700.198.982,00
7	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	705.550.000,00	705.550.000,00	100,00	611.369.779,00
8	Belanja Hibah Dana BOSP	8.378.030.000,00	8.257.536.250,00	98,56	7.601.146.617,00
Jumlah		37.279.727.000,00	36.910.383.160,94	99,01	72.645.506.776,00

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan untuk TA 2025 senilai Rp6.186.348.620,94 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.25 Rincian Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Hibah kepada Dekranasda Kabupaten Manggarai	400.000.000,00
2	Hibah kepada KONI	200.000.000,00
3	Hibah DAU SG kepada Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Manggarai	70.000.000,00
4	Hibah kepada KPAD Kabupaten Manggarai	75.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uralan	Nilai (Rp)
5	Hibah kepada National Paralympic Committee (NPC)	40.000.000,00
6	Hibah kepada SMP/MTs Negeri dan Swasta untuk Siswa Kelas 8 dan 9	242.840.000,00
7	Hibah kepada SD Negeri dan Swasta untuk siswa Kelas 5 dan 6	769.823.350,00
8	Hibah kepada SMP St. Antonius	249.779.628,00
9	Hibah kepada SDK Akel	99.800.000,00
10	Hibah kepada MIS Amanah	534.096.790,00
11	Hibah kepada SDK Paka	154.870.002,00
12	Hibah kepada SDK Kumba II	154.480.067,00
13	Hibah kepada SDK Ruteng II	154.850.143,00
14	Hibah kepada SDK Wae Codi	99.800.027,00
15	Hibah kepada MTs AN Najah	533.690.130,00
16	Hibah kepada SDK Cancar I	39.898.950,00
17	Hibah kepada SDK Cancar II	229.849.530,00
18	Hibah kepada MTs Amanah	261.382.349,00
19	Hibah kepada SD Swasta - (Ruteng VI, Rentung I, Ka Redong, Beo Rahong)	399.838.002,00
20	Hibah kepada SDK Kedindi	99.789.978,00
21	Hibah kepada SDK Pasa	224.721.022,00
22	Hibah kepada SD (Negeri dan Swasta) 6 Sekolah	102.909.900,00
23	Hibah kepada SD - 1 sekolah (Konsultan Perencana dan Pengawas)	11.955.000,00
24	Hibah kepada SD Negeri 5 sekolah dan Swasta 4 sekolah (9 sekolah)	399.999.600,00
25	Hibah kepada TK dan PAUD (Negeri 4 dan Swasta 13) untuk 17 Sekolah	459.209.285,29
26	Hibah kepada TK dan PAUD (Negeri 4 dan Swasta 13) untuk 17 Sekolah	177.764.867,65
Jumlah		6.186.348.620,94

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar untuk TA 2025 senilai Rp222.600.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.26 Rincian Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar TA 2025

No.	Uralan	Nilai (Rp)
1	Hibah kepada Komunitas Taman Bacaan Masyarakat Literasi Keluarga	100.000.000,00
2	Hibah kepada Rumah Pintar Pelangi Narwastu	10.000.000,00
3	Hibah kepada PMI	75.000.000,00
4	Hibah kepada Bunda PAUD	37.600.000,00
Jumlah		222.600.000,00

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan untuk TA 2025 senilai Rp50.000.000,00 yaitu hibah kepada Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Manggarai.

Realisasi Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia untuk TA 2025 senilai Rp287.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.27 Rincian Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2025

No.	Uralan	Nilai (Rp)
1	Hibah kepada IGTKI-PGRI	30.000.000,00
2	Hibah kepada POKJA Bunda PAUD	162.000.000,00
3	Hibah kepada GOPTKI	70.000.000,00
4	Hibah kepada HIMPAUDI	25.000.000,00
Jumlah		287.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Belanja Hibah Dana BOS yang Diterima oleh Satuan Pendidikan Dasar (Satdikdas) dan Satuan Pendidikan Menengah (Satdikmen) Swasta untuk TA 2025 senilai Rp21.201.348.290,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.28 Rincian Belanja Dana BOS TA 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Hibah BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar (Satdikdas)	16.643.912.290,00
2	Hibah BOS untuk Satuan Pendidikan Menengah (Satdikmen)	4.557.436.000,00
Jumlah		21.201.348.290,00

Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik untuk TA 2025 senilai Rp705.550.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.29 Rincian Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Hibah kepada Partai Golkar	80.871.480,00
2	Hibah kepada Partai PKB	102.064.760,00
3	Hibah kepada Partai PDIP	115.310.560,00
4	Hibah kepada Partai Nasdem	81.917.960,00
5	Hibah kepada Partai Hanura	47.524.200,00
6	Hibah kepada Partai PAN	53.180.960,00
7	Hibah kepada Partai Demokrat	94.677.600,00
8	Hibah kepada Partai Perindo	40.981.640,00
9	Hibah kepada Partai Gerindra	89.020.840,00
Jumlah		705.550.000,00

Belanja Hibah Dana BOSP yang Diterima oleh Sekolah PAUD dan Kesetaraan Swasta untuk TA 2025 senilai Rp8.257.536.250,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.30 Rincian Belanja Hibah Dana BOSP TA 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Belanja Hibah Dana BOP PAUD	6.508.603.450,00
2	Belanja Hibah Dana BOP Kesetaraan	1.748.932.800,00
Jumlah		8.257.536.250,00

5.1.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial

Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
Rp2.707.691.738,00	Rp2.628.405.176,00	Rp7.995.971.000,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial senilai Rp2.628.405.176,00 atau sebesar 97,07% merupakan realisasi Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan TA 2025 dari anggaran senilai Rp2.707.691.738,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.31 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2025 dan TA 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.043.441.738,00	1.027.500.000,00	98,47	1.085.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	364.750.000,00	360.948.356,00	98,96	197.469.000,00
3	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	312.000.000,00	305.583.480,00	97,94	0,00
4	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	900.000.000,00	846.949.500,00	94,11	6.713.502.000,00
5	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	87.500.000,00	87.423.840,00	99,91	0,00
Jumlah		2.707.691.738,00	2.628.405.176,00	97,07	7.995.971.000,00

5.1.2.2. Belanja Modal

<u>Anggaran TA 2025</u>	<u>Realisasi TA 2025</u>	<u>Realisasi TA 2024</u>
Rp133.732.377.967,00	Rp124.990.675.843,84	Rp159.732.790.450,10

Belanja Modal meliputi Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dan Belanja Modal Aset Lainnya untuk TA 2025. Realisasi Belanja Modal TA 2025 senilai Rp124.990.675.843,84 atau sebesar 93,46% dari anggaran senilai Rp133.732.377.967,00. Rincian Realisasi Belanja Modal TA 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.32 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2025

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.733.533.650,00	16.722.365.759,06	94,30	40.880.603.233,10
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.980.360.023,00	10.214.672.090,78	93,03	39.089.157.311,00
3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	97.076.650.894,00	90.112.302.024,00	92,83	75.324.159.743,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.791.833.400,00	7.791.485.970,00	99,99	4.438.870.163,00
5	Belanja Modal Aset Lainnya	150.000.000,00	149.850.000,00	99,90	0,00
Jumlah		133.732.377.967,00	124.990.675.843,84	93,46	159.732.790.450,10

5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

<u>Anggaran TA 2025</u>	<u>Realisasi TA 2025</u>	<u>Realisasi TA 2024</u>
Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00

Tidak terdapat Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah pada TA 2025 dan 2024



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
Rp17.733.533.650,00	Rp16.722.365.759,06	Rp40.880.603.233,10

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp16.722.365.759,06 atau 94,30% dari anggaran senilai Rp17.733.533.650,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.33 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Bantu	20.974.450,00	16.974.450,00	80,93	6.259.000,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	750.000.000,00	699.000.000,00	93,20	9.276.450.000,00
3	Belanja Modal Alat Ukur	110.363.350,00	109.741.100,00	99,44	62.467.000,00
4	Belanja Modal Alat Pengolahan	1.648.865.700,00	1.534.829.003,00	93,08	2.806.425.000,00
5	Belanja Modal Alat Kantor	1.439.163.227,00	1.415.848.225,00	98,38	996.608.891,00
6	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.957.435.995,00	2.936.698.097,00	99,30	3.330.892.900,00
7	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	108.550.000,00	102.387.336,00	94,32	337.625.000,00
8	Belanja Modal Alat Studio	563.324.965,00	548.032.403,00	97,29	460.205.126,00
9	Belanja Modal Alat Komunikasi	2.172.000,00	2.172.000,00	100,00	13.223.700,00
10	Belanja Modal Alat Pemancar	6.150.000,00	6.150.000,00	100,00	0,00
11	Belanja Modal Alat Kedokteran	17.503.888,00	0,00	0,00	1.274.629.822,00
12	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	785.802.452,00	290.923.752,00	37,02	1.022.917.578,00
13	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	23.644.900,00	23.644.900,00	100,00	26.958.200,00
14	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	327.459.554,00	326.299.054,00	99,65	90.010.214,00
15	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	0,00	0,00	0,00	7.446.082.500,00
16	Belanja Modal Komputer Unit	2.565.979.220,00	2.392.386.658,00	93,23	1.966.819.220,00
17	Belanja Modal Peralatan Komputer	4.023.153.149,00	3.989.868.911,00	99,17	5.643.495.881,00
18	Belanja Modal Sumur	0,00	0,00	0,00	230.140.300,00
19	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	2.030.000.000,00
20	Belanja Modal Alat Bantu Produksi	0,00	0,00	0,00	934.227.100,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
21	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	0,00	0,00	0,00	19.492.000,00
22	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00	545.516.027,10
23	Belanja Modal Peralatan Olahraga	199.395.800,00	199.387.847,06	99,99	228.315.398,00
24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.170.595.000,00	2.115.022.023,00	97,44	2.131.842.376,00
Jumlah		17.733.533.650,00	16.722.365.759,06	94,30	40.880.603.233,10

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin per SKPD disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.34 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin per SKPD TA 2025

No.	Nama Organisasi Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	9.431.074.077,06
2	Dinas Kesehatan	2.703.158.320,00
3	RSUD Ruteng	2.115.022.023,00
4	RSUD Kelas D Pratama Reo	158.637.300,00
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	32.313.600,00
6	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	21.000.000,00
7	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	175.897.380,00
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	91.418.300,00
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	85.817.745,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	55.472.250,00
11	Dinas Perhubungan	93.945.500,00
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	14.000.000,00
13	Dinas Perikanan	18.400.000,00
14	Dinas Peternakan	14.850.000,00
15	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	131.114.001,00
16	Sekretariat Daerah	468.364.929,00
17	Sekretariat DPRD	807.114.000,00
18	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	49.317.300,00
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	86.079.634,00
20	Badan Pendapatan Daerah	59.178.900,00
21	Inspektorat	17.482.500,00
22	Kec. Langke Rembong	35.250.000,00
23	Kec. Ruteng	34.958.000,00
24	Kec. Reok	22.500.000,00
Jumlah		16.722.365.759,06

5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

<u>Anggaran TA 2025</u>	<u>Realisasi TA 2025</u>	<u>Realisasi TA 2024</u>
<u>Rp10.980.360.023,00</u>	<u>Rp10.214.672.090,78</u>	<u>Rp39.089.157.311,00</u>



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp10.214.672.090,78 atau sebesar 93,03% dari anggaran senilai Rp10.980.360.023,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.35 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung Bangunan TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	46.000.000,00
2	Belanja Modal Bangunan Gudang	283.333.521,00	283.180.000,00	99,95	0,00
3	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	528.808.000,00	528.367.018,78	99,92	298.397.956,00
4	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	7.123.625.753,00	6.656.775.573,00	93,45	32.684.374.768,00
5	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	98.750.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	0,00	0,00	0,00	101.622.000,00
7	Belanja Modal Bangunan Terbuka	1.119.243.799,00	1.119.243.799,00	100,00	2.420.340.267,00
8	Belanja Modal Bangunan Industri	0,00	0,00	0,00	3.321.900.600,00
9	Belanja Modal Bangunan Peternakan / Perikanan	853.069.950,00	710.496.000,00	83,29	138.000.000,00
10	Belanja Modal Taman	0,00	0,00	0,00	28.531.760,00
11	Belanja Modal Bangunan Tempat Tinggal Lainnya	618.630.000,00	616.110.900,00	99,59	0,00
12	Belanja Modal Pagar	100.000.000,00	99.944.500,00	99,94	0,00
13	Belanja Modal Tugu/ Tanda Batas Lainnya	25.000.000,00	24.996.400,00	99,99	49.989.960,00
14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	219.899.000,00	165.557.900,00	75,29	0,00
Jumlah		10.980.360.023,00	10.214.672.090,78	93,03	39.089.157.311,00

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan per SKPD TA 2025 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.36 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan per SKPD TA 2025

No.	Nama Organisasi Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	6.656.775.573,00
2	Dinas Kesehatan	738.367.518,78
3	Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng	475.368.300,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.144.240.199,00
5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	383.124.500,00
6	Dinas Perhubungan	10.000.000,00
7	Dinas Perikanan	267.293.100,00
8	Dinas Peternakan	443.202.900,00
9	Kecamatan Reok	96.300.000,0
Jumlah		10.214.672.090,78



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
Rp97.076.650.894,00	Rp90.112.302.024,00	Rp75.324.159.743,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan (JIJ) senilai Rp90.112.302.024,00 atau 92,83% dari anggaran senilai Rp97.076.650.894,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.37 Anggaran dan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Jalan dan Jembatan	79.720.752.940,00	73.338.334.610,00	91,99	58.957.655.022,00
2	Bangunan Air	7.529.046.654,00	7.512.136.828,00	99,78	12.320.243.499,00
3	Instalasi	9.119.309.000,00	8.554.842.836,00	93,81	3.854.218.196,00
4	Jaringan	21.638.300,00	21.638.300,00	100,00	22.023.882,00
5	JIJ BLUD	685.904.000,00	685.349.450,00	99,92	170.019.144,00
	Jumlah	97.076.650.894,00	90.112.302.024,00	92,83	75.324.159.743,00

Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi per SKPD TA 2025 dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.38 Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi per SKPD TA 2025

No.	Nama Organisasi Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	681.879.167,00
2	Dinas Kesehatan	158.465.700,00
3	RSUD Ruteng	685.349.450,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	85.115.940.207,00
5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	149.747.500,00
6	Kecamatan Langke Rembong	2.655.600.000,00
7	Kecamatan Ruteng	200.000.000,00
8	Kecamatan Reok	379.100.000,00
9	Kecamatan Cibai	86.220.000,00
	Jumlah	90.112.302.024,00

5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
Rp7.791.833.400,00	Rp7.791.485.970,00	Rp4.438.870.163,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya (ATL) TA 2025 direalisasikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp7.726.833.400,00 serta pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan senilai Rp64.652.570,00. Belanja Aset Tetap Lainnya dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 5.39 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	7.604.484.660,00	7.606.637.220,00	100,03	3.411.232.970,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
2	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	37.308.850,00	36.308.850,00	97,32	77.513.768,00
3	Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
4	Belanja Modal Musik	47.200.000,00	47.200.000,00	100,00	0,00
5	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	92.021.300,00	90.521.300,00	98,37	140.056.850,00
6	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	10.318.600,00	10.318.600,00	100,00	24.940.500,00
7	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	785.126.075,00
Jumlah		7.791.833.400,00	7.791.485.970,00	99,99	4.438.870.163,00

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya per SKPD dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.40 Rincian Belanja Aset Tetap Lainnya per SKPD TA 2025

No.	Nama Organisasi Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	7.726.833.400,00
2	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	64.652.570,00
Jumlah		7.791.485.970,00

5.1.2.2.6. Belanja Modal Aset Lainnya

<u>Anggaran TA 2025</u>	<u>Realisasi TA 2025</u>	<u>Realisasi TA 2024</u>
Rp150.000.000,00	Rp149.850.000,00	Rp0,00

Belanja Modal Aset Lainnya TA 2025 direalisasikan pada Bagian Organisasi senilai Rp149.850.000,00 dari anggaran senilai Rp150.000.000,00 atau sebesar 99,90%. Belanja Aset Tetap Lainnya tersebut berupa software absensi online pegawai multi-platform yaitu absensi harian yang digunakan oleh semua ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai dengan menggunakan *smartphone* berbasis android atau IOS.

5.1.2.3. Belanja Tidak Terduga

<u>Anggaran TA 2025</u>	<u>Realisasi TA 2025</u>	<u>Realisasi TA 2024</u>
Rp1.325.000.000,00	Rp1.254.970.300,00	Rp667.330.200,00

Belanja Tidak Terduga (BTT) dialokasikan pada APBD dalam rangka penanganan akibat dari bencana alam longsor, banjir dan angin kencang di Kabupaten Manggarai dan pelaksanaan kewenangan daerah lainnya. Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2025 adalah Rp1.254.970.300,00 atau 94,71% dari anggaran senilai Rp1.325.000.000,00. Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp587.640.100,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp667.330.200,00.

5.1.2.4. Belanja Transfer

<u>Anggaran TA 2025</u>	<u>Realisasi TA 2025</u>	<u>Realisasi TA 2024</u>
Rp199.564.294.861,00	Rp195.008.839.321,00	Rp201.701.424.200,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Realisasi Belanja Transfer TA 2025 adalah Rp195.008.839.321,00 atau 97,72% dari anggaran senilai Rp199.564.294.861,00 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 5.41 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Transfer Bagi Hasil ke Desa	5.750.633.461,00	2.802.323.221,00	48,73	4.952.787.580,00
2	Transfer Bantuan Keuangan	193.813.661.400,00	192.206.516.100,00	99,17	196.748.636.620,00
Jumlah		199.564.294.861,00	195.008.839.321,00	97,72	201.701.424.200,00

5.1.2.4.1. Transfer/Bagi Hasil ke Desa

Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
Rp5.750.633.461,00	Rp2.802.323.221,00	Rp4.952.787.580,00

Realisasi Transfer/Bagi Hasil ke Desa berupa Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi senilai Rp2.802.323.221,00 atau sebesar 48,73% dari anggaran senilai Rp5.750.633.461,00. Realisasi 2025 mengalami penurunan senilai Rp2.150.464.359,00 dari tahun 2024. Rincian Transfer/Bagi Hasil ke Desa dijelaskan sebagai berikut.

5.1.2.4.1.1. Bagi Hasil Pajak

Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
Rp4.515.533.621,00	Rp2.272.153.345,00	Rp4.952.787.580,00

Realisasi Bagi Hasil Pajak TA 2025 senilai Rp2.272.153.345,00 atau sebesar 50,32% dari anggaran senilai Rp4.515.533.621,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.42 Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak	4.515.533.621,00	2.272.153.345,00	50,32	4.952.787.580,00
Jumlah		4.515.533.621,00	2.272.153.345,00	50,32	4.952.787.580,00

5.1.2.4.1.2. Bagi Hasil Retribusi

Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
Rp1.235.099.840,00	Rp530.169.876,00	Rp0,00

Realisasi Bagi Hasil Retribusi TA 2025 senilai Rp530.169.876,00 atau sebesar 42,93% dari anggaran senilai Rp1.235.099.840,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.43 Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Retribusi TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Bagi Hasil Retribusi	1.235.099.840,00	530.169.876,00	42,93	0,00
Jumlah		1.235.099.840,00	530.169.876,00	42,93	0,00

Rincian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi TA 2025 disajikan pada **Lampiran 1** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.1.2.4.2. Transfer Bantuan Keuangan

<u>Anggaran TA 2025</u>	<u>Realisasi TA 2025</u>	<u>Realisasi TA 2024</u>
<u>Rp193.813.661.400,00</u>	<u>Rp192.206.516.100,00</u>	<u>Rp196.748.636.620,00</u>

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan merupakan Transfer Bantuan Keuangan ke Desa senilai Rp192.206.516.100,00 atau sebesar 99,17% dari anggaran senilai Rp193.813.661.400,00. Realisasi 2025 mengalami penurunan senilai Rp4.542.120.520,00 dari tahun 2024. Rincian Transfer Bantuan Keuangan dijelaskan sebagai berikut.

5.1.2.4.2.1. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

<u>Anggaran TA 2025</u>	<u>Realisasi TA 2025</u>	<u>Realisasi TA 2024</u>
<u>Rp193.813.661.400,00</u>	<u>Rp192.206.516.100,00</u>	<u>Rp196.748.636.620,00</u>

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa TA 2025 senilai Rp192.206.516.100,00 atau sebesar 99,17% dari anggaran senilai Rp193.813.661.400,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.44 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	123.365.629.000,00	121.758.483.700,00	98,70	0,00
2	Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/ Kota kepada Desa	70.448.032.400,00	70.448.032.400,00	100,00	196.748.636.620,00
Jumlah		193.813.661.400,00	192.206.516.100,00	99,17	196.748.636.620,00

Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa merupakan Bantuan Keuangan kepada Dana Desa yang telah direalisasikan/dialurkan kepada 145 Desa di Kabupaten Manggarai senilai Rp121.758.483.700,00 atau sebesar 98,70% dari anggaran senilai Rp123.365.629.000,00. Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa merupakan Bantuan Keuangan berupa Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah direalisasikan senilai Rp70.448.032.400,00 atau sebesar 100% dari anggaran senilai Rp70.448.032.400,00. Rincian Transfer Bantuan Keuangan ke Desa TA 2025 disajikan pada **Lampiran 2** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

5.1.3. Surplus/(Defisit)

<u>Anggaran TA 2025</u>	<u>Realisasi TA 2025</u>	<u>Realisasi TA 2024</u>
<u>(Rp21.204.540.235,00)</u>	<u>(Rp1.504.097.344,51)</u>	<u>Rp52.398.426.887,25</u>

Realisasi Surplus/Defisit TA 2025 senilai (Rp1.504.097.344,51) atau sebesar 7,09% dari anggaran senilai (Rp21.204.540.235,00). Realisasi Surplus/Defisit TA 2024 senilai Rp52.398.426.887,25.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.1.4. Pembiayaan Daerah

<u>Anggaran TA 2025</u>	<u>Realisasi TA 2025</u>	<u>Realisasi TA 2024</u>
<u>Rp21.204.540.235,00</u>	<u>Rp21.218.071.112,10</u>	<u>(Rp31.184.555.774,33)</u>

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam anggarannya terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Adapun Pembiayaan Netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Realisasi Pembiayaan Netto TA 2025 senilai Rp21.218.071.112,10. Rincian Pembiayaan dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.45 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan	21.204.540.235,00	21.218.071.112,10	100,06	27.206.748.573,66
2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	58.391.304.347,99
Jumlah		21.204.540.235,00	21.218.071.112,10	100,06	(31.184.555.774,33)

5.1.4.1. Penerimaan Pembiayaan

<u>Anggaran TA 2025</u>	<u>Realisasi TA 2025</u>	<u>Realisasi TA 2024</u>
<u>Rp21.204.540.235,00</u>	<u>Rp21.218.071.112,10</u>	<u>Rp27.206.748.573,66</u>

Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Manggarai TA 2025 senilai Rp21.218.071.112,10 atau 100,06% dari yang dianggarkan pada APBD TA 2025 senilai Rp21.204.540.235,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.46 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	21.204.540.235,00	21.218.071.112,10	100,06	27.206.748.573,66
Jumlah		21.204.540.235,00	21.218.071.112,10	100,06	27.206.748.573,66

5.1.4.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

<u>Anggaran TA 2025</u>	<u>Realisasi TA 2025</u>	<u>Realisasi TA 2024</u>
<u>Rp21.204.540.235,00</u>	<u>Rp21.218.071.112,10</u>	<u>Rp27.206.748.573,66</u>

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kabupaten Manggarai TA 2025 senilai Rp21.218.071.112,10 atau 100,06% dari yang dianggarkan pada APBD TA 2025 senilai Rp21.204.540.235,00. Jumlah senilai Rp21.218.071.112,10 merupakan realisasi penerimaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang digunakan di TA 2025.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.1.4.2. Pengeluaran Pembiayaan

Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
Rp0,00	Rp0,00	Rp58.391.304.347,99

Tidak terdapat anggaran dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Manggarai pada TA 2025.

5.1.4.2.1. Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah

Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000.000,00

Tidak terdapat Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah pada Kabupaten Manggarai TA 2025.

5.1.4.2.2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
Rp0,00	Rp0,00	Rp57.391.304.347,99

Tidak terdapat Pembayaran Cicilan Pokok Utang Jatuh Tempo pada TA 2025.

5.1.5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2025 senilai Rp19.713.973.767,59 atau terdapat penurunan senilai Rp1.499.897.345,33 dibandingkan dengan Tahun 2024 senilai Rp21.213.871.112,92.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut.

- Surplus/Defisit	(Rp 1.504.097.344,51)
- Pembiayaan Netto	Rp21.218.071.112,10 +
- Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp19.713.973.767,59

5.2. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan SAL Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal adalah gabungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2025 senilai Rp21.213.871.112,92. Terdapat Penurunan Saldo Anggaran Lebih Awal senilai Rp6.008.665.875,15 jika dibandingkan dengan Saldo Anggaran Lebih Awal tahun 2024 senilai Rp27.222.536.988,07.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun berjalan. Pada tahun 2025 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan senilai Rp21.218.071.112,10.

5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SILPA/SIKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2025 senilai Rp19.713.973.767,59. Terdapat penurunan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran senilai Rp1.499.897.345,33 jika dibandingkan dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2024 senilai Rp21.213.871.112,92.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut.

- Surplus/Defisit Anggaran	(Rp 1.504.097.344,51)
- Pembiayaan Netto	Rp21.218.071.112,10 +
- SILPA Tahun berjalan	Rp19.713.973.767,59

5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya adalah koreksi kesalahan pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya. Pada tahun 2025 terdapat koreksi kesalahan pembukuan pada tahun sebelumnya senilai 4.199.999,18 yang terdiri dari:

1. Koreksi kurang saldo awal Kas Dana BOSP senilai Rp0,82 yang merupakan jasa giro SDI Wontong yang masih tercatat sebagai saldo Kas Dana BOSP namun ternyata sudah disetorkan ke Kas di Kas Daerah pada 29 Desember tahun 2023; dan
2. Koreksi tambah saldo awal Kas Lainnya atas adanya saldo pada rekening giro milik Puskesmas Iteng senilai Rp4.200.000,00 dimana rekening tersebut diluar rekening yang ditetapkan bupati dan tidak dapat ditelusuri sumber dana tersebut.

5.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2025 senilai Rp19.713.973.767,59, sedangkan Saldo Anggaran Lebih Tahun 2024 senilai Rp21.213.871.112,92. Saldo Anggaran Lebih Tahun 2025 terdiri dari :

1. Kas di Kas Daerah	Rp 8.360.767.545,00
2. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 380.800,00
3. Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 0,00
4. Kas di BLUD	Rp 5.299.417.878,67
5. Kas Dana Kapitasi pada FKTP	Rp 2.924.963.789,81
6. Kas Lainnya	Rp 1.136.614.169,78
7. Kas Dana BOSP	Rp 425.125.711,11
8. Kas Dana BOK Puskesmas	Rp 2.690.790.815,00
9. Jumlah (1 s/d 8)	Rp 20.838.060.709,37
10. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	<u>(Rp 1.124.086.941,78)</u>
11. Saldo Anggaran Lebih Tahun 2025 (9 – 11)	Rp 19.713.973.767,59



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.3. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca

5.3.1. Aset

<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
<u>Rp2.088.359.545.967,83</u>	<u>Rp2.058.948.671.872,87</u>

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Jumlah Aset per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp2.088.359.545.967,83 dan Rp 2.058.948.671.872,87. Kenaikan Aset Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024 senilai Rp29.410.874.094,96 atau 1,43%. Jumlah Aset per 31 Desember 2025 dan 2024 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.47 Aset per 31 Desember Tahun 2025 dan Tahun 2024

No.	Aset	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Aset Lancar	48.942.482.952,91	58.563.353.811,97
2	Investasi Jangka Panjang	157.176.084.566,00	156.450.628.582,45
3	Aset Tetap	1.787.222.632.951,74	1.750.096.233.285,34
4	Aset Lainnya	18.401.184.762,14	15.898.873.124,07
5	Properti Investasi	76.617.160.735,04	77.939.583.069,04
Jumlah		2.088.359.545.967,83	2.058.948.671.872,87

5.3.1.1. Aset Lancar

<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
<u>Rp48.942.482.952,91</u>	<u>Rp58.563.353.811,97</u>

Aset Lancar diklasifikasikan jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, serta berupa kas dan setara kas. Aset Lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai yang terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Kas Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), Kas Lainnya, Kas Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Kas Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Lain-Lain PAD yang Sah, Piutang Transfer, Piutang Lainnya, Penyisihan Piutang, Beban Dibayar Dimuka, dan Persediaan.

Jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp48.942.482.952,91 dan Rp58.563.353.811,97. Penurunan Aset Lancar pada Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024 senilai Rp9.620.870.859,06 atau 16,43%. Rincian Aset Lancar Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.48 Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Aset Lancar	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Kas dan Setara kas	20.838.060.709,37	21.346.292.419,09
2	Piutang	29.141.700.850,64	30.794.316.034,77
3	Penyisihan Piutang	(16.627.164.110,94)	(14.598.910.740,11)
4	Beban Dibayar Dimuka	65.041.200,00	5.697.103.257,59
5	Persediaan	15.524.844.303,84	15.324.552.840,63
	Jumlah	48.942.482.952,91	58.563.353.811,97

Kas dan Setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Rincian Kas dan Setara Kas Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 5.49 Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian Kas dan Setara Kas	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	8.360.767.545,00	6.056.991.447,91
2	Kas di Bendahara Penerimaan	380.800,00	112.086.032,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	1.009.694,00
4	Kas di BLUD	5.299.417.878,67	4.367.351.645,52
5	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	2.924.963.789,81	2.408.785.857,26
6	Kas Lainnya	1.136.614.169,78	151.622.291,29
7	Kas Dana BOSP	425.125.711,11	367.824.044,11
8	Kas Dana BOK Puskesmas	2.690.790.815,00	7.880.621.407,00
	Jumlah	20.838.060.709,37	21.346.292.419,09

5.3.1.1.1. Kas di Kas Daerah

31 Desember 2025

Rp8.360.767.545,00

31 Desember 2024

Rp6.056.991.447,91

Kas di Kas Daerah merupakan saldo Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Per 31 Desember 2025 pada PT. Bank NTT Cabang Ruteng, PT. Bank Mandiri Cabang Ruteng, PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ruteng dan PT Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Pembantu Ruteng.

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 senilai Rp8.360.767.545,00 dan per 31 Desember 2024 senilai Rp6.056.991.447,91. Rincian Kas di Kas Daerah pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 pada 4 Rekening BUD adalah sebagai berikut.

Tabel 5.50 Rincian Saldo Kas di Kas Daerah per Rekening TA 2025

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
A.	Saldo Menurut Rekening Koran		
1	Rekening pada Bank NTT	8.051.853.188,39	6.051.968.022,28
1.1	006.01.04000001-0 Rekening Kas Umum Daerah Kab. Manggarai	5.847.983.610,70	5.363.586.730,46
1.2	006.01.04000135-0 Rekening Daerah Penerimaan (Rekening PAD Penerimaan Pemerintah Kabupaten Manggarai)	2.203.869.577,69	688.381.291,82



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uralan		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
2	Rekening pada Bank Mandiri		1.646.101,71	4.982.458,63
2.1	1610002215151	Rekening Penerima Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	1.640.991,60	4.977.348,52
2.2	1610000110804	Rekening yang digunakan untuk Deposito	5.110,11	5.110,11
3	Rekening pada Bank BNI		40.967,00	40.967,00
3.1	0054730749	Rekening yang digunakan untuk Deposito	40.967,00	40.967,00
4	Rekening pada Bank BRI			
4.1	027301000038309	Rekening yang digunakan untuk Deposito	0,00	0,00
4.2	027301002700300	Rekening yang digunakan untuk Penampungan DAU	0,00	0,00
Total Saldo Menurut Rekening Koran			8.053.540.257,10	6.056.991.447,91
B.	Rekonsiliasi Bank			
1	Tambah			
	Koreksi saldo Kas RKUD Tahun 2025 disebabkan karena pada Tahun 2025 Bank NTT lebih mendebet SP2D Nomor 0301/LS/2025		2,00	0,00
	Setoran Penerimaan Pajak tanggal diterima pada tanggal 31 Desember dan baru dibukukan oleh Bank di Bulan Januari 2026		327.527.287,00	0,00
2	Kurang			
	Koreksi Saldo Kas RKUD Tahun 2025 disebabkan karena pada Tahun 2025 Bank NTT kurang mendebet SP2D Nomor 0458/LS/2025		(0,32)	0,00
	Koreksi Saldo Kas RKUD Tahun 2025 disebabkan karena pada Tahun 2025 Bank NTT kurang mendebet SP2D Nomor 0292/LS/2025		(0,39)	0,00
	Koreksi Saldo Kas RKUD Tahun 2025 disebabkan karena pada Tahun 2025 Bank NTT kurang mendebet SP2D Nomor 0292/LS/2025		(0,39)	0,00
	Kesalahan pencatatan penerimaan pada rekening 135 pada Bank NTT yang bukan merupakan penerimaan Pemda		(20.300.000,00)	0,00
Saldo Kas di Kas Daerah Setelah Rekonsiliasi			8.360.767.545,00	6.056.991.447,91

Saldo Kas di Kas Daerah tersimpan pada rekening bank yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor 125 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Manggarai Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekening Giro yang digunakan Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam Pelaksanaan APBD Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai TA.2025. Rincian rekening bank Kas di Kas Daerah adalah sebagai berikut.

1. Pada PT. Bank NTT Cabang Ruteng, terdapat 2 Rekening BUD, yaitu:
 - a. Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai dengan Nomor Rekening: 006.01.04000001-0 merupakan rekening Kas Daerah yang digunakan untuk menampung seluruh transaksi Bendahara Umum Daerah (BUD) yang meliputi penerimaan dana transfer dari Pemerintah Pusat serta pengeluaran atas belanja daerah. Saldo akhir per 31 Desember 2025 senilai Rp5.847.983.610,70.
 - b. Rekening Penerimaan Daerah (Rekening Penampung PAD Pemerintah Kabupaten Manggarai) dengan Nomor Rekening: 006.01.04000135-0,



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

merupakan Rekening Kas Daerah yang digunakan untuk penempatan dana Pemerintah Kabupaten Manggarai, yang meliputi transaksi penerimaan dana transfer dari Pemerintah Provinsi, transaksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai termasuk untuk menampung pendapatan jasa giro yang di-*autodebet*-kan dari Rekening Kas Umum Daerah dan dari seluruh Rekening Giro Bendahara Pengeluaran SKPD. Saldo akhir per 31 Desember 2025 senilai Rp2.203.869.577,69.

2. Pada Bank Mandiri, terdapat dua Rekening BUD, yaitu :
 - a. Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1810002215151 merupakan Rekening Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Pemerintah Kabupaten Manggarai dengan saldo akhir per 31 Desember 2025 senilai Rp1.640.991,60.
 - b. Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1610000110804 merupakan rekening yang digunakan untuk deposito Pemerintah Kabupaten Manggarai. Saldo akhir per 31 Desember 2025 senilai Rp5.110,11.
3. Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) dengan Nomor Rekening 0054730749 merupakan rekening Kas Daerah yang digunakan untuk penempatan deposito Pemerintah Kabupaten Manggarai. Saldo akhir per 31 Desember 2025 senilai Rp40.967,00.
4. Rekening pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) terdapat dua Rekening BUD, yaitu :
 - a. Rekening BRI dengan Nomor Rekening 027301000038309 merupakan rekening Kas daerah yang digunakan untuk penempatan Deposito Pemerintah Kabupaten Manggarai. Saldo akhir per 31 Desember 2025 senilai Rp0,00.
 - b. Rekening BRI dengan Nomor Rekening 027301002700300 merupakan rekening Kas daerah yang digunakan untuk penempatan penampungan DAU yang ditransfer ke Bank Rakyat Indonesia (BRI). Saldo akhir per 31 Desember 2025 senilai Rp0,00.

5.3.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
<u>Rp380.800,00</u>	<u>Rp112.086.032,00</u>

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 senilai Rp380.800, dengan rincian sebagai berikut.

1. Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan senilai Rp380.000,00 atas penerimaan retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga tahun 2025 yang baru disetor pada bulan Januari 2026; dan
2. Kas di Bendahara penerimaan Badan Pendapatan Daerah senilai Rp800,00 juga merupakan penerimaan retribusi kekayaan daerah tahun 2025 yang baru disetor pada bulan Februari 2026.

5.3.1.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran

<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
<u>Rp0,00</u>	<u>Rp1.009.694,00</u>

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 lingkup SKPD Pemerintah Kabupaten Manggarai senilai Rp0,00, sedangkan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tahun 2024 senilai Rp1.009.694,00 terdapat pada Sekretariat DPRD senilai Rp1.000.000,00, Bagian Umum Setda senilai Rp9.693,00, dan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran senilai Rp1,00 telah disetorkan kembali ke Kas Daerah pada tahun 2025.

5.3.1.1.4. Kas di BLUD

<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
<u>Rp5.299.417.878,67</u>	<u>Rp4.367.351.645,52</u>

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2025 senilai Rp5.299.417.878,67 merupakan saldo yang terdapat di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng. Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan senilai Rp932.066.233,15 atau 21,34% dari saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp4.367.351.645,52. Penjelasan mutasi saldo Kas di BLUD sebagai berikut.

Tabel 5.51 Rincian Saldo Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo Awal	4.367.351.645,52
2	Koreksi Saldo Awal	
3	Saldo Awal setelah koreksi (1+2)	4.367.351.645,52
4	Pendapatan	77.593.218.119,15
5	Belanja	76.661.151.886,00
	Pegawai	44.850.000,00
	Barang dan Jasa	73.650.372.513,00
	Modal	2.965.929.373,00
6	Saldo Akhir (3+4-5)	5.299.417.878,67

Laporan Keuangan BLUD RSUD Ruteng *Audited* Tahun 2025 yang telah diperiksa Kantor Akuntan Publik (KAP) disajikan pada **Lampiran 3** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan keuangan ini.

5.3.1.1.5. Kas Dana Kapitasi pada FKTP

<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
<u>Rp2.924.963.789,81</u>	<u>Rp2.408.785.857,26</u>

Saldo Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2025 senilai Rp2.924.963.789,81 merupakan jumlah seluruh saldo rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang terdapat di 25 (dua puluh lima) puskesmas/FKTP milik Pemerintah Kabupaten Manggarai. Rincian Kas Dana Kapitasi pada FKTP TA 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.52 Rincian Kas Dana Kapitasi pada FKTP TA 2025

No.	Nama Puskesmas	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Anam	62.069.676,40	47.353.718,59
2	Bangka Kenda	102.929.725,68	58.416.604,72
3	Bea Mese	82.086.978,20	65.563.546,20
4	Cancar	184.449.071,41	206.753.517,41
5	Dintor	130.839.323,08	35.971.194,86
6	Iteng	55.102.207,96	52.407.197,52
7	Ketang	85.309.103,05	46.880.328,05
8	Kota	384.473.248,89	282.338.831,34



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Nama Puskesmas	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
9	Langgo	25.200.381,00	119.385.927,59
10	Langke Majok	220.066.532,53	256.579.229,89
11	La'o	196.133.018,89	86.124.807,50
12	Loce	111.469.061,54	97.213.070,92
13	Nanu	69.636.139,08	41.135.350,22
14	Narang	59.521.557,37	50.396.848,75
15	Pagal	128.806.558,75	146.481.329,13
16	Ponggeok	122.219.219,13	117.598.108,51
17	Reo	143.975.517,65	132.917.910,94
18	Timung	109.931.868,74	28.352.186,53
19	Todo	35.837.338,53	161.909.267,31
20	Wae Codi	213.081.136,13	50.628.389,17
21	Wae Kajong	66.996.656,47	150.639.317,43
22	Wae Mbeleng	151.243.540,43	102.554.856,51
23	Wangko	156.493.527,51	23.754.180,17
24	Watu Alo	927.905,39	42.241.004,00
25	RS Pratama Reo	26.164.496,00	5.189.134,00
Jumlah		2.924.963.789,81	2.408.785.857,26

Bendahara Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas/FKTP diangkat oleh kepala daerah atas usul kepada SKPD Dinas Kesehatan melalui PPKD selaku BUD. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP membuka rekening Dana Kapitasi JKN yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Pembayaran dana kapitasi JKN dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui Rekening Dana Kapitasi JKN pada setiap Puskesmas/FKTP dan diakui sebagai pendapatan dan belanja setelah diterbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) oleh PPKD selaku BUD.

Penetapan rekening bank Dana Kapitasi JKN pada puskesmas Dinas Kesehatan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 125 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekening Giro yang digunakan Perangkat Daerah/Unit Kerja Dalam Pelaksanaan APBD Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai T.A 2025 yang terdiri dari 25 rekening.

Seluruh rekening JKN tersebut telah dilaporkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pembayaran dana kapitasi dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui Rekening Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP dan diakui sebagai pendapatan. Pendapatan Dana Kapitasi JKN digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP.

5.3.1.1.6. Kas Lainnya

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp1.136.614.169,78	Rp151.622.291,29

Saldo kas lainnya per 31 Desember 2025 senilai Rp1.136.614.169,78 terdiri dari:

1. Utang PFK pada bendahara yang belum disetor antara lain:
 - a. Bendahara BOS SD senilai Rp15.631.150,00;
 - b. Bendahara BOS SMP senilai Rp15.620.788,00;
 - c. Bendahara Dana BOK Puskesmas senilai Rp668.290,00 dan



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- d. Bendahara Dana Kapitasi pada FKTP senilai Rp295.607,00; dan
- e. BUD yang tersimpan pada Rekening Titipan CMS BUD Bank NTT senilai Rp1.089.000.461,10.
2. Saldo dana Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) senilai Rp11.197.873,68.
3. Saldo pada rekening giro milik Puskesmas Iteng senilai Rp4.200.000,00 dimana rekening tersebut diluar rekening yang ditetapkan bupati dan tidak dapat ditelusuri sumber dana tersebut.

5.3.1.1.7. Kas Dana BOSP

<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
<u>Rp425.125.711,11</u>	<u>Rp367.824.044,11</u>

Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2025 senilai Rp425.125.711,11. Saldo tersebut mengalami kenaikan senilai Rp57.301.667,00 atau sebesar 15,58% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp367.824.044,11, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.53 Rincian Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Keterangan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Kas BOS Sekolah Dasar Negeri	263.410.376,02	237.798.393,02
2	Kas BOS Sekolah Menengah Pertama Negeri	161.531.173,49	129.831.489,49
3	Kas BOSP PAUD	151.161,60	161.161,60
4	Kas BOSP Kesetaraan	33.000,00	33.000,00
Jumlah		425.125.711,11	367.824.044,11

Adapun jumlah satuan pendidikan negeri di Kabupaten Manggarai yang menerima dan mengelola Dana BOS pada Tahun 2025 sebanyak 247 sekolah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.54 Rincian Satuan Pendidikan Negeri yang Menerima dan Mengelola Dana BOSP

No.	Status Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah	Keterangan
1	Kas BOS Sekolah Dasar Negeri	69	Dana BOS
2	Kas BOS Sekolah Menengah Pertama Negeri	165	Dana BOS
3	Kas BOSP PAUD	12	Dana BOP PAUD
4	Kas BOSP Kesetaraan	1	Dana BOP Kesetaraan
Jumlah		247	

Rincian saldo akhir Kas Dana BOSP per 31 Desember 2025 disajikan pada **Lampiran 4** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan keuangan ini.

5.3.1.1.8. Kas Dana BOK Puskesmas

<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
<u>Rp2.690.790.815,00</u>	<u>Rp7.880.621.407,00</u>

Saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2025 senilai Rp2.690.790.815,00 merupakan saldo pada 24 puskesmas Kabupaten Manggarai. Dana BOK Puskesmas merupakan dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kesehatan yang digunakan untuk belanja operasional program prioritas



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

upaya kesehatan masyarakat di puskesmas serta mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah di bidang kesehatan guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan

Adapun jumlah puskesmas di Kabupaten Manggarai yang menerima dan mengelola Dana BOK Puskesmas pada tahun 2025 sebanyak 24 Puskesmas, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.55 Rincian Saldo Kas BOK per Puskesmas TA 2025

No.	Puskesmas	31 Desember 2024 (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)
1	Anam	292.654.828,00	314.962.172,00	372.587.054,00	235.029.946,00
2	Bangka Kenda	403.533.472,00	348.195.528,00	678.044.748,00	73.684.252,00
3	Bea Mese	367.128.606,00	341.303.394,00	526.693.014,00	181.738.986,00
4	Cancar	345.141.534,00	375.850.466,00	694.830.000,00	26.162.000,00
5	Dintor	336.520.505,00	480.206.495,00	740.375.000,00	76.352.000,00
6	Iteng	345.656.240,00	523.685.760,00	805.919.000,00	63.423.000,00
7	Kelang	396.852.311,00	584.137.689,00	961.940.391,00	19.049.609,00
8	Kota	409.751.555,00	585.010.445,00	956.501.031,00	38.260.969,00
9	Langgo	314.696.598,00	509.473.402,00	549.443.503,00	274.726.497,00
10	Langke Majok	438.782.109,00	587.554.891,00	833.636.998,00	192.701.002,00
11	La'o	324.102.229,00	521.369.771,00	805.620.832,00	39.851.168,00
12	Loce	439.796.781,00	684.063.219,00	913.094.881,00	210.765.119,00
13	Nanu	301.501.673,00	400.660.327,00	635.018.051,00	67.143.949,00
14	Narang	204.579.700,00	429.224.300,00	566.161.327,00	67.642.673,00
15	Pagal	67.153.486,00	1.182.597.514,00	1.245.239.670,00	4.511.330,00
16	Ponggeok	425.593.185,00	617.722.815,00	940.035.885,00	103.280.115,00
17	Reo	300.538.627,00	821.881.373,00	1.011.709.718,00	110.510.282,00
18	Timung	105.760.086,00	603.836.348,00	670.095.867,00	39.500.567,00
19	Todo	208.756.716,00	536.268.284,00	646.466.672,00	98.559.328,00
20	Wae Codi	554.657.097,00	537.948.903,00	914.053.201,00	178.552.799,00
21.	Wae Kajong	488.882.492,00	201.240.508,00	444.031.206,00	247.091.794,00
22.	Waembeleng	349.781.053,00	442.746.947,00	631.998.306,00	160.529.694,00
23	Wangko	245.655.467,00	852.209.533,00	992.341.064,00	105.523.936,00
24	Watu Alo	212.145.057,00	435.283.943,00	571.229.200,00	76.199.800,00
Jumlah		7.880.621.407,00	12.917.234.027,00	18.107.064.619,00	2.690.790.815,00

5.3.1.1.9. Piutang

5.3.1.1.9.1. Piutang Pajak

31 Desember 2025

Rp19.495.015.309,64

31 Desember 2024

Rp18.320.010.209,64

Piutang Pajak merupakan saldo Piutang Pajak pada Badan Pendapatan Daerah karena adanya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai dan sampai dengan tanggal Neraca belum dibayar oleh Wajib Pajak. Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2025 senilai Rp19.495.015.309,64 mengalami kenaikan mencapai Rp1.175.005.100,00 atau 6,41% dari saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp18.320.010.209,64, dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.56 Rincian Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	Koreksi		Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)			
1	Piutang Pajak Hotel	61.861.399,00	12.985.350,00	0,00	22.958.686,00	14.235.350,00	83.570.085,00
2	Piutang Pajak Restoran	83.182.516,00	17.129.609,00	0,00	26.217.282,00	17.684.609,00	108.844.798,00
3	Piutang Pajak Hiburan	820.500,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	1.320.500,00
4	Piutang Pajak Reklame	131.058.250,00	0,00	0,00	29.919.600,00	0,00	160.977.850,00
5	Piutang Pajak Penerangan Jalan	616.291.161,00	0,00	0,00	667.701.310,00	616.291.161,00	667.701.310,00
6	Piutang Pajak Air Tanah	42.892.061,00	0,00	0,00	1.704.007,00	7.588.251,00	37.007.817,00
7	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	740.574.199,40	177.503.833,00	0,00	548.764.846,00	232.773.307,00	1.234.069.571,40
8	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	16.643.330.123,24	0,00	0,00	1.250.343.610,00	692.150.355,00	17.201.523.378,24
Jumlah		18.320.010.209,64	207.618.792,00	0,00	2.548.109.341,00	1.580.723.033,00	19.495.015.309,64

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 yang tercatat di Neraca merupakan Saldo Piutang Pajak Daerah sebelum Penyisihan Piutang. Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Piutang Pajak Hotel

Saldo Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2025 senilai Rp83.570.085,00 merupakan penjumlahan saldo awal senilai Rp61.861.399,00 ditambah dan dengan koreksi tambah saldo awal senilai Rp12.985.350,00 akibat terdapat kurang catat piutang tahun 2024 ditambah piutang baru tahun berjalan senilai Rp22.958.686,00 dikurangi pelunasan piutang senilai Rp14.235.350,00.

2) Piutang Pajak Restoran

Saldo Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2025 senilai Rp108.844.798,00 merupakan penjumlahan saldo awal senilai Rp83.182.516,00 ditambah koreksi tambah saldo awal senilai Rp17.129.609,00 akibat kurang catat piutang tahun 2024 ditambah dengan piutang baru tahun berjalan senilai Rp26.217.282,00 dikurangi pelunasan/penysetoran piutang senilai Rp17.684.609,00.

3) Piutang Pajak Hiburan

Saldo Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2025 senilai Rp1.320.500,00 merupakan penjumlahan saldo awal senilai Rp820.500,00 ditambah piutang baru tahun berjalan senilai Rp500.000,00.

4) Piutang Pajak Reklame

Saldo Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2025 senilai Rp160.977.850,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

merupakan penjumlahan saldo awal senilai Rp131.058.250,00 ditambah penambahan piutang baru tahun berjalan senilai Rp29.919.600,00.

5) Piutang Pajak Penerangan Jalan

Saldo Piutang Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember 2025 senilai Rp667.701.310,00 merupakan penjumlahan saldo awal senilai Rp616.291.161,00 ditambah piutang baru tahun 2025 senilai Rp667.701.310,00 dikurangi pelunasan piutang tahun sebelumnya senilai Rp616.291.161,00.

6) Piutang Pajak Air Tanah

Saldo Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2025 senilai Rp37.007.817,00 merupakan penjumlahan saldo awal senilai Rp42.892.061,00 ditambah piutang baru tahun berjalan senilai Rp1.704.007,00 dikurangi pelunasan/penyetoran piutang tahun sebelumnya senilai Rp7.588.251,00.

7) Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Saldo Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan per 31 Desember 2025 senilai Rp1.234.069.571,40 merupakan penjumlahan saldo awal senilai Rp740.574.199,40 ditambah koreksi tambah saldo awal senilai Rp177.503.833,00 ditambah piutang baru tahun berjalan senilai Rp548.764.846,00 dikurangi pelunasan/penyetoran piutang tahun sebelumnya senilai Rp232.773.307,00.

8) Piutang PBB-P2

Saldo Piutang PBB P2 per 31 Desember 2025 senilai Rp17.201.523.378,24 merupakan penjumlahan saldo awal senilai Rp16.643.330.123,24 ditambah penambahan piutang tahun berjalan senilai Rp1.250.343.610,00 dikurangi cicilan pelunasan/penyetoran piutang tahun sebelumnya senilai Rp692.150.355,00 dengan rincian sebagai berikut.

- a. Pelunasan/penyetoran atas Piutang PBB P2 Tahun 2013 senilai Rp3.944.185,00;
- b. Pelunasan/penyetoran atas Piutang PBB P2 tahun 2014 senilai Rp18.856.313,00;
- c. Pelunasan/penyetoran atas Piutang PBB P2 tahun 2015 senilai Rp42.460.839,00;
- d. Pelunasan/penyetoran atas Piutang PBB P2 tahun 2016 senilai Rp38.473.523,00;
- e. Pelunasan/penyetoran atas Piutang PBB P2 tahun 2017 senilai Rp27.321.147,00;
- f. Pelunasan/penyetoran atas Piutang PBB P2 tahun 2018 senilai Rp21.037.260,00;
- g. Pelunasan/penyetoran piutang PBB P2 Tahun 2019 senilai Rp33.293.371,00;
- h. Pelunasan/penyetoran piutang PBB P2 Tahun 2020 senilai Rp47.323.712,00;
- i. Pelunasan/penyetoran piutang PBB P2 Tahun 2021 senilai Rp46.620.439,00;
- j. Pelunasan/penyetoran piutang PBB P2 Tahun 2022 senilai Rp45.321.686,00;
- k. Pelunasan/penyetoran piutang PBB P2 Tahun 2023 senilai Rp77.521.488,00; dan
- l. Pelunasan/penyetoran piutang PBB P2 Tahun 2024 senilai Rp289.976.392,00.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.3.1.1.9.2. Piutang Retribusi

31 Desember 2025

31 Desember 2024

Rp3.778.783.753,00

Rp3.157.516.873,00

Saldo Piutang Retribusi merupakan saldo Piutang Retribusi Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai per 31 Desember 2025 senilai Rp3.778.783.753,00. Piutang Retribusi TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp621.266.880,00 dari saldo Piutang Retribusi TA 2024 senilai Rp3.157.516.873,00.

Tabel 5.57 Rincian Piutang Retribusi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Jenis Piutang	Saldo Awal (Rp)	Koreksi Saldo Awal (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	Retribusi Shopping Center	29.741.625,00	0,00	23.622.000,00	20.541.000,00	32.822.625,00
2	Retribusi Ruko	156.336.000,00	0,00	117.495.000,00	99.495.000,00	174.336.000,00
3	Retribusi Pasar Rakyat	46.587.500,00	0,00	36.000.000,00	15.400.000,00	67.187.500,00
4	Retribusi Rumah Dinas	243.720.850,00	6.793.800,00	38.823.200,00	38.178.600,00	262.159.250,00
5	Retribusi Pasar	2.681.130.898,00	0,00	957.022.370,00	385.874.890,00	3.252.278.378,00
6	Sewa Tanah	0,00	8.678.500,00	0,00	8.678.500,00	0,00
Jumlah		3.157.516.873,00	15.472.300,00	1.173.962.570,00	568.167.990,00	3.778.783.753,00

Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 yang tercatat di Neraca merupakan Saldo Piutang Retribusi Daerah sebelum Penyisihan Piutang. Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Piutang Retribusi Shopping Center

Saldo Piutang Retribusi *Shopping Center* per 31 Desember 2025 senilai Rp32.822.625,00 merupakan penjumlahan saldo awal senilai Rp29.741.625,00 ditambah dengan penambahan piutang tahun berjalan senilai Rp23.622.000,00 dikurangi cicilan pelunasan/penyetoran piutang Retribusi *Shopping Center* senilai Rp20.541.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

- Pelunasan Piutang Retribusi *Shopping Center* Tahun 2024 senilai Rp20.541.000,00; dan
- Penambahan Piutang Retribusi *Shopping Center* Tahun 2025 senilai Rp23.622.000,00.

2) Piutang Retribusi Ruko

Saldo Piutang Retribusi Ruko per 31 Desember 2025 senilai Rp174.336.000,00 merupakan penjumlahan saldo awal senilai Rp156.336.000,00 ditambah penambahan piutang tahun berjalan senilai Rp117.495.000,00 dikurangi cicilan pelunasan/penyetoran piutang Retribusi Ruko senilai Rp99.495.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

- Pelunasan Piutang Retribusi Ruko Tahun 2024 senilai Rp 99.495.000,00; dan



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- b. Penambahan Piutang Retribusi Ruko Tahun 2025 senilai Rp117.495.000,00.
- 3) Piutang Retribusi Pasar Rakyat
Saldo Piutang Retribusi Pasar Rakyat per 31 Desember 2025 senilai Rp67.187.500,00 merupakan penjumlahan saldo awal senilai Rp46.587.500,00 ditambah penambahan piutang tahun berjalan senilai Rp36.000.000,00 dikurangi cicilan pelunasan/penyetoran piutang Retribusi Pasar Rakyat senilai Rp15.400.000,00, dengan rincian sebagai berikut.
- a. Pelunasan Piutang Retribusi Pasar Rakyat Tahun 2024 senilai Rp15.400.000,00; dan
- b. Penambahan piutang baru Retribusi Pasar Rakyat TA 2025 senilai Rp36.000.000,00.
- 4) Piutang Retribusi Rumah Dinas
Saldo Piutang Retribusi Rumah Dinas per 31 Desember 2025 senilai Rp252.159.250,00 merupakan penjumlahan saldo awal senilai Rp243.720.850,00 ditambah koreksi saldo awal akibat kurang catat piutang tahun 2024 senilai Rp6.793.800,00 ditambah penambahan piutang tahun berjalan senilai Rp39.823.200,00 dikurangi cicilan pelunasan/penyetoran piutang Retribusi Rumah Dinas senilai Rp38.178.600,00, dengan rincian sebagai berikut.
- a. Pelunasan Piutang Retribusi Rumah Dinas tahun 2024 senilai Rp28.018.500,00, tahun 2022 senilai Rp2.514.600,00, tahun 2018 senilai Rp3.048.000,00, tahun 2016 senilai Rp2.989.500,00, tahun 2014 senilai Rp1.608.000,00; dan
- b. Penambahan Piutang baru Retribusi Rumah Dinas tahun 2025 senilai Rp39.823.200,00.
- 5) Piutang Retribusi Pasar
Saldo piutang pasar per 31 Desember 2025 senilai Rp3.252.278.378,00 merupakan penjumlahan saldo awal senilai Rp2.681.130.898,00 ditambah dengan penambahan piutang baru di tahun berjalan senilai Rp957.022.370,00 dan dikurangi dengan pelunasan piutang di tahun 2025 senilai Rp385.874.890,00, dengan rincian sebagai berikut.
- a. Pelunasan Piutang Retribusi Pasar tahun 2024 senilai Rp254.276.420,00, tahun 2023 senilai Rp41.646.300,00, tahun 2022 senilai Rp84.327.270,00, tahun 2021 senilai Rp5.624.900,00; dan
- b. Penambahan piutang baru Retribusi Pasar tahun 2025 senilai Rp957.022.370,00.
- 6) Piutang Sewa Tanah
Pada tahun 2025 tidak terdapat saldo awal piutang sewa tanah, namun terdapat penambahan koreksi saldo awal akibat kurang catat piutang pada tahun 2024 senilai Rp8.678.500,00, kemudian atas piutang tersebut telah dilakukan pelunasan seluruhnya senilai Rp8.678.500,00.

5.3.1.1.9.3. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp1.759.272.792,00	Rp8.151.304.478,13

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah Dacrah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja, Bagian



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Bagian Umum, Badan Pendapatan Daerah dan RSUD Ruteng Kabupaten Manggarai per 31 Desember 2025 senilai Rp1.759.272.792,00 mengalami penurunan senilai Rp6.392.031.686,13 atau 78,42% dari saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp8.151.304.478,13.

Tabel 5.58 Daftar Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2025

No.	OPD	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Monongah dan Tenaga Kerja	Dana Bergulir	298.585.913,00	0,00	0,00	298.585.913,00
2	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Dana Bergulir	155.403.920,00	0,00	0,00	155.403.920,00
3	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dana Bergulir	200.950.297,00	0,00	0,00	200.950.297,00
4	Dinas Perikanan	Dana Bergulir	14.883.552,00	0,00	0,00	14.883.552,00
5	Bagian Umum	Dana Bergulir	21.244.273,00	0,00	0,00	21.244.273,00
6	Badan Pendapatan Daerah	Piutang Bunga Deposito TA. 2012 dan TA. 2013	5.515.068,00	0,00	0,00	5.515.068,00
7	Badan Pendapatan Daerah	Piutang dari Penjualan Kendaraan Dinas	57.078.410,00	0,00	0,00	57.078.410,00
8	Badan Pendapatan Daerah	Piutang Sisa Hasil Likuidasi PD Komodo Jaya	339.494.500,00	0,00	0,00	339.494.500,00
9	Badan Pendapatan Daerah	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	228.455.036,04	0,00	189.264.823,04	39.190.413,00
10	Badan Pendapatan Daerah	Piutang Atas Kelebihan Pembayaran PPh 21 atas Selisih Perhitungan PTKP	90.025.298,00	0,00	63.153.814,00	26.871.484,00
11	RSUD Ruteng	Piutang BLUD	5.711.603.248,00	357.721.614,00	5.469.249.900,00	600.074.962,00
12	Badan Pendapatan Daerah	Piutang Pendapatan Bunga	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Jumlah			7.123.221.985,04	357.721.614,00	5.721.670.787,04	1.759.272.792,00

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 yang tercatat di Neraca merupakan Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebelum Penyisihan Piutang. Mutasi pada saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Saldo Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan senilai Rp39.190.413,00 merupakan saldo awal senilai Rp228.455.036,04 dikurangi pelunasan piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan senilai Rp189.264.623,04;
- 2) Piutang Atas Kelebihan Pembayaran PPh 21 atas Selisih Perhitungan PTKP
Saldo Piutang Atas Kelebihan Pembayaran PPh Psl 21 atas Selisih Perhitungan PTKP pada Badan Pendapatan Daerah per 31 Desember 2025 senilai



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Rp26.871.484,00 merupakan saldo awal senilai Rp90.025.298,00 dikurangi dengan Pengurangan Piutang atas Kompensasi Kelebihan Penyetoran PPh Pasal 21 yang telah direstitusi senilai Rp63.153.814,00;

3) Piutang BLUD

Saldo Piutang BLUD pada RSUD Ruteng per 31 Desember 2025 senilai Rp600.074.962,00 merupakan penjumlahan saldo awal senilai Rp5.711.603.248,00 ditambah dengan piutang baru di tahun berjalan senilai Rp357.721.614,00 yang terdiri dari:

- a) Piutang hemodialisa pada pihak ketiga senilai Rp120.611.775,00;
- b) Piutang pasien umum senilai Rp102.620.939,00; dan
- c) Piutang BPJS senilai Rp134.488.900,00.

serta pengurangan pelunasan piutang senilai Rp5.469.249.900,00 yang terdiri dari:

- a) Piutang BPJS senilai Rp1.822.345.300,00; dan
- b) Piutang jasa pelayanan senilai Rp3.646.904.600,00.

4) Piutang Pendapatan Bunga

Saldo Piutang Pendapatan Bunga per 31 Desember 2025 senilai Rp0,00 merupakan saldo awal Piutang Pendapatan Bunga atas TDF senilai Rp2.450,00 dikurangi penerimaan bunga atas TDF Tahun 2024 senilai Rp2.450,00.

5.3.1.1.9.4. Piutang Transfer Pemerintah Pusat

31 Desember 2025

31 Desember 2024

Rp3.291.697.000,00

Rp0,00

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2025 senilai Rp3.291.697.000,00 merupakan Piutang Dana Transfer Umum - DBH dari Pemerintah Pusat berdasarkan PMK 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025 senilai Rp3.291.697.000,00. Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut.

Tabel 5.59 Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat/Piutang Dana Porimbangan

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 21	1.415.913.000,00	0,00
2	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	366.163.000,00	0,00
3	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PBB	874.934.000,00	0,00
4	Piutang Dana Transfer Umum-DBH CHT	120.904.000,00	0,00
5	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	14.756.000,00	0,00
6	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	1.429.000,00	0,00
7	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	494.778.000,00	0,00
8	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-PSDH	2.820.000,00	0,00
Jumlah		3.291.697.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.3.1.1.9.5. Piutang Transfer Antar Daerah

31 Desember 2025	31 Desember 2024
<u>Rp816.931.996,00</u>	<u>Rp754.935.274,00</u>

Saldo Piutang Transfer per 31 Desember 2025 senilai Rp816.931.996,00 merupakan piutang transfer Bagi Hasil yang belum ditransfer pada Tahun 2025. Rincian Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi NTT, sebagai berikut.

Tabel 5.60 Rincian Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi

No.	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang/Polunasan (Rp)	Saldo akhir (Rp)
1	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	(574.284.286,00)	674.163.222,00	(574.284.286,00)	674.163.222,00
2	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	(117.053.936)	0,00	(117.053.936,00)	0,00
3	Piutang Bagi Hasil Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.432.739.234,00	0,00	1.290.161.277,00	142.577.957,00
4	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	13.534.262,00	190.817,00	13.534.262,00	190.817,00
	Jumlah	754.935.274,00	674.354.039,00	1.994.842.944,00	816.931.996,00

5.3.1.1.9.6. Piutang Lainnya

31 Desember 2025	31 Desember 2024
<u>Rp0,00</u>	<u>Rp410.549.200,00</u>

Saldo Piutang Lainnya TA 2025 senilai Rp0,00 sedangkan Tahun 2024 senilai Rp410.549.200,00 merupakan Piutang Dana Non Kapitasi BPJS Kesehatan pada 25 Puskesmas dan Rumah Sakit Pratama Reo atas Klaim bulan November dan Desember TA. 2024 yang telah dibayarkan pada Tahun 2025.

5.3.1.1.10. Penyisihan Piutang

31 Desember 2025	31 Desember 2024
<u>(Rp16.627.164.110,94)</u>	<u>(Rp14.598.910.740,11)</u>

Penyisihan piutang yang dilakukan merupakan taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 senilai (Rp16.627.164.110,94) dan per 31 Desember 2024 senilai (Rp14.598.910.740,11), disajikan sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.61 Rincian Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
A.	Penyisihan Piutang Pendapatan	(16.627.164.110,94)	(14.596.857.994,11)
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(11.915.293.718,26)	(10.677.454.517,01)
2	Penyisihan Piutang Retribusi	(3.023.243.328,00)	(2.557.160.191,00)
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah	(1.341.827.798,78)	(1.358.468.609,73)
4	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	(329.169.700,00)	0,00
4	Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	(17.629.565,90)	(3.774.676,37)
B.	Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	(2.052.746,00)
1	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang	0,00	(2.052.746,00)
Jumlah		(16.627.164.110,94)	(14.598.910.740,11)

Rincian Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 disajikan pada **Lampiran 5** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

1. Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Jumlah senilai (Rp11.915.293.718,26) dan (Rp10.677.454.517,01) merupakan saldo Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.62 Rincian Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	Piutang 2025 (Rp)	Kualitas Piutang	Penyisihan (Rp)
1	Piutang Pajak Hotel	83.570.085,00		22.396.092,93
	1 Lancar	22.958.686,00	0,5	114.793,43
	2 Kurang Lancar	27.936.000,00	10	2.793.600,00
	3 Diragukan	26.375.399,00	50	13.187.699,50
	4 Macet	6.300.000,00	100	6.300.000,00
2	Piutang Pajak Restoran	108.844.798,00		29.688.638,01
	1 Lancar	26.837.282,00	0,5	134.186,41
	2 Kurang Lancar	52.467.016,00	10	5.246.701,60
	3 Diragukan	10.465.500,00	50	5.232.750,00
	4 Macet	19.075.000	100	19.075.000,00
3	Piutang Hiburan	1.320.500,00		823.000,00
	1 Lancar	500.000,00	0,5	2.500,00
	2 Kurang Lancar	0,00	10	0,00
	3 Diragukan	0,00	50	0,00
	4 Macet	820.500,00	100	820.500,00
4	Piutang Pajak Reklame	160.977.850,00		91.252.348,00
	1 Lancar	29.919.600,00	0,5	149.598,00
	2 Kurang Lancar	11.485.000,00	10	1.148.500,00
	3 Diragukan	59.238.000,00	50	29.619.000,00
	4 Macet	60.335.250,00	100	60.335.250,00
5	Piutang Pajak Air Tanah	37.007.817,00		3.538.901,04
	1 Kualitas Lancar	1.704.007,00	0,5	8.520,04
	2 Kurang Lancar	35.303.810,00	10	3.530.381,00
	3 Diragukan	0,00	50	0,00
	4 Macet	0,00	100	0,00
6	Pajak Penerangan Jalan-Ponorangan Jalan Sumber Lain	667.701.310,00		3.338.816,56
	1 Lancar	667.701.310,00	0,5	3.338.816,56



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uralan	Piutang 2025 (Rp)	Kualitas Piutang	Ponyisihan (Rp)
7	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.234.069.571,40		575.711.723,03
	1 Lancar	548.764.846,00	0,5	2.743.824,23
	2 Kurang Lancar	86.353.539,00	10	8.635.353,90
	3 Diragukan	69.237.283,00	50	34.618.641,50
	4 Macet	529.713.903,40	100	529.713.903,40
8	Piutang PBB	17.201.523.378,24		11.188.544.198,69
	1 Lancar	1.250.343.610,00	0,5	6.251.718,05
	2 Kurang Lancar	2.538.814.139,00	10	253.881.413,90
	3 Diragukan	4.968.125.301,00	50	2.484.062.650,50
	4 Macet	8.444.240.328,24	100	8.444.348.416,24
Jumlah		19.495.015.309,64		11.915.293.718,26

2. Penyisihan Piutang Retribusi

Jumlah senilai (Rp3.023.243.328,00) dan (Rp2.557.160.191,00) merupakan saldo penyisihan piutang Retribusi per 31 Desember 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.63 Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uralan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Piutang Retribusi Rumah Dinas	12.795.225,00	223.780.900,00
2	Piutang Retribusi <i>Shopping Center</i>	88.053.300,00	11.254.725,00
3	Piutang Retribusi Pasar	40.427.500,00	2.210.373.766,00
4	Piutang Retribusi Ruko	232.247.650,00	86.253.300,00
5	Piutang Retribusi Pasar Rakyat	2.649.719.653,00	25.497.500,00
Jumlah		3.023.243.328,00	2.557.160.191,00

Selanjutnya, rincian penyisihan Piutang Retribusi berdasarkan umur pokok piutang (*aging schedule*) disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.64 Rincian Penyisihan Piutang Retribusi Berdasarkan Umur Pokok Piutang

No.	Umur Piutang (Penetapan)	Pokok Piutang per 31 Desember 2025 (Rp)	Persentase Penyisihan	Jumlah Penyisihan Pokok Piutang (Rp)	Nilai Bersih Pokok Piutang (Rp)
1	<1 bulan	0,00	0,01	0,00	0,00
2	1 - 3 bulan	421.397.850,00	0,10	42.139.785,00	379.258.065,00
3	3 - 12 bulan	752.564.720,00	0,50	376.282.360,00	376.282.360,00
4	>12 bulan	2.604.821.183,00	1,00	2.604.821.183,00	0,00
Jumlah		3.778.783.753,00		3.023.243.328,00	755.540.425,00

3. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Jumlah senilai (Rp1.341.827.798,78) dan (Rp1.358.468.609,73) merupakan Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.65 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah TA 2025 dan 2024

No.	Nama Organisasi Perangkat Daerah	Piutang	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	Dana Bergulir	298.565.913,00	298.565.913,00
2	Bagian Perencanaan dan Sumber Daya Alam	Dana Bergulir	155.403.920,00	155.403.920,00
3	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dana Bergulir	200.950.297,00	200.950.297,00
4	Dinas Perikanan	Dana Bergulir	14.883.552,00	14.883.552,00
5	Bagian Umum	Dana Bergulir	21.244.273,00	21.244.273,00
6	Badan Pendapatan Daerah	Piutang Bunga Deposito TA. 2012 dan TA. 2013	5.515.088,00	5.515.088,00
7	Badan Pendapatan Daerah	Piutang dari Penjualan Kendaraan Dinas	57.078.410,00	57.078.410,00
8	Badan Pendapatan Daerah	Piutang Sisa Hasil Likuidasi PD Komodo Jaya	339.494.500,00	339.494.500,00
9	Badan Pendapatan Daerah	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	3.919.041,30	4.865.364,42
10	Badan Pendapatan Daerah	Piutang Atas Kelebihan Pembayaran PPh 21 atas Sellsih Perhitungan PTKP	2.687.148,40	460.126,49
11	RSUD Ruteng	Piutang BLUD	242.085.676,07	254.876.761,00
12	Badan Pendapatan Daerah	Piutang Pendapatan dari pengembalian	0,00	5.140.412,57
13	Badan Pendapatan Daerah	Piutang Pendapatan Bunga	0,00	12,25
Jumlah			1.341.827.798,77	1.358.468.609,73

4. Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2025 senilai (Rp329.169.700,00) dan Tahun 2024 senilai (Rp0,00) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.66 Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Penyisihan Piutang DBH PBB	(87.493.400,00)	0,00
2	Penyisihan Piutang DBH PPh Pasal 21	(141.591.300,00)	0,00
3	Penyisihan Piutang DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPON	(36.616.300,00)	0,00
4	Penyisihan Piutang DBH CHT	(12.090.400,00)	0,00
5	Penyisihan Piutang DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	(49.477.800,00)	0,00
6	Penyisihan Piutang DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	(1.475.600,00)	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
7	Penyisihan Piutang DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	(142.900,00)	0,00
8	Penyisihan Piutang DBH SDA Kehutanan-PSDH	(282.000,00)	0,00
Jumlah		(329.169.700,00)	(0,00)

5. Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah

Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2025 senilai (Rp17.629.565,90) dan Tahun 2024 senilai (Rp3.774.676,37) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.67 Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	(3.370.816,11)	2.871.421,43
2	Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	585.269,68
3	Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	(14.257.795,70)	(7.163.696,17)
4	Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	(954,09)	(67.671,31)
Jumlah		(17.629.565,90)	(3.774.676,37)

6. Penyisihan Piutang Lainnya

Penyisihan Piutang Lainnya Tahun 2025 senilai Rp0,00 dan Tahun 2024 senilai (Rp2.052.746,00) yang berupa Piutang Klaim BPJS Dana Non Kapitasi Puskesmas dengan kategori lancar yang telah dibayarkan pada Tahun 2025.

5.3.1.1.11. Beban Dibayar Dimuka

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp65.041.200,00	Rp5.697.103.257,59

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 senilai Rp65.041.200,00 dan Rp5.697.103.257,59. Rincian Beban Dibayar Dimuka dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.68 Tabel Rincian Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Beban Dibayar Dimuka	64.789.200,00	0.00
2	Jasa Dibayar Dimuka	252.000,00	2.161.600,00
3.	Hibah Dibayar Dimuka	0,00	5.694.941.657,59
Jumlah		65.041.200,00	5.697.103.257,59

Beban Dibayar Dimuka Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Beban Dibayar Dimuka merupakan pembayaran atas pembelian barang senilai Rp64.789.200,00 namun sampai dengan 31 Desember 2025, fisik barang belum diterima;



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

2. Jasa Dibayar Dimuka merupakan kelebihan pembayaran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemerintah Kabupaten Manggarai senilai Rp84.00,00 dan PBI (Jamkesda) senilai Rp168.00,00.

Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Manggarai mencatat Beban Dibayar Dimuka dengan rincian sebagai berikut.

1. Beban Dibayar Dimuka atas pengembalian Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat yaitu KPU dan Bawaslu senilai Rp5.694.941.657,59 yang telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 09 April 2025; dan
2. Jasa atas Pembayaran PBPU senilai Rp2.161.600,00. Beban Dibayar Dimuka atas Jasa Pembayaran PBPU terdapat koreksi tambah saldo awal senilai Rp592.200,00 karena terdapat kesalahan pencatatan Beban Dibayar Dimuka tahun yang lalu, dan atas Beban Dibayar Dimuka tersebut, tagihannya telah dibayarkan kepada BPJS pada tanggal 10 April 2025 dengan SP2D nomor: 53.10/04.0/000017/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/M/4/2025.

5.3.1.1.12. Persediaan

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp15.524.844.303,84	Rp15.324.552.840,63

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 senilai Rp15.524.844.303,84 dan per 31 Desember 2024 senilai Rp15.324.552.840,63 merupakan saldo Persediaan Pemerintah Kabupaten Manggarai pada SKPD. Rincian saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.69 Rincian Saldo Persediaan TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
A.	Bahan	87.308.606,10	420.569.718,93
1	Bahan Kimia	15.212.405,00	86.523.000,00
2	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	4.150.000,00	1.400.000,00
3	Bahan Lainnya	67.946.201,10	332.646.718,93
B	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	3.610.888.628,79	7.875.061.663,86
1	Alat Tulis Kantor	916.800,00	3.215.000,00
2	Kertas dan Cover	1.337.600,00	5.076.000,00
3	Bahan Celak	364.193.500,00	391.725.500,00
4	Perabot kantor	26.071.740,00	0,00
5	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.218.368.988,79	7.475.045.163,86
C	Obat-Obatan	11.188.464.068,95	6.710.316.457,84
1	Obat	11.054.557.522,70	6.475.548.952,84
2	Obat-obatan Lainnya	133.906.546,25	234.767.505,00
D	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	302.903.000,00	107.300.000,00
1	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	302.903.000,00	107.300.000,00
E.	Persediaan untuk Tujuan Strategis/ Berjaga-jaga	74.060.000,00	0,00
F.	Natura dan Pakan	261.220.000,00	211.305.000,00
1	Pakan	261.220.000,00	211.305.000,00
Jumlah		15.524.844.303,84	15.324.552.840,63



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Rincian saldo persediaan per SKPD disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.70 Persediaan per SKPD TA 2025

No.	Nama Organisasi Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	9.351.043.728,70
2	RSUD Ruteng	4.857.474.902,79
3	Dinas Perikanan	188.308.000,00
4	Dinas Peternakan	591.862.092,00
5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	96.757.405,00
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	215.563.500,00
7	Dinas Perhubungan	33.700.000,00
8	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.254.400,00
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	39.080.000,00
10	Badan Pendapatan Daerah	75.850.000,00
11	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	72.950.275,35
Jumlah		15.524.844.303,84

Selanjutnya, penjelasan atas saldo Persediaan pada masing-masing SKPD per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

- Persediaan pada Dinas Kesehatan senilai Rp9.351.043.728,70 terdiri dari:
 - Persediaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) senilai Rp5.273.058.377,34; dan
 - Persediaan Obat senilai Rp4.077.985.351,36.
- Persediaan pada RSUD Ruteng senilai Rp4.857.474.902,79,00 terdiri dari:
 - Persediaan Alat Kesehatan senilai Rp1.905.046.233,00;
 - Persediaan Barang Habis Pakai senilai Rp1.618.683.994,00;
 - Persediaan Obat senilai Rp1.313.322.755,79, dan
 - Persediaan Obat Lainnya berupa obat covid senilai Rp20.421.920,00.
- Persediaan pada Dinas Perikanan senilai Rp188.308.000,00 terdiri dari;
 - Persediaan Pakan ikan senilai Rp169.858.000,00
 - Persediaan Ikan senilai Rp14.300.000,00;
 - Persediaan Benih Ikan senilai Rp2.500.000,00; dan
 - Persediaan Calon Induk Ikan senilai Rp1.650.000,00.
- Persediaan pada Dinas Peternakan senilai Rp591.862.092,00 terdiri dari:
 - Persediaan Obat-obatan senilai Rp84.829.800,00;
 - Persediaan Obat-obatan Lainnya senilai Rp108.480.552,00;
 - Persediaan Anak Babi senilai Rp37.200.000,00;
 - Persediaan Pakan senilai Rp261.220.000,00;
 - Persediaan Vaksin senilai Rp74.060.000,00;
 - Persediaan Peralatan Kandang dan UPTD senilai Rp26.071.740,00
- Persediaan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp96.757.405,00 merupakan persediaan bahan kimia.
- Persediaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp215.563.500,00 merupakan persediaan bahan cetak.
- Persediaan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp33.700.000,00 merupakan persediaan buku cetak bukti lulus uji.
- Persediaan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebesar Rp2.254.400,00 merupakan persediaan Alat Tulis Kantor.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

9. Persediaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp39.080.000,00 merupakan persediaan bahan cetakan.
10. Persediaan pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp75.850.000,00 merupakan persediaan bahan cetak PBB dan BPHTB.
11. Persediaan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp72.950.275,35 terdiri dari :
 - a. Persediaan alat kontrasepsi senilai Rp47.195.406,10;
 - b. Persediaan Bahan-bahan lainnya Rp20.750.795,00; dan
 - c. Persediaan Bahan Habis Pakai berupa obat-obatan Rp5.004.074,25.

5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp157.176.084.566,00	Rp156.450.628.582,45

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari dua belas bulan. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu investasi permanen dan investasi non permanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp157.176.084.566,00 dan Rp156.450.628.585,45 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.71 Rincian Investasi Jangka Panjang TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1.	Investasi Jangka Panjang Non Permanen (Dana Bergulir)	3.320.516.449,00	3.320.516.449,00
2.	Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen	(3.320.516.449,00)	(3.320.516.449,00)
3.	Investasi Jangka Panjang Permanen	157.176.084.566,00	156.450.628.582,45
	Jumlah	157.176.084.566,00	156.450.628.582,45

5.3.1.2.1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp0,00	Rp0,00

Investasi Jangka Panjang Non Permanen per 31 Desember 2025 dan 2024 senilai Rp0,00. Investasi Jangka Panjang Non Permanen tersebut berasal dari nilai bersih Dana Bergulir dikurangi nilai Penyisihan Investasi dengan rincian sebagai berikut.

5.3.1.2.1.1. Dana Bergulir

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp3.320.516.449,00	Rp3.320.516.449,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Investasi Jangka Panjang Non Permanen - Dana Bergulir Per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.320.516.449,00 dan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.320.516.449,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.72 Rekapitulasi Investasi Jangka Panjang TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	Total Investasi 2024 (Rp)	Pengembalian Pokok TA 2024 (Rp)	Total Investasi TA 2025 (Rp)	Kualitas Macet (100%) (Rp)
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	1.797.835.956,00	0,00	1.797.835.956,00	1.797.835.956,00
2	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	594.558.725,00	0,00	594.558.725,00	594.558.725,00
3	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	813.617.168,00	0,00	813.617.168,00	813.617.168,00
4	Dinas Perikanan	114.504.600,00	0,00	114.504.600,00	114.504.600,00
Jumlah		3.320.516.449,00	0,00	3.320.516.449,00	3.320.516.449,00

Rincian Dana Bergulir dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja

Investasi Non Permanen pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Tenaga Kerja per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah senilai Rp1.797.835.956,00 dan Rp1.797.835.956,00. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Tenaga Kerja mengelola dana bergulir dengan mekanisme menggulirkan pengembalian pokok dana bergulir dan menyetorkan ke Kas Daerah atas pengembalian bunga dana bergulir dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.73 Rincian Dana Bergulir pada Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	Pengembalian (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Dana bergulir pada Bidang UKM	1.009.316.343,00	0,00	1.009.316.343,00
2	Dana bergulir KSP-USP- UBSP	522.694.613,00	0,00	522.694.613,00
3	Dana bergulir Binkop dan Penyanga Pangan	265.825.000,00	0,00	265.825.000,00
Jumlah		1.797.835.956,00	0,00	1.797.835.956,00

2. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Investasi Non Permanen pada Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah senilai Rp594.558.725,00 terdiri dari Dana Bergulir Penanggulangan masalah Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) dan Dana Bergulir Pembinaan Industri Kecil. Dana bergulir berasal dari pengeluaran pemerintah TA. 2001. Khusus untuk Dana Bergulir Pembinaan Industri Kecil telah digulirkan kembali pada tahun 2002, 2003, dan 2004 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.74 Rincian Dana Bergulir pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	Pengembalian (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Dana bergulir penanggulangan masalah GAKY	188.016.125,00	0,00	188.016.125,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uralan	31 Desember 2025 (Rp)	Pengembalian (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
2	Dana bergulir pembinaan Industri kecil (dana segar)	408.542.600,00	0,00	408.542.600,00
	Jumlah	594.558.725,00	0,00	594.558.725,00

Dalam usaha melakukan perbaikan penatausahaan dana bergulir, Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Dacrah telah melakukan pendataan domisili para peminjam dana bergulir termasuk mengidentifikasi para penerima dana bergulir yang tinggal di Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Manggarai Barat.

3. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Investasi Non Permanen pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah senilai Rp813.617.168,00 dan Rp813.617.168,00, dana tersebut merupakan pinjaman modal agribisnis padi sawah yang disalurkan dari tahun 2001 s.d. 2008. Pinjaman modal tersebut bukan merupakan dana bergulir sehingga pengembalian pokok dan bunga disetorkan ke Kas Dacrah. Rincian data penyaluran dan saldo pinjaman 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.75 Rincian Dana Bergulir pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Tahun	31 Desember 2025			31 Desember 2024		
	Pokok (Rp)	Bunga (Rp)	Jumlah (Rp)	Pokok (Rp)	Bunga (Rp)	Jumlah (Rp)
2001	20.409.374	11.898.563	32.307.937	20.409.374	11.898.563	32.307.937
2002	146.249.025	25.977.840	172.226.865	146.249.025	25.977.840	172.226.865
2003	78.249.955	25.953.273	104.203.228	78.249.955	25.953.273	104.203.228
2004	57.016.500	12.438.625	69.455.125	57.016.500	12.438.625	69.455.125
2005	94.179.910	21.397.988	115.577.898	94.179.910	21.397.988	115.577.898
2006	32.001.598	4.545.648	36.547.246	32.001.598	4.545.648	36.547.246
2007	23.420.250	5.336.538	28.756.788	23.420.250	5.336.538	28.756.788
2008	362.090.556	93.401.822	455.492.378	362.090.556	93.401.822	455.492.378
Jumlah	813.617.168	200.950.297	1.014.567.465	813.617.168	200.950.297	1.014.567.465

4. Dinas Perikanan

Investasi Non Permanen pada Dinas Kelautan dan Perikanan 31 Desember 2025 senilai Rp114.504.600,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.76 Rincian Dana Bergulir pada Dinas Perikanan TA 2025

No.	Jenis Kegiatan	Kelompok penerima	Kecamatan	Sisa per 31 Des. 2025 (Rp)			Sisa per 31 Des. 2024 (Rp)		
				Pokok	Bunga	Jumlah	Pokok	Bunga	Jumlah
1.	Peng. Budidaya Rumput Laut	1. Sbr. Laut	Satar Mese	59.000.000	7.560.000	66.560.000	59.000.000	7.560.000	66.560.000
		2. Br Muncul	Satar Mese	25.675.000	3.600.000	29.275.000	25.675.000	3.600.000	29.275.000
2	Peng. Budidaya Ikan Air Tawar	1. K. Mekar	L. Rembong	5.171.600	620.592	5.792.192	5.171.600	620.592	5.792.192
		2. K. Lao	L. Rembong	5.171.600	620.592	5.792.192	5.171.600	620.592	5.792.192
		3.Raci Koe	L. Rembong	5.171.600	620.592	5.792.192	5.171.600	620.592	5.792.192
		4.W. Sosor	L. Rembong	4.671.600	620.592	5.292.192	4.671.600	620.592	5.292.192
		5. Ibunda I	L. Rembong	4.821.600	620.592	5.442.192	4.821.600	620.592	5.442.192
		6. Ibunda II	L. Rembong	4.821.600	620.592	5.442.192	4.821.600	620.592	5.442.192
Jumlah				114.504.600	14.883.552	129.388.152	114.504.600	14.883.552	129.388.152



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Investasi Non Permanen pada Dinas Perikanan berasal dari kegiatan pengeluaran pembiayaan TA. 2005 berupa pinjaman modal untuk budidaya rumput laut dan ikan air tawar dengan total nilai Rp248.059.200,00. Dari jumlah tersebut senilai Rp124.029.600,00 disalurkan kepada kelompok usaha di Kabupaten Manggarai dan senilai Rp124.029.600,00 disalurkan kepada kelompok usaha di Kabupaten Manggarai Timur (pada tahun 2005 masih termasuk wilayah Kabupaten Manggarai). Saldo pinjaman modal yang dilaporkan dalam Neraca per 31 Desember 2014 dan 2013 hanya mencakup sisa pinjaman kepada kelompok tani di wilayah Kabupaten Manggarai yaitu senilai Rp114.504.600,00. Saldo tersebut tidak mengalami perubahan karena tidak ada mutasi pengembalian pinjaman baik pada tahun 2014 maupun tahun 2015. Saldo pinjaman modal tersebut merupakan saldo pokok pinjaman kepada dua kelompok usaha budi daya rumput laut dan enam kelompok usaha budi daya ikan air tawar sedangkan sisa piutang bunga adalah Rp14.883.552,00 (disajikan dalam akun piutang lainnya). Menurut laporan Kepala Dinas Perikanan kegiatan usaha budi daya rumput laut dan budi daya ikan air tawar tidak berjalan lagi ntara lain karena bencana alam. Laporan tersebut didukung dengan pernyataan masing-masing kelompok mengenai kondisi usaha mereka.

Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Inspektorat Kabupaten telah melakukan inventarisasi atas Dana Bergulir dan penguatan modal kerja di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, serta Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan namun hasilnya belum digunakan untuk membuat analisis umur piutang (*aging schedule*) serta menetapkan status atas dana bergulir yang macet (tidak tertagih).

5.3.1.2.1.2. Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen

31 Desember 2025	31 Desember 2024
<u>(Rp3.320.516.449,00)</u>	<u>(Rp3.320.516.449,00)</u>

Jumlah Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen (Dana Bergulir) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah senilai (Rp3.320.516.449,00) dan (Rp3.320.516.449,00). Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen per 31 Desember 2025 senilai (Rp3.320.516.449,00) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah.

5.3.1.2.2. Investasi Jangka Panjang Permanen

31 Desember 2025	31 Desember 2024
<u>Rp157.176.084.566,00</u>	<u>Rp156.450.628.582,45</u>

Saldo Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp157.176.084.566,00 dan Rp156.450.628.582,45. Kenaikan Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2025 dibandingkan per 31 Desember 2024 senilai Rp725.455.983,55 atau 0,46%. Investasi Jangka Panjang Permanen yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.3.1.2.2.1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp157.176.084.566,00	Rp156.450.628.582,45

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2025 senilai Rp157.176.084.566,00 dan per 31 Desember 2024 senilai Rp156.450.628.582,45 merupakan saldo dana Investasi Jangka Panjang Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Manggarai per 31 Desember 2025. Investasi Penyertaan Modal Kabupaten Manggarai terdapat di Bank NTT, PDAM Tirta Komodo dan PT. Multi Manggarai Investasi (MMI).

Tabel 5.77 Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	Koreksi Laba Tahun 2024 (Rp)	Surplus/Defisit (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)
1	Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Komodo Jaya	88.278.144.440,00	1.172.074.863,00	2.426.583.976,00	89.532.653.553,00
2	Penyertaan Modal pada PT Bank NTT	61.408.118.953,00	0,00	0,00	61.408.118.953,00
3	Penyertaan Modal pada PT. MMI	6.764.365.189,45	0,00	(529.053.129,45)	6.235.312.060,00
Jumlah		156.450.628.582,45	1.172.074.863,00	1.897.530.846,55	157.176.084.566,00

Jumlah investasi permanen senilai Rp157.176.084.566,00, per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. PDAM Tirta Komodo

Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Komodo senilai Rp89.532.653.553,00 merupakan kekayaan Pemerintah daerah yang tercatat dalam Neraca Komparatif PDAM Tirta Komodo dan nilai Penyertaan Modal disajikan sesuai dengan kebijakan akuntansi dengan kepemilikan 100 menggunakan metode ekuitas (*equity*). Laporan keuangan PDAM Tirta Komodo yang telah diaudit terlampir.

Tabel 5.78 Daftar Kepemilikan Saham Pemerintah Kab. Manggarai pada PDAM Tirta Komodo TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Saldo akhir Tahun 2023	88.278.144.440,00	86.076.037.047,00
Pengurangan :			
1	Koreksi Laba Tahun sebelumnya	1.172.074.863,00	0,00
Penambah			
1	Laba	2.426.583.976,00	2.202.107.393,00
Jumlah		89.532.653.553,00	88.278.144.440,00

Laporan Keuangan PDAM Tirta Komodo *Audited* Tahun 2025 yang telah diperiksa Kantor Akuntan Publik (KAP) disajikan pada **Lampiran 6** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan keuangan ini.

2. Bank NTT

Pada PT Bank NTT penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Manggarai senilai Rp61.408.118.953,00 dan nilai penyertaan modal pada PT Bank NTT dengan kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya (*cost*). Saldo Penyertaan Modal pada PT Bank NTT per 31 Desember 2025 merupakan investasi yang



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai sejak tahun 2001 s.d. Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.79 Daftar Kepemilikan Saham Pemerintah Kab. Manggarai pada Bank NTT

No.	Tahun	Nilai (Rp)	No Sertifikat	Tanggal
1	2001	136.750.000,00	A/II/11/13675	31/03/2004
2	2002	365.740.000,00	A/II/11/36574	31/03/2004
3	2003	863.250.000,00	A/II/11/86325	31/03/2004
4	2004	200.000.000,00	A/II/11/20000	10/01/2005
5	2005	250.000.000,00	A/II/11/25000	01/05/2006
6	2006	1.000.000.000,00	A/II/11/100000	15/05/2006
7	2007	1.000.000.000,00	A/II/11/100000	05/07/2007
8	2008	1.000.000.000,00	A/II/11/100000	26/03/2008
9	2009	1.000.000.000,00	A/II/11/100000	07/04/2009
10	2010	4.000.000.000,00	A/II/11/400000	13/12/2010
11	2011	3.000.000.000,00	A/II/11/300000	29/12/2011
12	2012	4.000.000.000,00	A/II/11/400000	24/10/2012
13	2013	4.000.000.000,00	A/II/11/400000	08/07/2013
14	2014	4.000.000.000,00	A/II/11/400000	15/07/2014
15	2015	4.000.000.000,00	A/II/11/400000	31/08/2015
16	2016	0,00	-	-
17	2017	0,00	-	-
18	2018	10.000.000.000,00	A/II/11/100000	
19	2019	0,00	-	-
20	2020	2.957.438.953,00	-	-
21	2020	2.634.940.000,00	-	-
22	2021	5.000.000.000,00	-	-
23	2022	10.000.000.000,00	-	-
24	2023	1.000.000.000,00	-	-
25	2024	1.000.000.000,00		
		61.408.118.953,00		

3. PT. MMI

Pada PT. Manggarai Multi Investasi, nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Manggarai Per 31 Desember Tahun 2025 menurun senilai Rp529.053.129,45 menjadi senilai Rp6.235.312.060,00 dari saldo awal Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Manggarai pada PT. MMI Per 31 Desember Tahun 2024 senilai Rp6.764.365.189,45 dengan kepemilikan modal lebih dari 98,04% menggunakan metode ekuitas (*equity*). Laporan keuangan PT. Manggarai Multi Investasi yang telah diaudit terlampir.

Tabel 5.80 Penyesuaian Nilai Ekuitas PT. MMI

No.	Uraian	Tahun		
		2025 (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Saldo akhir	6.764.365.189,45	8.456.751.674,51	10.599.096.597,57
	Pengurangan :			
2	Dividen Tahun Berjalan		1.692.386.485,06	2.142.344.923,06
3	Pengakuan Rugi	529.053.129,45		
	Penambah :			
4	Pengakuan Laba			
	Jumlah	6.235.312.060,00	6.764.365.189,45	8.456.751.674,51



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Laporan Keuangan PT MMI *Audited* Tahun 2025 yang telah diperiksa KAP disajikan pada **Lampiran 7** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan keuangan ini.

5.3.1.3. Aset Tetap

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp1.787.222.632.951,74	Rp1.750.096.233.285,34

Aset Tetap per 31 Desember 2025 senilai Rp1.787.222.632.951,74 dan Per 31 Desember 2024 senilai Rp1.750.096.233.285,34 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.81 Daftar Aset Tetap per 31 Desember 2025

No.	Uraian	Per 31 Desember 2025		
		Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Tanah	260.452.768.224,67	0,00	260.452.768.224,67
2	Peralatan dan Mesin	517.394.610.085,43	(445.162.116.205,50)	72.232.493.879,93
3	Gedung dan Bangunan	932.600.363.988,33	(230.819.333.525,36)	701.781.030.462,97
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.266.076.234.153,12	(1.623.001.105.705,00)	643.075.128.448,12
5	Aset Tetap Lainnya	76.584.278.156,68	(466.070.200,00)	76.118.207.956,68
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	33.563.003.979,37	0,00	33.563.003.979,37
Jumlah		4.086.671.258.587,60	(2.299.448.625.635,86)	1.787.222.632.951,74

Terhadap saldo Aset Tetap telah dilakukan pemetaan kode barang atas saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 sehingga dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.82 Daftar Aset Intrakomptabel TA 2025

No.	Aset Tetap	Saldo Awal Intrakomptabel (Rp)	Penyesuaian		Saldo Akhir Intrakomptabel (Rp)
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1	Tanah	257.675.756.562,67	2.976.195.925,00	199.184.263,00	260.452.768.224,67
2	Peralatan dan Mesin	501.051.753.981,13	20.704.601.091,61	4.361.744.987,31	517.394.610.085,43
3	Gedung dan Bangunan	920.427.550.164,70	13.568.512.503,46	1.395.698.679,83	932.600.363.988,33
4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	2.147.104.890.863,89	140.187.437.250,53	21.216.093.961,30	2.266.076.234.153,12
5	Aset Tetap Lainnya	71.857.448.438,68	7.974.281.620,00	3.247.451.902,00	76.584.278.156,68
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	18.030.619.030,71	20.078.586.950,89	4.546.202.002,23	33.563.003.979,37
7	Akumulasi Penyusutan	(2.166.051.785.756,44)	(136.277.179.091,91)	(2.880.339.212,49)	(2.299.448.625.635,86)
Jumlah		1.750.096.233.285,34	69.252.247.624,58	32.075.847.958,18	1.787.222.632.951,74

Rincian aset tetap per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.3.1.3.1. Tanah

31 Desember 2025

Rp260.452.768.224,67

31 Desember 2024

Rp257.675.756.562,67

Saldo aset tetap tanah pada Tahun 2025 senilai Rp260.452.768.224,67. Kenaikan/Penurunan Aset Tanah dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.83 Daftar Mutasi Aset Tetap Tanah TA 2025

No.	Uraian Mutasi	Jumlah (Rp)
A	Saldo Awal Aset Tetap	257.675.756.562,67
1	Saldo Awal Aset Tanah Tahun 2025	257.675.756.562,67
B	Mutasi Tambah	2.976.195.925,00
1	Belanja Modal Tahun 2025	0,00
2	Mutasi antar SKPD	90.070.000,00
3	Hibah (Pemerintah Pusat/Provinsi/Pemda Lain/Masyarakat)	0,00
4	Koreksi Nilai	2.886.125.925,00
5	Kurang Pencatatan (Sebab Lain)	0,00
6	Reklasifikasi Masuk (Mutasi antar Aset Tetap)	0,00
C	Mutasi Kurang	199.184.263,00
1	Mutasi antar SKPD	90.070.000,00
2	Aset Tetap yang Dhibah	109.114.263,00
3	Aset Tetap yang menjadi Properti Investasi -Tanah	0,00
D	Saldo Per 31 Desember 2025 (A+B-C)	260.452.768.224,67

Penjelasan Mutasi Tambah Aset Tetap Tanah:

1. Terdapat mutasi antar SKPD, yaitu dari Dinas Komunikasi dan Informatika ke Kecamatan Langke Rembong, yaitu sebidang tanah senilai Rp90.070.000,00.
2. Pada Tahun 2025 dilakukan penilaian kembali atas aset tanah bawah jalan Dinas PUPR terhadap dua tanah bawah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai. Penilaian kembali dua tanah bawah jalan tersebut dilakukan karena terjadi perbedaan lebar jalan yang tercatat tahun 2018, yaitu lebar jalan 8 meter, yang seharusnya lebar jalan 5 meter. Tanah bawah jalan dimaksud merupakan ruas jalan penting untuk akses menuju PLTU Ulumbu. Dua aset tanah bawah jalan tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.84 Daftar Mutasi Tambah Aset Tetap Tanah TA 2025

No.	SKPD	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)
1	Tanah untuk jalan Kabupaten (Ponggeok-Ulumbu)	1.100.605.356,00	0,00
2	Tanah untuk jalan Kabupaten (Sp.Golo Namut-Lungar)	1.785.520.569,00	0,00
Jumlah		2.886.125.925,00	0,00

Penjelasan Mutasi Kurang Aset Tetap Tanah:

1. Terdapat mutasi antar SKPD, yaitu dari Dinas Komunikasi dan Informatika ke Kecamatan Langke Rembong, yaitu sebidang tanah senilai Rp90.070.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

2. Tahun 2025 dilakukan hibah aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai kepada Kepolisian Resor (Polres) Manggarai yang akan dipergunakan untuk pembangunan Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) di Kecamatan senilai Rp109.114.263,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.85 Daftar Mutasi Kurang Aset Tetap Tanah TA 2025

No.	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Kecamatan Wae Ri'i	19.597.013,00
2	Kecamatan Satamese Barat	13.482.000,00
3	Kecamatan Ruteng	48.950.000,00
4	Dinas Kesehatan	27.085.250,00
Jumlah		109.114.263,00

Rincian Aset Tetap Tanah masing-masing SKPD per 31 Desember 2025 disajikan pada **Lampiran 8** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Selain informasi tersebut diatas, terdapat tambahan pengungkapan bahwa KIB Aset Tetap Tanah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah terdapat Aset Tetap Tanah dengan luas 10.642 m2 senilai Rp.7.500.000.000,00 yaitu Tanah Rumah Pegawai LP dan Tanah Kosong, yang juga dicatat sebagai Aset Tetap Tanah oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasaryakatan. Pemerintah Kabupaten Manggarai masih dalam proses penyelesaian status kepemilikan atas tanah tersebut.

5.3.1.3.2. Peralatan Mesin

31 Desember 2025	31 Desember 2024
<u>Rp517.394.610.085,43</u>	<u>Rp501.051.753.981,13</u>

Saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 senilai Rp517.394.610.085,43 Kenaikan/Penurunan Aset Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.86 Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA 2025

No.	Uraian Mutasi	Nilai (Rp)
A	Saldo Awal Aset Tetap	501.051.753.981,13
1	Saldo Awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024	501.051.753.981,13
B	Mutasi Tambah	20.704.601.091,61
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2025 (LRA)	16.722.365.759,06
2	Belanja non Modal (Belanja Pegawai/Barang & Jasa yang Diatribusikan menjadi Aset Tetap)	71.511.465,55
3	Belanja non Modal (Aset Tetap yang Berasal dari Belanja Barang Jasa)	307.371.904,00
5	Hibah (Pemerintah Pusat/Provinsi/Pemda Lain/Masyarakat)	3.359.357.288,00
6	Penambahan Ulang	25.979.550,00
7	Reklasifikasi masuk dari JIJ	31.933.300,00
8	Reklasifikasi masuk dari ATL	185.193.300,00
9	Reklasifikasi masuk dari Aset Ekstrakomptabel	888.525,00
C	Mutasi Kurang	4.361.744.987,31
1	Reklasifikasi keluar ke JIJ	15.149.000,00
2	Reklasifikasi keluar ke ATL	8.873.050,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian Mutasi	Nilai (Rp)
3	Reklasifikasi keluar ke Aset Tidak Berwujud (ATB)	397.513.020,00
4	Penghapusan (penjualan)	497.000.000,00
5	Aset Tetap yang dipindahkan ke aset lainnya	2.014.980.521,00
6	Belanja Modal 2025 tidak Jadi Aset Tetap (Dibawah Nilai Kapitalisasi)	1.390.218.456,31
7	Temuan Kurang Volume	30.775.000,00
8	Reklas Aset menjadi Beban atas Temuan Kurang Volume	1.235.940,00
9	Temuan Pembelian Barang yang Diterima Lewat Tahun	6.000.000,00
D	Saldo Per 31 Desember 2025 (A+B-C)	517.394.610.085,43

Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut.

Penjelasan Mutasi Tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin:

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 sesuai LRA senilai Rp16.722.365.759,06;
2. Belanja Jasa yang diatribusikan menjadi aset tetap, yaitu honorarium pengadaan barang dan jasa senilai Rp71.511.465,55, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.87 Rincian Belanja Pegawai yang diatribusikan menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA 2025

No.	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	1.800.000,00
2	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3.600.000,00
3	Dinas Perhubungan	5.000.000,00
4	Inspektorat Daerah	900.000,00
5	Badan Pendapatan Daerah	900.000,00
6	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.600.000,00
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.200.000,00
8	DP2KB	1.500.000,00
9	Dinas Peternakan	400.000,00
10	Bagian Kerjasama	500.000,00
11	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3.450.000,00
12	Dinas Penanaman Modal	10.800.000,00
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	300.000,00
14	Dinas Kesehatan	11.700.000,00
15	Bagian Umum	8.799.880,00
16	Dinas PPO	14.061.585,55
Jumlah		71.511.465,55

3. Terdapat penambahan aset yang bersumber dari Belanja Barang senilai Rp307.371.904,00 berupa peralatan komputer, printer dan peralatan rumah tangga, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.88 Rincian Belanja Barang menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA 2025

No.	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Dinas Lingkungan Hidup	39.072.000,00
2	Bagian Umum	243.449.904,00
3	Bagian Prokopim	24.850.000,00
Jumlah		307.371.904,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

4. Penambahan Aset Tetap yang bersumber dari hibah Tahun 2025 dari Kementerian Pertanian berupa peralatan dan mesin pertanian senilai Rp3.359.357.288,00 pada Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.89 Pendapatan Hibah berupa Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA 2025

No.	Nama Barang	Nilai (Rp)
1	Combine Harvester Besar	375.500.000,00
2	Traktor Roda 4	1.573.295.768,00
3	Traktor Roda Crawler	1.410.561.520,00
Jumlah		3.359.357.288,00

5. Penambahan utang atas aset tetap berupa Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan senilai Rp25.979.550,00;
6. Terdapat reklasifikasi masuk dari JIJ senilai Rp31.933.300,00 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga pada sekolah-sekolah yang bersumber dari Dana BOS SD dan SMP;
7. Rekalsifikasi masuk dari ATL senilai Rp185.193.300,00 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga di Sekolah-sekolah yang bersumber dari Dana BOS SD, BOS SMP dan BOP Paud/Kesetaraan; dan
8. Rekalsifikasi masuk dari Aset Ekstrakomptabel pada Dinas Kesehatan senilai Rp888.525,00.

Penjelasan Mutasi Kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin:

1. Rekalsifikasi keluar ke JIJ senilai Rp15.149.000,00 dengan rincian :
- Dinas Kesehatan senilai Rp4.799.000,00 yaitu konsultan perencana pengadaan IPAL pada Puskesmas Wae Kajong dan Puskesmas Anam; dan
 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp10.350.000,00 berupa meteran listrik dan jaringan pipa distribusi tekanan menengah.
2. Rekalsifikasi keluar ke ATL senilai Rp8.873.050,00 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang bersumber dari Dana BOS SD dan SMP;
3. Rekalsifikasi keluar ke ATB senilai Rp397.513.020,00 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, yaitu berupa Aplikasi Sekolah Enuma + LMS yang melekat pada Pengadaan Tablet Advan VX Neo T606 Octacore;
4. Penghapusan atas aset kendaraan roda empat senilai Rp497.000.000,00 pada Sekretariat DPRD dengan mekanisme penjualan kendaraan dinas perorangan;
5. Rekalsifikasi dari aset tetap Peralatan dan Mesin berupa kendaraan roda dua, roda empat dan peralatan komputer yang sudah rusak berat ke aset lainnya senilai Rp2.014.980.521,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.90 Daftar Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain

No.	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	462.625.776,00
2	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	19.427.384,00
3	BKPSDM	57.929.000,00
4	Dinas Kesehatan	1.408.837.560,00
5	Bagian Perekonomian dan SDA	8.170.000,00
6	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	22.490.801,00
7	Sekretariat DPRD	35.500.000,00
Jumlah		2.014.980.521,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

6. Terdapat aset peralatan dan mesin yang nilainya dibawah kapitalisasi aset tetap maka dilakukan pencatatan pada daftar ekstrakomptabel. Jumlah aset peralatan mesin di bawah batasan minimal kapitalisasi aset tetap tetap peralatan mesin senilai Rp1.390.218.456,31. Rincian Belanja Modal 2025 tidak jadi Aset Tetap (dibawah nilai kapitalisasi) sebagai berikut.

Tabel 5.91 Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel TA 2025

No.	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Dinas Perhubungan	2.000.000,00
2	Kecamatan Langke Rembong	35.250.000,00
3	Dinas Perdagangan	824.933,66
4	DP2KB	9.890.100,00
5	Bagian Umum	23.990.000,00
6	Dinas Penanaman Modal	11.249.961,00
7	RSUD Ruteng	4.916.000,00
8	Dinas Peternakan	350.000,00
9	Dinas Kesehatan	45.100.395,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA	4.200.000,00
11	Dinas PPO	1.252.447.066,65
Jumlah		1.390.218.456,31

7. Temuan kurang volume atas pengadaan peralatan dan mesin senilai Rp30.775.000,00 yaitu pada Bagian Umum Sekretariat Daerah senilai Rp23.175.000,00 dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp7.600.000,00;
8. Atas temuan kurang volume terdapat nilai PPN dan atribusi honor yang menjadi pengurang nilai aset dan direklas menjadi beban senilai Rp1.235.940,00; dan
9. Terdapat pembelian barang yang telah dilakukan pembayaran namun fisik barang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2025 senilai Rp6.000.000,00.

Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin masing-masing SKPD per 31 Desember 2025 disajikan pada **Lampiran 9** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp932.600.363.988,33	Rp920.427.550.164,70

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Tahun 2025 senilai Rp932.600.363.988,33. Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.92 Daftar Mutasi Aset Gedung dan Bangunan TA 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Saldo Awal Aset Tetap	920.427.550.164,70
1	Saldo Awal Aset Gedung dan Bangunan 2024	920.427.550.164,70
B	Mutasi Tambah	13.568.512.503,46
1	Belanja Modal 2025 (LRA)	10.214.672.090,78



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	Nilai (Rp)
2	Belanja non Modal (Belanja Pegawai/Barang & Jasa yang diatribusikan menjadi aset tetap)	79.602.108,60
3	Belanja non Modal (Aset tetap yang berasal dari belanja Pegawai/Barang Jasa)	133.433.707,00
4	Koreksi saldo awal (hibah tahun 2024)	381.129.021,00
5	Aset Tetap yang dimutasikan dari SKPD Lain (Mutasi antar SKPD)	150.120.000,00
6	Pindahan dari KDP	2.294.508.511,65
5	Ulang belanja	315.047.064,43
C	Mutasi Kurang	1.395.698.679,83
1	Aset Tetap yang dipindahkan ke aset lainnya	25.000.000,00
2	Aset Tetap yang Dihilangkan	598.848.000,00
3	Reklasifikasi keluar ke JIJ	273.693.100,00
4	Reklasifikasi keluar ke KDP	189.331.622,76
5	Aset Tetap yang dimutasikan ke SKPD Lain (Mutasi antar SKPD)	150.120.000,00
6	Temuan Kurang Volume Pekerjaan	122.336.573,07
7	Belanja Modal 2025 tidak Jadi Aset Tetap (Pelunasan Utang)	36.369.384,00
D	Saldo Per 31 Desember 2025 (A+B-C)	932.600.363.988,33

Penjelasan Mutasi Tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan:

1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 sesuai LRA senilai Rp10.214.672.090,78;
2. Atribusi honorarium pengadaan barang dan jasa ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp79.602.108,60, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.93 Rincian Belanja Pegawai yang diatribusikan menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA 2025

No.	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Dinas Perhubungan	900.000,00
2	Dinas PUPR	32.000.000,00
3	Dinas Peternakan	1.000.000,00
4	Dinas Kesehatan	5.700.000,00
5	Dinas Perikanan	6.400.000,00
6	Dinas Pendidikan	33.602.108,60
Jumlah		79.602.108,60

3. Terdapat belanja yang bersumber dari belanja barang yang menjadi aset tetap senilai Rp133.433.707,00 pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai berupa pemeliharaan Rumah Dinas Wakil Bupati Manggarai.
4. Koreksi ekuitas saldo awal atas Gedung dan Bangunan karena Hibah masuk dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2024 sesuai Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) yang baru tercatat pada tahun 2025 senilai Rp381.129.021,00;
5. Aset Tetap yang dimutasikan dari SKPD Lain (Mutasi antar SKPD) senilai Rp150.120.000,00 dari Dinas Komunikasi dan Informatika ke Kecamatan Langke Rembong;
6. Terdapat reklasifikasi dari KDP yang sudah menjadi aset senilai Rp2.294.508.511,65 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Lingkungan Pertokoan Kec. Langke Rembong (Lanjutan).



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

7. Terdapat penambahan nilai aset tetap dari hutang pada Dinas PPO senilai Rp315.047.064,43, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.94 Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA 2025 dari Penambahan Utang

No.	Nama UPB	Nama Paket	Nilai (Rp)
1	SDN Rampasasa	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN Rampasasa Kec.Wae Ril (DAU SG)2 Ruang x 230.000.000	87.675.088,97
2	SMPN 6 Reok	Pembangunan Ruang Kelas baru (RKB) SMPN 6 Reok diRura Kec.Reok Barat(DAU SG)	9.187.975,42
3	SMPN 4 Ruteng	Pembangunan Ruang Kelas baru (RKB)SMPN 4 Ruteng Kec.Rahong Utara (DAU SG)	218.184.000,04
Jumlah			315.047.064,43

Penjelasan Mutasi Kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan:

1. Reklasifikasi dari aset tetap Gedung dan Bangunan berupa gedung pos jaga permanen pada Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah yang sudah rusak berat ke aset lainnya senilai Rp25.000.000,00;
2. Hibah Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Pemerintah Kabupaten Manggarai ke Kepolisian Resort Manggarai dan Keuskupan Ruteng senilai Rp598.848.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.95 Daftar Rincian Hibah Keluar Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA 2025

No.	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)	Penerima Hibah
1	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	421.408.000	Keuskupan Ruteng
2	Dinas Kesehatan	177.440.000,00	Kepolisian Resort Manggarai
Jumlah		598.848.000,00	

3. Terdapat reklasifikasi Aset Tetap Gedung Bangunan ke Aset JIJ pada Dinas Perikanan senilai Rp273.693.100,00;
4. Reklasifikasi Aset Tetap Gedung Bangunan ke KDP atas pekerjaan yang belum diselesaikan sampai dengan periode 31 Desember 2025 pada Dinas PPO senilai Rp189.331.622,76 atas pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 6 Reok;
5. Mutasi antar SKPD senilai Rp150.120.000,00 dari Dinas Komunikasi dan Informatika ke Kec. Langke Rembong;
6. Terdapat temuan kurang volume pekerjaan pada Dinas Kesehatan dan Dinas PPO senilai Rp. 122.336.573,07 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.96 Rincian Temuan Kurang Volume Pekerjaan Gedung dan Bangunan

No.	Perangkat Daerah	Nama Paket	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	Pembangunan Rumah Dinas Kesehatan Puskesmas Dintor	7.757.982,68
2	Dinas Kesehatan	Pembangunan Rumah Dinas Kesehatan Puskesmas Dintor	7.757.982,68
3	Dinas PPO	Pembangunan Ruang Kelas baru (RKB)	6.944.644,68
4	Dinas PPO	Pembangunan Ruang Kelas baru (RKB)	14.394.644,60
5	Dinas PPO	Pembangunan Ruang Kelas baru (RKB)	17.747.746,63
6	Dinas PPO	Pembangunan Ruang Kelas baru (RKB)	14.444.937,00
7	Dinas PPO	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)SDN Rampasasa Kec.WaeRil(DAU SG)	28.597.464,48
8	Dinas PPO	Pembangunan Ruang Kelas baru (RKB)SMPN 4 Ruteng Kec.Rahong Utara (DAU SG)	24.691.170,32
Jumlah			122.336.573,07



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

7. Pelunasan utang aset tetap senilai Rp36.369.384,00 atas Konsultan Pengawas pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.97 Rincian Pelunasan Utang Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA 2025

No.	Nama UPB	Nama Paket	Nilai (Rp)
1	SD Inpres Lenda	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	4.999.500,00
2	SD Negeri Reok	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	4.984.300,00
3	SD Inpres Nimbong	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	4.995.000,00
4	SD Inpres Bea Denger	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	4.995.000,00
6	SD Inpres Lando	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	4.995.000,00
6	SDI Ral	Pembangunan Ruang Guru	11.400.584,00
Jumlah			36.369.384,00

Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan masing-masing SKPD per 31 Desember 2025 disajikan pada **Lampiran 10** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Selain informasi tersebut diatas, terdapat tambahan pengungkapan sebagai berikut.

1. Hasil pemeriksaan fisik atas aset Gedung dan Bangunan pada RSUD Ruteng Kabupaten Manggarai diketahui terdapat bangunan yang masih digunakan untuk operasional RSUD namun sudah tidak tercatat dalam KIB C RSUD Ruteng. Hasil penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa bangunan tersebut sebelumnya tercatat dengan aset tetap dengan keterangan “Bangunan Gedung *Laundry*, Sanitasi, dan Dapur Lama”, dimana telah dihapuskan dari daftar BMD berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai nomor HK/279/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Penghapusan Bangunan Gedung Ruangan Rawat Inap (Teratai), Bangunan Gedung *Laundry*/Sanitasi, Bangunan Gedung Dapur Lama, Gedung Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRs), Gedung Gudang Obat Farmasi, Gedung Gudang Barang Bekas Logistik, Bak Air dan Reservoir Air pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ben Mboi Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2020; dan
2. Pada tahun 2025, terdapat program Revitalisasi Satuan Pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada 7 sekolah dasar negeri dan 6 sekolah menengah pertama negeri di Kabupaten Manggarai, dengan total pekerjaan senilai Rp18.482.978.349,00. Hasil pekerjaan dari program Revitalisasi Satuan Pendidikan sudah tidak dicatat sebagai aset oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-186/KN/KN.2/2025 tanggal 23 Desember 2025 tentang Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara Tingkat Kementerian/Lembaga Tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Manggarai belum mencatat hasil dari program Revitalisasi Satuan Pendidikan dalam daftar aset karena masih dalam proses inventarisasi pada masing-masing sekolah agar dapat dikategorikan sesuai jenis asetnya, termasuk pencatatan sebagai aset baru atau aset rehabilitasi yang menambah masa manfaat. Adapun rincian sekolah penerima bantuan dan kegiatan sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.98 Rincian Sekolah Penerima Bantuan Revitalisasi

No	Sekolah Penerima	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	SDI Iteng I	Rehabilitasi Ruang Kelas, Pembangunan Toilet, Pembangunan Ruang UKS, Pembangunan Ruang Administrasi, Pengadaan Meubelair, Konsultan Perencana dan Pengawas	835.689.261
2	SDI Bea Dongor	Rehabilitasi Ruang Kelas, Pembangunan Toilet, Pembangunan Ruang UKS, Pembangunan Ruang Administrasi, Pengadaan Meubelair, Konsultan Perencana dan Pengawas	508.284.208
3	SDI Ranggi	Rehabilitasi Ruang Kelas, Pembangunan Toilet, Rehabilitasi Toilet, Pembangunan Ruang UKS, Pembangunan Ruang Administrasi, Pengadaan Meubelair, Konsultan Perencana dan Pengawas	811.694.817
4	SDI Kaca	Rehabilitasi Ruang Kelas, Pembangunan Toilet, Rehabilitasi Toilet, Pembangunan Ruang UKS, Pembangunan Ruang Administrasi, Pengadaan Meubelair, Konsultan Perencana dan Pengawas	1.186.360.662
5	SDI Wae Bolong	Rehabilitasi Ruang Kelas, Pembangunan Toilet, Pembangunan Ruang UKS, Pembangunan Ruang Administrasi, Pengadaan Meubelair, Konsultan Perencana dan Pengawas	570.672.202
6	SDN Jong	Rehabilitasi Ruang Kelas, Rehabilitasi Ruang Perpustakaan, Pembangunan Ruang UKS, Pembangunan Ruang Administrasi, Pengadaan Meubelair, Konsultan Perencana dan Pengawas	1.485.526.702
7	SDN Madona	Rehabilitasi Ruang Kelas, Pembangunan Toilet, Rehabilitasi Toilet, Pembangunan Ruang UKS, Pembangunan Ruang Administrasi, Pengadaan Meubelair, Konsultan Perencana dan Pengawas	895.750.497
8	SMPN 2 Wae Rii	Rehabilitasi Ruang Kelas, Pembangunan Toilet, Rehabilitasi Ruang Laboratorium, Pembangunan Ruang UKS, Pembangunan Ruang Administrasi, Pengadaan Meubelair, Konsultan Perencana dan Pengawas	1.286.000.000,00
9	SMPN 2 Cibai	Pembangunan Toilet, Pembangunan Ruang Administrasi, Pengadaan Meubelair, Konsultan Perencana dan Pengawas	652.000.000,00
10	SMPN 2 Satar Mese	Pembangunan Ruang Laboratorium, Pembangunan Ruang UKS, Pembangunan Toilet, Pengadaan Meubelair, Konsultan Perencana dan Pengawas	1.023.000.000,00
11	SMPN 16 Satar Mese	Pembangunan Ruang Administrasi, Pembangunan Ruang Kelas Baru, Pembangunan Perpustakaan, Pengadaan Meubelair, Konsultan Perencana dan Pengawas	3.137.000.000,00
12	SMPN 13 Ruteng	Pembangunan Ruang Administrasi, Pembangunan Ruang Kelas Baru, Pembangunan Perpustakaan, Pengadaan Meubelair, Konsultan Perencana dan Pengawas	2.750.000.000,00
13	SMPN 11 Ruteng	Pembangunan Ruang Administrasi, Pembangunan Ruang Kelas Baru, Pembangunan Perpustakaan, Pengadaan Meubelair, Konsultan Perencana dan Pengawas	3.341.000.000,00
Total			18.482.978.349,00

5.3.1.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2025

31 Desember 2024

Rp2.266.076.234.153,12

Rp2.147.104.890.863,89

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 senilai Rp2.266.076.234.153,12. Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dapat dirinci sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.99 Daftar Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian Mutasi	Nilai (Rp)
A	Saldo Awal Aset Tetap	2.147.104.890.863,89
1	Saldo Awal Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan 2024	2.147.104.890.863,89
B	Mutasi Tambah	140.187.437.250,53
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2025 (LRA)	90.112.302.024,00
2	Belanja non Modal (Belanja Pegawai/Barang & Jasa yang diatribusikan menjadi aset tetap)	626.588.749,36
3	Utang belanja	1.894.187.561,71
4	Hibah (Pemerintah Pusat/Provinsi/Pemda Lain/Masyarakat)	45.680.726.668,00
5	Reklasifikasi Masuk dari Peralatan dan Mesin	15.149.000,00
6	Reklasifikasi Masuk dari Gedung dan Bangunan	273.693.100,00
7	Reklasifikasi Masuk dari KDP	1.584.790.147,46
C	Mutasi Kurang	21.216.093.961,30
1	Aset Ekstrakomptabel (dibawah Nilai Kapitalisasi)	11.850.000,00
2	Reklasifikasi ke PM	31.933.300,00
3	Reklasifikasi ke KDP	19.889.255.328,13
4	Penghapusan	164.222.859,75
5	Temuan Kurang Volume Pekerjaan	416.928.226,20
6	Belanja Modal 2025 tidak Jadi Aset Tetap (Pelunasan Utang)	93.697.428,00
7	Belanja Modal menjadi Beban Jasa	312.571.000,00
8	Aset Ekstrakomptabel (sesuai hasil Inventarisasi di bawah nilai kapitalisasi yang masuk Neraca tahun sebelumnya)	271.768.347,00
9	Lebih pembayaran Jasa Konsultansi	23.867.472,22
D	Saldo Per 31 Desember 2025 (A+B-C)	2.266.076.234.153,12

Penjelasan Mutasi Tambah Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan:

1. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 (LRA) senilai Rp90.112.302.024,00
2. Belanja jasa yang diatribusikan menjadi aset tetap senilai Rp626.588.749,36, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.100 Rincian Belanja Jasa yang diatribusikan menjadi Aset Tetap JIJ TA 2025

No.	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Dinas PUPR	623.700.000,00
2	Dinas PPO	2.888.749,36
Jumlah		626.588.749,36

3. Terdapat penambahan nilai aset tetap dari utang aset tetap pada Dinas PUPR senilai Rp1.894.187.561,71 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.101 Rincian Perolehan Aset dari Hutang

No.	Nama Paket	Nilai (Rp)
1	Peningkatan Jalan Dalam Kota Ruteng	610.310.710,50
2	Peningkatan Jalan Cibal - Rampasasa	19.949.451,00
3	Ruteng Golo Cala	316.624.475,01
4	Peningkatan Jalan Ramut-Bts Kab.,Lapen 3,5 km Kec. S. Mese DAK)	444.631.809,61



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Nama Paket	Nilai (Rp)
5	Peningkatan Jalan Lingkungan Nggringgong-Lokom-wae Dunga Ds. Terong	49.163.697,75
6	Peningkatan Jalan Sp. Bea Loli - Lamba + Bea Loli - Kaca - Longko, Kec. Cibal Barat	16.995.240,00
7	Pembangunan reservoir Golo Roket Kecamatan Langke Rembong	27.582.729,10
8	Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Kedindi-Kajong, Lapen, Kec. Reok Barat	408.929.448,74
Jumlah		1.894.187.561,71

4. Hibah masuk dari Kementerian Pekerjaan Umum atas pekerjaan peningkatan jalan senilai Rp45.680.726.668,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.102 Rincian Masuk Aset Tetap JIJ TA 2025

No.	Nama Kegiatan	Nama Paket	Volume (Km)	Nilai (Rp)
1	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat	Peningkatan jalan Iteng, Nanga Woja-Sp.Melo	6,5	23.220.426.210,00
2	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat	Peningkatan jalan Cepang Sp. Melo Bangka Sumba	7	22.460.300.458,00
Jumlah				45.680.726.668,00

5. Reklasifikasi Masuk dari Peralatan dan Mesin senilai Rp15.149.000,00 pada Dinas PPO yang bersumber dari Dana BOS SD dan BOS SMP;
6. Rekalsifikasi Masuk dari Gedung dan Bangunan senilai Rp273.693.100,00 pada Dinas Perikanan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.103 Rincian Rekalsifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke JIJ TA 2025

Nama Paket	Komponen				Harga Perolehan (Rp)
	Realisasi	Honorarium (Rp)			
		Honorarium (PPK)	Honorarium (PP)	Jumlah Honorarium	
Rehabilitasi kolam/bak pemijah/induk/ calon induk/ larva/ tandon Balal Benih Ikan Rowang	192.386.100,00	4.000.000,00	400.000,00	4.400.000,00	196.786.100,00
Rehabilitasi sarana Kolam Dalo	74.907.000,00	2.000.000,00	-	2.000.000,00	76.907.000,00
Jumlah	267.293.100,00	6.000.000,00	400.000,00	6.400.000,00	273.693.100,00

7. Rekalsifikasi Masuk dari KDP senilai Rp1.584.790.147,46 pada Dinas PUPR dan Dinas PPO, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.104 Rincian Rekalsifikasi dari KDP ke JIJ TA 2025

No.	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Dinas PUPR	1.244.834.194,94
2	Dinas PPO	339.955.952,52
Jumlah		1.157.012.259,32



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Penjelasan Mutasi Kurang Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan:

1. Terdapat aset yang nilainya dibawah kapitalisasi aset tetap maka dilakukan pencatatan pada daftar ekstrakomptabel pada Dinas PPO yang bersumber dari Dana BOS sebesar Rp.11.850.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.105 Rincian Adet JIJ Ekstrakomptabel TA 2025

No.	Nama UPB	Nilai (Rp)
1	SD INPRES LOKOM	2.860.000,00
2	SD - SMP Satu Atap Negeri Mahima	4.500.000,00
3	SMP NEGERI 8 REOK	3.000.000,00
4	SDN Mano	1.500.000,00
Jumlah		18.850.000,00

2. Reklasifikasi keluar ke PM senilai Rp31.933.300,00 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga yang bersumber dari Dana BOS SD dan BOS SMP;
3. Terdapat reklasifikasi ke KDP senilai Rp19.889.255.328,15 pada Dinas PUPR;
4. Tahun 2025 dilakukan penghapusan atas jalan khusus lainnya pada Dinas PUPR senilai Rp164.222.859,75. Penghapusan dilakukan karena pada lokasi SMPN 2 Iteng, Kecamatan Satar Mese akan dibangun Sekolah Rakyat (program Pemerintah Pusat), yang salah satu persyaratannya adalah Pemerintah Daerah menyediakan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat dimaksud. Pada lokasi tersebut, di tengahnya terdapat bangunan milik Dinas PUPR berupa rabat beton (jalan khusus lainnya), sehingga untuk kepentingan pensertifikatan tanah, aset tersebut dihapus;
5. Terdapat temuan kurang volume pekerjaan pada Dinas PUPR senilai Rp416.928.226,20 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.106 Temuan Kurang Volume Pekerjaan JIJ

No.	Paket Pekerjaan	Nilai (Rp)
1	Peningkatan Jalan Poka - Timung	25.974.336,39
2	Peningkatan Jalan Dalam Kota Ruteng	126.462.217,22
3	Peningkatan Jalan Sp. Cancar - Golo Welu	136.609.063,22
4	Peningkatan Jalan Dalam Kota Timung	22.253.979,37
5	Pembukaan Jalan Baru Hllhltir - Nanga Kolang, Kec. Satar Meso Barat (Swakolola)	105.628.630,00
Jumlah		416.928.226,20

6. Pelunasan utang aset tetap tahun 2024 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga atas pembangunan toilet senilai Rp93.697.428,00;
7. Tahun 2025, terdapat belanja modal yang menjadi beban jasa senilai Rp312.571.000,00 pada Dinas PUPR atas belanja *update* data base jalan dan jembatan. Belanja ini adalah belanja jasa tenaga ahli;
8. Terdapat nilai aset JIJ di bawah nilai kapitalisasi yang masuk Neraca pada Tahun sebelumnya dan dilakukan koreksi pencatatan ke Barang Ekstrakomptabel senilai Rp271.768.347,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.107 Rincian Reklasifikasi JIJ ke Aset Ekstrakomptabel

No.	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Kecamatan Langko Rembong	1.000.000,00
2	Badan Pendapatan Daerah	6.500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
3	Dinas Pariwisata	2.000.000,00
4	Dinas BP2KB	5.194.608,00
5	Kecamatan Rook	3.800.000,00
6	Bagian Umum	14.000.000,00
7	RSUD Rutong	3.000.000,00
8	Dinas Pertanian	35.664.680,00
9	Dinas PUPR	48.109.409,00
10	Dinas Pemukiman	18.974.885,00
11	Dinas Kesehatan	125.286.565,00
12	Dinas Perhubungan	8.238.200,00
Jumlah		271.768.347,00

9. Temuan atas kelebihan pembayaran Jasa Konsultansi Tahun 2025 pada Dinas PUPR senilai Rp. 23.867.472,22.

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan masing-masing SKPD per 31 Desember 2025 disajikan pada **Lampiran 11** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2025

Rp76.584.278.156,68

31 Desember 2024

Rp71.857.448.438,68

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 senilai Rp76.584.278.156,68 merupakan Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset Tetap Lainnya antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olahraga. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya sebagai berikut.

Tabel 5.108 Daftar Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian Mutasi	Nilai (Rp)
A	Saldo Awal Aset Tetap	71.857.448.438,68
1	Saldo Awal Aset Tetap Lainnya 2024	71.857.448.438,68
B	Mutasi Tambah	7.974.281.620,00
1	Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2025 (LRA)	7.791.485.970,00
2	Belanja non Modal (Aset tetap yang berasal dari belanja Pegawai/Barang Jasa)	173.922.600,00
3	Reklasifikasi dari PM	8.873.050,00
C	Mutasi Kurang	3.247.451.902,00
1	Hibah keluar	133.500.000,00
2	Belanja Modal 2025 tidak jadi Aset Tetap (Dibawah Nilai Kapitalisasi)	2.925.458.502,00
3	Reklasifikasi ke PM	185.193.300,00
4	Temuan Belanja Barang namun Fisik Diterima Lewat Tahun	3.300.100,00
D	Saldo Per 31 Desember 2025 (A+B-C)	76.584.278.156,68



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Penjelasan Mutasi Tambah Aset Tetap Lainnya:

1. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2025 (LRA) senilai Rp7.791.485.970,00;
2. Terdapat belanja barang pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga yang bersumber dari Dana BOS SD dan SMP senilai Rp173.922.600,00 menjadi Aset Tetap Lainnya; dan
3. Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya senilai Rp8.873.050,00.

Penjelasan Mutasi Kurang Aset Tetap Lainnya:

1. Tahun 2025 dilaksanakan hibah atas aset renovasi senilai Rp133.500.000,00 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dari Pemerintah Kabupaten Manggarai kepada Keuskupan Ruteng. Aset tersebut berupa Obyek dan Daya tarik Wisata (ODTW) di Kel.Karot Kec.Langke Rembong;
2. Terdapat Belanja Modal 2025 tidak menjadi Aset Tetap (dibawah nilai kapitalisasi) yang merupakan barang ekstrakomptabel senilai Rp2.925.458.502,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.109 Daftar Rincian Aset Tetap Lainnya Ekstrakomptabel TA 2025

No.	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	46.221.088,00
2	Dinas PPO	2.879.237.414,00
Jumlah Total		2.925.458.502,00

3. Reklasifikasi ke PM senilai Rp185.193.300,00 pada Dinas PPO yang bersumber dari Dana BOS SD dan BOS SMP; dan
4. Terdapat Aset Tetap Lainnya yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2025 meskipun telah dilakukan pembayaran senilai Rp3.300.100,00.

Rincian Aset Tetap Lainnya masing-masing SKPD per 31 Desember 2025 disajikan pada **Lampiran 12** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

5.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp33.563.003.979,37	Rp18.030.619.030,71

Saldo Aset Tetap KDP pada Tahun 2025 senilai Rp33.563.003.979,37 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.110 Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Perjalanan Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian Mutasi	Nilai (Rp)
A	Saldo Awal Aset Tetap (1)	18.030.619.030,71
1	Saldo Awal Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) 2024	18.030.619.030,71
B	Mutasi Tambah	20.078.586.950,89
1	Reklasifikasi Masuk dari GB	189.331.622,76
2	Reklasifikasi Masuk dari JIJ	19.889.255.328,13
C	Mutasi Kurang	4.546.202.002,23



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian Mutasi	Nilai (Rp)
1	Reklasifikasi Keluar ke GB	2.294.508.511,65
2	Reklasifikasi Keluar ke JIJ	1.545.888.719,46
3	Temuan Kurang Volume	705.804.771,12
D	Saldo Per 31 Desember 2025 (A+B-C)	33.563.003.979,37

Penjelasan Mutasi Tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan:

1. Reklasifikasi masuk dari GB senilai Rp189.331.622,76 pada Dinas PPO atas pengerjaan pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 6 Reok; dan
2. Terdapat reklasifikasi masuk dari JIJ senilai Rp19.889.255.328,13 pada Dinas PUPR atas pengerjaan pembanguna reservoir, peningkatan struktur jalan dan rehabilitasi/pemeliharaan periodik jalan.

Penjelasan Mutasi Kurang Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan :

1. Reklasifikasi keluar ke GB yang sudah menjadi aset tetap senilai Rp2.294.508.511,65 pada Dinas PUPR atas pengerjaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Pertokoan Kec. Langke Rembong; dan
2. Reklasifikasi keluar ke JIJ yang sudah menjadi aset tetap senilai Rp1.545.888.719,46 pada Dinas PUPR dan Dinas PPO, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.111 Daftar Rincian Reklasifikasi ke Aset Tetap JIJ TA 2025

No.	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Dinas PUPR	1.205.932.766,94
2	Dinas PPO	339.955.952,52
Jumlah		1.545.888.719,46

3. Terdapat temuan kekurangan volume paket pekerjaan yang menjadi KDP pada Dinas PUPR senilai Rp.705.804.771,12 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.112 Daftar Rincian Reklasifikasi ke Aset Tetap JIJ TA 2025

No.	Paket Pekerjaan	Nilai (Rp)
1	Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Dalam Kota Ruteng, HRS, Kec. Langke Rembong	228.845.709,20
2	Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Ruteng - Golo Cala, HRS, Kec. Satar Mese	71.934.735,01
	Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Ramut - Dintor, HRS, Kec. Satar Mese Barat	250.781.279,60
	Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Kedindl - Kajong, Lapen, Kec. Reok Barat	154.243.047,31
Jumlah		705.804.771,12

Rincian Konstruksi dalam Pengerjaan masing-masing SKPD per 31 Desember 2025 disajikan pada **Lampiran 13** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(Rp2.299.448.625.635,86)	(Rp2.166.051.785.756,44)



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.113 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2025

Uraian	Akumulasi Penyusutan 2024 (Rp)	Penyusutan		Akum Penyusutan 31 Desember 2025 (Rp)
		Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
Peralatan dan Mesin	409.480.368.639,28	37.993.533.958,40	2.311.786.392,18	445.162.116.205,50
Gedung dan Bangunan	212.167.412.524,96	18.793.330679,98	141.409679,58	230.819.333.525,36
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.543.937.934.392,20	79.490.314.453,53	427.143.140,74	1.623.001.105.705,00
Aset Tetap Lainnya	466.070.200,00	-	-	466.070.200,00
Jumlah	2.166.051.785.756,44	136.277.179.091,91	2.880.339.212,49	2.299.448.625.635,86

5.3.1.4. Aset Lainnya

31 Desember 2025

31 Desember 2024

Rp18.401.184.762,14

Rp15.898.873.124,07

Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp18.401.184.762,14 dan senilai Rp15.898.873.124,07.

Tabel 5.114 Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	Tagihan Jangka Panjang	213.999.532,00	0,00	0,00	213.999.532,00
2	Aset Tidak Berwujud	3.088.953.486,00	547.363.020,00	0,00	3.636.316.506,00
3	Aset Lain-lain	48.817.095.229,96	4.640.659.570,94	1.646.111.322,09	51.811.643.478,81
4	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.540.216.928,6)	(281.479.238,60)	0,00	(2.821.696.167,20)
5	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(33.680.958.195,29)	(1.967.286.392,18)	(1.209.166.000,00)	(34.439.078.587,47)
	Jumlah	15.898.873.124,07	2.939.256.960,16	436.945.322,09	18.401.184.762,14

5.3.1.4.1. Tagihan Jangka Panjang

31 Desember 2025

31 Desember 2024

Rp213.999.532,00

Rp213.999.532,00

Jumlah Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 adalah senilai Rp213.999.532,00 karena tidak ada penambahan atau pengurangan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.115 Rincian Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	TGR BOS	108.124.032,00	0,00	0,00	108.124.032,00
2	TGR SKT JM	105.875.500,00	0,00	0,00	105.875.500,00
	Jumlah	213.999.532,00	0,00	0,00	213.999.532,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.3.1.4.2. Aset Tidak Berwujud

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp3.636.316.506,00	Rp3.088.953.486,00

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp3.636.316.506,00 dan Rp3.088.953.486,00 mengalami kenaikan senilai Rp547.363.020,00 atau 17,72% dibandingkan dengan nilai Aset Tidak Berwujud Tahun 2024 senilai Rp 3.088.953.486,00. Rincian lebih lanjut atas saldo Aset Tidak Berwujud TA 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.116 Daftar Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025

No.	Unit Pengguna Barang	Jenis	Nilai (Rp)
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	<i>Software</i>	49.995.000,00
2	Badan Pendapatan Daerah	<i>Software</i>	169.400.000,00
3	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Kajian	852.881.600,00
4	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Lisensi dan <i>Franchise</i>	390.500.600,00
5	Dinas PUPR	ATB Lainnya	1.153.851.286,00
6	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Kajian	472.325.000,00
7	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	<i>Software</i>	149.850.000,00
8	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	<i>Software</i>	397.513.020,00
Jumlah			3.636.316.506,00

Adapun rincian mutasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.117 Daftar Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025

No.	Jenis	Saldo Awal (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Lisensi dan <i>Franchise</i>	390.500.600,00	0,00	0,00	390.500.600,00
2	<i>Software</i>	209.920.000,00	547.363.020,00	0,00	757.283.020,00
3	Kajian	1.233.894.600,00	0,00	0,00	1.233.894.600,00
4	ATB Lainnya	1.254.638.286,00	0,00	0,00	1.254.638.286,00
Jumlah		3.088.953.486,00	547.363.020,00	0,00	3.238.803.486,00

Penjelasan mutasi tambah Aset Tidak Berwujud :

1. Belanja Modal pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai berupa *software* absensi *online* pegawai multiplatform senilai Rp149.850.000,00; dan
2. Reklasifikasi masuk dari Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga berupa Lisensi Tablet Pembelajaran TIK Enuma + LMS yang melekat pada Pengadaan Tablet Advan VX Neo T606 Octacore senilai Rp.397.513.020,00.

Rincian Aset Tidak Berwujud masing-masing SKPD per 31 Desember 2025 disajikan pada **Lampiran 14** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.3.1.4.3. Aset Lain-lain

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp51.811.643.478,81	Rp48.817.095.229,96

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 senilai Rp51.811.643.478,81 dan per 31 Desember 2024 senilai Rp48.817.095.229,96 terdiri dari aset tetap berupa Peralatan dan mesin, dan JJJ

Tabel 5.118 Daftar Aset Lain – Lain TA 2025

No.	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Akhir 2025 (Rp)
I	Aset lain-lain dari Aset Tetap				
1	Peralatan dan Mesin	26.970.658.074,51	2.014.980.521,00	1.209.166.000,00	27.776.472.595,51
2	Gedung dan Bangunan	7.073.151.722,00	25.000.000,00	0,00	7.098.151.722,00
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.697.859.254,00	0,00	0,00	1.697.859.254,00
4	Aset Tidak Berwujud	1.752.557.000,00	0,00	0,00	1.752.557.000,00
5	Aset Tetap Lainnya	1.693.996.670,00	0,00	0,00	1.693.996.670,00
	Jumlah I	39.188.222.720,51	2.039.980.521,00	1.209.166.000,00	40.019.037.241,51
II	Aset Tetap yang akan dihabiskan				
1	Gedung dan Bangunan	7.030.166.346,00	0,00	0,00	7.030.166.346,00
2	Peralatan dan Mesin	53.132.908,00	0,00	0,00	53.132.908,00
	Jumlah II	7.083.299.254,00	0,00	0,00	7.083.299.254,00
III	Aset Lain-lain Lainnya				
1	Treasury Deposit Facility (TDF)	18.526.000,00	0,00	18.526.000,00	0,00
2	Temuan kekurangan volume	1.747.519.597,38	1.275.844.570,39	32.945.065,34	2.990.419.102,43
3	Temuan kelebihan bayar Belanja Barang dan Jasa	754.910.790,07	325.006.234,22	371.331.756,75	708.585.267,54
4	Temuan kelebihan bayar Belanja Pegawai	24.616.868,00	65.804.084,00	14.142.500,00	76.278.452,00
5	Temuan Kelebihan Penerimaan Transfer DAK Non Fiskal	0,00	510.892.800,00	0,00	510.892.800,00
6	Temuan Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga	0,00	49.193.000,00	0,00	49.193.000,00
7	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah atas Temuan BPK	0,00	373.938.361,33	0,00	373.938.361,33



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Akhir 2025 (Rp)
	yang belum ada SKTJM				
	Jumlah III	2.545.573.255,45	2.600.679.049,94	436.945.322,09	4.709.306.983,30
	Jumlah I+II+III	48.817.095.229,96	4.640.659.570,94	1.646.111.322,09	51.811.643.478,81

Penjelasan atas mutasi tambah Aset Lain-lain adalah sebagai berikut.

1. Mutasi tambah aset lain-lain dari aset tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp2.014.980.521,00 merupakan Aset Tetap yang dimutasikan ke Aset lain-lain karena perubahan kondisi dari Baik menjadi Rusak Berat.

Tabel 5.119 Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin Rusak Berat/Usang TA 2025

No.	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	462.625.776,00
2	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	19.427.384,00
3	BKPSDM	57.929.000,00
4	Dinas Kesehatan	1.408.837.560,00
5	Bagian Perekonomian dan SDA	8.170.000,00
6	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	22.490.801,00
7	Sekretariat DPRD	35.500.000,00
	Jumlah	2.014.980.521,00

2. Mutasi tambah aset lain-lain dari aset tetap Gedung dan Bangunan berupa Bangunan Pos Jaga pada Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai senilai Rp25.000.000,00 merupakan Aset Tetap yang dimutasikan ke Aset lain-lain karena perubahan kondisi dari Baik menjadi Rusak Berat.
3. Mutasi tambah Aset lain-lain Lainnya, yaitu atas temuan kurang volume Aset Tetap senilai Rp1.275.844.570,39 yang terdiri dari:
 - a. Temuan kurang volume Peralatan dan Mesin senilai Rp30.775.000,00;
 - b. Temuan kurang volume Gedung dan Bangunan senilai Rp122.336.573,07;
 - c. Temuan kurang volume Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp416.928.226,20; dan
 - d. Temuan kurang volume Aset Tetap KDP senilai Rp705.804.771,12;
4. Mutasi tambah Aset Lain-Lain Lainnya, yaitu atas temuan kelebihan pembayaran Belanja Barang dan Jasa senilai Rp325.006.234,22 yang terdiri dari:
 - a. Kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas senilai Rp216.950.000,00;
 - b. Kelebihan pembayaran belanja air atas BOSP senilai Rp8.927.362,00;
 - c. Kelebihan pembayaran belanja ATK atas dana BOSP senilai Rp18.906.100,00;
 - d. Kelebihan pembayaran jasa konsultasi senilai Rp23.867.472,22; dan
 - e. Kelebihan pembayaran belanja BBM senilai Rp56.355.300,00;
5. Mutasi tambah Aset lain-lain Lainnya atas temuan kelebihan Belanja Pegawai senilai Rp65.804.084,00 atas Tunjangan Suami/Istri dan beras;
6. Mutasi tambah Aset lain-lain Lainnya atas kelebihan Penerimaan Transfer DAK Non Fisik pada Dinas PPO senilai Rp.510.892.800,00;



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

7. Mutasi tambah Aset lain-lain Lainnya atas kelebihan pembayaran Belanja Tidak Terduga senilai Rp49.193.000,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai; dan
8. Mutasi tambah Aset lain-lain Lainnya atas Piutang Lain-lain yang sah senilai Rp373.938.361,33 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas PUPR, dan Dinas PPO.

Penjelasan atas mutasi kurang Aset lain-lain adalah sebagai berikut.

1. Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Manggarai melaksanakan kegiatan Pelelangan Umum atas aset rusak berat dari Aset lain-lain berupa Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 sejumlah 77 unit pada 10 Perangkat Daerah. Pelelangan Umum difasilitasi oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pelelangan Umum tersebut dilakukan dengan metode pelelangan unit sebanyak 27 unit dan metode *Scrap* sebanyak 50 unit, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.120 Rincian Penghapusan Aset Lain-lain atas Pelelangan Umum

No.	Perangkat Daerah	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
1	Bagian Administrasi Pembangunan	27.500.000,00	Lelang umum
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	44.500.000,00	Lelang umum
3	Bagian Organisasi	68.500.000,00	Lelang umum
4	Bagian Perekonomian dan SDA	83.900.000,00	Lelang umum
5	Bagian Umum	165.000.000,00	Lelang umum
6	Badan Pendapatan Daerah	30.000.000,00	Lelang umum
7	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	155.868.000,00	Lelang umum
8	Badan Keuangan dan Aset Daerah	166.250.000,00	Lelang umum
9	Dinas Perhubungan	205.648.000,00	Lelang umum
10	Sekretariat DPRD	262.000.000,00	Lelang umum
Jumlah		1.209.166.000,00	

2. Mutasi kurang *Treasury Deposit Facility* (TDF) senilai Rp18.526.000,00 merupakan pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil Non Tunai melalui TDF Tahun 2024 yang telah dicairkan ke Pemerintah Daerah;
3. Mutasi kurang temuan kekurangan volume senilai Rp32.945.065,34 merupakan temuan kekurangan volume pekerjaan TA 2023 dan 2024 yang sudah dibayar pada Tahun 2025;
4. Mutasi kurang atas Penyetoran Temuan Kelebihan bayar Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 yang telah dibayar senilai Rp371.331.756,75 pada Tahun 2025;
5. Mutasi kurang atas temuan kelebihan bayar Belanja Pegawai Tahun 2024 yang telah disetor pada tahun 2025 senilai Rp14.142.500,00.

5.3.1.4.4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(Rp2.821.696.167,20)	(Rp2.540.216.928,60)

Saldo Nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 senilai (Rp2.821.696.167,20) merupakan Amortisasi Aset Tidak Berwujud berupa software, kajian dan aset tidak berwujud lainnya. Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai (Rp2.821.696.167,20) dan (Rp2.540.216.928,60) atau bertambah senilai Rp281.479.238,60.

5.3.1.4.5. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(Rp34.439.078.587,47)	(Rp33.680.958.195,29)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai (Rp34.439.078.587,47) dan senilai (Rp33.680.958.195,29).

Tabel 5.121 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya TA 2025

No.	Uraian	Saldo Awal 2025 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Akhir 2025 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(33.680.958.195,29)	(1.967.286.392,18)	(1.209.166.000,00)	(34.439.078.587,47)
	Jumlah	(33.680.958.195,29)	(1.967.286.392,18)	(1.209.166.000,00)	(34.439.078.587,47)

Mutasi tambah Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain senilai Rp1.967.286.392,18 bersumber dari Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang yang direklasifikasi ke Aset Lainnya pada tujuh SKPD terdiri dari:

1. Dinas Kesehatan senilai Rp1.408.837.560,00;
2. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan senilai Rp16.868.100,75;
3. Sekretariat Daerah senilai Rp18.670.000,00;
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian & Pengembangan senilai Rp19.427.384,00;
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp410.054.347,43;
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah senilai Rp57.929.000,00; dan
7. Sekretariat DPRD senilai Rp35.500.000,00.

5.3.1.5. Properti Investasi

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp76.617.160.735,04	Rp77.939.583.069,04

Sejak tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Manggarai menyajikan Properti Investasi pada Neraca Pemerintah Daerah Manggarai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 17 Properti Investasi dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Manggarai Nomor 72 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 72 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Manggarai. Pemerintah Manggarai menyajikan Properti Investasi atas Aset Tetap Tanah dan Gedung untuk menghasilkan sewa yaitu Tanah dan Gedung Rumah Toko seperti tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.122 Daftar Rincian Aset Tetap Properti Investasi

No.	Perangkat Daerah	Nama Barang	Jumlah	Harga (Rp)
Tanah				
1		1. Tanah Bangunan Pasar	14	25.318.643.005,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Perangkat Daerah	Nama Barang	Jumlah	Harga (Rp)
	Badan Pendapatan Daerah	2. Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi	1	1.850.000.000,00
2	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Tanah Bangunan Pasar	4	90.849.900,00
3	Bagian Umum	1. Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	1	36.730.000,00
		2. Tanah Bangunan Gudang	1	587.925.000,00
4	Dinas Koperasi. Usaha Kecil. Menengah dan Tenaga Kerja	Tanah Bangunan Pasar	1	27.900.000,00
Jumlah Tanah			22	27.912.047.905,00
Bangunan Gedung				
1	Badan Pendapatan Daerah	1. Bangunan Gedung Tertutup ermanen	1	314.950.623,00
		2. Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	15	15.059.867.524,00
2	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1. Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	1.797.032.000,00
		2. Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	21	43.923.718.491,00
		3. Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Seml Permanen	5	3.927.392.050,00
3	Dinas Koperasi. Usaha Kecil. Menengah dan Tenaga Kerja	1. Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1	913.696.000,00
		2. Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain	1	184.480.000,00
Jumlah Bangunan gedung			45	66.121.116.688,00
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung				(17.416.003.857,96)
Jumlah Tanah dan Bangunan Gedung				76.617.160.735,04

1. Tanah atas Gedung dan Bangunan Ruko yang dicatat sebagai Properti Investasi merupakan Tanah di bawah Gedung dan Bangunan Ruko yang selama ini dimanfaatkan oleh Pihak Ketiga dengan mekanisme sewa, atas Gedung dan Bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai pada tahun 2003 s.d. 2022.
2. Gedung dan Bangunan Ruko yang dicatat sebagai Properti Investasi merupakan Gedung dan Bangunan Ruko yang selama ini dimanfaatkan oleh Pihak Ketiga dengan mekanisme sewa, atas Gedung dan Bangunan tersebut dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai pada tahun 2003 - 2022.

5.3.1.5.1. Properti Investasi Tanah

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp27.912.047.905,00	Rp27.912.047.905,00

Properti Investasi Tanah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp27.912.047.905,00 dan Rp27.912.047.905,00 dan tidak terdapat penambahan maupun pengurangan Properti Investasi Tanah. Rincian lebih lanjut dapat disajikan pada tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.123 Daftar Aset Tetap Properti Investasi Tanah per 31 Desember 2025

No.	Perangkat Daerah	Nama Barang	Jumlah	Nilai (Rp)
1	Badan Pendapatan Daerah	Tanah Bangunan Pasar	14	25.318.643.005,00
		Tanah Bangunan Pertokoan/ Rumah Toko/Koperasi	1	1.850.000.000,00
2	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Tanah Bangunan Pasar	4	90.849.900,00
3	Bagian Umum	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	1	36.730.000,00
		Tanah Bangunan Gudang	1	587.925.000,00
4	Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja	Tanah Bangunan Pasar	1	27.900.000,00
Jumlah			22	27.912.047.905,00

5.3.1.5.2. Properti Investasi Gedung dan Bangunan

31 Desember 2025

31 Desember 2024

Rp66.121.116.688,00

Rp66.121.116.688,00

Properti Investasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp66.121.116.688,00 dan senilai Rp66.121.116.688,00, tidak terdapat mutasi penambahan maupun pengurangan Properti Investasi Bangunan dan Gedung. Rincian lebih lanjut dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.124 Rincian Aset Tetap Properti Investasi Gedung dan Bangunan

No.	Perangkat Daerah	Nama Aset	Unit	Nilai (Rp)
1	Badan Pendapatan Daerah	Bangunan Gedung Tertutup Permanen	1	314.950.623,00
		Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	15	15.059.867.524,00
2	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Bangunan Gedung Tertutup Permanen	1	1.797.032.000,00
		Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	21	43.923.718.491,00
		Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Semi Permanen	5	3.927.392.050,00
3	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1	913.696.000,00
		Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain	1	184.460.000,00
Jumlah			45	66.121.116.688,00

5.3.1.5.3. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

31 Desember 2025

31 Desember 2024

(Rp17.416.003.857,96)

(Rp16.093.581.523,96)

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai (Rp17.416.003.857,96) dan senilai (Rp16.093.581.523,96). Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi TA 2025 senilai (Rp17.416.003.857,96) merupakan penyusutan atas Properti Investasi Gedung dan Bangunan yang ada di Kabupaten Manggarai. Rincian lebih lanjut dapat disajikan pada tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.125 Daftar Rincian Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025

No.	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	(11.525.841.007,08)
2	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	(142.846.320,00)
3	Badan Pendapatan Daerah	(5.747.316.530,88)
Jumlah		(17.416.003.875,96)

5.3.2. Kewajiban

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp13.489.704.709,17	Rp3.805.907.176,68

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp13.489.704.709,17 dan Rp3.805.907.176,68. Kewajiban adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek (kewajiban lancar) dan kewajiban jangka panjang.

5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp13.489.704.709,17	Rp3.805.907.176,68

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp13.489.704.709,17 dan Rp3.805.907.176,68, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.126 Kewajiban Jangka Pendek TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	Saldo Awal 2025 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo akhir 2025 (Rp)
1	Utang PFK	132.421.306,17	1.121.124.796,78	129.459.161,17	1.124.086.941,78
2	Utang Belanja	3.484.752.617,51	8.841.838.640,14	3.301.015.290,26	9.025.575.967,39
3	Utang Jangka Pendek Lainnya	188.733.253,00	3.645.900.889,01	494.592.342,01	3.340.041.800,00
Jumlah		3.805.907.176,68	13.608.864.325,93	3.925.066.793,44	13.489.704.709,17

5.3.2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp1.124.086.941,78	Rp132.421.306,17

Utang Perhitungan Pihak Ketiga senilai Rp1.124.086.941,78 terdiri dari:

1. Utang PFK BUD senilai Rp1.091.871.106,78 dimana senilai Rp2.870.645,68 berada di Kas di Kas Daerah dan senilai Rp1.089.000.461,10 berada di Kas Lainnya;
2. Utang PFK untuk beberapa sekolah yang belum lunas senilai Rp31.251.938,00;
3. Utang PFK Dana JKN senilai Rp295.607,00; dan
4. Utang PFK BOK senilai Rp668.290,00.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Saldo Rincian saldo Utang PFK per 31 Desember 2025 dan 2024 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.127 Rincian Utang PFK per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No.	Uralan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
A	PFK pada Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.091.871.106,78	15.307.246,00
1	Utang PPN	938.076.770,68	12.616.692,00
2	Utang PPh Pasal 21	566.280,00	0,00
3	Utang PPh Pasal 22	7.520.423,00	820.075,00
4	Utang PPh Pasal 23	2.078.400,00	0,00
5	Utang PPh Pasal 4 ayat 2	143.629.233,10	1.871.479,00
B	PFK pada Bendahara BOSP SD dan SMP	31.251.938,00	39.032.372,00
1	Utang PPn	25.243.399,00	32.462.308,00
2	Utang PPh Pasal 21	736.000,00	1.018.000,00
3	Utang PPh Pasal 23	5.272.539,00	5.552.064,00
C	PFK pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0,00	64.529.382,00
1	Utang PPn	0,00	21.215.264,00
2	Utang PPh Pasal 21	0,00	37.240.000,00
3	Utang PPh Pasal 22	0,00	4.014.383,00
4	Utang PPh Pasal 23	0,00	2.059.735,00
D	PFK pada Bendahara FKTP	295.607,00	2.334.519,17
1	Utang PPn	260.135,00	2.177.677,17
2	Utang PPh Pasal 21	0,00	17.133,00
3	Utang PPh Pasal 22	35.472,00	139.709,00
E	PFK pada Bendahara Prolanis	0,00	192.544,00
1	Utang PPh Pasal 23	0,00	192.544,00
F	PFK pada Bendahara BOK	668.290,00	11.025.243,00
1	Utang PPn	498.000,00	4.845.295,00
2	Utang PPh Pasal 21	29.324,00	4.396.762,00
3	Utang PPh Pasal 22	136.466,00	1.132.586,00
4	Utang PPh Pasal 23	4.500,00	651.600,00
Jumlah (A+B+C+D+E+F)		1.124.086.941,78	132.421.306,17

5.3.2.1.2. Utang Belanja

31 Desember 2025

Rp9.025.575.967,39

31 Desember 2024

Rp3.484.752.617,51

Jumlah Utang Belanja per 31 Desember 2025 senilai Rp9.025.575.967,39 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.128 Rincian Utang Belanja per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No.	Uralan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	131.835.997,25	65.793.171,25
	Utang Belanja Pegawai	131.835.997,25	65.793.171,25



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uralan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	131.835.997,25	55.793.171,25
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	6.433.013.769,00	3.301.015.290,26
	Utang Belanja Barang	805.436.660,00	0,00
	Dinas Kesehatan	805.436.660,00	0,00
	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	5.627.577.109,00	3.278.834.594,02
	Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng	5.627.577.109,00	3.278.834.594,02
	Utang Belanja Jasa	0,00	22.180.696,24
	Dinas Kesehatan	0,00	22.180.696,24
3	Utang Belanja Modal	2.460.726.021,14	127.943.976,00
	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.286.550,00	0,00
	Dinas Kesehatan	52.286.550,00	0,00
	Utang Belanja Modal - Aset Tetap Gedung dan Bangunan	497.935.858,43	111.627.925,00
	Dinas Penanaman Modal	96.207.910,00	96.207.910,00
	Dinas Kesehatan	15.420.015,00	15.420.015,00
	Dinas PPO	386.307.933,43	0,00
	Utang Belanja Modal - Aset Tetap JIJ	1.910.503.612,71	16.316.051,00
	Dinas PUPR	1.898.937.561,71	4.750.000,00
	Kecamatan Ruteng	11.566.051,00	11.566.051,00
4	Utang Belanja Bantuan Keuangan	180,00	180,00
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	180,00	180,00
	Jumlah	9.025.575.967,39	3.484.752.617,51

Rincian Utang Belanja dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Utang Pegawai per 31 Desember 2025 senilai Rp131.835.997,25 terdiri dari:
 - a. Utang iuran jaminan kesehatan kepada BPJS Kesehatan atas gaji susulan dan gaji terusan senilai Rp76.042.826,00; dan
 - b. Utang pegawai berupa sisa utang PD Komodo Jaya yang sudah dilikuidasi senilai Rp55.793.171,25 yang terdiri dari pengakuan saldo awal tahun 2015 senilai Rp164.300.144,25 dan sudah terbayar tahun 2016 senilai Rp108.506.973,00.

2. Utang Belanja Barang dan Jasa

Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 senilai Rp6.433.013.769,00 merupakan utang belanja barang pada Dinas Kesehatan senilai Rp805.436.660,00 dan Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD senilai Rp5.627.577.109,00.

3. Utang Belanja Modal

Utang Belanja Modal per 31 Desember 2025 senilai Rp2.460.726.021,14 terdiri dari:

- a. Utang Belanja Modal-Aset Tetap Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya pada Dinas Kesehatan senilai Rp52.286.550,00;
- b. Utang Belanja Modal-Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp96.207.910,00, pada Dinas Kesehatan senilai Rp15.420.015,00, dan pada Dinas PPO senilai Rp386.307.933,43.
- c. Utang Belanja Modal-Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jalan per 31 Desember 2025 senilai Rp1.910.503.612,71 yang terdiri dari Utang belanja Tahun 2021 senilai



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Rp4.750.000,00 dan Tahun 2025 senilai Rp1.898.937.561,71 pada Dinas PUPR dan Kecamatan Ruteng senilai Rp11.566.051,00.

4. Utang Bantuan Keuangan

Utang Belanja Bantuan Keuangan per 31 Desember 2025 senilai Rp180,00 merupakan kekurangan Transfer Bantuan Keuangan berupa Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Watu Baur Kecamatan Reok pada Tahun 2024.

5.3.2.1.3. Utang Jangka Pendek Lainnya

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp3.340.041.800,00	Rp188.733.253,00

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 senilai Rp3.340.041.800,00 dan per 31 Desember 2024 senilai Rp188.733.253,00, dengan mutasi sebagai berikut.

Tabel 5.129 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025

No.	Uraian	Saldo	Mutasi		Saldo
		31 Desember 2024 (Rp)	Tambah (Rp)	Kurang(Rp)	31 Desember 2025 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	162.426.253,00	305.859.089,01	468.285.342,01	0,00
2	Dinas Kesehatan	26.307.000,00	0,00	26.307.000,00	0,00
3	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	0,00	3.340.041.800,00	0,00	3.340.041.800,00
Jumlah		188.733.253,00	3.340.041.800,00	188.733.253,00	3.340.041.800,00

Rincian mutasi pada Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut.

- Utang Jangka Pendek Lainnya berupa pengadaan bangunan dan gedung pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp162.426.253,00 di Tahun 2024 ditambah dengan utang pengadaan Gedung dan Bangunan Tahun 2025 senilai Rp305.859.089,01 telah direklas ke Utang Belanja Modal.
- Utang pengadaan aset tetap pada Dinas Kesehatan sebesar Rp26.307.000,00 telah direklas ke Utang Belanja Modal;
- Utang Jangka Pendek Lainnya tahun 2025 senilai Rp3.340.041.800,00 merupakan utang atas kelebihan pembayaran Dana Transfer Pusat pada Badan Keuangan dan Aset Daerah, yang terdiri dari:
 - Utang kelebihan penerimaan Dana Transfer Umum DBH senilai Rp2.829.149.000,00 terdiri dari :
 - Kelebihan penerimaan DBH Pajak PPh Pasal 21 senilai Rp191.802.000,00;
 - Kelebihan penerimaan DBH PBB senilai Rp654.682.000,00;
 - Kelebihan penerimaan DBH Pajak CHT senilai Rp20.162.000,00;
 - Kelebihan penerimaan DBH SDA Minerba Landrent senilai Rp59.782.000,00;
 - Kelebihan penerimaan DBH SDA Minerba Royalty senilai Rp13.864.000,00;
 - Kelebihan penerimaan DBH SDA Panas Bumi senilai Rp161.040.000,00;
 - Kelebihan penerimaan DBH SDA Kehutanan senilai Rp5.726.000,00; dan
 - Kelebihan penerimaan DBH SDA Perikanan senilai Rp1.722.091.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- b. Utang kelebihan penerimaan pendapatan transfer DAK Non Fisik senilai Rp510.892.800,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.130 Rincian Utang Kelebihan Penerimaan Pendapatan Transfer

Nama Satuan Pendidikan	Nilai (Rp)
SKB Randong	7.220.000,00
PKBM Amenehung	189.468.300,00
PKBM Benteng Pongkor	34.484.500,00
PKBM Cahyo Timur	20.600.000,00
PKBM Compang Nderas	33.340.000,00
PKBM Fyllano	6.180.000,00
PKBM Karya Muda	72.100.000,00
PKBM Kembang Emas	23.700.000,00
PKBM Maju Bersama	19.240.000,00
PKBM Maria Assumpta	6.880.000,00
PKBM Mentari Pagl	3.770.000,00
PKBM Mutlara Hati Bola	5.840.000,00
PKBM Pumama Jaya	8.240.000,00
PKBM Santu Benedikto	26.280.000,00
PKBM Taman Harapan	10.300.000,00
PKBM Titong Flores	41.190.000,00
PKBM Ulu Wae Randong	2.060.000,00
Jumlah	510.892.800,00

5.3.3. Ekuitas

31 Desember 2025

31 Desember 2024

Rp2.074.869.841.258,66

Rp2.055.142.764.696,19

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 senilai Rp2.074.869.841.258,66 dan per 31 Desember 2024 senilai Rp2.055.142.764.696,19, dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 5.131 Rincian Ekuitas TA 2025

Uraian	Nilai (Rp)
Ekuitas Awal	2.055.142.764.696,19
Surplus/Defisit-LO	20.637.580.118,42
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	
Koreksi Ekuitas - Kas	4.199.999,18
Koreksi Ekuitas - Piutang	4.205.506.674,01
Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang	(264.084.900,47)
Koreksi Ekuitas - Beban dibayar dimuka	960.400,00
Koreksi Ekuitas - Investasi	(1.172.074.863,00)
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	148.262.102,00
Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	419.520.560,33
Koreksi Ekuitas - Kewajiban	(4.252.793.528,00)
Ekuitas Akhir	2.074.869.841.258,66

Uraian tentang akun ekuitas secara lebih terperinci disajikan pada bagian penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.4. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai yang tercermin dalam Pendapatan Daerah-LO, Beban dan Surplus/Defisit Operasional.

5.4.1. Pendapatan Daerah-LO

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp1.129.447.834.412,63	Rp1.163.726.926.866,26

Pendapatan Daerah-LO adalah hak pemerintah Kabupaten Manggarai yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Daerah-LO TA 2025 senilai Rp1.129.447.834.412,63 mengalami penurunan senilai Rp34.279.092.453,63 atau sebesar 2,95% dari pendapatan TA 2024 senilai Rp1.163.726.926.866,26. Realisasi Pendapatan Daerah-LO TA 2025 dan 2024 dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.132 Pendapatan Daerah-LO TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenalkan/ Penurunan (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	121.210.488.373,63	114.935.289.261,26	6.275.199.112,37	5,46
2	Pendapatan Transfer-LO	940.542.996.191,00	1.025.663.087.211,00	(85.120.091.020,00)	(8,30)
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	67.694.349.848,00	23.128.550.394,00	44.565.799.454,00	192,69
Jumlah		1.129.447.834.412,63	1.163.726.926.866,26	(34.279.092.453,63)	(2,95)

Realisasi masing-masing akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp121.210.488.373,63	Rp114.935.289.261,26

Pos ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO untuk periode Tahun 2025 senilai Rp121.210.488.373,63 yang terdiri dari:

Tabel 5.133 Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO TA 2025

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenalkan/ Penurunan (Rp)	%
1	Pendapatan Pajak Daerah-LO	31.251.628.662,00	22.203.028.224,00	9.048.600.438,00	40,75
2	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	7.742.870.368,00	7.506.282.565,00	236.587.803,00	3,15
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	5.511.802.797,00	5.284.238.494,00	227.564.303,00	4,31



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenalkan/ Penurunan (Rp)	%
4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	76.704.186.546,63	79.941.739.978,26	(3.237.553.431,63)	(4,05)
Jumlah PAD-LO		121.210.488.373,63	114.935.289.261,26	6.275.199.112,37	5,46

Realisasi masing-masing akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

5.4.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah-LO

31 Desember 2025	31 Desember 2025
<u>Rp31.251.628.662,00</u>	<u>Rp22.203.028.224,00</u>

Realisasi Pendapatan Pajak-LO Tahun 2025 senilai Rp31.251.628.662,00 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya senilai Rp9.048.600.438,00 atau sebesar 40,75%. Rincian Realisasi Pajak Daerah – LO TA 2025 sebagai berikut.

Tabel 5.134 Pendapatan Pajak Daerah-LO TA 2025

No.	Uraian Pendapatan Pajak Daerah-LO	Nilai (Rp)
1	Pajak Hotel-LO	622.679.336,00
2	Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	2.738.748.756,00
3	Pajak Hiburan-LO	12.392.000,00
4	Pajak Reklame-LO	240.541.000,00
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	6.742.136.891,00
6	Pajak Air Tanah-LO	317.221.816,00
7	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan-LO	5.591.932.032,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	5.667.405.339,00
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	1.120.822.663,00
10	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	5.204.495.069,00
11	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	2.993.253.760,00
Jumlah		31.251.628.662,00

Terdapat perbedaan antara Pendapatan Pajak Daerah-LO dan Pendapatan Pajak Daerah LRA. Rincian lebih lanjut atas perbedaan Pendapatan Pajak Daerah-LO dan Pendapatan Pajak Daerah-LRA tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.135 Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah LO dan LRA TA 2025

No.	Uraian Pendapatan Pajak Daerah	Nilai LO (Rp)	Nilai LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pajak Hotel	622.679.336,00	613.956.000,00	8.723.336,00
2	Pajak Restoran	2.738.748.756,00	2.729.596.083,00	9.152.673,00
3	Pajak Hiburan	12.392.000,00	11.892.000,00	500.000,00
4	Pajak Reklame	240.541.000,00	210.621.400,00	29.919.600,00
5	Pajak Penerangan Jalan	6.742.136.891,00	6.690.726.742,00	51.410.149,00
6	Pajak Air Tanah	317.221.816,00	323.106.060,00	(5.884.244,00)
7	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	5.591.932.032,00	5.275.940.493,00	315.991.539,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5.667.405.339,00	5.109.212.084,00	558.193.255,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian Pendapatan Pajak Daerah	Nilai LO (Rp)	Nilai LRA (Rp)	Selisih (Rp)
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.120.822.663,00	1.120.822.663,00	0,00
10	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	5.204.495.069,00	5.204.495.069,00	0,00
11	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	2.993.253.760,00	2.993.253.760,00	0,00
Jumlah		31.251.628.662,00	30.283.622.354,00	968.006.308,00

Selisih Pendapatan Pajak Daerah-LO dan Pendapatan Pajak Daerah-LRA senilai Rp968.006.308,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Selisih Pendapatan Pajak Hotel-LO dan Pendapatan Pajak Hotel-LRA senilai Rp8.723.336,00 merupakan piutang baru Pajak Hotel di tahun berjalan senilai Rp22.958.686,00 dan pelunasan Piutang Pajak Hotel senilai Rp14.235.350,00;
2. Selisih Pendapatan Pajak Restoran-LO dan Pendapatan Pajak Restoran-LRA senilai Rp9.152.673,00 merupakan piutang baru Pajak Restoran di tahun berjalan senilai Rp26.837.282,00 dan pelunasan Piutang senilai Rp17.684.609,00;
3. Selisih Pendapatan Pajak Hiburan-LO dan Pendapatan Pajak Hiburan-LRA senilai Rp500.000,00 merupakan piutang baru Pajak Hiburan di tahun berjalan senilai Rp500.000,00;
4. Selisih Pendapatan Pajak Reklame-LO dan Pendapatan Pajak Reklame-LRA senilai Rp29.919.600,00 merupakan piutang baru Pajak Reklame di tahun berjalan senilai Rp29.919.600,00;
5. Selisih Pendapatan Pajak Penerangan Jalan LRA dan LO senilai Rp51.410.149,00 merupakan piutang baru Pajak Penerangan Jalan di tahun berjalan senilai Rp667.701.310,00 dan pelunasan Piutang Pajak Penerangan Jalan senilai Rp616.291.161,00;
6. Selisih Pendapatan Pajak Air Tanah-LO dan Pendapatan Pajak Air Tanah-LRA senilai (Rp5.884.244,00) merupakan piutang baru Pajak Air Tanah di tahun berjalan senilai Rp1.704.007,00 dan pelunasan Piutang Pajak Air Tanah senilai Rp7.588.251,00;
7. Selisih Pendapatan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan-LO dan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan-LRA senilai Rp315.991.539,00 merupakan piutang baru Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di tahun berjalan senilai Rp548.764.846,00 dan pelunasan Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan senilai Rp232.773.307,00; dan
8. Selisih Pendapatan PBBP2-LO dan Pendapatan PBBP2-LRA senilai Rp558.193.255,00 merupakan piutang baru PBBP2 di tahun berjalan senilai Rp1.250.343.610,00, pelunasan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) senilai Rp692.150.355,00.

5.4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah-LO

31 Desember 2025	31 Desember 2024
<u>Rp7.742.870.368,00</u>	<u>Rp7.506.282.565,00</u>

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2025 senilai Rp7.742.870.368,00 mengalami kenaikan senilai Rp236.587.803,00 atau sebesar 3,15% dari Pendapatan



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Retribusi Daerah-LO TA 2024 senilai Rp7.506.282.565,00. Adapun rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO TA 2025 sebagai berikut.

Tabel 5.136 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO TA 2025

No.	Uraian Pendapatan Retribusi Daerah-LO	Nilai (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	444.727.500,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	532.578.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	264.566.000,00
4	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	1.012.956.700,00
5	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO	3.799.465.350,00
6	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	296.280.000,00
7	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	5.320.952,00
8	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	1.000.000,00
9	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	864.160.000,00
10	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-LO	375.359.000,00
11	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	146.456.866,00
Jumlah Pendapatan Retribusi		7.742.870.368,00

Terdapat perbedaan antara Pendapatan Retribusi Daerah-LO dan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA. Rincian lebih lanjut atas perbedaan Pendapatan Retribusi Daerah-LO dan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.137 Perbandingan Pendapatan Retribusi LO dan LRA TA 2025

No.	Uraian Pendapatan Retribusi Daerah - LO	Nilai LO (Rp)	Nilai LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	444.727.500,00	444.727.500,00	0,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	532.578.000,00	532.578.000,00	0,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	264.566.000,00	264.566.000,00	0,00
4	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.012.956.700,00	1.019.990.600,00	(7.033.900,00)
5	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	3.799.465.350,00	3.186.636.870,00	612.828.480,00
6	Retribusi Rumah Potong Hewan	296.280.000,00	296.280.000,00	0,00
7	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	5.320.952,00	5.320.952,00	0,00
8	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
9	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	864.160.000,00	864.160.000,00	0,00
10	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	375.359.000,00	375.359.000,00	0,00
11	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	146.456.866,00	146.456.866,00	0,00
Jumlah Pendapatan Retribusi		7.742.870.368,00	7.137.075.788,00	605.794.580,00

Selisih Pendapatan Retribusi LO dan LRA sebesar Rp605.794.580,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Selisih Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah LO dan LRA senilai (Rp7.033.900,00) merupakan selisih akibat terdapat pelunasan Piutang Rumah



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas senilai Rp38.178.600,00, pelunasan Piutang Sewa Tanah senilai Rp8.678.500,00 dan terdapat penambahan piutang baru Rumah Dinas senilai Rp39.823.200,00;

2. Selisih Pendapatan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan LO dan LRA senilai Rp612.828.480,00 merupakan selisih akibat terdapat pelunasan Piutang Retribusi *Shopping Center* senilai Rp20.541.000,00, pelunasan Piutang Retribusi Ruko senilai Rp99.495.000,00, pelunasan Piutang Pasar Rakyat senilai Rp15.400.000,00, pelunasan Piutang Retribusi Pasar senilai Rp385.874.890,00 serta terdapat penambahan piutang baru Retribusi *Shopping Center* senilai Rp23.622.000,00, piutang baru Retribusi Ruko senilai Rp117.495.000,00, piutang baru Retribusi Pasar Rakyat senilai Rp36.000.000,00 dan piutang baru Retribusi Pasar senilai Rp957.022.370,00.

5.4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp5.511.802.797,00	Rp5.284.238.494,00

Saldo Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp5.511.802.797,00 dan senilai Rp5.284.238.494,00. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO mengalami kenaikan senilai Rp227.564.303,00 atau 4,31% dari tahun sebelumnya. Adapun Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO TA 2025 sebagai berikut.

Tabel 5.138 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO TA 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Bank NTT	4.511.802.797,00
2	Kontribusi PT. Perumda Tirta Komodo pada PAD	1.000.000.000,00
Jumlah		5.511.802.797,00

Tidak terdapat perbedaan antara Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO dan LRA.

5.4.1.1.4. Lain-lain PAD yang Sah-LO

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp76.704.186.546,63	Rp79.941.739.978,26

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah Lainnya-LO Tahun 2025 senilai Rp76.704.186.546,63 yang mengalami penurunan senilai Rp3.237.553.431,63 atau 4,05% dari pendapatan tahun lalu. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel 5.139 Rincian Lain-lain PAD yang Sah Lainnya-LO TA 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	7.680.000,00
2	Jasa Giro-LO	828.644.309,96
3	Pendapatan Bunga-LO	719.688.295,14
4	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	1.716.310.808,81
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	19.344.433,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	Nilai (Rp)
6	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	226.379.427,00
7	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	8.940,00
8	Pendapatan dari Pengembalian-LO	704.440.499,57
9	Pendapatan dari BLUD-LO	72.481.689.833,15
Jumlah		76.704.186.546,63

Terdapat perbedaan antara Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO dan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah LRA yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.140 Perbandingan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah LO dan LRA TA 2025

No.	Uraian	Nilai LO (Rp)	Nilai LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tidak Dipisahkan	0,00	262.083.000,00	(262.083.000,00)
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	7.680.000,00	7.680.000,00	0,00
3	Jasa Giro	828.644.309,96	828.644.309,96	0,00
4	Pendapatan Bunga	719.688.295,14	719.690.745,14	(2.450,00)
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.716.310.808,81	2.673.250.509,96	(956.939.701,15)
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	19.344.433,00	19.344.433,00	0,00
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	226.379.427,00	226.379.427,00	0,00
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	8.940,00	8.940,00	0,00
9	Pendapatan dari Pengembalian	704.440.499,57	6.656.067.876,26	(5.951.627.376,69)
10	Pendapatan dari BLUD	72.481.689.833,15	77.593.218.119,15	(5.111.528.286,00)
Jumlah		76.704.186.546,63	88.986.367.360,47	(12.282.180.813,84)

Selisih Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah LO dan LRA senilai (Rp12.282.180.813,84) pada tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Selisih Pendapatan dari Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tidak Dipisahkan LO dan LRA senilai (Rp262.083.000,00) merupakan penjualan kendaraan roda empat dinas senilai Rp142.454.000,00 dan lelang kendaraan bermotor roda dua senilai Rp119.629.000,00 yang tidak dicatat sebagai Pendapatan-LO melainkan mengurangi Aset Tetap;
2. Selisih Pendapatan Bunga LO dan LRA senilai (Rp2.450,00) merupakan penerimaan pelunasan piutang remunerasi TDF tahun 2024;
3. Selisih Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah LO dan LRA senilai (Rp956.939.701,15) merupakan penerimaan pelunasan atas temuan yang tidak dicatat sebagai Pendapatan-LO melainkan mengurangi nilai Aset Lainnya, yang terdiri dari:
 - a. Kurang volume pekerjaan senilai Rp32.945.065,34;
 - b. Temuan kelebihan pembayaran perjalanan dinas senilai Rp1.030.000,00;
 - c. Temuan kelebihan pembayaran honorarium senilai Rp23.852.500,00;
 - d. Temuan jasa konsultan senilai Rp2.000.000;



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- e. Temuan kelebihan pembayaran belanja Listrik senilai Rp53.703.000,00;
 - f. Penerimaan atas denda keterlambatan pekerjaan senilai Rp189.264.623,04; dan
 - g. Penerimaan atas pendapatan dari pengembalian pekerjaan senilai Rp654.144.512,77.
4. Selisih Pendapatan dari Pengembalian LO dan LRA senilai (Rp5.951.627.376,69) yang terdiri dari:
- a. Penerimaan atas sisa dana hibah partai politik senilai Rp5.694.941.657,59 yang mengurangi Beban Dibayar Dimuka;
 - b. Penerimaan atas temuan kelebihan pembayaran yang mengurangi Aset Lainnya terdiri dari
 - 1) Temuan kelebihan pembayaran perjalanan dinas senilai Rp144.369.939,10
 - 2) Temuan kelebihan pembayaran honorarium kegiatan senilai Rp6.454.250,00;
 - 3) Temuan kelebihan pembayaran tunjangan anak dan beras senilai Rp14.142.500,00;
 - 4) Temuan kelebihan pembayaran belanja BBM senilai Rp75.602.030,00; dan
 - 5) Temuan kelebihan belanja Listrik senilai Rp16.117.000,00.
5. Selisih Pendapatan dari BLUD LO dan LRA senilai (Rp5.111.528.286,00) merupakan piutang baru BLUD senilai Rp357.721.614,00 dan pelunasan piutang BLUD senilai Rp5.469.249.900,00.

5.4.1.2. Pendapatan Transfer-LO

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp940.542.996.191,00	Rp1.025.663.087.211,00

Pos ini menggambarkan realisasi Pendapatan Transfer untuk periode tahun 2025 senilai Rp940.542.996.191,00 yang mengalami penurunan senilai Rp85.120.091.020,00 atau 8,30% dari tahun sebelumnya. Rincian Pendapatan Transfer-LO TA 2025 sebagai berikut.

Tabel 5.141 Rincian Pendapatan Transfer-LO TA 2025

No.	Uraian Pendapatan Transfer-LO	Nilai (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO	912.796.487.932,00
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	7.346.924.100,00
	Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	676.150.082.895,00
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	18.922.609.585,00
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	210.376.871.352,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	27.746.508.259,00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	27.546.508.259,00
	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	200.000.000,00
	Jumlah	940.542.996.191,00

Rincian Pendapatan Transfer dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.4.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp912.796.487.932,00	Rp994.228.079.037,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan-LO Tahun 2025 senilai Rp912.796.487.932,00 yang mengalami penurunan senilai Rp81.431.591.105,00 atau 8,19%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.142 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan-LO TA 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak-LO	5.059.697.100,00
2	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam-LO	2.287.227.000,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	676.150.082.895,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO	229.299.480.937,00
Jumlah		912.796.487.932,00

Rincian Realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO sebagai berikut.

5.4.1.2.1.1. Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak-LO

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp5.059.697.100,00	Rp4.371.521.000,00

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak-LO Tahun 2025 senilai Rp5.059.697.100,00 yang mengalami kenaikan senilai Rp688.176.100,00 atau 15,74% dari tahun sebelumnya. Rincian Dana Bagi Hasil Pajak-LO TA 2025 sebagai berikut.

Tabel 5.143 Rincian Dana Bagi Hasil Pajak-LO TA 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.767.879.400,00
2	DBH PPh Pasal 21	2.917.583.700,00
3	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	374.234.000,00
Jumlah		5.059.697.100,00

Terdapat perbedaan antara nilai Dana Bagi Hasil Pajak LO dan LRA yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.144 Perbandingan Dana Bagi Hasil Pajak LO dan LRA

No.	Uraian	Nilai LO	Nilai LRA	Selisih
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.767.879.400,00	1.784.524.400,00	(16.645.000,00)
2	DBH PPh Pasal 21	2.917.583.700,00	2.917.583.700,00	0,00
3	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	374.234.000,00	374.234.000,00	0,00
Jumlah		5.059.697.100,00	5.076.342.100,00	(16.645.000,00)

Selisih nilai Dana Bagi Hasil Pajak LO dan LRA senilai (Rp16.645.000,00) merupakan pencairan *Treasury Deposit Facility* (TDF) Tahun 2024 pada bulan April tahun 2025 yang tidak dicatat sebagai Pendapatan-LO melainkan mengurangi nilai Aset Lainnya.

5.4.1.2.1.2. Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam-LO

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp2.287.227.000,00	Rp2.589.809.000,00

Realisasi Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO Tahun 2025 senilai Rp2.287.227.000,00 dan Tahun 2024 senilai Rp2.589.809.000,00. Realisasi TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp302.582.000,00 atau 11,68% dari tahun sebelumnya. Rincian Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO TA 2025 sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.145 Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO TA 2025

No.	Uraian	Nilai LO
1	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	1.075.547.000,00
2	DBH SDA Mineral dan Batubara- Landrent-LO	33.770.000,00
3	DBH SDA Mineral dan Batubara- Royalty-LO	1.093.000,00
4	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)-LO	5.856.000,00
5	DBH SDA Perikanan-LO	1.170.961.000,00
Jumlah		2.287.227.000,00

Terdapat perbedaan antara nilai Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam LO dan LRA yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.146 Perbandingan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam LO dan LRA TA 2025

No.	Uraian	Nilai LO (Rp)	Nilai LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	1.075.547.000,00	1.075.548.000,00	(1.000,00)
2	DBH SDA Mineral dan Batubara- Landrent	33.770.000,00	33.770.000,00	0,00
3	DBH SDA Mineral dan Batubara- Royalty	1.093.000,00	1.864.000,00	(771.000,00)
4	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	5.856.000,00	6.965.000,00	(1.109.000,00)
5	DBH SDA Perikanan	1.170.961.000,00	1.170.961.000,00	0,00
Jumlah		2.287.227.000,00	2.289.108.000,00	(1.881.000,00)

Selisih nilai Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam LO dan LRA senilai (Rp1.881.000,00) merupakan pencairan *Treasury Deposit Facility* (TDF) Tahun 2024 pada bulan April tahun 2025 yang tidak dicatat sebagai Pendapatan-LO melainkan mengurangi nilai Aset Lainnya, dengan rincian sebagai berikut.

1. DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi senilai Rp1.000,00;
2. DBH SDA Mineral dan Batubara- Royalty senilai Rp771.000,00; dan
3. DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) senilai Rp1.109.000,00.

5.4.1.2.1.3. Dana Alokasi Umum (DAU)-LO

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp676.150.082.895,00	Rp677.515.472.202,00

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU)-LO Tahun 2025 senilai Rp676.150.082.895,00 dan Tahun 2024 senilai Rp677.515.472.202,00. Realisasi DAU-LO mengalami penurunan senilai Rp1.365.389.307,00 atau 0,20% dari tahun sebelumnya. Rincian Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU)-LO TA 2025 sebagai berikut.

Tabel 5.147 Rincian Dana Alokasi Umum-LO TA 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	DAU-LO	571.748.523.607,00
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan-LO	5.200.000.000,00
3	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja-LO	26.029.307.288,00
4	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan-LO	60.891.101.000,00
5	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan-LO	12.281.151.000,00
Jumlah		676.150.082.895,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tidak terdapat selisih nilai Dana Alokasi Umum antara LO dan LRA yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.148 Perbandingan Dana Alokasi Umum LO dan LRA TA 2025

No.	Uraian	Nilai LO (Rp)	Nilai LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	DAU-LO	571.748.523.607,00	571.748.523.607,00	0,00
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan-LO	5.200.000.000,00	5.200.000.000,00	0,00
3	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja-LO	26.029.307.288,00	26.029.307.288,00	0,00
4	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan-LO	60.891.101.000,00	60.891.101.000,00	0,00
5	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan-LO	12.281.151.000,00	12.281.151.000,00	0,00
Jumlah		676.150.082.895,00	676.150.082.895,00	0,00

5.4.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO

31 Desember 2025

Rp229.299.480.937,00

31 Desember 2024

Rp309.751.276.835,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO Tahun 2025 senilai Rp229.299.480.937,00 yang mengalami penurunan senilai Rp80.451.795.898,00 atau 25,97% dari tahun sebelumnya. Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO TA 2025 sebagai berikut.

Tabel 5.149 Rincian Dana Alokasi Khusus-LO TA 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Dana Alokasi Khusus Fisik	18.922.609.585,00
2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	210.376.871.352,00
Jumlah		229.299.480.937,00

Selisih nilai Dana Alokasi Khusus antara LO dan LRA yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.150 Perbandingan Dana Alokasi Khusus LO dan LRA TA 2025

No.	Uraian	Nilai LO (Rp)	Nilai LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	Dana Alokasi Khusus Fisik	18.922.609.585,00	18.922.609.585,00	0,00
2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	210.376.871.352,00	210.887.764.152,00	(510.892.800,00)
Jumlah		229.299.480.937,00	229.810.373.737,00	(510.892.800,00)

Selisih nilai Dana Alokasi Khusus antara LO dan LRA akibat terdapat temuan kelebihan Penerimaan Transfer DAK Non Fisik atas BOP Kesetaraan Tahun 2025 senilai Rp510.892.800,00, yang terdiri dari 1 SKB Negeri senilai Rp7.220.000,00 dan 16 PKBM Swasta senilai Rp503.672.800,00.

5.4.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO

31 Desember 2025

Rp27.746.508.259,00

31 Desember 2024

Rp31.435.008.174,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah-LO Tahun 2025 senilai Rp27.746.508.259,00 mengalami penurunan senilai Rp3.688.499.915,00 atau 11,73% dari realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah tahun sebelumnya. Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

5.4.1.2.2.1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp27.546.508.259,00	Rp31.435.008.174,00

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO Tahun 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp27.546.508.259,00 dan senilai Rp31.435.008.174,00. Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO Tahun 2025 mengalami penurunan senilai Rp3.888.499.915,00 atau 12,37%. Adapun Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 5.151 Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO TA 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	674.163.222,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	9.370.766.823,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO	35.795.283,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	17.465.782.931,00
Jumlah		27.546.508.259,00

Terdapat perbedaan antara Pendapatan Bagi Hasil Pajak LO dan LRA yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.152 Perbandingan Pendapatan Bagi Hasil Pajak LO dan LRA TA 2025

No.	Uraian	Nilai LO (Rp)	Nilai LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	674.163.222,00	0,00	674.163.222,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	9.370.766.823,00	10.660.928.100,00	(1.290.161.277,00)
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	35.795.283,00	49.138.727,00	(13.343.444,00)
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	17.465.782.931,00	17.465.782.931,00	0,00
Jumlah		27.546.508.259,00	28.175.849.758,00	(629.341.499,00)

Selisih Pendapatan Bagi Hasil Pajak LO dan LRA senilai (Rp629.341.499,00) dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Selisih Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor LO dan LRA senilai Rp674.163.222,00 merupakan koreksi tambah pengakuan Piutang Bagi Hasil Provinsi TA 2025 berdasarkan Surat Badan Pendapatan dan Aset Daerah No. 900.1.1.14.3/483/BPAD.1.1 Tanggal 11 Februari 2026 senilai Rp674.163.22,00;
2. Selisih Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor LO dan LRA senilai (Rp1.290.161.277,00) merupakan pelunasan piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor senilai Rp1.290.161.277,00; dan
3. Selisih Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan LO dan LRA senilai (Rp13.343.444,00) merupakan pelunasan Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan senilai Rp13.534.261,00 serta terdapat Pengakuan Piutang Bagi Hasil



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Provinsi atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan TA 2025 berdasarkan Surat Badan Pendapatan dan Aset Daerah No. 900.1.1.14.3/483/BPAD.1.1 Tanggal 11 Februari 2026 senilai Rp190.817,00.

5.4.1.2.2.2. Bantuan Keuangan-LO

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp200.000.000,00	Rp0,00

Realisasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp200.000.000,00 dan Rp0,00 adapun rinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel 5.153 Pendapatan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah TA 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	200.000.000,00
	Jumlah	200.000.000,00

Tidak terdapat selisih antara Pendapatan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah LO dan LRA seperti yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.154 Perbandingan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah LO dan LRA TA 2025

No.	Uraian	Nilai LO	Nilai LRA	Selisih
1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
	Jumlah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00

5.4.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp67.694.349.848,00	Rp23.128.550.394,00

Pos ini menggambarkan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO TA 2025 senilai Rp67.694.349.848,00 yang mengalami kenaikan senilai Rp44.565.799.454,00 atau 192,69% dari tahun sebelumnya. Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO TA 2025 sebagai berikut.

Tabel 5.155 Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO TA 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pendapatan Hibah-LO	49.906.322.842,00
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	17.788.027.006,00
	Jumlah	67.694.349.848,00

5.4.1.3.1. Pendapatan Hibah-LO

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp49.906.322.842,00	Rp6.827.100.145,00

Saldo Pendapatan Hibah-LO Tahun 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp49.906.322.842,00 dan senilai Rp6.827.100.145,00. Pendapatan Hibah-LO Tahun 2025 mengalami kenaikan senilai Rp43.079.222.697,00 atau (631,00%). Pendapatan Hibah-LO Tahun 2025 sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.156 Pendapatan Hibah-LO TA 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	49.040.083.956,00
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	866.238.886,00
Jumlah		49.906.322.842,00

Terdapat perbedaan antara nilai Pendapatan Hibah LO dan LRA yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.157 Pendapatan Hibah-LO TA 2025

No.	Uraian	Nilai LO (Rp)	Nilai LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	49.040.083.956,00	0,00	49.040.083.956,00
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	866.238.886,00	0,00	866.238.886,00
Jumlah		49.906.322.842,00	0,00	49.906.322.842,00

Selisih Pendapatan Hibah LO dan LRA senilai Rp49.906.322.842,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Selisih Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat LO dan LRA senilai Rp49.040.083.956,00 merupakan penerimaan hibah masuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berupa alat pengolahan tanah dan tanaman dari Kementerian Pertanian dan Ketahanan Pangan senilai Rp3.359.357.288,00, dan hibah masuk Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari Kementerian Pekerjaan Umum senilai Rp45.680.726.668,00; dan
2. Selisih Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya LO dan LRA senilai Rp866.238.886,00 merupakan hibah masuk persediaan berupa alat kontrasepsi dan bahan medis pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dari Pemerintah Provinsi senilai Rp523.428.200,00 dan hibah masuk obat-obatan pada Dinas Kesehatan dari Pemerintah Provinsi senilai Rp342.810.686,00.

5.4.1.3.2. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp17.788.027.006,00	Rp16.301.450.249,00

Saldo Pendapatan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO TA 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp17.788.027.006,00 dan senilai Rp16.301.450.249,00. Pendapatan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO Tahun 2025 mengalami kenaikan senilai Rp1.486.576.757,00 atau 9,12%. Pendapatan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO TA 2025 sebagai berikut.

Tabel 5.158 Pendapatan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO TA 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	17.374.841.217,00
2	Pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi-LO	413.185.789,00
Jumlah		17.788.027.006,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Terdapat perbedaan antara nilai Pendapatan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan LO dan LRA yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.159 Perbedaan Pendapatan Hibah LO dan LRA TA 2025

No.	Uraian	Nilai LO (Rp)	Nilai LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	17.374.841.217,00	17.833.593.454,66	(458.752.237,65)
2	Pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi	413.185.789,00	413.185.789,00	0,00
Jumlah		17.788.027.006,00	18.246.779.243,65	(458.752.237,65)

Selisih Pendapatan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan LO dan LRA senilai (Rp458.752.237,65) merupakan pelunasan piutang lainnya berupa Piutang Dana Non Kapitasi BPJS senilai Rp410.549.200,00 dan penerimaan atas temuan kelebihan jasa pelayanan JKN pada Puskesmas senilai Rp48.203.037,65 yang mengurangi Aset Lainnya.

5.4.2. Beban

31 Desember 2025	31 Desember 2024
<u>Rp1.112.230.174.808,52</u>	<u>Rp1.074.814.306.839,74</u>

Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Realisasi Beban tahun 2025 senilai Rp1.112.230.174.808,52 yang mengalami kenaikan senilai Rp37.415.867.968,78 atau 3,48% dari tahun sebelumnya. Rincian Beban-LO adalah sebagai berikut.

Tabel 5.160 Rincian Beban Tahun 2025

No.	Uraian Beban	Nilai (Rp)
1	Beban Pegawai	563.062.799.123,00
2	Beban Barang dan Jasa	296.533.725.389,69
3	Beban Bunga	0,00
4	Beban Hibah	37.609.640.363,94
5	Beban Bantuan Sosial	2.128.405.176,00
6	Beban Penyisihan Piutang	1.764.168.470,36
7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	137.881.080.664,53
8	Beban Transfer	73.250.355.621,00
Jumlah		1.112.230.174.808,52

5.4.2.1. Beban Pegawai

31 Desember 2025	31 Desember 2024
<u>Rp563.062.799.123,00</u>	<u>Rp491.751.428.195,02</u>

Beban Pegawai Kabupaten Manggarai adalah Beban Pegawai Tahun 2025 senilai Rp563.062.799.123,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.161 Rincian Beban Pegawai LO Tahun 2025

No.	Uraian Beban Pegawai	Nilai (Rp)
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	427.887.739.240,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	115.560.083.868,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian Beban Pegawai	Nilai (Rp)
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	18.586.085.836,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	220.223.738,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	763.816.441,00
7	Beban Pegawai BLUD	44.850.000,00
Jumlah		563.062.799.123,00

Terdapat perbedaan antara nilai Beban Pegawai dengan Belanja Pegawai yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.162 Perbedaan Beban Pegawai dan Belanja Pegawai Tahun 2025

No.	Uraian Beban Pegawai	Nilai LO (Rp)	Nilai LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	427.887.739.240,00	427.814.346.684,00	73.392.556,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	115.560.083.868,00	116.944.826.968,00	(1.384.743.100,00)
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	18.586.085.836,00	18.586.085.836,00	0,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	220.223.738,00	220.223.738,00	0,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	763.816.441,00	763.816.441,00	0,00
7	Beban Pegawai BLUD	44.850.000,00	44.850.000,00	0,00
Jumlah		563.062.799.123,00	564.374.149.667,00	(1.311.350.544,00)

Selisih Beban Pegawai dan Belanja Pegawai senilai (Rp1.311.350.544,00) dapat dijelaskan sebagai berikut.

- Selisih Beban Gaji dan Tunjangan ASN dan Belanja Gaji dan Tunjangan ASN senilai Rp73.392.556,00 disebabkan karena
 - Pengakuan beban atas pengurangan piutang atas kompensasi kelebihan penyeteroran PPh 21 yang telah direstitusi Tahun 2025 senilai Rp63.153.814,00;
 - Penambahan utang belanja pegawai atas iuran jaminan kesehatan kepada BPJS Kesehatan senilai Rp76.042.826,00; dan
 - Reklas Beban Pegawai ke Aset Lainnya atas temuan kelebihan pembayaran Belanja Pegawai atas Tunjangan Keluarga senilai Rp65.804.084,01.
- Selisih Beban Tambahan Penghasilan ASN dan Belanja Tambahan Penghasilan ASN senilai (Rp1.384.743.100,00) disebabkan karena adanya pelunasan utang Tambahan Penghasilan Guru senilai Rp89.638.100,00, Tunjangan Khusus Guru senilai Rp8.355.000,00 dan Tambahan Penghasilan Guru senilai Rp1.286.750.000,00;

5.4.2.2. Beban Barang

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp130.199.599.332,61	Rp109.417.517.773,93



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Saldo Beban Barang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp130.199.599.332,61 dan Rp109.417.517.773,93 yang merupakan konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang yang habis pakai. Beban Persediaan TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp20.782.081.558,68 atau 18,99% dari tahun sebelumnya. Rincian Beban Persediaan TA 2025 sebagai berikut.

Tabel 5.163 Rincian Beban Barang Tahun 2025

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Barang BOS	16.159.579.438,00
2	Beban Barang BOK	3.686.066.628,00
3	Beban Barang BLUD	34.026.610.971,00
4	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	30.282.000,00
5	Beban Bahan-Bahan Kimia	71.310.595,00
6	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.669.574.295,00
7	Beban Bahan-Bahan Baku	(139.609.850,00)
8	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.082.127.980,00
9	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	1.589.799.286,00
10	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	(2.750.000,00)
11	Beban Bahan-Bahan Lainnya	8.326.392.066,83
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.306.492.755,00
13	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar	(4.012.000,00)
14	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	(6.400.000,00)
15	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	14.420.000,00
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.634.611.210,00
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	908.641.616,00
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.960.455.906,00
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	159.910.000,00
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	56.964.950,00
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	423.679.160,00
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	280.662.000,00
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00
24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	29.900.000,00
25	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cinderamata	50.000.000,00
26	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	(7.468.077.225,43)
27	Beban Obat-Obatan-Obat	10.718.012.174,15
28	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	200.942.254,75
29	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	35.115.356.592,00
30	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	125.000.000,00
31	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	98.267.500,00
32	Beban Natura dan Pakan-Pakan	661.193.000,00
33	Beban Makanan dan Minuman Rapat	5.415.072.994,00
34	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.824.799.163,00
35	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.682.928.100,00
36	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	74.600.000,00
37	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	30.690.000,00
38	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	56.903.040,00
39	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	122.494.050,00
40	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	41.760.000,00
41	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	7.575.750,00
42	Beban Pakaian Adat Daerah	(5.780.000,00)
43	Beban Pakaian Paskibraka	58.398.000,00
44	Beban Barang Sampel Pangan	6.032.000,00
45	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	400.738.000,00
46	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service	70.295.000,00
47	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding	824.933,66
48	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.257.662.166,65



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Nilai (Rp)
49	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	4.200.000,00
50	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	133.348.500,00
51	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Home Use</i>)	1.520.000,00
52	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	39.250.000,00
53	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	11.249.961,00
54	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0,00
55	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	49.127.870,00
56	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal <i>Computer</i>	12.000.000,00
57	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal <i>Computer</i>	1.750.000,00
58	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	8.065.000,00
59	Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung	4.437.000,00
60	Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	242.435.100,00
61	Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	0,00
62	Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	(21.980.000,00)
63	Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	(8.479.900,00)
64	Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	18.144.988,00
65	Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	(48.673.708,00)
66	Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	7.350.000,00
67	Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik	2.944.450,00
68	Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi	14.802.000,00
69	Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah	91.766.113,00
70	Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	4.985.555,00
71	Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	3.800.000,00
72	Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	(59.922.598,00)
73	Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	5.000.000,00
74	Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah	2.113.100,00
75	Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	2.860.343.602,00
76	Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial	5.838.300,00
77	Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa	3.337.500,00
78	Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	450.000,00
Jumlah		130.199.599.332,61

Terdapat selisih antara Beban Barang dengan Belanja Barang. Selisih tersebut dapat disajikan dalam tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.164 Perbedaan Belanja Barang LRA dan Beban Barang Tahun 2025

No	Uralan	Nilai LO (Rp)	Nilai LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	Beban Barang BOS	16.159.579.438,00	16.159.579.438,00	0,00
2	Beban Barang BOK	3.686.066.628,00	3.686.066.628,00	0,00
3	Beban Barang BLUD	34.026.610.971,00	34.026.610.971,00	0,00
4	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	30.282.000,00	30.282.000,00	0,00
5	Beban Bahan-Bahan Kimia	71.310.595,00	0,00	71.310.595,00
6	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.669.574.295,00	1.725.929.595,00	(56.355.300,00)
7	Beban Bahan-Bahan Baku	(139.609.850,00)	0,00	(139.609.850,00)
8	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.082.127.980,00	1.099.528.730,00	(17.400.750,00)
9	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	1.589.799.286,00	220.783.286,00	1.369.016.000,00
10	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	(2.750.000,00)	0,00	(2.750.000,00)
11	Beban Bahan-Bahan Lainnya	8.326.392.066,83	7.289.664.004,00	1.036.728.062,83
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.306.492.755,00	1.307.092.755,00	(600.000,00)
13	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar	(4.012.000,00)	0,00	(4.012.000,00)
14	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	(6.400.000,00)	0,00	(6.400.000,00)
15	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	14.420.000,00	14.420.000,00	0,00
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.634.611.210,00	2.651.219.110,00	(16.607.900,00)
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	908.641.616,00	904.903.216,00	3.738.400,00
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.960.455.906,00	2.877.623.906,00	82.832.000,00
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	159.910.000,00	159.910.000,00	0,00
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	56.964.950,00	56.964.950,00	0,00
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	423.679.160,00	449.750.900,00	(26.071.740,00)
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	280.662.000,00	280.662.000,00	0,00
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00	39.072.000,00	(39.072.000,00)
24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga	29.900.000,00	29.900.000,00	0,00
25	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Nilai LO (Rp)	Nilai LRA (Rp)	Selisih (Rp)
26	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	(7.468.077.225,43)	336.808.300,00	(7.803.885.525,43)
27	Beban Obat-Obatan-Obat	10.718.012.174,15	2.436.773.840,00	8.281.238.334,15
28	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	200.942.254,75	283.983.842,00	(83.041.587,25)
29	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	35.115.356.592,00	35.310.959.592,00	(195.603.000,00)
30	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00
31	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	98.267.500,00	172.327.500,00	(74.060.000,00)
32	Beban Natura dan Pakan-Pakan	661.193.000,00	711.108.000,00	(49.915.000,00)
33	Beban Makanan dan Minuman Rapat	5.415.072.994,00	5.415.072.994,00	0,00
34	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.824.799.163,00	2.824.799.163,00	0,00
35	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.682.928.100,00	1.682.928.100,00	0,00
36	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	74.600.000,00	74.600.000,00	0,00
37	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	30.690.000,00	30.690.000,00	0,00
38	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	56.903.040,00	56.903.040,00	0,00
39	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	122.494.050,00	122.494.050,00	0,00
40	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	41.760.000,00	41.880.000,00	(120.000,00)
41	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	7.575.750,00	7.575.750,00	0,00
42	Beban Pakaian Adat Daerah	(5.780.000,00)	0,00	(5.780.000,00)
43	Beban Pakaian Paskibraka	58.398.000,00	58.398.000,00	0,00
44	Beban Barang Sampel Pangan	6.032.000,00	6.032.000,00	0,00
45	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	400.738.000,00	400.738.000,00	0,00
46	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service	70.295.000,00	70.295.000,00	0,00
47	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Pembandingan	824.933,66	0,00	824.933,66
48	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.257.662.166,65	1.040.000,00	1.256.622.166,65



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Nilai LO (Rp)	Nilai LRA (Rp)	Selisih (Rp)
49	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
50	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	133.348.500,00	287.984.404,00	(154.635.904,00)
51	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00
52	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	39.250.000,00	4.000.000,00	35.250.000,00
53	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	11.249.961,00	0,00	11.249.961,00
54	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0,00	64.824.000,00	(64.824.000,00)
55	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	49.127.870,00	0,00	49.127.870,00
56	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	12.000.000,00	36.850.000,00	(24.850.000,00)
57	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
58	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	8.065.000,00	0,00	8.065.000,00
59	Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	4.437.000,00	4.437.000,00	0,00
60	Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	242.435.100,00	242.435.100,00	0,00
61	Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	0,00	133.433.707,00	(133.433.707,00)
62	Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	(21.980.000,00)	0,00	(21.980.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Nilai LO (Rp)	Nilai LRA (Rp)	Selisih (Rp)
63	Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	(8.479.900,00)	0,00	(8.479.900,00)
64	Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	18.144.988,00	0,00	18.144.988,00
65	Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	(48.673.708,00)	0,00	(48.673.708,00)
66	Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	7.350.000,00	0,00	7.350.000,00
67	Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik	2.944.450,00	0,00	2.944.450,00
68	Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi	14.802.000,00	0,00	14.802.000,00
69	Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah	91.766.113,00	0,00	91.766.113,00
70	Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	4.985.555,00	0,00	4.985.555,00
71	Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
72	Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	(59.922.598,00)	0,00	(59.922.598,00)
73	Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
74	Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah	2.113.100,00	0,00	2.113.100,00
75	Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	2.860.343.602,00	0,00	2.860.343.602,00
76	Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial	5.838.300,00	0,00	5.838.300,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Nilai LO (Rp)	Nilai LRA (Rp)	Selisih (Rp)
77	Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa	3.337.500,00	0,00	3.337.500,00
78	Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	450.000,00	0,00	450.000,00
Jumlah		130.199.599.332,61	124.006.604.871,00	6.192.994.461,61

Selisih Beban Barang dan Belanja Barang senilai Rp6.192.994.461,61 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Selisih Beban Bahan-Bahan Kimia dan Belanja Bahan-Bahan Kimia senilai Rp71.310.595,00 disebabkan karena terdapat pemakaian persediaan pestisida pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan senilai Rp71.310.595,00;
2. Selisih Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas dan Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas senilai (Rp56.355.300,00) disebabkan karena adanya temuan kelebihan pembayaran Belanja Bahan Bakar dan Pelumas senilai Rp56.355.300,00;
3. Selisih Beban Bahan-Bahan Baku dan Belanja Bahan-Bahan Baku senilai (Rp139.609.850,00) disebabkan karena adanya reklasifikasi Beban Barang menjadi Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp139.609.850,00;
4. Selisih Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman dan Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman senilai (Rp17.400.750,00) terjadi akibat adanya reklasifikasi Beban Barang menjadi Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp17.400.750,00;
5. Selisih Beban Bahan-Isi Tabung Gas dan Belanja Bahan-Isi Tabung Gas senilai Rp1.369.016.000,00 terjadi akibat adanya pelunasan Utang BLUD pada RSUD Ruteng senilai Rp63.610.000,00 dan terdapat Utang Baru BLUD pada RSUD Ruteng di tahun berjalan senilai Rp1.432.626.000,00;
6. Selisih Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan dan Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan senilai (Rp2.750.000,00) terjadi akibat adanya pengadaan persediaan benih ikan pada Dinas Perikanan senilai Rp215.350.000,00 dan Penjualan ikan senilai Rp212.600.000,00;
7. Selisih Beban Bahan-Bahan Lainnya dan Belanja Bahan-Bahan Lainnya senilai Rp1.036.728.062,83 terjadi akibat adanya pengadaan persediaan bahan lainnya pada Dinas PPO berupa kursus kecantikan, bahan kursus menjahit dan bahan kursus barbershop senilai Rp50.000.000,00, persediaan bahan lainnya pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berupa Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) senilai Rp49.578.016,80, pemakaian bahan lainnya berupa Bahan Kursus Kecantikan, Bahan Kursus Menjahit dan Bahan Kursus Barbershop pada SKB Randong senilai Rp87.187.000,00, pemakaian persediaan bahan lainnya pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berupa Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) senilai Rp800.519.734,63 dan pencatatan utang baru pada Dinas Kesehatan senilai Rp248.599.345,00;
8. Selisih Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan dan Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan senilai (Rp600.000,00) terjadi akibat adanya



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- reklasifikasi Beban Barang menjadi Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp600.000,00;
9. Selisih Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar dan Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar senilai (Rp4.012.000,00) terjadi akibat adanya reklasifikasi Beban Barang menjadi Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp4.012.000,00;
 10. Selisih Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi dan Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi senilai (Rp6.400.000,00) akibat adanya reklasifikasi Beban Barang menjadi Aset Tetap Lainnya;
 11. Selisih Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor senilai (Rp16.607.900,00) terjadi karena adanya pengadaan persediaan alat tulis kantor pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah senilai Rp21.030.540,00, pemakaian persediaan pada alat tulis kantor pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah senilai Rp23.248.740,00, pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan senilai Rp80.000,00 dan terdapat temuan kelebihan pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor BOS senilai Rp18.906.100,00;
 12. Selisih Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover senilai Rp3.738.400,00 terjadi akibat adanya pengadaan persediaan kertas dan cover pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp302.767.983,00, pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah senilai Rp52.651.250,00, pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng senilai Rp208.566.000,00, dan pemakaian persediaan kertas dan cover pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp307.637.983,00, pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah senilai Rp51.313.650,00, pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng senilai Rp208.566.000,00 dan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan senilai Rp206.000,00;
 13. Selisih Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak senilai Rp82.832.000,00 terjadi akibat adanya pengadaan persediaan bahan cetak pada Badan Pendapatan Daerah senilai Rp79.837.837,00, pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp234.383.300,00 dan pemakaian persediaan bahan cetak pada Badan Pendapatan Daerah senilai Rp67.837.837,00, pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp270.240.300,00, pada Dinas Perhubungan senilai Rp3.675.000,00 dan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng senilai Rp55.300.000,00;
 14. Selisih Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor senilai (Rp26.071.740,00) terjadi akibat adanya pengadaan persediaan pada Dinas Peternakan berupa peralatan kandang dan RPH senilai Rp35.071.740,00 dan pemakaian persediaan pada Dinas Peternakan berupa peralatan RPH senilai Rp9.000.000,00;
 15. Selisih Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas senilai (Rp39.072.000,00) terjadi akibat adanya reklasifikasi beban barang menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp39.072.000,00;
 16. Selisih Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- Kegiatan Kantor Lainnya senilai (Rp7.803.885.525,43) terjadi akibat adanya pengadaan persediaan pada Dinas Kesehatan berupa BMHP Puskesmas, BMHP CKG dan BMHP GFK senilai Rp7.413.023.379,65, pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng berupa Alat/Bahan kegiatan kantor lainnya senilai Rp23.554.353.367,00 dan terdapat pemakaian persediaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng berupa alat/Bahan Kegiatan Kantor Lainnya senilai Rp23.163.491.221,22;
- 17.Selisih Beban Obat-Obatan-Obat dan Belanja Obat-Obatan-Obat senilai Rp8.281.238.334,15 terjadi akibat adanya pengadaan persediaan obat pada Dinas Peternakan senilai Rp131.767.300,00, pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng senilai Rp8.318.851.172,00, pada Dinas Kesehatan senilai Rp7.192.959.769,33 dan pemakaian persediaan obat pada Dinas Peternakan senilai Rp66.754.325,00, pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng senilai Rp8.869.413.167,00 dan pada Dinas Kesehatan senilai Rp14.431.811.768,48 serta terdapat pencatatan utang baru pada Dinas Kesehatan di tahun berjalan senilai Rp556.837.315,00;
- 18.Selisih Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya dan Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya senilai (Rp83.041.587,25) terjadi akibat adanya pengadaan persediaan obat-obatan lainnya pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp11.294.910,45, pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng senilai Rp335.520.000,00 dan pemakaian persediaan obat-obatan lainnya pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp6.290.836,20, pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng senilai Rp66.503.492,00, pada Dinas Peternakan senilai Rp26.341.241,00 serta terdapat utang baru pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng di tahun berjalan senilai Rp164.637.754,00;
- 19.Selisih Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat dan Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat senilai (Rp195.603.000,00) terjadi akibat adanya pengadaan persediaan bibit ikan pada Dinas Perikanan senilai Rp224.058.000,00, pengadaan pestisida pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan senilai Rp81.545.000,00, pengadaan Ternak anak babi pada Dinas Peternakan senilai Rp510.000.000,00 dan terdapat penjualan induk ikan pada Dinas Perikanan senilai Rp58.400.000,00 dan penjualan Anak Babi pada Dinas Peternakan senilai Rp561.600.000,00;
- 20.Selisih Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya dan Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya senilai (Rp74.060.000,00) terjadi akibat adanya pengadaan persediaan vaksin ternak pada Dinas Peternakan senilai Rp172.400.000,00 dan pemakaian persediaan vaksin ternak pada Dinas Peternakan senilai Rp98.340.000,00;
- 21.Selisih Beban Natura dan Pakan-Pakan dan Belanja Natura dan Pakan-Pakan senilai (Rp49.915.000,00) terjadi akibat adanya pengadaan persediaan pakan ternak pada Dinas Peternakan senilai Rp726.170.000,00 dan pemakaian persediaan pakan ternak pada Dinas Peternakan senilai Rp676.255.000,00;
- 22.Selisih Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU) dan Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) senilai (Rp120.000,00) terjadi akibat adanya reklasifikasi beban barang menjadi Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp120.000,00;



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

23. Selisih Beban Pakaian Adat Daerah dan Belanja Pakaian Adat Daerah senilai (Rp5.780.000,00) terjadi akibat adanya reklasifikasi Beban Barang ke Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp5.780.000,00;
24. Selisih Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding dan Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding senilai Rp824.933,66 terjadi akibat adanya beban barang ekstrakomptabel pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian senilai Rp824.933,66;
25. Selisih Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya dan Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya senilai Rp1.256.622.166,65 terjadi akibat adanya beban barang ekstrakomptabel pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp9.890.100,00, pada Dinas Peternakan senilai Rp350.000,00, pada Dinas Perhubungan senilai Rp2.000.000,00 dan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp1.244.382.066,65;
26. Selisih Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel dan Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel senilai Rp4.200.000,00 terjadi akibat adanya beban barang ekstrakomptabel pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak senilai Rp4.200.000,00;
27. Selisih Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur dan Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur senilai (Rp154.635.904,00) terjadi akibat adanya beban barang menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Bagian Umum senilai Rp178.625.904,00 dan terdapat beban barang ekstrakomptabel pada Bagian Umum senilai Rp23.990.000,00;
28. Selisih Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat dan Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat senilai Rp35.250.000,00 terjadi akibat adanya beban barang ekstrakomptabel peralatan dan mesin pada Kecamatan Langke Rembong senilai Rp35.250.000,00;
29. Selisih Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat dan Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat senilai Rp11.249.961,00 terjadi akibat adanya beban barang ekstrakomptabel peralatan dan mesin pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp11.249.961,00;
30. Selisih Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio dan Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio senilai (Rp64.824.000,00) terjadi akibat adanya reklasifikasi beban barang menjadi aset tetap peralatan dan mesin pada Bagian Umum senilai Rp64.824.000,00;
31. Selisih Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya dan Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya senilai Rp49.127.870,00 terjadi akibat adanya beban barang ekstrakomptabel peralatan dan mesin pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng senilai



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- Rp4.916.000,00 dan pada Dinas Kesehatan senilai Rp45.100.395,00 serta terdapat reklasifikasi Beban Barang menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Kesehatan senilai Rp888.525,00;
- 32.Selisih Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal Computer dan Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal Computer senilai (Rp24.850.000,00) terjadi akibat adanya reklasifikasi beban barang menjadi aset tetap peralatan dan mesin pada Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan senilai Rp24.850.000,00;
- 33.Selisih Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya dan Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya senilai Rp8.065.000,00 merupakan Beban Barang Ekstrakomtabel pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- 34.Selisih Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II dan Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II senilai (Rp133.433.707,00) merupakan reklasifikasi Beban Barang ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Bagian Umum;
- 35.Selisih Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai dan Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai senilai (Rp21.980.000,00) merupakan koreksi Beban Barang yang seharusnya dicatat sebagai Barang Ekstrakomtabel pada tahun sebelumnya pada UPTD Puskesmas Ketang senilai Rp2.500.000,00, UPTD Puskesmas Watu Alo senilai Rp2.500.000,00, UPTD Puskesmas Narang senilai Rp11.500.000,00, UPTD Puskesmas Wae Kajong senilai Rp2.980.000,00 dan UPTD Puskesmas Iteng senilai Rp2.500.000,00;
- 36.Selisih Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air dan Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air senilai (Rp8.479.900,00) terjadi akibat adanya Beban Barang Ekstrakomtabel pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan senilai Rp3.000.000,00 dan terdapat koreksi Beban Barang yang seharusnya dicatat sebagai Barang Ekstrakomtabel pada tahun sebelumnya pada UPTD Puskesmas Pagal senilai Rp9.479.900,00 dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan senilai Rp2.000.000,00;
- 37.Selisih Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya dan Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya senilai Rp18.144.988,00 terjadi akibat adanya beban barang ekstrakomtabel Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp5.194.608,00, pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan senilai Rp9.023.180,00 dan pada Dinas Peternakan senilai Rp3.927.200,00;
- 38.Selisih Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik dan Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik senilai (Rp48.673.708,00) terjadi akibat terdapat koreksi Beban Barang yang seharusnya dicatat sebagai Barang Ekstrakomtabel pada tahun sebelumnya pada UPTD Puskesmas Reo senilai



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- Rp28.499.500,00, UPTD Puskesmas Kota senilai Rp5.499.900,00, UPTD Puskesmas Wae Codi senilai Rp480.000,00, UPTD Puskesmas Timung senilai Rp5.999.800,00, UPTD Puskesmas La'o senilai Rp2.999.900,00 dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp5.194.608,00;
39. Selisih Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) senilai Rp7.350.000,00 terjadi akibat adanya beban barang ekstrakomptabel Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp7.350.000,00;
40. Selisih Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik dan Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik senilai Rp2.944.450,00 terjadi akibat adanya beban barang ekstrakomptabel Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Dinas Peternakan senilai Rp1.954.450,00 dan pada Dinas Kesehatan senilai Rp990.000,00;
41. Selisih Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi dan Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi senilai Rp14.802.000,00 terjadi akibat adanya beban barang ekstrakomptabel Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Dinas Kesehatan senilai Rp 14.802.000,00;
42. Selisih Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah dan Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah senilai Rp91.766.113,00 terjadi akibat adanya beban barang ekstrakomptabel Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Kecamatan Langke Rembong senilai Rp1.000.000,00, pada Dinas Peternakan senilai Rp1.593.235,00, pada Dinas Perhubungan senilai Rp4.938.200,00 dan pada Dinas Kesehatan senilai Rp90.234.678,00 dan terdapat koreksi Beban Barang yang seharusnya dicatat sebagai Barang Ekstrakomptabel pada tahun sebelumnya pada UPTD Puskesmas Cancar senilai Rp6.000.000,00;
43. Selisih Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya dan Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya senilai Rp4.985.555,00 terjadi akibat adanya beban barang ekstrakomptabel Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan senilai Rp2.000.000,00 dan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp2.985.555,00;
44. Selisih Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi dan Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi senilai Rp3.800.000,00 terjadi akibat adanya beban barang ekstrakomptabel Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Kecamatan Reok senilai Rp3.800.000,00;
45. Selisih Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi dan Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi senilai (Rp59.922.598,00) terjadi akibat adanya beban barang ekstrakomptabel Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan senilai Rp23.641.500,00, pada Dinas Peternakan senilai Rp11.500.000,00, pada Dinas Perhubungan senilai Rp3.300.000,00, pada Bagian Umum senilai Rp14.000.000,00, pada Dinas Kesehatan senilai Rp12.591.612,00, pada Dinas



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- Pendidikan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp1.514.445,00 dan terdapat koreksi Beban Barang yang seharusnya dicatat sebagai Barang Ekstrakomptabel pada tahun sebelumnya senilai Rp126.470.155,00;
46. Selisih Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya dan Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya senilai Rp5.000.000,00 terjadi akibat adanya Beban Barang Ekstrakomptabel pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng senilai Rp3.000.000,00 dan pada Dinas Kesehatan senilai Rp2.000.000,00;
47. Selisih Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah dan Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah senilai Rp2.113.100,00 terjadi akibat adanya beban barang ekstrakomptabel Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Dinas Kesehatan senilai Rp2.113.100,00;
48. Selisih Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum dan Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum senilai Rp2.860.343.602,00 terjadi akibat adanya beban barang ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan senilai Rp36.595.288,00 dan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp2.864.437.014,00, terdapat temuan Belanja Barang yang Diterima Lewat Tahun pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp 55.489.100,00 serta terdapat Beban Barang Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp14.800.400,00;
49. Selisih Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial dan Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial senilai Rp5.838.300,00 terjadi akibat adanya beban barang ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan senilai Rp5.838.300,00;
50. Selisih Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa dan Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa senilai Rp3.337.500,00 terjadi akibat adanya beban barang ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan senilai Rp3.337.500,00; dan
51. Selisih Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga dan Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga senilai Rp450.000,00 terjadi akibat adanya beban barang ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan senilai Rp 450.000,00.

5.4.2.3. Beban Jasa

31 Desember 2025	31 Desember 2024
<u>Rp129.697.620.324,08</u>	<u>Rp148.467.054.892,79</u>

Saldo Beban Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp129.697.620.324,08 dan senilai Rp148.467.054.892,79 yang merupakan konsumsi atas jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan selama TA 2025. Realisasi Beban Jasa TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp18.769.434.568,71 atau 12,64%. Rincian lebih lanjut atas Beban Jasa Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.165 Beban Jasa Tahun 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Jasa BOS	17.081.322.398,00
2	Beban Jasa BOK	11.848.484.998,00
3	Beban Jasa BLUD	37.350.009.716,00
4	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	22.800.000,00
5	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	697.550.000,00
6	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.845.408.000,00
7	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	816.992.700,00
8	Beban Honorarium Rohaniwan	800.000,00
9	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	122.450.000,00
10	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	385.700.000,00
11	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	6.631.988.250,00
12	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	19.487.654.033,84
13	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	1.400.000,00
14	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	568.000.000,00
15	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.549.965.250,00
16	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	14.187.250,00
17	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	44.850.000,00
18	Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	356.138.750,00
19	Beban Jasa Tenaga Administrasi	4.561.466.250,00
20	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	395.216.250,00
21	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	189.177.000,00
22	Beban Jasa Tenaga Ahli	328.871.000,00
23	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	1.502.099.000,00
24	Beban Jasa Tenaga Keamanan	310.800.000,00
25	Beban Jasa Tenaga Supir	37.374.500,00
26	Beban Jasa Tenaga Juru Masak	50.874.500,00
27	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	22.500.000,00
28	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	5.000.000,00
29	Beban Jasa Pelayanan Perpustakaan	19.769.100,00
30	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	122.070.663,00
31	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	212.345.100,00
32	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	63.000.000,00
33	Beban Jasa Kalibrasi	107.559.000,00
34	Beban Jasa Pengolahan Sampah	29.049.440,00
35	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	277.150.000,00
36	Beban Tagihan Telepon	8.440.456,00
37	Beban Tagihan Air	390.240.938,00
38	Beban Tagihan Listrik	779.413.450,00
39	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.422.378,00
40	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.227.220.785,00
41	Beban Paket/Pengiriman	61.712.986,00
42	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	456.041.706,00
43	Beban Medical Check Up	153.638.570,00
44	Beban Jasa Pengujian Sampel Pangan	61.992.000,00
45	Beban Honorarium Penganggung Jawab Pengelola Keuangan	963.162.500,00
46	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	250.097.616,49
47	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.534.671.456,00
48	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	9.600.120.600,00
49	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	852.626.600,00
50	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	254.453.002,00
51	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	137.108.160,00
52	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	103.047.516,75
53	Beban Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	3.399.241,00
54	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	71.100.000,00
55	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	14.495.000,00
56	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	371.826.500,00
57	Beban Sewa Komputer Unit Lainnya	8.400.000,00
58	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	140.000.000,00
59	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	159.490.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	Nilai (Rp)
60	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasehat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	750.000.000,00
61	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	2.000.000,00
62	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	506.049.500,00
63	Beban Bimbingan Teknis	244.345.000,00
64	Beban Diklat Kepemimpinan	22.945.000,00
65	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.508.136.214,00
Jumlah		129.697.620.324,08

Terdapat selisih antara Beban Jasa dengan Belanja Jasa dengan rincian penjelasan sebagai berikut.

Tabel 5.166 Perbandingan Beban Jasa dan Belanja Jasa Tahun 2025

No	Uraian	Nilai LO (Rp)	Nilai LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	Beban Jasa BOS	17.081.322.398,00	17.081.322.398,00	0,00
2	Beban Jasa BOK	11.848.484.998,00	11.848.484.998,00	0,00
3	Beban Jasa BLUD	37.350.009.716,00	37.350.009.716,00	0,00
4	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00
5	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	697.550.000,00	697.550.000,00	0,00
6	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.845.408.000,00	2.845.408.000,00	0,00
7	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	816.992.700,00	816.992.700,00	0,00
8	Beban Honorarium Rohaniwan	800.000,00	800.000,00	0,00
9	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	122.450.000,00	122.450.000,00	0,00
10	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	385.700.000,00	385.700.000,00	0,00
11	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	6.631.988.250,00	6.639.208.250,00	(7.220.000,00)
12	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	19.487.654.033,84	18.562.751.109,10	924.902.924,74
13	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
14	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	568.000.000,00	568.000.000,00	0,00
15	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.549.965.250,00	1.549.965.250,00	0,00
16	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	14.187.250,00	14.187.250,00	0,00
17	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	44.850.000,00	44.850.000,00	0,00
18	Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	356.138.750,00	356.138.750,00	0,00
19	Beban Jasa Tenaga Administrasi	4.561.466.250,00	4.561.466.250,00	0,00
20	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	395.216.250,00	395.216.250,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Nilai LO (Rp)	Nilai LRA (Rp)	Selisih (Rp)
21	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	189.177.000,00	189.177.000,00	0,00
22	Beban Jasa Tenaga Ahli	328.871.000,00	16.300.000,00	312.571.000,00
23	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	1.502.099.000,00	1.502.099.000,00	0,00
24	Beban Jasa Tenaga Keamanan	310.800.000,00	310.800.000,00	0,00
25	Beban Jasa Tenaga Supir	37.374.500,00	37.374.500,00	0,00
26	Beban Jasa Tenaga Juru Masak	50.874.500,00	50.874.500,00	0,00
27	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
28	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
29	Beban Jasa Pelayanan Perpustakaan	19.769.100,00	19.769.100,00	0,00
30	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	122.070.663,00	122.070.663,00	0,00
31	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	212.345.100,00	82.500.000,00	129.845.100,00
32	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00
33	Beban Jasa Kalibrasi	107.559.000,00	107.559.000,00	0,00
34	Beban Jasa Pengolahan Sampah	29.049.440,00	0,00	29.049.440,00
35	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	277.150.000,00	277.150.000,00	0,00
36	Beban Tagihan Telepon	8.440.456,00	8.440.456,00	0,00
37	Beban Tagihan Air	390.240.938,00	399.168.300,00	(8.927.362,00)
38	Beban Tagihan Listrik	779.413.450,00	779.413.450,00	0,00
39	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.422.378,00	1.422.378,00	0,00
40	Beban Kawat/ Faksimili/ Internet/TV Berlangganan	1.227.220.785,00	1.227.220.785,00	0,00
41	Beban Paket/Pengiriman	61.712.986,00	61.712.986,00	0,00
42	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	456.041.706,00	456.041.706,00	0,00
43	Beban Medical Check Up	153.638.570,00	153.638.570,00	0,00
44	Beban Jasa Pengujian Sampel Pangan	61.992.000,00	61.992.000,00	0,00
45	Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	963.162.500,00	963.162.500,00	0,00
46	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	250.097.616,49	1.027.400.000,00	(777.302.383,51)
47	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.534.671.456,00	1.534.671.456,00	0,00
48	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	9.600.120.600,00	9.607.920.000,00	(7.799.400,00)
49	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	852.626.600,00	852.626.600,00	0,00
50	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	254.453.002,00	254.453.002,00	0,00
51	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	137.108.160,00	137.108.160,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Nilai LO (Rp)	Nilai LRA (Rp)	Selisih (Rp)
52	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	103.047.516,75	103.047.516,75	0,00
53	Beban Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	3.399.241,00	3.399.241,00	0,00
54	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	71.100.000,00	71.100.000,00	0,00
55	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	14.495.000,00	14.495.000,00	0,00
56	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	371.826.500,00	371.826.500,00	0,00
57	Beban Sewa Komputer Unit Lainnya	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
58	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00
59	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	159.490.000,00	159.490.000,00	0,00
60	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00
61	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
62	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	506.049.500,00	506.049.500,00	0,00
63	Beban Bimbingan Teknis	244.345.000,00	244.345.000,00	0,00
64	Beban Diklat Kepemimpinan	22.945.000,00	22.945.000,00	0,00
65	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.508.136.214,00	2.508.136.214,00	0,00
Jumlah		129.697.620.324,08	129.102.501.004,85	595.119.319,23

Selisih antara Beban Jasa dan Belanja Jasa senilai Rp595.119.319,23 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Selisih Beban Jasa Tenaga Pendidikan dan Belanja Jasa Tenaga Pendidikan senilai (Rp7.220.000,00) terjadi akibat adanya temuan kelebihan primaan Transfer DAK Non Fisik pada SKB Randong sehingga dilakukan koreksi atas nilai Beban;
2. Selisih Beban Jasa Tenaga Kesehatan dan Belanja Jasa Tenaga Kesehatan senilai Rp924.902.924,74 terjadi akibat adanya pelunasan utang BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng senilai Rp2.780.774.994,02, pada Dinas Kesehatan senilai Rp11.511.296,24 dan terdapat pencatatan utang baru BLUD di tahun berjalan senilai Rp3.717.189.215,00;
3. Selisih Beban Jasa Tenaga Ahli dan Belanja Jasa Tenaga Ahli senilai Rp312.571.000,00 terjadi akibat adanya reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi menjadi Beban Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang senilai Rp312.571.000,00;
4. Selisih Beban Jasa Penyelenggaraan Acara dan Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara senilai Rp129.845.100,00 terjadi akibat adanya pelunasan utang BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng senilai Rp98.929.600,00 dan terdapat pencatatan utang baru BLUD di tahun berjalan senilai Rp228.774.700,00;



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5. Selisih Beban Jasa Pengolahan Sampah dan Belanja Jasa Pengolahan Sampah senilai Rp29.049.440,00 terjadi akibat adanya pencatatan utang baru BLUD di tahun berjalan senilai Rp29.049.440,00;
6. Selisih Beban Tagihan Air dan Belanja Tagihan Air senilai (Rp8.927.362,00) terjadi akibat adanya temuan kelebihan pembayaran Belanja Air atas Dana BOSP;
7. Selisih Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa dan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa senilai (Rp777.302.383,51) terjadi akibat adanya atribusi honorarium pengadaan barang dan jasa menjadi aset tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp3.600.000,00, pada Badan Pendapatan Daerah senilai Rp900.000,00, pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah senilai Rp1.800.000,00, pada Bagian Kerja Sama senilai Rp500.000,00, pada Bagian Umum senilai Rp8.799.880,00, pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan senilai Rp3.450.000,00, pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp300.000,00, pada Dinas Kesehatan senilai Rp17.400.000,00, pada Dinas Komunikasi dan Informatika senilai Rp4.200.000,00, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp655.700.000,00, pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp10.800.000,00, pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp50.552.443,51, pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp1.500.000,00, pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian senilai Rp3.600.000,00, pada Dinas Perhubungan senilai Rp5.900.000,00, pada Dinas Perikanan senilai Rp6.400.000,00, pada Dinas Peternakan senilai Rp1.400.000,00 dan pada Inspektorat senilai Rp900.000,00 serta adanya temuan kekurangan volume pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Bagian Umum senilai Rp399.940,00; dan
8. Selisih Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 dan Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 senilai (Rp7.799.400,00) terjadi akibat adanya pelunasan utang Iuran Jaminan Kesehatan PBI senilai Rp7.018.200,00, adanya kelebihan pembayaran iuran PBI senilai Rp252.000,00 dan terdapat koreksi kelebihan pencatatan iuran PBI senilai Rp529.200,00.

5.4.2.4. Beban Pemeliharaan

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp5.222.327.157,00	Rp3.626.370.648,00

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 Rp5.222.327.157,00 yang mengalami kenaikan senilai Rp1.595.956.509,00 atau 44,01% dari tahun sebelumnya. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.167 Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2025

No	Uraian Beban Pemeliharaan	Nilai (Rp)
A	Beban Pemeliharaan BLUD	1.864.366.006,00
B	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.322.468.660,00
1	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	99.999.300,00
2	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	100.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian Beban Pemeliharaan	Nilai (Rp)
3	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	50.000.000,00
4	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	3.660.000,00
5	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	750.000,00
6	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	96.025.000,00
7	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	8.415.000,00
8	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	5.496.000,00
9	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	115.237.328,00
10	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	37.943.609,00
11	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	70.690.623,00
12	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	31.950.700,00
13	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	92.366.700,00
14	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.500.000,00
15	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.080.000,00
16	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	400.000,00
17	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	14.995.000,00
18	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia	5.620.000,00
19	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika	600.000,00
20	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS	10.106.400,00
21	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama	1.800.000,00
22	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	758.500,00
23	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	14.407.500,00
24	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK	274.000,00
25	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	178.397.000,00
26	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	210.976.000,00
27	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	14.250.000,00
28	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	80.000,00
29	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	1.150.000,00
30	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	8.400.000,00
31	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	43.010.000,00
32	Beban Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan	6.755.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian Beban Pemeliharaan	Nilai (Rp)
33	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik	20.493.000,00
34	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	68.032.000,00
35	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam	1.200.000,00
36	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Air	650.000,00
C	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	979.021.741,00
1	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	516.694.941,00
2	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	6.318.000,00
3	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	14.400.000,00
4	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	20.255.000,00
5	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	500.000,00
6	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	64.830.100,00
7	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	22.000.000,00
8	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	4.668.500,00
9	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	13.834.000,00
10	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	252.229.700,00
11	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	2.386.000,00
12	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	33.437.100,00
13	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	27.468.400,00
D	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	30.103.900,00
1	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	12.713.200,00
2	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	17.390.700,00
3	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	0,00
4	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	0,00
E	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.026.366.850,00
1	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	997.227.950,00
2	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Musik-Musik Lainnya	24.238.900,00
3	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	4.780.000,00
4	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian	120.000,00
Jumlah A+B+C+D+E		5.222.327.157,00

Tidak terdapat selisih antara Beban Pemeliharaan dengan Belanja Pemeliharaan, rincian lebih lanjut disajikan pada tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.168 Perbandingan Beban Pemeliharaan dan Belanja Pemeliharaan Tahun 2025

No	Uraian Beban Pemeliharaan	Nilai LO (Rp)	Nilai LRA (Rp)	Selisih (Rp)
A	Beban Pemeliharaan BLUD	1.864.366.006,00	1.864.366.006,00	0,00
B	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.322.468.660,00	1.322.468.660,00	0,00
1	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	99.999.300,00	99.999.300,00	0,00
2	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
3	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	3.660.000,00	3.660.000,00	0,00
5	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	750.000,00	750.000,00	0,00
6	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	96.025.000,00	96.025.000,00	0,00
7	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	8.415.000,00	8.415.000,00	0,00
8	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	5.496.000,00	5.496.000,00	0,00
9	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	115.237.328,00	115.237.328,00	0,00
10	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	37.943.609,00	37.943.609,00	0,00
11	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	70.690.623,00	70.690.623,00	0,00
12	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	31.950.700,00	31.950.700,00	0,00
13	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	92.366.700,00	92.366.700,00	0,00
14	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
15	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.080.000,00	6.080.000,00	0,00
16	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	400.000,00	400.000,00	0,00
17	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	14.995.000,00	14.995.000,00	0,00
18	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia	5.620.000,00	5.620.000,00	0,00
19	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika	600.000,00	600.000,00	0,00
20	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS	10.106.400,00	10.106.400,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian Beban Pemeliharaan	Nilai LO (Rp)	Nilai LRA (Rp)	Selisih (Rp)
21	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
22	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	758.500,00	758.500,00	0,00
23	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	14.407.500,00	14.407.500,00	0,00
24	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK	274.000,00	274.000,00	0,00
25	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	178.397.000,00	178.397.000,00	0,00
26	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	210.976.000,00	210.976.000,00	0,00
27	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00
28	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	80.000,00	80.000,00	0,00
29	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
30	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
31	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	43.010.000,00	43.010.000,00	0,00
32	Beban Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan	6.755.000,00	6.755.000,00	0,00
33	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik	20.493.000,00	20.493.000,00	0,00
34	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	68.032.000,00	68.032.000,00	0,00
35	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
36	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Air	650.000,00	650.000,00	0,00
C	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	979.021.741,00	979.021.741,00	0,00
1	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	516.694.941,00	516.694.941,00	0,00
2	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	6.318.000,00	6.318.000,00	0,00
3	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00
4	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	20.255.000,00	20.255.000,00	0,00
5	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	500.000,00	500.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian Beban Pemeliharaan	Nilai LO (Rp)	Nilai LRA (Rp)	Selisih (Rp)
6	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	64.830.100,00	64.830.100,00	0,00
7	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00
8	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	4.668.500,00	4.668.500,00	0,00
9	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	13.834.000,00	13.834.000,00	0,00
10	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	252.229.700,00	252.229.700,00	0,00
11	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	2.386.000,00	2.386.000,00	0,00
12	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	33.437.100,00	33.437.100,00	0,00
13	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	27.468.400,00	27.468.400,00	0,00
D	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	30.103.900,00	30.103.900,00	0,00
1	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	12.713.200,00	12.713.200,00	0,00
2	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	17.390.700,00	17.390.700,00	0,00
3	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	0,00	0,00	0,00
4	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	0,00	0,00	0,00
E	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.026.366.850,00	1.026.366.850,00	0,00
1	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	997.227.950,00	997.227.950,00	0,00
2	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Musik-Musik Lainnya	24.238.900,00	24.238.900,00	0,00
3	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	4.780.000,00	4.780.000,00	0,00
4	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian	120.000,00	120.000,00	0,00
Jumlah Beban Pemeliharaan		5.222.327.157,00	5.222.327.157,00	0,00

5.4.2.5. Beban Perjalanan Dinas

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp31.414.178.576,00	Rp36.607.202.657,90



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah senilai Rp31.414.178.576,00 yang mengalami penurunan senilai Rp5.193.024.081,90 atau 14,19% dari tahun sebelumnya. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian beban perjalanan dinas tahun 2025 dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.169 Rincian Beban Perjalanan Dinas LO TA 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Perjalanan Dinas BLUD	409.385.820,00
2	Beban Perjalanan Dinas Biasa	11.122.174.932,00
3	Beban Perjalanan Dinas Tetap	256.800.000,00
4	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.019.120.824,00
5	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.291.225.000,00
6	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	315.472.000,00
Jumlah		31.414.178.576,00

Terdapat selisih antara Beban Perjalanan Dinas dengan Belanja Perjalanan Dinas. Rincian lebih lanjut dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.170 Perbandingan Beban Perjalanan Dinas dan Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2025

No.	Uraian	Nilai LO (Rp)	Nilai LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	Beban Perjalanan Dinas BLUD	409.385.820,00	409.385.820,00	0,00
2	Beban Perjalanan Dinas Biasa	11.122.174.932,00	11.339.124.932,00	216.950.000,00
3	Beban Perjalanan Dinas Tetap	256.800.000,00	256.800.000,00	0,00
4	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.019.120.824,00	18.019.120.824,00	0,00
5	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.291.225.000,00	1.291.225.000,00	0,00
6	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	315.472.000,00	315.472.000,00	0,00
Jumlah		31.414.178.576,00	31.631.128.576,00	216.950.000,00

Selisih Beban Perjalanan Dinas dengan Belanja Perjalanan Dinas senilai (Rp216.950.000,00) merupakan temuan kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas sehingga Beban direklas ke Aset Lainnya.

5.4.2.6. Beban Bunga

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp0,00	Rp2.331.521.738,99

Saldo Beban Bunga LO per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp2.331.521.738,99. Rincian lebih lanjut atas Beban Bunga TA 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.171 Rincian Beban Bunga LO TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	2.331.521.739,14
Jumlah		0,00	2.331.521.739,14

Tidak terdapat selisih antara Beban Bunga dengan Belanja Bunga dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.172 Perbandingan Belanja Bunga LRA dan Beban Bunga LO TA 2025

No.	Uraian	Nilai LRA (Rp)	Nilai LO (Rp)	Selisih (Rp)
1	Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00

5.4.2.7. Beban Hibah

31 Desember 2025

Rp37.609.640.363,94

31 Desember 2024

Rp66.945.012.149,41

Beban Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah senilai Rp37.609.640.363,94 yang mengalami penurunan senilai Rp29.335.371.785,47 atau 43,82% dari tahun sebelumnya. Rincian Beban Hibah dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 5.173 Rincian Beban Hibah Tahun 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	148.022.003,00
1	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	148.022.003,00
B	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	7.800.856.620,94
1	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	6.686.348.620,94
2	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	222.600.000,00
3	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	604.908.000,00
4	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	287.000.000,00
C	Beban Hibah Dana BOS	21.201.348.290,00
1	Beban Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Swasta	20.953.848.290,00
2	Beban Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdikmen Swasta	247.500.000,00
D	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	705.550.000,00
1	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	705.550.000,00
E	Beban Hibah Dana BOSP	7.753.863.450,00
1	Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	6.508.603.450,00
2	Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	1.245.260.000,00
Jumlah A+B+C+D+E		37.609.640.363,94

Terdapat selisih antara Beban Hibah dan Belanja Hibah Tahun 2025 yang dirincikan sebagai berikut.

Tabel 5.174 Perbandingan Beban Hibah dan Belanja Hibah Tahun 2025

No.	Uraian	Nilai LO (Rp)	Nilai LRA (Rp)	Selisih (Rp)
A	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	148.022.003,00	0,00	148.022.003,00
1	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	148.022.003,00	0,00	148.022.003,00
B	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	7.800.856.620,94	6.745.948.620,94	1.054.908.000,00
1	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	6.686.348.620,94	6.186.348.620,94	500.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	Nilai LO (Rp)	Nilai LRA (Rp)	Selisih (Rp)
2	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	222.600.000,00	222.600.000,00	0,00
3	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	604.908.000,00	50.000.000,00	554.908.000,00
4	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	287.000.000,00	287.000.000,00	0,00
C	Beban Hibah Dana BOS	21.201.348.290,00	21.201.348.290,00	0,00
1	Beban Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Swasta	20.953.848.290,00	20.953.848.290,00	0,00
2	Beban Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdikmen Swasta	247.500.000,00	247.500.000,00	0,00
D	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	705.550.000,00	705.550.000,00	0,00
1	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	705.550.000,00	705.550.000,00	0,00
E	Beban Hibah Dana BOSP	7.753.863.450,00	8.257.536.250,00	(503.672.800,00)
1	Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	6.508.603.450,00	6.508.603.450,00	0,00
2	Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	1.245.260.000,00	1.748.932.800,00	(503.672.800,00)
Jumlah A+B+C+D+E		37.609.640.363,94	36.910.383.160,94	699.257.203,00

Selisih Beban Hibah dan Belanja Hibah senilai Rp699.257.203,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Selisih Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya senilai Rp148.022.003,00 terjadi akibat adanya hibah keluar Aset Tetap Tanah ke Polres Manggarai senilai Rp109.114.263,00 dan hibah keluar Aset Tetap Gedung dan Bangunan kepada Polres Manggarai senilai Rp38.907.740,00;
2. Selisih Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan senilai Rp500.000.000,00 merupakan reklasifikasi beban hibah ke beban bantuan sosial;
3. Selisih Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dan Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia senilai Rp554.908.000,00 terjadi akibat adanya hibah keluar Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kepada Keuskupan Ruteng senilai Rp421.408.000,00 dan hibah keluar Aset Tetap Lainnya senilai Rp133.500.000,00; dan



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

4. Selisih Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan dan Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan senilai (Rp503.672.800,00) merupakan reklasifikasi Beban Hibah ke Aset Lainnya atas temuan kelebihan Penerimaan Transfer DAK Non Fisik.

5.4.2.8. Beban Bantuan Sosial

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp2.128.405.176,00	Rp7.997.471.000,00

Saldo Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp2.128.405.176,00 dan Rp7.997.471.000,00, yang merupakan beban dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Beban Bantuan Sosial mengalami penurunan senilai Rp5.869.065.824,00 atau 73,39% dari realisasi tahun sebelumnya. Rincian lebih lanjut atas Beban Bantuan Sosial TA 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.175 Beban Bantuan Sosial Tahun 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	1.388.448.356,00
2	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	305.583.480,00
3	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	434.373.340,00
Jumlah		2.128.405.176,00

Tidak terdapat selisih antara Beban Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Sosial TA 2025 yang dirincikan sebagai berikut.

Tabel 5.176 Perbandingan Beban Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Sosial Tahun 2025

No.	Uraian	Nilai LO	Nilai LRA	Selisih
1	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	1.388.448.356,00	1.388.448.356,00	0,00
2	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	305.583.480,00	305.583.480,00	0,00
3	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	434.373.340,00	934.373.340,00	(500.000.000,00)
Jumlah		2.128.405.176,00	2.628.405.176,00	(500.000.000,00)

Selisih Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat dan Belanja Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat senilai (Rp500.000.000,00) terjadi akibat adanya reklasifikasi Beban Bantuan Sosial ke Beban Hibah.

5.4.2.9. Beban Penyisihan Piutang

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp1.764.168.470,36	Rp2.110.196.451,53

Saldo Beban Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp1.764.168.470,36 dan Rp2.110.196.451,53. Beban Penyisihan Piutang mengalami penurunan senilai Rp346.027.981,17 atau 16,40% dari tahun sebelumnya. Rincian lebih lanjut atas Beban Penyisihan Piutang TA 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.177 Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	1.240.542.215,76
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Hotel	2.876.691,68
2	Beban Penyisihan Piutang Pajak Restoran	8.399.311,41
3	Beban Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	412.760,00
4	Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame	7.547.298,00
5	Beban Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan	257.360,75
6	Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	8.520,04
7	Beban Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	41.971.082,56
8	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan	1.179.069.201,32
B	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	466.083.137,00
1	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	466.083.137,00
C	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	39.913.551,70
1	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga	232,75
2	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian	34.490.443,68
3	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	5.422.875,27
D	Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	17.629.565,90
1	Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	17.629.565,90
Jumlah A+B+C+D		1.764.168.470,36

5.4.2.10. Beban Penyusutan dan Amortisasi

31 Desember 2025

31 Desember 2024

Rp137.881.080.664,53

Rp132.921.015.952,17

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Tahun 2025 senilai Rp137.881.080.664,53 mengalami kenaikan senilai Rp4.960.064.712,36 atau 3,73% dari tahun sebelumnya. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan atau amortisasi selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 5.178 Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	37.993.533.958,40
1	Beban Penyusutan Alat Besar	1.450.421.180,41
2	Beban Penyusutan Alat Angkutan	4.205.647.560,18
3	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	389.370.728,02
4	Beban Penyusutan Alat Pertanian	92.274.500,00
5	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.387.760.821,19
6	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.675.890.850,00
7	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	12.717.409.319,55
8	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	3.010.888.801,42
9	Beban Penyusutan Komputer	6.124.048.677,63
10	Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	921.867.500,00
11	Beban Penyusutan Rambu-Rambu	17.954.020,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	Nilai (Rp)
B	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	18.793.330.679,98
1	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	18.556.309.656,57
2	Beban Penyusutan Monumen	32.506.234,42
3	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	204.514.788,99
C	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	79.490.314.453,55
1	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	2.528.071.384,37
2	Beban Penyusutan Bangunan Air	2.317.045.480,84
3	Beban Penyusutan Instalasi	74.629.241.627,90
4	Beban Penyusutan Jaringan	15.955.960,44
D	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	281.479.238,60
1	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	218.741.010,00
2	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian	62.738.228,60
E	Beban Penyusutan Properti Investasi	1.322.422.334,00
1	Beban Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung	1.322.422.334,00
Jumlah A+B+C+D+E		137.881.080.664,53

5.4.2.11. Beban Transfer

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp73.250.355.621,00	Rp72.639.515.380,00

Saldo Beban Transfer per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp73.250.355.621,00 dan Rp72.639.515.380,00, merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Kabupaten Manggarai kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, mencakup Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan dan Beban Transfer Bantuan Keuangan. Beban Transfer mengalami kenaikan senilai Rp610.840.241,00 atau 0,84% dari tahun sebelumnya. Rincian lebih lanjut atas Beban Transfer Tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.179 Beban Transfer Tahun 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2.272.153.345,00
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	530.169.876,00
3	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	70.448.032.400,00
Jumlah		73.250.355.621,00

Terdapat perbedaan antara Beban Transfer dan Belanja Transfer Tahun 2025 yang dirincikan pada tabel berikut.

Tabel 5.180 Perbedaan Belanja Transfer dan Beban Transfer TA 2025

No.	Uraian	Nilai LO (Rp)	Nilai LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2.272.153.345,00	2.272.153.345,00	0,00
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	530.169.876,00	530.169.876,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	Nilai LO (Rp)	Nilai LRA (Rp)	Selisih (Rp)
3	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	70.448.032.400,00	192.206.516.100,00	(121.758.483.700,00)
	Jumlah	73.250.355.621,00	195.008.839.321,00	(121.758.483.700,00)

Selisih Beban Transfer dan Belanja Transfer senilai (Rp121.758.483.700,00) merupakan nilai penyaluran dana desa yang tidak dicatat di Laporan Operasional.

5.4.3. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

31 Desember 2025	31 Desember 2024
<u>Rp17.217.659.604,11</u>	<u>Rp88.912.620.026,52</u>

Surplus/Defisit dari Operasi-LO merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2025 senilai Rp17.217.659.604,11 atau mengalami penurunan senilai Rp71.694.960.422,41 atau 80,64% dari tahun sebelumnya. Rincian Surplus/Defisit dari Operasi-LO TA 2025 sebagai berikut.

Pendapatan	Rp1.129.447.834.412,63
Beban	<u>(Rp1.112.230.174.808,52)</u>
Surplus/Defisit dari Operasi	Rp 17.217.659.604,11

5.4.4. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

31 Desember 2025	31 Desember 2024
<u>Rp4.625.697.814,31</u>	<u>Rp(1.692.386.485,20)</u>

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp4.625.697.814,31 dan (Rp1.692.386.485,20). Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.4.4.1. Surplus Non Operasional-LO

31 Desember 2025	31 Desember 2024
<u>Rp5.432.792.901,00</u>	<u>Rp0,01</u>

Surplus dari Kegiatan Non Operasional TA 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp5.432.792.901,00 dan senilai Rp0,01. Realisasi Surplus Non Operasional dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.4.4.1.1. Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

31 Desember 2025	31 Desember 2024
<u>Rp2.546.666.976,00</u>	<u>Rp0,00</u>

Surplus dari Kegiatan Non Operasional pada tahun 2025 senilai Rp2.546.666.976,00 berasal dari surplus hasil penjualan aset tetap senilai Rp120.083.000,00 dan pengakuan atas laba penyertaan modal pada PT. PDAM Tirta Komodo Jaya senilai Rp2.426.583.976,00.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.4.4.1.2. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO

31 Desember 2025	31 Desember 2024
<u>Rp0,00</u>	<u>Rp0,01</u>

Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang TA 2025 dan TA 2024 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,01.

5.4.4.1.3. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO

31 Desember 2025	31 Desember 2024
<u>Rp2.886.125.925,00</u>	<u>Rp0,00</u>

Surplus dari Kegiatan Non Operasional pada tahun 2025 senilai Rp2.886.125.925,00 merupakan koreksi tambah atas penilaian Aset Tetap Tanah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

5.4.4.2. Defisit Non Operasional-LO

31 Desember 2025	31 Desember 2024
<u>Rp807.095.086,69</u>	<u>Rp1.692.386.485,21</u>

Defisit dari Kegiatan Non Operasional TA 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp807.095.086,69 dan senilai Rp1.692.386.485,21. Realisasi Defisit Non Operasional dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.4.4.2.1. Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO

31 Desember 2025	31 Desember 2024
<u>Rp0,00</u>	<u>Rp0,15</u>

Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang TA 2025 dan TA 2024 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,15.

5.4.4.2.2. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO

31 Desember 2025	31 Desember 2024
<u>Rp807.095.086,69</u>	<u>(Rp1.692.386.485,06)</u>

Defisit dari Kegiatan Non Operasional senilai Rp807.095.086,69 merupakan penghapusan jalan yang sudah dibongkar pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan senilai Rp164.222.859,75, pencatatan obat kadaluarsa senilai Rp112.983.097,49, Kerugian Investasi pada PT. MMI. Senilai Rp529.053.129,45 dan Temuan Kurang Volume Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Bagian Umum senilai Rp836.000,00. Defisit dari Kegiatan Non Operasional TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp885.291.398,37 atau 52,31% dari tahun sebelumnya.

5.4.5. Pos Luar Biasa

31 Desember 2025	31 Desember 2024
<u>Rp1.205.777.300,00</u>	<u>Rp665.830.200,00</u>



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa TA 2025 yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas pemerintah daerah. Saldo Pos Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp1.205.777.300,00 dan senilai Rp665.830.200,00. Pos Luar Biasa TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp539.947.100,00 atau 81,09% dari tahun sebelumnya.

5.4.5.1. Beban Luar Biasa

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp1.205.777.300,00	Rp665.830.200,00

Saldo Beban Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp1.205.777.300,00 dan Rp665.830.200,00. Realisasi Beban Luar Biasa Tahun 2025 senilai Rp1.205.777.300,00 merupakan Beban Luar Biasa yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga Tahun 2025. Beban Luar Biasa Tahun 2025 mengalami kenaikan senilai Rp539.947.100,00 atau 81,09% dari tahun sebelumnya.

Terdapat selisih antara Belanja Tidak Terduga dan Beban Luar Biasa senilai Rp49.193.000,00 yang merupakan temuan kelebihan pembayaran Belanja Tidak Terduga atas pembelian BBM.

5.4.6. Surplus/Defisit-LO

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp20.637.580.118,42	Rp86.554.403.341,32

Surplus/Defisit-LO merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional TA 31 Desember 2025 senilai Rp20.637.580.118,42 atau mengalami penurunan senilai Rp65.916.823.222,90 atau sebesar 76,16% dari tahun sebelumnya.

Rincian Surplus/Defisit-LO TA 2025 sebagai berikut.

Pendapatan	Rp 1.129.447.834.412,63
Beban	(Rp1.112.230.174.808,52)
Surplus/Defisit Dari Operasi	Rp 17.217.659.604,11
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp 5.432.792.901,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(Rp 807.095.086,69)
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp 21.843.357.418,42
Pos Luar Biasa	(Rp 1.205.777.300,00)
Surplus/Defisit-LO	Rp 20.637.580.118,42

5.5. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran ditambah dengan arus kas bersih atau



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Kenaikan/Penurunan Kas selama tahun anggaran berkenaan merupakan saldo akhir kas daerah yang berada dan dikuasai oleh BUD dan Bendahara Pengeluaran. Saldo akhir kas yang dikuasai BUD tidak termasuk sisa dana kas yang dikuasai oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD. Sisa kas di Bendahara SKPD baik Bendahara Penerimaan maupun pengeluaran adalah sisa dana yang berasal dari arus kas keluar di BUD sesuai dengan SP2D dan/atau penerimaan daerah yang belum disetorkan ke BUD. Namun terkait hal tersebut sisa dana kas di Bendahara SKPD merupakan bagian dari Kas Daerah, dimana sampai dengan akhir tahun anggaran berakhir belum disetor ke BUD. Arus Kas Bersih Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2025 dan 2024 terdiri atas:

Tabel 5.181 Arus Kas Bersih Pemerintah Kabupaten Manggarai TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Aktivitas Operasi	123.224.495.499,33	212.131.217.337,35
2	Aktivitas Investasi	(124.728.592.843,84)	(160.732.790.450,10)
3	Aktivitas Pendanaan	0,00	(57.391.304.347,99)
4	Aktivitas Transitoris	991.665.635,61	130.966.149,17
Jumlah		(512.431.708,90)	(5.861.911.311,57)

Realisasi kas bersih dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut.

5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Realisasi arus kas dari aktivitas operasi yang dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut.

5.5.1.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp1.213.363.804.733,12	Rp1.289.104.308.257,38

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas, yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu tahun anggaran. Arus kas bersih aktivitas operasi dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.182 Realisasi Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Penerimaan Pajak Daerah	30.283.622.354,00	21.270.967.323,00
2	Penerimaan Retribusi Daerah	7.137.075.788,00	7.155.915.070,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.511.802.797,00	3.579.443.275,00
4	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	88.724.284.360,47	77.301.026.921,08
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	5.076.342.100,00	5.824.669.000,00
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	2.289.108.000,00	2.589.809.000,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	676.150.082.895,00	677.515.472.202,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	229.810.373.737,00	309.751.276.835,00
9	Penerimaan Dana Desa	121.758.483.700,00	129.061.909.000,00
10	Penerimaan Dana Bagi Hasil dari Provinsi	28.175.849.758,00	38.322.145.943,00
11	Penerimaan Dana Bantuan Keuangan	200.000.000,00	0,00
12	Penerimaan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	18.246.779.243,65	16.731.673.688,30
Jumlah Arus Masuk Kas		1.213.363.804.733,12	1.289.104.308.257,38



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.5.1.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp1.090.139.309.233,79	Rp1.076.973.090.920,03

Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi untuk Tahun 2025 senilai Rp1.090.139.309.233,79 dan Tahun 2024 senilai Rp1.076.973.090.920,03 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.183 Realisasi Keluar Kas dari Aktivitas Operasi TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Belanja Pegawai	564.374.149.667,00	492.021.991.032,10
2	Belanja Barang dan Jasa	289.962.561.608,85	299.436.416.127,13
3	Belanja Bunga	0,00	2.504.451.584,80
4	Belanja Hibah	36.910.383.160,94	72.645.506.776,00
5	Belanja Bantuan Sosial	2.628.405.176,00	7.995.971.000,00
6	Belanja Tidak Terduga	1.254.970.300,00	667.330.200,00
7	Belanja Bagi Hasil Pajak	2.272.153.345,00	4.952.787.580,00
8	Belanja Bagi Hasil Retribusi	530.169.876,00	0,00
9	Belanja Bantuan Keuangan ke Desa	192.206.516.100,00	196.748.636.620,00
Jumlah Arus Keluar Kas		1.090.139.309.233,79	1.076.973.090.920,03

5.5.1.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp123.224.495.499,33	Rp212.131.217.337,35

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas, yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu tahun anggaran. Arus kas bersih aktivitas operasi dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.184 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	1.213.363.804.733,12	1.289.104.308.257,38
2	Arus Keluar Kas	1.090.139.309.233,79	1.076.973.090.920,03
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		123.224.495.499,33	212.131.217.337,35

5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Realisasi arus kas dari aktivitas Investasi dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.5.2.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp262.083.000,00	Rp0,00

Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi untuk Tahun 2025 senilai Rp262.083.000,00 dan Tahun 2024 senilai Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.185 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi 2025 dan 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Penjualan Aset Tetap	262.083.000,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		262.083.000,00	0,00

5.5.2.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp124.990.675.843,84	Rp160.732.790.450,10

Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi untuk Tahun 2025 senilai Rp124.990.675.843,84 dan Tahun 2024 senilai Rp160.732.790.450,10 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.186 Arus Keluar dari Aktivitas Investasi TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.722.365.759,06	40.880.603.233,10
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.214.672.090,78	39.089.157.311,00
3	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	90.112.302.024,00	75.324.159.743,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.791.485.970,00	4.438.870.163,00
5	Belanja Modal Aset Lainnya	149.850.000,00	0,00
6	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	1.000.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		124.990.675.843,84	160.732.790.450,10

5.5.2.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(Rp124.728.592.843,84)	(160.732.790.450,10)

Aliran kas bersih aktivitas investasi merupakan selisih dari aliran kas masuk dengan aliran kas keluar atas aktivitas investasi yang terdiri dari:

Tabel 5.187 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	262.083.000,00	0,00
2	Arus Keluar Kas	124.990.675.843,84	160.732.790.450,10
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(124.728.592.843,84)	(160.732.790.450,10)

5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Rincian Aliran Masuk Kas dan Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut.

5.5.3.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp0,00	Rp0,00

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan untuk Tahun 2025 senilai Rp0,00 dan Tahun 2024 senilai Rp0,00.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.5.3.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp0,00	Rp57.391.304.347,99

Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan untuk Tahun 2025 senilai Rp0,00 dan Tahun 2024 senilai Rp57.391.304.347,99 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.188 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	57.391.304.347,99
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan		0,00	57.391.304.347,99

5.5.3.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp0,00	(Rp57.391.304.347,99)

Aliran kas bersih aktivitas pendanaan merupakan selisih dari aliran kas masuk dengan aliran kas keluar atas aktivitas investasi yang terdiri dari:

Tabel 5.189 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	0,00	0,00
2	Arus Keluar Kas	0,00	57.391.304.347,99
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		0,00	(57.391.304.347,99)

5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Realisasi Arus Kas dari Aktivitas Transitoris yang dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut.

5.5.4.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp77.980.760.844,66	Rp30.735.894.635,54

Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris untuk Tahun 2025 senilai Rp77.980.760.844,66 dan Tahun 2024 senilai Rp30.735.894.635,54 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.190 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	77.980.760.844,66	30.735.894.635,54
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris		77.980.760.844,66	30.735.894.635,54



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.5.4.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

31 Desember 2025	31 Desember 2024
<u>Rp76.989.095.209,05</u>	<u>Rp30.604.928.486,37</u>

Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris untuk Tahun 2025 senilai Rp76.989.095.209,05 dan Tahun 2024 senilai Rp30.604.928.486,37 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.191 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	76.989.095.209,05	30.604.928.486,37
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris		76.989.095.209,05	30.604.928.486,37

5.5.4.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

31 Desember 2025	31 Desember 2024
<u>Rp991.665.635,61</u>	<u>Rp130.966.149,17</u>

Aliran kas bersih aktivitas Transitoris merupakan selisih dari aliran kas masuk dengan aliran kas keluar atas aktivitas Transitoris yang terdiri dari:

Tabel 5.192 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	77.980.760.844,66	30.735.894.635,54
2	Arus Keluar Kas	76.989.095.209,05	30.604.928.486,37
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		991.665.635,61	130.966.149,17

5.5.5. Kenaikan/Penurunan Kas

31 Desember 2025	31 Desember 2024
<u>(Rp512.431.708,90)</u>	<u>(Rp5.861.911.311,57)</u>

Jumlah senilai (Rp512.431.708,90) merupakan kenaikan/penurunan Kas TA 2025, sementara kenaikan/penurunan Kas pada TA 2024 senilai (Rp5.861.911.311,57) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.193 Perhitungan Kenaikan/Penurunan Kas

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Aktivitas Operasi	123.224.495.499,33	212.131.217.337,35
2	Aktivitas Investasi	(124.728.592.843,84)	(160.732.790.450,10)
3	Aktivitas Pendanaan	0,00	(57.391.304.347,99)
4	Aktivitas Transitoris	991.665.635,61	130.966.149,17
Jumlah		(512.431.708,90)	(5.861.911.311,57)

5.5.6. Saldo Awal Kas

31 Desember 2025	31 Desember 2024
<u>Rp21.346.292.419,09</u>	<u>Rp27.223.992.145,07</u>



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Saldo Awal Kas per 31 Desember 2025 senilai Rp21.346.292.419,09 merupakan saldo akhir Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas Dana Kapitasi pada FKTP, Kas Lainnya, Kas Dana BOSP, dan Kas Dana BOK Puskesmas. Saldo akhir Kas per 31 Desember 2024 senilai Rp27.223.992.145,07.

5.5.7. Koreksi SiLPA

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp4.199.999,18	(Rp15.788.414,41)

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya adalah koreksi kesalahan pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya. Pada Tahun 2025 terdapat koreksi kesalahan pembukuan pada tahun sebelumnya senilai 4.199.999,18 yang terdiri dari:

1. Koreksi kurang saldo awal Kas Dana BOSP senilai Rp0,82 yang merupakan jasa giro SDI Wontong yang masih tercatat sebagai saldo Kas Dana BOSP namun ternyata sudah disetorkan ke Kas di Kas Daerah pada 29 Desember tahun 2023; dan
2. Koreksi tambah saldo awal Kas Lainnya atas adanya saldo pada rekening giro milik Puskesmas Iteng senilai Rp4.200.000,00 dimana rekening tersebut diluar rekening yang ditetapkan bupati dan tidak dapat ditelusuri sumber dana tersebut.

5.5.8. Saldo Akhir Kas

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp20.838.060.709,37	Rp21.346.292.419,09

Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2025 senilai Rp20.838.060.709,37 merupakan saldo akhir Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas Dana Kapitasi pada FKTP, Kas Lainnya, Kas Dana BOSP, dan Kas Dana BOK Puskesmas. Saldo akhir kas per 31 Desember 2024 senilai Rp21.346.292.419,09, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.194 Perhitungan Saldo Akhir Kas per 31 Desember dan 2025

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Saldo Awal Kas	21.346.292.419,09	27.223.992.145,07
2	Kenalkan/Penurunan Kas	(512.431.708,90)	(5.861.911.311,57)
3	Koreksi SiLPA	4.199.999,18	(15.788.414,41)
Saldo Akhir Kas		20.838.060.709,37	21.346.292.419,09

5.6. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas TA 2025.

5.6.1. Ekuitas Awal

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp2.055.142.764.696,19	Rp1.934.867.214.152,54

Ekuitas awal tahun 2025 senilai Rp2.055.142.764.696,19, merupakan saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2024 pada Neraca *Audited*.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.6.2. Surplus/Defisit-LO

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp20.637.580.118,42	Rp86.554.403.341,32

Surplus/defisit - LO TA 2025 senilai Rp20.637.580.118,42 berasal dari Pendapatan - LO senilai Rp1.129.447.834.412,63 dikurangi Beban senilai Rp1.112.230.174.808,52 ditambah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional senilai Rp4.625.697.814,31 dan dikurangi Beban Luar Biasa senilai Rp1.205.777.300,00.

5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(Rp910.503.555,95)	Rp33.721.147.202,33

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar senilai (Rp910.503.555,95) yang terdiri dari:

- 1) Koreksi tambah Ekuitas atas Kas senilai Rp4.199.999,18, yang terdiri dari:
 - a) Koreksi kurang saldo awal Kas Dana BOSP senilai Rp0,82 yang merupakan jasa giro SDI Wontong yang masih tercatat sebagai saldo Kas Dana BOSP namun ternyata sudah disetorkan ke Kas di Kas Daerah pada 29 Desember tahun 2023; dan
 - b) Koreksi tambah saldo awal Kas Lainnya atas adanya saldo pada rekening giro milik Puskesmas Iteng senilai Rp4.200.000,00 dimana rekening tersebut diluar rekening yang ditetapkan Bupati dan tidak dapat ditelusuri sumber dana tersebut.
- 2) Koreksi tambah Ekuitas atas Piutang senilai Rp4.205.506.674,01, yang terdiri dari:
 - a) Koreksi tambah Piutang Pajak Hotel pada Badan Pendapatan Daerah akibat kurang catat Piutang tahun 2024 senilai Rp12.985.350,00;
 - b) Koreksi tambah Piutang Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah akibat kurang catat Piutang tahun 2024 senilai Rp16.509.609,00;
 - c) Koreksi tambah Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan pada Badan Pendapatan Daerah akibat kurang catat Piutang tahun 2024 senilai Rp177.503.833,00;
 - d) Koreksi tambah Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah akibat kurang catat Piutang tahun 2024 berupa sewa rumah dinas senilai Rp6.793.800,00 dan sewa tanah senilai Rp8.678.500,00;
 - e) Koreksi tambah Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yaitu Piutang Pendapatan dari Pengembalian pada Dinas PPO, Dinas Perdagin, dan Dinas PUPR akibat terdapat kurang catat Piutang atas temuan BPK tahun 2024 senilai Rp361,01;
 - f) Koreksi tambah Piutang Dana Transfer Umum - DBH dari Pemerintah Pusat berdasarkan PMK 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025 senilai Rp3.291.697.000,00 dengan rincian sebagai berikut.
 - i. Piutang DBH PPh Pasal 21 senilai Rp1.415.913.000,00;
 - ii. Piutang DBH PPh Pasal 25 senilai Rp366.163.000,00;
 - iii. Piutang DBH PBB senilai Rp874.934.000,00;



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- iv. Piutang DBH CHT senilai Rp120.904.000,00;
- v. Piutang DBH SDA Mineral dan Batubara - Landrent senilai Rp14.756.000,00;
- vi. Piutang DBH SDA Mineral dan Batubara - Royalty senilai Rp1.429.000,00;
- vii. Piutang DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi senilai Rp494.778.000,00; dan
- viii. Piutang DBH SDA Kehutanan - PSDH senilai Rp2.820.000,00.
- g) Koreksi tambah Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor senilai Rp574.284.286,00 dan Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor senilai Rp117.053.936,00 akibat pencatatan Piutang tidak sesuai dengan Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/117/BKUD1/2025 tentang Rincian Alokasi Hutang Bagi Hasil Pajak Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 kepada Kabupaten/Kota se Provinsi NTT; dan
- h) Koreksi kurang Piutang Pajak Air Permukaan akibat lebih catat Piutang tahun 2024 senilai Rp1,00;
- 3) Koreksi kurang Ekuitas atas Penyisihan Piutang senilai Rp264.084.900,47, yang terdiri dari:
 - a) Koreksi tambah atas Penyisihan Piutang Dana Perimbangan yaitu Dana Transfer Umum DBH senilai Rp329.169.700,00 akibat terdapat koreksi tambah Piutang Dana Transfer Umum - DBH dari Pemerintah Pusat;
 - b) Koreksi tambah Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor senilai Rp2.871.421,43 dan Penyisihan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor senilai Rp585.269,68 akibat adanya koreksi tambah Piutang yang bernilai minus;
 - c) Koreksi kurang Penyisihan Piutang Pajak Hotel senilai Rp2.665.073,25 akibat adanya pelunasan piutang;
 - d) Koreksi kurang Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah senilai Rp37.941,26 akibat adanya pelunasan piutang;
 - e) Koreksi kurang Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah senilai Rp245,00 akibat adanya pelunasan remunerasi TDF 2024;
 - f) Koreksi kurang Penyisihan Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berupa Penyisihan Piutang Denda atas Keterlambatan Pekerjaan senilai Rp946.323,12 akibat adanya pelunasan piutang;
 - g) Koreksi kurang Penyisihan Piutang BLUD senilai Rp18.213.960,20 yang terdiri dari koreksi saldo awal penyisihan piutang BLUD berdasarkan hasil rekalkulasi akibat kesalahan perhitungan masa penyisihan pada RSUD TA 2025;
 - h) Koreksi kurang Penyisihan Piutang Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor senilai Rp7.163.696,17,00 akibat adanya pelunasan piutang;
 - i) Koreksi kurang Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan senilai Rp67.671,31 akibat adanya pelunasan piutang;
 - j) Koreksi kurang Penyisihan Piutang Lainnya senilai Rp2.052.746,00 merupakan pengurangan penyisihan piutang Lainnya akibat adanya pelunasan piutang; dan
 - k) Koreksi kurang Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah berupa Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian senilai Rp37.393.834,33 akibat terdapat reklasifikasi Piutang Pendapatan dari Pengembalian atas temuan BPK tahun



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

sebelumnya berupa kekurangan volume pekerjaan yang belum didukung dengan SKTJM maupun jaminan ke Aset Lainnya.

- 4) Koreksi tambah Beban Dibayar Dimuka senilai Rp960.400,00 akibat kurang catat pengakuan Piutang BPBU berdasarkan hasil audit BPK Pusat atas tindak lanjut PMK 51 Tahun 2024;
- 5) Koreksi kurang Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah senilai Rp1.172.074.863,00 akibat adanya koreksi terhadap saldo awal pada PDAM Tirta Komodo pada Tahun 2024 sesuai Laporan Auditor Independen (LAI);
- 6) Koreksi tambah Ekuitas atas Aset Tetap senilai Rp148.262.102,00 terdiri dari:
 - a. Koreksi tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa Bangunan Terbuka senilai Rp381.129.021,00 akibat hibah masuk dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Tahun 2024;
 - b. Koreksi tambah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa jalan kabupaten pada Dinas PUPR senilai Rp427.777.888,14 akibat kesalahan pencatatan atas aset tetap yang telah PHO pada 2024 namun masih dicatat sebagai Aset Tetap KDP;
 - c. Koreksi kurang Aset Tetap KDP berupa jalan pada Dinas PUPR senilai Rp388.876.460,14 akibat kesalahan pencatatan aset tetap yang telah PHO pada tahun 2024 namun masih tercatat sebagai KDP; dan
 - d. Koreksi kurang Aset Tetap JIJ senilai Rp271.768.347,00 akibat reklasifikasi Aset Tetap JIJ tahun sebelumnya yang memiliki nilai dibawah batas kapitalisasi ke Aset Ekstrakomptabel.
- 7) Koreksi tambah Ekuitas atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap senilai Rp419.520.560,33 terdiri dari:
 - a) Koreksi tambah Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja Bangunan Fasilitas Umum senilai Rp7.622.580,42 akibat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menerima hibah Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada tahun 2024;
 - b) Koreksi tambah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap JIJ senilai Rp54.417.798,76 akibat kesalahan perhitungan akumulasi atas penghapusan sebagian Aset Tetap.
 - c) Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan Aset Tetap JIJ senilai Rp185.796.086,56 akibat penghapusan Aset Tetap berupa jalan khusus lainnya;
 - d) Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan Aset Tetap JIJ senilai Rp185.631.303,85 akibat perhitungan ulang akumulasi atas kesalahan pencatatan aset tetap yang telah PHO pada tahun 2024 namun masih tercatat sebagai KDP; dan
 - e) Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan Aset Tetap JIJ senilai Rp110.133.549,10 akibat reklasifikasi Aset Tetap JIJ tahun sebelumnya yang memiliki nilai dibawah batas kapitalisasi ke Aset Ekstrakomptabel;
- 8) Koreksi kurang Ekuitas atas Kewajiban senilai Rp4.252.793.528,00, yang terdiri dari:
 - a) Koreksi tambah Utang Belanja Pegawai senilai Rp1.384.743.100,00, yang terdiri dari:
 - i. Koreksi tambah Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN - Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD senilai Rp89.638.100,00 akibat kurang catat utang Belanja tahun 2024;



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- ii. Koreksi tambah Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN - Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD senilai Rp8.355.000,00 akibat kurang catat Utang Belanja tahun 2024; dan
- iii. Koreksi tambah Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN - Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD senilai Rp1.286.750.000,00 akibat kurang catat Utang Belanja tahun 2024;
- b) Koreksi tambah Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten pada Dinas PUPR senilai Rp38.901.428,00 karena adanya aset tetap yang telah PHO pada tahun 2024 namun belum dicatat sebagai aset tahun 2024;
- c) Koreksi tambah Utang atas kelebihan penerimaan Dana Transfer Umum DBH senilai Rp2.829.149.000,00 terdiri dari :
 - i. Kelebihan penerimaan Dana Transfer Umum DBH Pajak PPH Pasal 21 senilai Rp191.802.000,00;
 - ii. Kelebihan penerimaan Dana Transfer Umum DBH PBB senilai Rp654.682.000,00;
 - iii. Kelebihan penerimaan Dana Transfer Umum DBH Pajak CHT senilai Rp20.162.000,00;
 - iv. Kelebihan penerimaan Dana Transfer Umum DBH SDA Minerba *Landrent* senilai Rp59.782.000,00;
 - v. Kelebihan penerimaan Dana Transfer Umum DBH SDA Minerba *Royalty* senilai Rp13.864.000,00;
 - vi. Kelebihan penerimaan Dana Transfer Umum DBH SDA Panas Bumi senilai Rp161.040.000,00;
 - vii. Kelebihan penerimaan Dana Transfer Umum DBH SDA Kehutanan senilai Rp5.726.000,00; dan
 - viii. Kelebihan penerimaan Dana Transfer Umum DBH SDA Perikanan senilai Rp1.722.091.000,00;

5.6.4. Ekuitas Akhir

31 Desember 2025	31 Desember 2024
<u>Rp2.074.869.841.258,66</u>	<u>Rp2.055.142.764.696,19</u>

Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp2.074.869.841.258,66 dan senilai Rp2.055.142.764.696,19 mengalami kenaikan senilai Rp19.727.076.562,47 atau sebesar 0,96%.



BAB VI

PENGUNGKAPAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Kabupaten Manggarai adalah sebuah kabupaten yang terletak di bagian barat Pulau Flores, Provinsi NTT. UU pembentukan Kabupaten Manggarai sebenarnya tidak ada karena Kabupaten Manggarai sendiri sudah ada sejak tahun 1958 melalui UU Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Manggarai adalah kabupaten induk yang telah mengalami dua kali pemekaran wilayah yakni Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Manggarai Timur.

Kabupaten Manggarai sebagai salah satu daerah otonom yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman yang dimiliki daerah.

Berbagai rencana, kiat dan strategi disusun dan dilaksanakan untuk menghantar dan membebaskan masyarakat dari berbagai keteringgalan, tersirat dalam Visi Pemerintah Kabupaten Manggarai 2021-2026, yaitu "Manggarai Maju, Adil dan Berdaya Saing." Visi tersebut diwujudkan ke dalam 4 (empat) agenda pokok pembangunan Kabupaten Manggarai yaitu:

1. Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia;
2. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat;
3. Meningkatkan Mutu Lingkungan Hidup;
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Melayani.

Secara geografis Kabupaten Manggarai terletak di antara 8° 14'27, 32" hingga 8°54',17" Lintang Selatan dan 120° 13'41,34 hingga 120° 32' 47,22 Bujur Timur. Adapun batas wilayah Kabupaten Manggarai sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Manggarai Barat, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Manggarai Timur, sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores dan sebelah selatan berbatasan dengan Laut Sawu. Sedangkan luas wilayah Kabupaten Manggarai yaitu 1.343,03 km² yang terdiri dari daratan Pulau Flores dan Pulau Mules dengan pusat pemerintahan di Kota Ruteng, Kecamatan Langke Rembong. Secara umum Kabupaten Manggarai mengalami 2 (dua) musim yaitu musim hujan dan musim kemarau dengan hasil pertanian dari sawah dan juga Perkebunan di samping sayur dan buah-buahan juga terdapat kemiri, kopi, kakao, jambu mete, tembakau, dan vanili.

Kabupaten Manggarai juga terdapat objek wisata dari kampung adat peninggalan sejarah yang merupakan bagian dari adat istiadat di Kabupaten Manggarai yakni Kampung Adat Todo, Kampung Adat Wae Rebo, Kampung Adat Ruteng Pu'u dan juga obyek wisata Liang Bua dan obyek wisata Gunung Ranaka.

Berdasarkan data dari BPS jumlah penduduk Kabupaten Manggarai (per November 2025) sebanyak 342.56 ribu jiwa dengan rincian laki-laki sebanyak 175.131



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

jiwa dan perempuan sebanyak 174.705 jiwa yang merupakan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan dan keberhasilan pembangunan. Namun, dengan kualitas mayoritas pendidikan penduduk yang masih rendah dan jumlah lapangan pekerjaan yang terbatas akan menjadi beban bagi pembangunan daerah itu sendiri.

Angka kelahiran Total atau *Total Fertility Rate* (TFR) Tahun 2025 sebanyak 7.654 jiwa dengan angka lahir hidup sebanyak 7.585 jiwa dan angka lahir mati sebanyak 69 jiwa. Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk di antaranya angka kelahiran dan kematian, walau demikian untuk laju pertumbuhan penduduk tidak selamanya hanya kelahiran tetapi bagaimana kita mengendalikan penduduk dari luar sehingga mereka tidak boleh beramai-ramai datang ke suatu tempat. Karena kalau kelahiran kita kecil tapi banyak migrasi dari luar secara otomatis juga jumlah penduduk bertambah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Manggarai pada Tahun 2025 didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari tenaga Pegawai Negeri Sipil maupun Tenaga Harian Lepas (THL). Data SDM yang ditampilkan di sini hanya PNS sebagai penanggung jawab utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Tabel 6.1 Data Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Total (orang)
		Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	
1.	Pimpinan Tinggi Pratama	27	4	31
2.	Administrator	122	35	157
3.	Pengawas	141	92	233
4.	Fungsional Guru	568	703	1.271
5.	Fungsional Medis	230	964	1.194
6.	Fungsional Teknis	256	243	499
7.	Fungsional Umum	523	402	925
Jumlah		1.867	2.443	4.310

Sumber Data: BKPSDMD Kab. Manggarai TA. 2025

Tabel 6.2 Data Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Strata-2 (S2)	63	104	167
2.	Strata 1 (S1)	1.184	1.343	2.527
3.	Diploma IV (D IV)	39	58	97
4.	Diploma III (D III)	201	738	939
5.	Diploma II (D II)	24	11	35
6.	Diploma I (D I)	2	7	9
7.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	331	177	508
8.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	13	4	17
9.	Sekolah Dasar (SD)	10	1	11
Jumlah		1.867	2.443	4.310

Sumber Data: BKPSDMD Kab. Manggarai TA. 2025



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 6.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Golongan I	10	0	10
2.	Golongan II	308	325	633
3.	Golongan III	1.062	1.612	2.674
4.	Golongan IV	487	506	993
Jumlah		1.867	2.443	4.310

Sumber Data: BKPSDMD Kab. Manggarai TA. 2025

Tabel 6.4 Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Manggarai menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin TA 2025

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Strata 1 (S1)	862	906	1.768
2.	Diploma IV (D IV)	52	149	201
3.	Diploma III (D III)	2	35	37
4.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	13	1	14
Jumlah		929	1.091	2.020

Sumber Data: BKPSDMD Kab. Manggarai TA. 2025

Tabel 6.5 Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Manggarai Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin TA 2025

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Golongan V	13	1	14
2.	Golongan VII	144	567	711
3.	Golongan IX	1.094	1.119	2.213
4.	Golongan X	84	113	197
Jumlah		1.335	1.800	3.135

Sumber Data: BKPSDMD Kab. Manggarai TA. 2025

Tabel 6.6 Jumlah Tenaga Kontrak Daerah Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Manggarai TA 2025

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Strata 1 (S1)	7	3	10
2.	Diploma III (D III)	3	0	3
3.	Diploma II (D II)	0	0	0
4.	Diploma I (D I)	1	0	1
5.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	31	0	42
6.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	3	0	3
7.	Sekolah Dasar (SD)	4	0	4
Jumlah		49	14	63

Sumber Data: BKPSDMD Kab. Manggarai TA. 2025



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

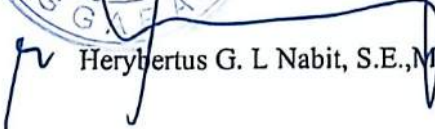
BAB VII

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai TA 2025 disajikan dengan berpedoman pada PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Pemerintahan Berbasis AkruaI dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai TA 2025 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam penyampaian Laporan Keuangan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Catatan Laporan atas Keuangan yang telah kami sajikan ini masih jauh dari sempurna dan atas kondisi tersebut kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, dengan maksud untuk penyempurnaan dalam penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Kabupaten Manggarai untuk periode yang akan datang.

Kiranya apa yang disampaikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan TA 2025 ini akan memberikan Gambaran yang jelas bagi ketujuh komponen Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai yaitu (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).


Bupati Manggarai,

Herybertus G. L Nabit, S.E., M.A

LAMPIRAN

Rincian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi TA 2025

No	Nama Desa	Bagi Hasil Pajak (Rp)	Bagi Hasil Retribusi (Rp)	Nilai Transfer (Rp)
1	2	3	4	5
1	Satar Ngkeling Kecamatan Wae Ril	15.035.000,00	3.508.000,00	18.543.000,00
2	Lolong Kecamatan Wae Ril	14.377.000,00	3.355.000,00	17.732.000,00
3	Poco Kecamatan Wae Ril	13.098.000,00	3.056.000,00	16.154.000,00
4	Wae Mufu Kecamatan Wae Ril	15.726.000,00	3.669.000,00	19.395.000,00
5	Ndehes Kecamatan Wae Ril	19.459.000,00	4.541.000,00	24.000.000,00
6	Go'o Cador Kecamatan Wae Ril	18.578.000,00	4.335.000,00	22.913.000,00
7	Longlo Kecamatan Wae Ril	13.602.000,00	3.174.000,00	16.776.000,00
8	Ranggi Kecamatan Wae Ril	13.676.000,00	3.191.000,00	16.867.000,00
9	Compang Ndehes Kecamatan Wae Ril	17.730.000,00	4.137.000,00	21.867.000,00
10	Bangka Jong Kecamatan Wae Ril	14.785.000,00	3.450.000,00	18.235.000,00
11	Bangka Kanda Kecamatan Wae Ril	15.159.000,00	3.537.000,00	18.696.000,00
12	Go'o Mando Kecamatan Wae Ril	14.835.000,00	3.462.000,00	18.297.000,00
13	Go'o Wuas Kecamatan Wae Ril	12.842.000,00	2.997.000,00	15.839.000,00
14	Wae Ril Kecamatan Wae Ril	18.292.000,00	4.268.000,00	22.560.000,00
15	Ranaka Kecamatan Wae Ril	14.797.000,00	3.453.000,00	18.250.000,00
16	Go'o Watu Kecamatan Wae Ril	17.186.000,00	4.010.000,00	21.196.000,00
17	Benteng Poco Kecamatan Wae Ril	11.824.000,00	2.759.000,00	14.583.000,00
18	Cumbi Kecamatan Ruteng	14.300.000,00	3.337.000,00	17.637.000,00
19	Kakor Kecamatan Ruteng	13.355.000,00	3.116.000,00	16.471.000,00
20	Pong Murung Kecamatan Ruteng	16.489.000,00	3.848.000,00	20.337.000,00
21	Bulan Kecamatan Ruteng	26.062.000,00	6.081.000,00	32.143.000,00
22	Pong Lao Kecamatan Ruteng	12.725.000,00	2.969.000,00	15.694.000,00
23	Bea Rahong Kecamatan Ruteng	17.154.000,00	4.003.000,00	21.157.000,00
24	Go'o Worok Kecamatan Ruteng	13.063.000,00	3.048.000,00	16.111.000,00
25	Mefer Kecamatan Ruteng	17.587.000,00	4.104.000,00	21.691.000,00
26	Benteng Kuwu Kecamatan Ruteng	21.140.000,00	4.933.000,00	26.073.000,00
27	Belang Turi Kecamatan Ruteng	23.167.000,00	5.406.000,00	28.573.000,00
28	Pong Leko Kecamatan Ruteng	15.333.000,00	3.578.000,00	18.911.000,00
29	Rai Kecamatan Ruteng	17.142.000,00	4.000.000,00	21.142.000,00
30	Poco Likang Kecamatan Ruteng	16.964.000,00	3.958.000,00	20.922.000,00
31	Bangka Lao Kecamatan Ruteng	21.193.000,00	4.945.000,00	26.138.000,00
32	Compang Dalo Kecamatan Ruteng	12.259.000,00	2.860.000,00	15.119.000,00
33	Bea Kakor Kecamatan Ruteng	15.147.000,00	3.534.000,00	18.681.000,00
34	Compang Namut Kecamatan Ruteng	18.259.000,00	4.261.000,00	22.520.000,00
35	Pong Lalo Kecamatan Ruteng	11.764.000,00	2.745.000,00	14.509.000,00
36	Jaong Kecamatan Satar Mese	11.757.000,00	2.743.000,00	14.500.000,00
37	Ponglor Kecamatan Satar Mese	17.279.000,00	4.032.000,00	21.311.000,00
38	Wae Ajang Kecamatan Satar Mese	17.635.000,00	4.115.000,00	21.750.000,00
39	Papang Kecamatan Satar Mese	14.232.000,00	3.321.000,00	17.553.000,00
40	Wewo Kecamatan Satar Mese	16.168.000,00	3.773.000,00	19.941.000,00
41	Lungar Kecamatan Satar Mese	12.353.000,00	2.882.000,00	15.235.000,00
42	Mocok Kecamatan Satar Mese	11.093.000,00	2.588.000,00	13.681.000,00
43	Koak Kecamatan Satar Mese	14.979.000,00	3.495.000,00	18.474.000,00
44	Lunggo Kecamatan Satar Mese	15.869.000,00	3.703.000,00	19.572.000,00
45	Lugu Kecamatan Satar Mese	16.329.000,00	3.810.000,00	20.139.000,00
46	Paia Kecamatan Satar Mese	13.620.000,00	3.178.000,00	16.798.000,00
47	Tal Kecamatan Satar Mese	15.786.000,00	3.683.000,00	19.469.000,00
48	Go'o Lambo Kecamatan Satar Mese	14.095.000,00	3.289.000,00	17.384.000,00
49	Ngkaer Kecamatan Satar Mese	13.869.000,00	3.236.000,00	17.105.000,00
50	Umung Kecamatan Satar Mese	14.381.000,00	3.356.000,00	17.737.000,00
51	Tado Kecamatan Satar Mese	11.295.000,00	2.635.000,00	13.930.000,00
52	Gara Kecamatan Satar Mese	17.833.000,00	4.161.000,00	21.994.000,00
53	Go'o Munlas Kecamatan Satar Mese	14.490.000,00	3.381.000,00	17.871.000,00
54	Ponggeok Kecamatan Satar Mese	18.494.000,00	4.315.000,00	22.809.000,00

Rincian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi TA 2025

No.	Nama Desa	Bagi Hasil Pajak (Rp)	Bagi Hasil Retribusi (Rp)	Nilai Transfer (Rp)
1	2	3	4	5
55	Iteng Kecamatan Satar Meso	17.803.000,00	4.154.000,00	21.957.000,00
56	Satar Loung Kecamatan Satar Meso	12.956.000,00	3.023.000,00	15.979.000,00
57	Lolang Kecamatan Satar Meso	15.362.000,00	3.584.000,00	18.946.000,00
58	Ulu Belang Kecamatan Satar Meso	11.862.000,00	2.768.000,00	14.630.000,00
59	Nenu Kecamatan Cibai	20.733.000,00	4.838.000,00	25.571.000,00
60	Rado Kecamatan Cibai	13.946.000,00	3.254.000,00	17.200.000,00
61	Wudi Kecamatan Cibai	17.127.000,00	3.999.000,00	21.136.000,00
62	Welu Kecamatan Cibai	15.495.000,00	3.615.000,00	19.110.000,00
63	Golo Kecamatan Cibai	13.961.000,00	3.257.000,00	17.218.000,00
64	Barang Kecamatan Cibai	17.455.000,00	4.073.000,00	21.528.000,00
65	Perak Kecamatan Cibai	15.859.000,00	3.700.000,00	19.559.000,00
66	Bea Mese Kecamatan Cibai	16.523.000,00	3.855.000,00	20.378.000,00
67	Langkas Kecamatan Cibai	16.154.000,00	3.769.000,00	19.923.000,00
68	Ladur Kecamatan Cibai	20.248.000,00	4.725.000,00	24.973.000,00
69	Kentol Kecamatan Cibai	16.261.000,00	3.794.000,00	20.055.000,00
70	Rung Kecamatan Cibai	14.531.000,00	3.391.000,00	17.922.000,00
71	Pinggang Kecamatan Cibai	15.841.000,00	3.696.000,00	19.537.000,00
72	Lando Kecamatan Cibai	11.726.000,00	2.736.000,00	14.462.000,00
73	Gapong Kecamatan Cibai	19.323.000,00	4.509.000,00	23.832.000,00
74	Golo Ncuang Kecamatan Cibai	12.476.000,00	2.911.000,00	15.387.000,00
75	Robek Kecamatan Reok	16.536.000,00	3.858.000,00	20.394.000,00
76	Ruis Kecamatan Reok	26.372.000,00	6.154.000,00	32.526.000,00
77	Bajak Kecamatan Reok	14.103.000,00	3.291.000,00	17.394.000,00
78	Watu Baur Kecamatan Reok	12.273.000,00	2.864.000,00	15.137.000,00
79	Salama Kecamatan Reok	19.437.000,00	4.535.000,00	23.972.000,00
80	Watu Tango Kecamatan Reok	17.190.000,00	4.011.000,00	21.201.000,00
81	Hihintir Kecamatan Satar Mese Barat	23.247.000,00	5.424.000,00	28.671.000,00
82	Bea Kondo Kecamatan Satar Mese Barat	17.148.000,00	4.001.000,00	21.149.000,00
83	Golo Ropong Kecamatan Satar Mese Barat	13.075.000,00	3.051.000,00	16.126.000,00
84	Terong Kecamatan Satar Mese Barat	18.255.000,00	4.259.000,00	22.514.000,00
85	Ceka Luju Kecamatan Satar Mese Barat	17.605.000,00	4.108.000,00	21.713.000,00
86	Satar Luju Kecamatan Satar Mese Barat	18.949.000,00	4.422.000,00	23.371.000,00
87	Satar Lenda Kecamatan Satar Mese Barat	13.924.000,00	3.249.000,00	17.173.000,00
88	Satar Ruwuk Kecamatan Satar Mese Barat	19.018.000,00	4.438.000,00	23.456.000,00
89	Nuca Molas Kecamatan Satar Mese Barat	14.186.000,00	3.310.000,00	17.496.000,00
90	Borik Kecamatan Satar Mese Barat	15.595.000,00	3.639.000,00	19.234.000,00
91	Cambir Leca Kecamatan Satar Mese Barat	13.973.000,00	3.260.000,00	17.233.000,00
92	Wongka Kecamatan Satar Mese Barat	11.879.000,00	2.772.000,00	14.651.000,00
93	Buar Kecamatan Rahong Utara	17.286.000,00	4.033.000,00	21.319.000,00
94	Benteng Tubi Kecamatan Rahong Utara	16.171.000,00	3.773.000,00	19.944.000,00
95	Comping Dari Kecamatan Rahong Utara	12.676.000,00	2.958.000,00	15.634.000,00
96	Dimpong Kecamatan Rahong Utara	14.263.000,00	3.328.000,00	17.591.000,00
97	Bangka Ajang Kecamatan Rahong Utara	12.731.000,00	2.971.000,00	15.702.000,00
98	Uang Bua Kecamatan Rahong Utara	13.368.000,00	3.119.000,00	16.487.000,00
99	Tengku Lese Kecamatan Rahong Utara	17.633.000,00	4.114.000,00	21.747.000,00
100	Golo Langlok Kecamatan Rahong Utara	15.073.000,00	3.517.000,00	18.590.000,00
101	Pong Lengor Kecamatan Rahong Utara	14.653.000,00	3.419.000,00	18.072.000,00
102	Manong Kecamatan Rahong Utara	16.059.000,00	3.747.000,00	19.806.000,00
103	Bangka Ruang Kecamatan Rahong Utara	15.805.000,00	3.686.000,00	19.493.000,00
104	Wae Mantang Kecamatan Rahong Utara	17.125.000,00	3.998.000,00	21.121.000,00
105	Bangka Lelak Kecamatan Lelak	15.664.000,00	3.655.000,00	19.319.000,00
106	Gelong Kecamatan Lelak	13.015.000,00	3.037.000,00	16.052.000,00
107	Urang Kecamatan Lelak	19.871.000,00	4.637.000,00	24.508.000,00
108	Ketang Kecamatan Lelak	16.538.000,00	3.859.000,00	20.397.000,00

Rincian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi TA 2025

No.	Nama Desa	Bagi Hasil Pajak (Rp)	Bagi Hasil Retribusi (Rp)	Nilai Transfer (Rp)
1	2	3	4	5
109	Pong Umpu Kecamatan Lelok	12.525.000,00	2.922.000,00	15.447.000,00
110	Bangka Desa Kecamatan Lelok	13.803.000,00	3.242.000,00	17.135.000,00
111	Nati Kecamatan Lelok	14.433.000,00	3.308.000,00	17.801.000,00
112	Ndiwar Kecamatan Lelok	14.948.000,00	3.468.000,00	18.436.000,00
113	Bangka Tonggur Kecamatan Lelok	13.617.000,00	3.177.000,00	16.794.000,00
114	Lentang Kecamatan Lelok	16.971.000,00	3.960.000,00	20.931.000,00
115	Kajong Kecamatan Reok Barat	19.222.000,00	4.485.000,00	23.707.000,00
116	Lante Kecamatan Reok Barat	13.755.000,00	3.209.000,00	16.964.000,00
117	Toe Kecamatan Reok Barat	17.826.000,00	4.159.000,00	21.985.000,00
118	Sambi Kecamatan Reok Barat	17.433.000,00	4.068.000,00	21.501.000,00
119	Nggalak Kecamatan Reok Barat	19.630.000,00	4.580.000,00	24.210.000,00
120	Loce Kecamatan Reok Barat	14.892.000,00	3.475.000,00	18.367.000,00
121	Lemarang Kecamatan Reok Barat	12.207.000,00	2.848.000,00	15.055.000,00
122	Torong Koe Kecamatan Reok Barat	16.711.000,00	3.699.000,00	20.610.000,00
123	Para Lando Kecamatan Reok Barat	12.815.000,00	2.990.000,00	15.805.000,00
124	Rura Kecamatan Reok Barat	16.669.000,00	3.890.000,00	20.659.000,00
125	Bera Kecamatan Cibai Barat	15.674.000,00	3.657.000,00	19.331.000,00
126	Wae Codi Kecamatan Cibai Barat	18.560.000,00	4.332.000,00	22.896.000,00
127	Golo Wol Kecamatan Cibai Barat	14.053.000,00	3.279.000,00	17.332.000,00
128	Golo Lanak Kecamatan Cibai Barat	12.445.000,00	2.904.000,00	15.349.000,00
129	Latung Kecamatan Cibai Barat	15.485.000,00	3.613.000,00	19.098.000,00
130	Wae Rance Kecamatan Cibai Barat	15.125.000,00	3.520.000,00	18.654.000,00
131	Timbu Kecamatan Cibai Barat	13.845.000,00	3.230.000,00	17.076.000,00
132	Bangka Ara Kecamatan Cibai Barat	14.070.000,00	3.283.000,00	17.353.000,00
133	Compang Cibai Kecamatan Cibai Barat	17.923.000,00	4.182.000,00	22.105.000,00
134	Lenda Kecamatan Cibai Barat	18.770.000,00	4.360.000,00	23.150.000,00
135	Renda Kecamatan Satar Mese Utara	11.100.000,00	2.590.000,00	13.690.000,00
136	Todo Kecamatan Satar Mese Utara	14.745.000,00	3.440.000,00	18.185.000,00
137	Gulung Kecamatan Satar Mese Utara	14.289.000,00	3.334.000,00	17.623.000,00
138	Podo Kecamatan Satar Mese Utara	14.841.000,00	3.463.000,00	18.304.000,00
139	Ua Kecamatan Satar Mese Utara	17.505.000,00	4.064.000,00	21.569.000,00
140	Kole Kecamatan Satar Mese Utara	13.966.000,00	3.259.000,00	17.225.000,00
141	Ung Kecamatan Satar Mese Utara	15.695.000,00	3.602.000,00	19.357.000,00
142	Nao Kecamatan Satar Mese Utara	14.419.000,00	3.365.000,00	17.784.000,00
143	Cireng Kecamatan Satar Mese Utara	14.231.000,00	3.321.000,00	17.552.000,00
144	Ruang Kecamatan Satar Mese Utara	13.276.000,00	3.098.000,00	16.374.000,00
145	Mata Wae Kecamatan Satar Mese Utara	12.574.345,00	2.932.876,00	15.507.221,00
Jumlah		2.272.163.345,00	630.169.876,00	2.802.323.221,00

Rincian Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa TA 2025

No.	Nama Desa	Alokasi Dana Desa (Rp)	Dana Desa (Rp)	Nilai Transfer (Rp)
1	2	3	4	5
1	Satar Ngkoling Kecamatan Wae Ril	490.054.000,00	852.246.000,00	1.342.300.000,00
2	Lalong Kecamatan Wae Ril	480.774.000,00	833.139.000,00	1.313.913.000,00
3	Poco Kecamatan Wae Ril	468.076.000,00	676.067.000,00	1.144.943.000,00
4	Wae Mulu Kecamatan Wae Ril	491.420.000,00	843.309.000,00	1.334.729.000,00
5	Ndehes Kecamatan Wae Ril	486.396.000,00	790.167.000,00	1.276.563.000,00
6	Golo Cador Kecamatan Wae Ril	498.366.000,00	813.543.000,00	1.311.909.000,00
7	Longko Kecamatan Wae Ril	471.689.000,00	676.913.000,00	1.148.602.000,00
8	Ranggi Kecamatan Wae Ril	476.836.000,00	799.890.000,00	1.276.726.000,00
9	Compang Ndehes Kecamatan Wae Ril	488.796.000,00	840.102.000,00	1.328.898.000,00
10	Bangka Jong Kecamatan Wae Ril	474.156.000,00	708.200.000,00	1.182.356.000,00
11	Bangka Kenda Kecamatan Wae Ril	493.316.000,00	809.040.000,00	1.302.356.000,00
12	Golo Mendo Kecamatan Wae Ril	470.829.000,00	712.622.000,00	1.183.451.000,00
13	Golo Wuas Kecamatan Wae Ril	472.596.000,00	716.759.000,00	1.189.355.000,00
14	Wae Ril Kecamatan Wae Ril	474.742.000,00	977.430.000,00	1.452.172.000,00
15	Ranaka Kecamatan Wae Ril	478.465.000,00	784.308.000,00	1.262.773.000,00
16	Golo Watu Kecamatan Wae Ril	490.574.000,00	817.314.000,00	1.307.888.000,00
17	Benteng Poco Kecamatan Wae Ril	464.409.000,00	721.313.000,00	1.185.722.000,00
18	Cumbi Kecamatan Ruteng	484.399.000,00	832.935.000,00	1.317.334.000,00
19	Kakor Kecamatan Ruteng	483.676.000,00	806.460.000,00	1.290.136.000,00
20	Pong Murung Kecamatan Ruteng	507.136.000,00	1.179.482.000,00	1.686.618.000,00
21	Bulan Kecamatan Ruteng	511.031.000,00	637.160.120,00	1.148.191.120,00
22	Pong Lao Kecamatan Ruteng	494.357.000,00	900.852.000,00	1.395.209.000,00
23	Beo Rahong Kecamatan Ruteng	501.240.000,00	898.929.000,00	1.400.169.000,00
24	Golo Worok Kecamatan Ruteng	489.323.000,00	842.046.000,00	1.331.369.000,00
25	Meler Kecamatan Ruteng	510.475.000,00	902.082.000,00	1.412.557.000,00
26	Benteng Kurwu Kecamatan Ruteng	500.152.000,00	1.147.475.000,00	1.647.627.000,00
27	Belang Turi Kecamatan Ruteng	482.675.000,00	788.163.000,00	1.270.838.000,00
28	Pong Leko Kecamatan Ruteng	486.433.000,00	834.057.000,00	1.320.490.000,00
29	Rai Kecamatan Ruteng	485.967.000,00	1.020.357.000,00	1.506.324.000,00
30	Poco Lijang Kecamatan Ruteng	486.648.000,00	1.047.813.000,00	1.534.461.000,00
31	Bangka Lao Kecamatan Ruteng	496.192.000,00	868.197.000,00	1.364.389.000,00
32	Compang Dalo Kecamatan Ruteng	490.885.000,00	881.604.000,00	1.372.489.000,00
33	Bea Kakor Kecamatan Ruteng	479.918.000,00	848.997.000,00	1.328.915.000,00
34	Compang Namut Kecamatan Ruteng	479.538.000,00	791.238.000,00	1.270.776.000,00
35	Pong Lale Kecamatan Ruteng	465.172.000,00	697.901.000,00	1.163.073.000,00
36	Jaong Kecamatan Satar Mese	467.410.000,00	723.902.000,00	1.191.312.000,00
37	Ponglor Kecamatan Satar Mese	491.130.000,00	819.663.000,00	1.310.793.000,00
38	Wae Njang Kecamatan Satar Mese	499.988.000,00	899.157.000,00	1.399.145.000,00
39	Papang Kecamatan Satar Mese	501.009.000,00	1.023.403.000,00	1.524.412.000,00
40	Wewo Kecamatan Satar Mese	502.188.000,00	879.810.000,00	1.381.998.000,00
41	Lungar Kecamatan Satar Mese	487.458.000,00	915.880.000,00	1.403.338.000,00
42	Mocok Kecamatan Satar Mese	491.675.000,00	906.284.000,00	1.398.139.000,00
43	Kosok Kecamatan Satar Mese	506.478.000,00	863.067.000,00	1.369.545.000,00
44	Linggo Kecamatan Satar Mese	484.270.000,00	837.075.000,00	1.321.345.000,00
45	Lugu Kecamatan Satar Mese	495.220.000,00	1.088.817.000,00	1.584.037.000,00
46	Peka Kecamatan Satar Mese	490.594.000,00	864.033.000,00	1.354.627.000,00
47	Tal Kecamatan Satar Mese	490.774.000,00	1.058.475.000,00	1.549.249.000,00
48	Golo Lambo Kecamatan Satar Mese	472.379.000,00	743.780.000,00	1.216.159.000,00
49	Higkar Kecamatan Satar Mese	476.871.000,00	729.650.000,00	1.206.521.000,00

Rincian Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa TA 2025

No.	Nama Desa	Alokasi Dana Desa (Rp)	Dana Desa (Rp)	Nilai Transfer (Rp)
1	2	3	4	5
50	Umung Kecamatan Satar Mese	485.702.000,00	856.203.000,00	1.341.905.000,00
51	Tado Kecamatan Salar Mese	481.871.000,00	900.384.000,00	1.382.255.000,00
52	Gara Kecamatan Salar Mese	484.255.000,00	905.130.000,00	1.389.385.000,00
53	Golo Munlas Kecamatan Satar Mese	480.241.000,00	1.021.172.000,00	1.501.413.000,00
54	Ponggeok Kecamatan Satar Mese	474.298.000,00	778.371.000,00	1.252.669.000,00
55	Ileng Kecamatan Salar Mese	467.681.000,00	869.621.000,00	1.337.302.000,00
56	Satar Loung Kecamatan Salar Mese	482.641.000,00	810.827.000,00	1.293.468.000,00
57	Lolang Kecamatan Satar Mese	471.535.000,00	853.728.000,00	1.325.263.000,00
58	Ulu Belang Kecamatan Satar Mese	475.532.000,00	869.532.000,00	1.345.064.000,00
59	Nenu Kecamatan Cibai	491.231.000,00	1.036.455.000,00	1.527.686.000,00
60	Rado Kecamatan Cibai	467.483.000,00	800.133.000,00	1.267.616.000,00
61	Wudi Kecamatan Cibai	480.582.000,00	513.781.080,00	994.363.080,00
62	Welu Kecamatan Cibai	497.481.000,00	604.158.600,00	1.101.639.600,00
63	Golo Kecamatan Cibai	488.014.000,00	834.636.000,00	1.322.650.000,00
64	Barang Kecamatan Cibai	477.042.000,00	755.894.000,00	1.232.936.000,00
65	Perak Kecamatan Cibai	471.947.000,00	742.613.000,00	1.214.560.000,00
66	Bea Mese Kecamatan Cibai	470.270.000,00	691.562.000,00	1.161.832.000,00
67	Langkas Kecamatan Cibai	481.211.000,00	779.819.000,00	1.261.030.000,00
68	Ladur Kecamatan Cibai	496.141.000,00	925.446.000,00	1.421.587.000,00
69	Kentol Kecamatan Cibai	466.419.000,00	699.632.000,00	1.166.051.000,00
70	Riung Kecamatan Cibai	494.034.000,00	822.177.000,00	1.316.211.000,00
71	Pinggang Kecamatan Cibai	477.239.000,00	805.923.000,00	1.283.162.000,00
72	Lando Kecamatan Cibai	471.461.000,00	480.484.760,00	951.945.760,00
73	Gapong Kecamatan Cibai	473.727.000,00	972.071.000,00	1.445.798.000,00
74	Golo Ncuang Kecamatan Cibai	480.716.000,00	817.496.000,00	1.298.212.000,00
75	Robek Kecamatan Reok	494.065.000,00	850.245.000,00	1.344.310.000,00
76	Ruis Kecamatan Reok	532.034.000,00	861.099.000,00	1.393.133.000,00
77	Bajak Kecamatan Reok	496.017.000,00	1.020.378.000,00	1.516.395.000,00
78	Watu Baur Kecamatan Reok	469.988.000,00	724.583.000,00	1.194.571.000,00
79	Salama Kecamatan Reok	485.453.000,00	853.524.000,00	1.338.977.000,00
80	Watu Tango Kecamatan Reok	486.542.000,00	816.200.000,00	1.302.742.000,00
81	Hihintir Kecamatan Satar Mese Barat	522.305.000,00	939.533.000,00	1.461.838.000,00
82	Bea Kondo Kecamatan Satar Mese Barat	485.686.000,00	907.359.000,00	1.393.045.000,00
83	Golo Ropong Kecamatan Satar Mese Barat	479.799.000,00	792.149.000,00	1.271.948.000,00
84	Terong Kecamatan Satar Mese Barat	500.106.000,00	1.095.036.000,00	1.595.142.000,00
85	Ceka Luju Kecamatan Satar Mese Barat	478.323.000,00	949.931.000,00	1.428.254.000,00
86	Satar Luju Kecamatan Satar Mese Barat	491.682.000,00	818.052.000,00	1.309.734.000,00
87	Satar Lenda Kecamatan Satar Mese Barat	498.942.000,00	884.130.000,00	1.383.072.000,00
88	Satar Ruwuk Kecamatan Satar Mese Barat	494.096.000,00	927.564.000,00	1.421.660.000,00
89	Nuca Molas Kecamatan Satar Mese Barat	488.514.000,00	860.079.000,00	1.348.593.000,00
90	Borik Kecamatan Satar Mese Barat	477.650.000,00	743.825.000,00	1.221.475.000,00
91	Cambir Leca Kecamatan Satar Mese Barat	494.466.000,00	898.092.000,00	1.392.558.000,00
92	Wongka Kecamatan Satar Mese Barat	479.338.000,00	709.541.000,00	1.188.879.000,00
93	Buar Kecamatan Rahong Utara	493.102.000,00	1.052.454.000,00	1.545.556.000,00
94	Benteng Tubi Kecamatan Rahong Utara	484.025.000,00	1.063.260.000,00	1.547.285.000,00
95	Compang Darl Kecamatan Rahong Utara	478.761.000,00	784.835.460,00	1.263.596.460,00
96	Ompong Kecamatan Rahong Utara	480.028.000,00	769.682.000,00	1.249.710.000,00
97	Bangka Ajang Kecamatan Rahong Utara	496.943.000,00	931.824.000,00	1.428.767.000,00
98	Uang Bua Kecamatan Rahong Utara	498.870.000,00	942.369.000,00	1.441.239.000,00

Rincian Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa TA 2020

No.	Nama Desa	Alokasi Dana Desa (Rp)	Dana Desa (Rp)	Total Transfer (Rp)
1	2	3	4	5
03	Tengku Lese Kecamatan Rahong Utara	402.040.000,00	1.000.140.000,00	1.052.769.000,00
100	Oolo Lengkok Kecamatan Rahong Utara	400.602.000,00	500.417.000,00	1.067.109.000,00
101	Pong Lengkong Kecamatan Rahong Utara	402.003.000,00	667.879.000,00	1.369.882.000,00
102	Manong Kecamatan Rahong Utara	487.123.000,00	624.919.000,00	1.312.042.000,00
103	Bangkla Ruang Kecamatan Rahong Utara	462.000.000,00	1.076.130.000,00	1.559.739.000,00
104	Wae Manteng Kecamatan Rahong Utara	402.113.000,00	669.000.000,00	1.361.001.000,00
105	Bangkla Lelak Kecamatan Lelak	405.000.000,00	700.001.000,00	1.268.670.000,00
106	Oeleng Kecamatan Lelak	405.770.000,00	639.775.000,00	1.305.551.000,00
107	Urang Kecamatan Lelak	402.370.000,00	630.433.000,00	1.421.812.000,00
108	Kelang Kecamatan Lelak	470.657.000,00	709.713.000,00	1.240.660.000,00
109	Pong Umpu Kecamatan Lelak	404.602.000,00	747.650.000,00	1.212.161.000,00
110	Bangkla Dosa Kecamatan Lelak	405.337.000,00	620.401.000,00	1.265.708.000,00
111	Nadi Kecamatan Lelak	400.802.000,00	721.160.000,00	1.188.061.000,00
112	Ndiwer Kecamatan Lelak	472.004.000,00	711.740.000,00	1.184.740.000,00
113	Bangkla Tonggur Kecamatan Lelak	403.771.000,00	686.836.000,00	1.162.006.000,00
114	Leriteng Kecamatan Lelak	404.476.000,00	1.053.042.000,00	1.537.517.000,00
115	Keljong Kecamatan Reok Barat	622.880.000,00	1.030.204.000,00	1.660.083.000,00
116	Lente Kecamatan Reok Barat	602.071.000,00	802.407.000,00	1.395.378.000,00
117	Toe Kecamatan Reok Barat	405.570.000,00	700.130.000,00	1.285.706.000,00
118	Bambi Kecamatan Reok Barat	607.000.000,00	602.706.000,00	1.409.706.000,00
119	Nggalak Kecamatan Reok Barat	620.620.000,00	1.002.124.000,00	1.622.053.000,00
120	Loce Kecamatan Reok Barat	613.700.000,00	843.160.000,00	1.350.940.000,00
121	Lemarang Kecamatan Reok Barat	404.000.000,00	719.177.000,00	1.203.205.000,00
122	Torong Koe Kecamatan Reok Barat	400.353.000,00	720.830.000,00	1.211.189.000,00
123	Para Lendo Kecamatan Reok Barat	403.204.000,00	604.863.000,00	1.178.147.000,00
124	Rusa Kecamatan Reok Barat	467.100.000,00	1.032.670.000,00	1.629.774.000,00
125	Bere Kecamatan Cibai Barat	400.747.000,00	665.314.000,00	1.302.061.000,00
126	Wae Codi Kecamatan Cibai Barat	401.776.000,00	647.678.000,00	1.430.664.000,00
127	Oolo Wai Kecamatan Cibai Barat	470.004.000,00	605.840.000,00	1.172.640.000,00
128	Oolo Lanak Kecamatan Cibai Barat	401.001.000,00	763.883.000,00	1.244.904.000,00
129	Litung Kecamatan Cibai Barat	470.501.000,00	776.872.000,00	1.262.433.000,00
130	Wae Ronca Kecamatan Cibai Barat	401.357.000,00	663.910.000,00	1.465.267.000,00
131	Timbu Kecamatan Cibai Barat	489.050.000,00	617.794.000,00	1.300.844.000,00
132	Bangkla Aia Kecamatan Cibai Barat	405.001.000,00	676.713.000,00	1.140.714.000,00
133	Compang Cibai Kecamatan Cibai Barat	475.916.000,00	726.046.000,00	1.200.960.000,00
134	Lende Kecamatan Cibai Barat	406.125.000,00	616.602.000,00	1.301.067.000,00
135	Randa Kecamatan Satar Mese Utara	404.447.000,00	797.577.000,00	1.202.024.000,00
136	Todo Kecamatan Satar Mese Utara	474.705.000,00	708.339.000,00	1.183.103.000,00
137	Gukung Kecamatan Satar Mese Utara	400.667.000,00	650.743.000,00	1.341.410.000,00
138	Papo Kecamatan Satar Mese Utara	475.210.000,00	602.314.000,00	1.277.630.000,00
139	Ua Kecamatan Satar Mese Utara	404.503.000,00	606.000.000,00	1.400.100.000,00
140	Kole Kecamatan Satar Mese Utara	466.160.000,00	703.004.000,00	1.269.964.000,00
141	Ung Kecamatan Satar Mese Utara	475.405.000,00	741.410.000,00	1.210.805.000,00
142	Nao Kecamatan Satar Mese Utara	466.404.000,00	702.042.000,00	1.240.400.000,00
143	Cireng Kecamatan Satar Mese Utara	405.301.000,00	611.254.000,00	1.290.915.000,00
144	Ruang Kecamatan Satar Mese Utara	476.764.000,00	722.048.000,00	1.108.832.000,00
145	Mata Wae Kecamatan Satar Mese Utara	470.216.400,00	757.644.000,00	1.230.700.400,00
Jumlah		70.448.032.400,00	121.788.483.700,00	192.200.616.100,00

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUTENG, KABUPATEN MANGGARAI
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2024
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Alamat : Jln. Dr. Soetomo No. 1 Ruteng Telp / Fax (0385) 21389 Email :
rs_sim@yahoo.co.id

Opini Auditor Nomor : 00020/2.0925/AU.5/11/1881-2/1/III/2026



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUTENG

Jln. Dr. Soetomo No. 1 Ruteng
Tel/Fax. (0385)21389, 22317 Email: rs_sim@yahoo.co.id

DAFTAR ISI

Halaman

Surat Pernyataan Direksi

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan

1. Laporan Realisasi Anggaran.....	1
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.....	2
3. Neraca.....	3
4. Laporan Operasional.....	4
5. Laporan Perubahan Ekuitas.....	5
6. Laporan Arus Kas	6
Catatan atas Laporan Keuangan.....	7

SURAT PERNYATAAN DIREKSI





PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUTENG

Jln. Dr. Soetomo No. 1 Ruteng
Tel/Fax. (0385)21389, 22317 Email: rs_sim@yahoo.co.id

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : dr. Oktavianus Y. Ampur, Sp. B.
Alamat kantor : Jln. Dr. Sutomo No. 1, Ruteng
Nomor Telepon : 0813-3752-1799
Jabatan : Direktur

Untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ruteng Kabupaten Manggarai menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan Keuangan RSUD Ruteng Kabupaten Manggarai untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Laporan Keuangan RSUD Ruteng Kabupaten Manggarai telah disusun dan disajikan dengan prinsip-prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 13;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan RSUD Ruteng Kabupaten Manggarai telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan Keuangan RSUD Ruteng Kabupaten Manggarai tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar;
c. Semua dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan serta dokumen pendukung telah lengkap disusun dan disimpan oleh RSUD Ruteng Kabupaten Manggarai sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Kami bertanggungjawab atas sistem pengendalian internal, pencegahan dan penanggulangan kecurangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan bagi RSUD Ruteng Kabupaten Manggarai.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Ruteng, 16 Maret 2026

Yang membuat Pernyataan,



dr. Oktavianus Y. Ampur, Sp. B.
Direktur

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No.: 00020/2.0925/AU.5/11/1881-2/1/III/2026

Kepada Yth,
Dewan Pengawas dan Direksi
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
RSUD Ruteng Kabupaten Manggarai

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan BLUD RSUD Ruteng Kabupaten Manggarai ("Rumah Sakit"), yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2025, serta laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, neraca Rumah Sakit tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Rumah Sakit berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Rumah Sakit dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Rumah Sakit atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Rumah Sakit.

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

(Lanjutan)

Tanggung Jawab Auditor Terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

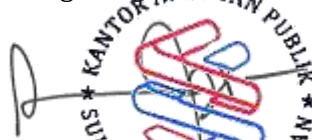
Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Rumah Sakit.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Rumah Sakit untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Rumah Sakit tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.



Tangerang, 10 Maret 2026



Pande Putu Agus Eko Pertama, S.K.M.Acc. CA, CPA
Nomor Izin Akuntan Publik: AP. 1881

LAPORAN KEUANGAN POKOK



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER Tahun 2025 DAN Tahun 2024
(dalam rupiah penuh, kecuali disajikan lain)

Uraian	Catatan	Anggaran	Realisasi Tahun 2025	%	Realisasi Tahun 2024
KEGIATAN OPERASIONAL	4.1.				
PENDAPATAN	1				
- Pendapatan Layanan dari Masyarakat	1)	69.391.228.197	77.329.970.301	111,44	73.388.865.790
- Pendapatan Hasil Kerjasama	2)	403.154.791	117.851.433	29,23	380.972.306
- Pendapatan Usaha Lainnya	3)	205.617.012	145.396.385	70,71	122.155.522
JUMLAH PENDAPATAN		70.000.000.000	77.593.218.119	110,85	73.891.993.618
BELANJA	2				
BELANJA OPERASI					
- Belanja Pegawai	a)	47.550.000	44.850.000	94,32	48.950.000
- Belanja Barang	b)	34.483.537.982	34.026.610.971	98,67	36.626.170.116
- Belanja Jasa	c)	36.759.865.664	39.623.761.542	107,79	42.696.771.873
JUMLAH BELANJA OPERASI		71.290.953.646	73.695.222.513	103,37	79.371.891.989
BELANJA MODAL					
- Belanja Peralatan dan Mesin	a)	2.170.595.000	2.115.022.023	97,44	2.131.842.376
- Belanja Gedung dan Bangunan	b)	219.899.000	165.557.900	-	-
- Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	c)	685.904.000	685.349.450	-	170.019.144
JUMLAH BELANJA MODAL		3.076.398.000	2.965.929.373	96,41	2.301.861.520
JUMLAH BELANJA		74.367.351.646	76.661.151.886	103,08	81.673.753.509
SURPLUS/DEFISIT		(4.367.351.646)	932.066.233	(21,34)	(7.781.759.891)
PEMBIAYAAN					
- Penerimaan		-	-	-	-
- Pengeluaran		-	-	-	-
JUMLAH PENGELUARAN NETTO		-	-	-	-
JUMLAH SILPA		(4.367.351.646)	932.066.233	(21,34)	(7.781.759.891)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Ruteng, 10 Maret 2026
RSUD Ruteng, Kabupaten Manggarai

dr. Oktavianus Y. Ampur, Sp.B.
Direktur

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER Tahun 2025 DAN Tahun 2024
(dalam rupiah penuh, kecuali disajikan lain)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun	4.367.351.646	12.149.111.537
Penggunaan SAL	-	-
Sub Total	4.367.351.646	12.149.111.537
Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	932.066.233	(7.781.759.891)
Sub Total	5.299.417.879	4.367.351.646
Pemindahbukuan ke R/K Kabupaten Manggarai	-	-
Koreksi kesalahan tahun sebelumnya	90	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun	5.299.417.969	4.367.351.646

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Ruteng, 10 Maret 2026
RSUD Ruteng, Kabupaten Manggarai


dr. Oktavianus Y. Ampur, Sp.B.
Direktur

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUTENG KABUPATEN MANGGARAI				
NERACA				
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL				
31 DESEMBER Tahun 2025 DAN Tahun 2024				
(dalam rupiah penuh, kecuali disajikan lain)				
Uraian	Catatan	Tahun 2025	Tahun 2024	
ASET	4.3.1.			
Aset Lancar	1			
- Kas dan Setara Kas	a)	5.299.417.969	4.367.351.646	
- Piutang Pelayanan	b)	6.104.672.464	7.689.907.925	
- Penyisihan Kerugian Piutang	c)	(5.903.346.522)	(5.865.106.395)	
- Piutang Lain-Lain	d)	198.685.995	78.074.220	
- Persediaan	e)	4.857.474.902	5.261.206.714	
Jumlah Aset Lancar		10.556.904.808	11.531.434.110	
Aset Tetap	2			
- Tanah	1)	6.711.250.000	6.711.250.000	
- Peralatan dan Mesin	2)	143.101.663.471	140.986.641.448	
- Gedung dan Bangunan	3)	119.754.652.019	119.279.283.719	
- Jalan,Irigasi dan Jaringan	4)	5.390.702.314	4.705.352.864	
- Konstruksi Dalam Pengerjaan	5)	10.467.114.422	10.467.114.422	
Jumah Nilai Perolehan Aktiva Tetap		285.425.382.226	282.149.642.453	
- Akumulasi Penyusutan		(140.466.861.188)	(122.270.937.313)	
Jumlah Aset Tetap		144.958.521.038	159.878.705.140	
Aset Lainnya	3			
- Aset tetap rusak tidak digunakan		1.255.726.144	1.255.726.144	
- Software		550.416.000	550.416.000	
- Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya		(1.597.442.744)	(1.542.401.144)	
Jumlah Aset Lainnya		208.699.400	263.741.000	
JUMLAH ASET		155.724.125.246	171.673.880.250	
KEWAJIBAN	4.3.2.			
Kewajiban Jangka Pendek	1			
- Utang Usaha	1)	1.910.387.894	498.059.600	
- Beban Yang Masih Harus Dibayar	2)	3.717.189.215	2.780.774.994	
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		5.627.577.109	3.278.834.594	
Kewajiban Jangka Panjang	2	-	-	
Jumlah Kewajiban		5.627.577.109	3.278.834.594	
EKUITAS	4.3.3.			
- Ekuitas		150.096.548.137	168.395.045.656	
Jumlah Ekuitas		150.096.548.137	168.395.045.656	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		155.724.125.246	171.673.880.250	
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan				
Ruteng, 10 Maret 2026				
RSUD Ruteng, Kabupaten Manggarai				
Dr. Oktavianus Y. Ampur, Sp.B.				
Direktur				
3 - 47				

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER Tahun 2025 DAN Tahun 2024
(dalam rupiah penuh, kecuali disajikan lain)

Uraian	Catatan	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL	4.4.				
PENDAPATAN	1				
- Pendapatan Layanan kepada Masyarakat	1)	75.744.734.840	69.160.475.945	6.584.258.895	9,52
- Pendapatan Hasil Kerjasama	2)	238.463.208	332.863.686	(94.400.478)	(28,36)
- Pendapatan Hibah	3)	-	1.801.820.000	(1.801.820.000)	(100,00)
- Pendapatan Operasional Lainnya	4)	145.396.385	174.355.522	(28.959.137)	(16,61)
- Pendapatan APBD	5)	28.960.709.978	29.007.397.550	(46.687.572)	(0,16)
JUMLAH PENDAPATAN		105.089.304.411	100.476.912.703	4.612.391.708	4,59
BEBAN	2				
- Beban Pegawai	1)	28.239.295.500	27.100.769.325	1.138.526.175	4,20
- Beban Pemakaian Persediaan	2)	35.507.887.110	34.449.276.542	1.058.610.568	3,07
- Beban Jasa	3)	41.263.248.134	29.854.732.812	11.408.515.322	38,21
- Beban Penyusutan, Penyisihan & Amortisasi	4)	19.413.813.813	22.062.086.414	(2.648.272.601)	(12,00)
JUMLAH BEBAN		124.424.244.557	113.466.865.093	10.957.379.464	9,66
SURPLUS/(DEFISIT) OPERASIONAL		(19.334.940.146)	(12.989.952.390)	(6.344.987.756)	48,85
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
- Surplus/Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-	-	-
- (Kerugian) Penurunan Nilai Aset		-	-	-	-
- Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-	-	-
JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		(19.334.940.146)	(12.989.952.390)	(6.344.987.756)	48,85
POS LUAR BIASA					
- Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-
- Beban Luar Biasa		-	-	-	-
JUMLAH POS LUAR BIASA		-	-	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) LO		(19.334.940.146)	(12.989.952.390)	(6.344.987.756)	48,85

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Ruteng, 10 Maret 2026
RSUD Ruteng, Kabupaten Manggarai



dr. Oktavianus Y. Ampur, Sp.B.
Direktur

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER Tahun 2025 DAN Tahun 2024
(dalam rupiah penuh, kecuali disajikan lain)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Ekuitas Awal	168.395.045.656	191.535.548.937
1 Surplus/Defisit LO	(19.334.940.146)	(12.989.952.392)
2 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar:		
- Koreksi lebih klaim piutang jasa pelayanan ke BPJS	-	(652.751.700)
- Koreksi beban tahun berjalan, dibayar di tahun berikut	-	(9.497.799.189)
- Koreksi atas lebih hitung ak penyusutan gedung TB 2024	1.124.608.211	-
- Koreksi atas salah catat persediaan	(77.565.673)	-
- Koreksi atas salah catat penambahan aset tetap tahun 2025	(6.000.000)	-
- Koreksi atas salah catat saldo kas	89	-
Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar:	1.041.042.627	(10.150.550.889)
3 Setor ke Kas Daerah	(4.600.000)	-
Ekuitas Akhir	150.096.548.137	168.395.045.656

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Ruteng, 10 Maret 2026
RSUD Ruteng, Kabupaten Manggarai

dr. Oktavianus Y. Ampur, Sp.B.
Direktur

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER Tahun 2025 DAN Tahun 2024
(dalam rupiah penuh, kecuali disajikan lain)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Arus Kas dari Aktifitas Operasional		
Arus Kas Masuk		
- Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan	77.329.970.301	73.388.865.790
- Pendapatan Kerjasama	117.851.433	380.972.306
- Pendapatan Lainnya	145.396.385	122.155.522
- Pendapatan APBD	24.916.134.978	1.998.078.225
Jumlah arus Kas Masuk	102.509.353.097	75.890.071.843
Arus Kas Keluar		
- Biaya Pegawai	24.190.129.500	94.600.000
- Biaya Barang	34.037.764.971	36.627.960.116
- Biaya Jasa	40.073.652.620	43.388.075.488
Jumlah Arus Kas Keluar	98.301.547.091	80.110.635.604
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi	4.207.806.006	(4.220.563.761)
Arus Kas dari Aktifitas Investasi		
Arus Kas Masuk	-	-
Arus Kas Keluar:		
- Perolehan Peralatan dan Mesin	2.115.022.023	3.561.196.130
- Perolehan Gedung dan Bangunan	475.368.300	-
- Perolehan jalan,irigasi dan jaringan	685.349.450	-
Jumlah Arus Kas Keluar	3.275.739.773	3.561.196.130
Arus Kas Bersih dar Aktifitas Investasi	932.066.233	(7.781.759.891)
Arus kas dari Aktifitas Pendanaan		
Arus Kas dar Aktifitas Transitoris	-	-
Arus Kas Masuk		
- Koreksi saldo kas	90,00	-
Jumlah Arus Kas Masuk	90,00	-
Arus Kas Keluar		
- Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	-	-
- Pemindahbukuan ke R/K Pemda	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar	-	-
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pendanaan	90	-
Kenaikan/Penurunan Kas BLUD	932.066.323	(7.781.759.891)
Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD	4.367.351.646	12.149.111.537
Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD	5.299.417.969	4.367.351.646

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Ruteng, 10 Maret 2026
RSUD Ruteng, Kabupaten Manggarai



dr. Oktavianus Y. Ampur, Sp.B.
Direktur

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah penuh)**

1. UMUM

1.1. Sejarah Berdiri dan Tempat Kedudukan

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ruteng Kabupaten Manggarai merupakan institusi kesehatan yang berada dibawah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai, adalah cikal bakal dari unit pelayanan kesehatan yang dibentuk pada tanggal 20 Mei 1918. Sebelumnya bernama RSUD dr. Ben Mboi Kabupaten Manggarai.

RSUD Ruteng didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 10 Tahun 2015 tanggal 4 November 2015 tentang Perubahan Ke-empat atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2015 Nomor 010) yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Manggarai Nomor 37 Tanggal 2015 tentang Perubahan Ke-empat Pelaksanaan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Manggarai (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2015 Nomor 37).

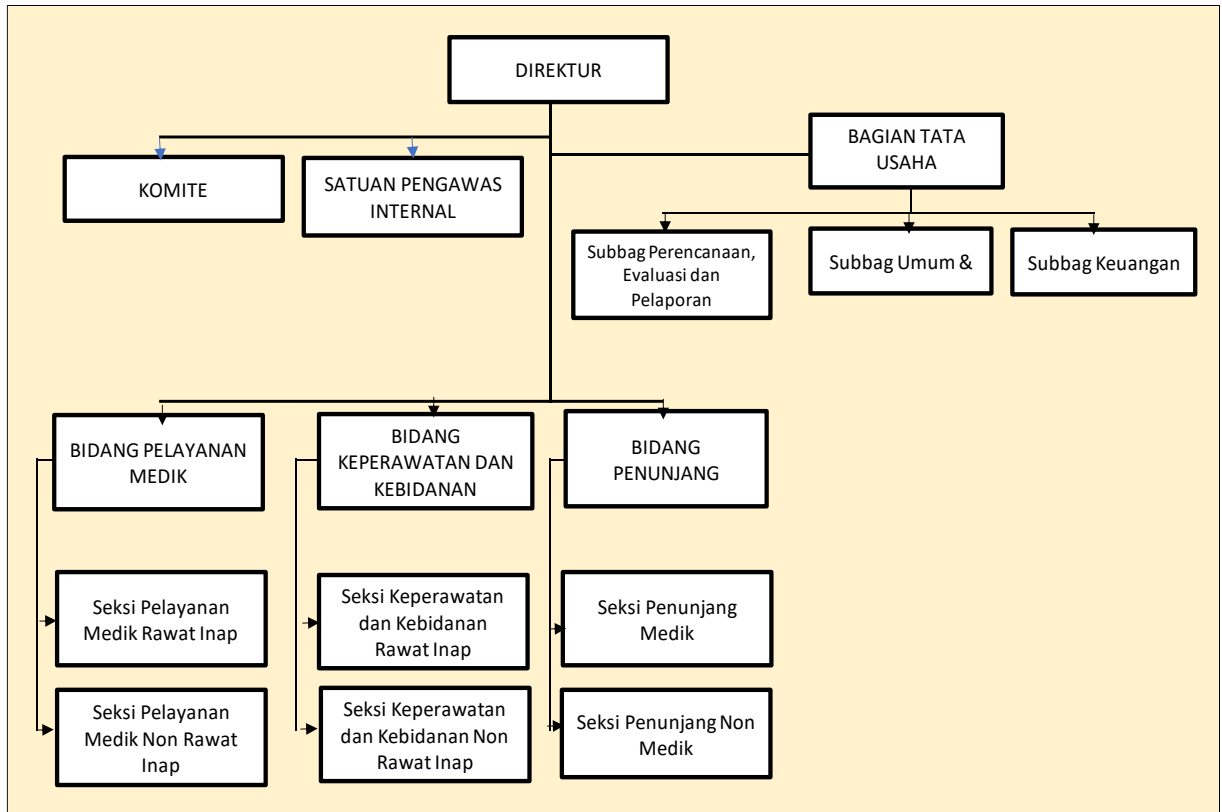
Tempat kedudukan RSUD Ruteng di Jalan dr. Soetomo Nomor 1, Ruteng, Kabupaten Manggarai.

1.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi BLUD RSUD Ruteng ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja RSUD Ruteng.

Sesuai peraturan tersebut, kerangka struktur organisasi BLUD RSUD Ruteng ditetapkan sebagai berikut:

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah penuh)



a. Direktur

Pada tahun 2025 direktur RSUD Ruteng Kabupaten Manggarai dijabat oleh dr. Oktavianus Yanuarius Ampur, Sp.B., yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Nomor HK/66/2022 tanggal 31 Januari 2022.

Direktur membawahi Bagian Tata Usaha dan 3 Bidang Pelayanan. terdiri dari

- 1) Bagian Tata Usaha, dijabat oleh Rosa Delima Augusta J. Moa, SE., membawahi:
 - a) Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - b) Subbag Umum dan Kepegawaian
 - c) Subbag Keuangan
- 2) Bidang Pelayanan Medik, dijabat oleh Maria Octaviana Lambo, membawahi:
 - a) Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap
 - b) Seksi Pelayanan Medik Non Rawat Inap
- 3) Bidang Keperawatan dan Kebidanan, dijabat oleh Jenny membawahi:

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah penuh)**

- a) Seksi Keperawatan dan Kebidanan Rawat Inap
- b) Seksi Keperawatan dan Kebidanan Non Rawat Inap
- 4) Bidang Penunjang, dijabat oleh Benyamin Lo, membawahi:
 - a) Seksi Penunjang Medik
 - b) Seksi Penunjang Non Medik

Dalam kaitan dengan pengelolaan keuangan, mulai sejak 1 Januari 2014 pengelolaan keuangan BLUD RSUD Ruteng dilaksanakan dengan menerapkan pola Badan Layanan Umum Daerah, berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Nomor HK/399/2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Ruteng, Kabupaten Manggarai.

b. Dewan Pengawas

Dewan Pengawas pada RSUD Ruteng dibentuk berdasarkan keputusan Bupati Manggarai Nomor: HK/262/2022 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Ben Mboi Periode Tahun 2022-2025, terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, yaitu:

- Kepala Dinas Kesehatan
- Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, dan
- Mariati S.Kep, Ns., M.Kep.

Dewan Pengawas dalam tugasnya membantu Bupati dalam aspek pengawasan langsung.

c. Satuan Pemeriksa Internal

RSUD Ruteng Kabupaten Manggarai memiliki unit yang memhantu manajemen dalam fungsi pengawasan internal, dibentuk secara internal berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Ruteng Nomor: RSUD 445.7/167/VII/2024 tentang Pembentukan Satuan Pengawas Internal (SPI) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, dengan susunan Tim terdiri dari :

Ketua : drg. Helena Silvia Lahur

Sekretaris : Margaretha B. Banilo, SKM

Anggota : - Katarina A. Sinar, Ns. S.Kep

– Beatriks Julita Dampuk, S.Farm., Apt.

– Eufemia Angelina Piora, SE.

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah penuh)**

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Manggarai Nornor 8 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, terurai sebagai berikut:

a. Tugas Pokok

RSUD Ruteng mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan medik. pelayanan keperawatan dan kebidanan, pelayanan penunjang dan ketatausahaan.

b. Fungsi

RSUD Ruteng dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengoordinasian penyusunan program/kegiatan RSUD Ruteng:
- 2) Perumusan kebijakan teknis/petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan RSUD Ruteng:
- 3) Pengordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi RSUD Ruteng:
- 4) Pelaksanaan pembinaan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi RSUD Ruteng:
- 5) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya:
- 6) Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

1.4. Visi - Misi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan ideal yang akan dicapai pada akhir periode perencanaan pembangunan. Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 - 2026 adalah : "MANGGARAI MAJU. ADIL DAN BERDAYA SAING".

a. Visi

Memperhatikan visi Bupati dan Wakil Bupati Manggarai, maka sebagai penyedia layanan kesehatan. visi yang ingin dicapai RSUD Ruteng adalah: "RSUD RUTENG yang MAJU dan BERDAYA SAING".

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

b. Misi

Untuk melaksanakan visi, maka ditetapkan misi RSUD Ruteng adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia;
- 2) Menyediakan sarana dan prasarana yang berkualitas;
- 3) Menyediakan pelayanan yang mengedepankan keselamatan pasien.

1.5. Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia pada RSUD Ruteng per 31 Desember 2025 berjumlah 587 orang. terdiri dari 551 orang PNS/PPPK dan 36 Non PNS.

Berdasarkan Pendidikan, ke 551 orang PNS/PPPK terdiri dari : master (S2) 15 orang. sarjana lengkap (Sl/D4) 175 Orang. Diploma (D3) 299 orang. Diploma (D1) 2 orang. SLTA 75 orang. dan SLTP 5 orang, dengan rincian:

No	Jabatan	PNS				PPPK				NON ASN	Jumlah
		I	II	III	IV	X	IX	VII	V		
I.	MANAJERIAL (STRUKTURAL)	-	-	7	7	-	-	-	-	-	14
1	Direktur				1						1
2	Kepala Bagian				1						1
3	Kepala Bidang			1	2						3
4	Kasie			3	3						6
5	Kasubag			3							3
II.	JABATAN FUNGSIONAL	-	35	222	20	-	-	-	-	-	277
1	Administrator Kesehatan			1							1
2	Apoteker			8	4						12
3	Asisten Apoteker		9	6							15
4	Bidan		1	44	2						47
5	Dr. Spesialis			11	1						12
6	Dr. Umum			5	2						7
7	Dr. Gigi			1	3						4
8	Elektomedik		2	1							3
9	Epidemiolog			1							1
10	Fisiotrapi			2	1						3
11	Nutrisi			8							8
12	Perawat		6	106	7						119
13	Perekam Medis		5	5							10
14	Pranata Lab Kesehatan		10	8							18
15	Radiografer		2	3							5

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

No	Jabatan	PNS				PPPK				NON ASN	Jumlah
		I	II	III	IV	X	IX	VII	V		
I.	MANAJERIAL (STRUKTURAL)	-	-	7	7	-	-	-	-	-	14
Lanjutan SDM RSUD											
16	Refraksionis Optision			1							1
17	Sanitarian			5							5
18	Teknisi Gigi			1							1
19	Teknisi Transfusi			1							1
20	Terapis gigi dan mulut			4							4
III.	NON MANAJERIAL	-	43	27	-	-	-	-	-	-	70
1	Administrator Komputer			1							1
2	Analisis Perencanaan Anggaran			1							1
3	Bendahara APBD			1							1
4	Bendahara BLUD		1								1
5	Binatu RS		4	1							5
6	Pemelihara Sarpras		1	2							3
7	Pemulasaran Jenasah		2								2
8	Pengadministrasi		7	14							21
9	Pengemudi Ambulance		3	1							4
10	Pengolah Data Jami			1							1
11	kes		5								5
12	Pramu Kebersihan		11	1							12
13	Pranata Jamuan		6	2							8
14	Pranata Lab Kesehatan			1							1
15	Teknik Pemelihara Sarpras			1							1
16	Teknisi Air Bersih & Limbah		3								3
	CPNS	-	17	49	-	-	-	1	-	-	67
1	Asisten Apoteker		2								2
2	Bidan			4							4
3	Dr.Umum			2							2
4	Elektromedik		2								2
5	Fasilitator Pemerintahan			7							7
6	Operator Layanan Kesehatan		4								4
7	Penata Anestesi			1							1
8	Penata Kelola TI.			1							1
5	Analisis							1			1
9	Perawat		5	34							39
10	Radiografer		2								2
11	Teknisi Transfusi Darah		2								2
	PPPK	-	-	-	-	45	9	59	9	-	122
1	Perawat					45		33			78
2	Bidan						1	15			16

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

No	Jabatan	PNS				PPPK				NON ASN	Jumlah
		I	II	III	IV	X	IX	VII	V		
Lanjutan SDM RSUD											
3	Elektromedis						1				1
4	Administrator Kesehatan						2				2
5	Administrasi Perkantoran								2		2
6	Nutrisionis						2				2
7	Fisioterapi						1				1
8	Pranata Lab Kesehatan						2	1			3
9	Operator Layanan								7		7
10	Asisten Apoteker							7			7
11	Sanitarian							3			3
IV.	NON ASN RSUD RUTENG									32	32
1	dr Spesialis									3	3
2	dr Umum									11	11
3	Perawat									3	3
4	Bidan									3	3
5	Pengadministrasian									4	4
6	Elektromedik									2	2
7	Juru Masak									1	1
8	Penata Anestesi									1	1
9	Penelaah Teknis Kebijakan									1	1
10	Radiografer									1	1
11	Pengolah Data Jamkes									1	1
12	Pranata Komputer									1	1
V.	TPPK DINKES									4	4
1	Perawat									4	4
JUMLAH			95	305	27	45	9	60	10	36	587

1.6. Pelayanan Kesehatan Di RSUD Ruteng Kabupaten Manggarai

Fasilitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng Kabupaten Manggarai terdiri dari:

- 1) Instalasi Gawat Darurat
- 2) Instalasi Rawat Jalan yang terdiri dari :
 - (1) Poli Penyakit Dalam
 - (2) Poli Kebidanan dan kandungan
 - (3) Poli Bedah

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

- (4) Poli Anak
 - (5) Poli Umum
 - (6) Poli Saraf
 - (7) Poli Gigi
 - (8) Poli THT
 - 3) Instalasi Rawat Inap meliputi:
 - (1) Rawat Inap Umum
 - (2) Rawat Inap Kebidanan dan kandungan
 - (3) Rawat Inap Intensif
 - (4) Rawat Inap Perinatologi
 - 4) Instalasi Bedah Central
 - 5) Instalasi Persalinan
 - 6) Instalasi Rehabilitasi Medik
 - 7) Instalasi Laboratorium
 - 8) Instalasi Radiologi
 - 9) Instalasi Farmasi
 - 10) Instalasi Gizi
 - 11) Instalasi Rekam Medik
 - 12) Unit Pemulasaran jenazah
 - 13) Unit Pelayanan Pengelolaan limbah
 - 14) Unit Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat
 - 15) Unit Pelayanan Administrasi
 - 16) Unit Pelayanan Ambulance dan mobil jenazah
 - 17) Unit CSSD dan Laundry
 - 18) Unit Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit
 - 19) Unit Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)
-

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah penuh)**

2. PERNYATAAN KEPATUHAN TERHADAP PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL NOMOR 13 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

Laporan keuangan RSUD Ruteng telah disusun dan disajikan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Keuangan disajikan sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Kebijakan Akuntansi RSUD Ruteng mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Beberapa kebijakan akuntansi yang penting adalah:

3.1. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan RSUD Ruteng Kabupaten Manggarai adalah sebagai berikut:

- Basis Kas (*cash basis*) untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas
Pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas RSUD dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas RSUD.
- Basis Akrual (*accrual basis*) untuk penyusunan Neraca dan Laporan Operasional. Aset, kewajiban dan ekuitas, dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan RSUD, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- Laporan keuangan dinyatakan dalam satuan mata uang Rupiah, dibulatkan menjadi rupiah penuh.

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah penuh)**

3.2. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A. NERACA

1) ASET LANCAR

Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi.

(1) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Penerimaan yang berasal dari penerimaan rumah sakit yang belum disetor ke bank per 31 Desember tahun berjalan yang masih ada di bendahara penerimaan. Mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Penerimaan, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Penerimaan dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral (Bank Indonesia) pada tanggal neraca.

(2) Kas pada BLUD

Kas di BLUD mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara BLUD yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas bendahara BLUD. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara BLUD. Kas di Bendahara BLUD dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral (BI) pada tanggal neraca.

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

(3) Investasi Jangka Pendek

Merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam satu periode akuntansi. Investasi jangka pendek ini merupakan investasi non permanen seperti investasi dalam Surat Utang Negara (SUN) dan Depisoto.

(4) Piutang Layanan

Piutang layanan merupakan piutang yang diakui atas jumlah yang belum terbayar sebesar nilai rupiah dari jasa layanan yang belum dilunasi berdasarkan bukti penetapan jasa layanan. Perkiraan piutang retribusi dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah dari layanan yang belum dilunasi.

(5) Penyisihan Piutang Layanan

Penyisihan piutang sangsi (ragu-ragu) ditentukan dengan cara sebagai berikut :

Umur Piutang	Prosentase Penyisihan
>1 bulan	0,5 %
Di atas 1 – 3 bulan	10 %
Di atas 3 – 12 bulan	50%
Di atas 12 bulan	100 %

(6) Belanja Dibayar Dimuka

Belanja dibayar di muka merupakan penurunan aktiva yang digunakan untuk uang muka pembelian barang atau jasa dan belanja yang maksud penggunaan aktivitya akan dipertanggungjawabkan kemudian.

(7) Piutang Pajak

Piutang pajak dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah pajak-pajak yang telah dibayar.

(8) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TGR jangka panjang yang

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah penuh)**

jatuh tempo tahun berikutnya. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Dokumen sumber TGR adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan Majelis Pembebanan TP/TGR. Dalam hal Surat Keputusan tersebut terlambat atau tidak diterbitkan, dokumen sumber untuk Piutang TGR diperoleh dari hasil pemeriksaan APFP.

(9) Piutang Lainnya

Akun Piutang Lainnya digunakan antara lain untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi. Piutang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

(10) Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional BLUD dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Saldo persediaan adalah jumlah persediaan yang masih ada pada tanggal neraca. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

2) ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD. Perkiraan (Akun) aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Akumulasi Penyusutan. Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi aset agar tetap dapat digunakan tidak dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan, sedangkan biaya rehabilitasi yang menambah umur dan manfaat dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan.

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah penuh)**

(1) Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional BLU dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Tanah diakui sebagai aset pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Biaya ini meliputi harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Jika tidak tersedia data secara memadai, maka tanah dicatat dengan estimasi harga perolehan.

(2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat angkutan; alat pertanian; alat kantor; alat studio, komunikasi dan pemancar; alat laboratorium; komputer; alat eksplorasi; pengolahan dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Peralatan dan mesin dicatat sebagai aset BLU pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Peralatan dan mesin dicatat dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai peralatan dan mesin dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi oleh instansi teknis terkait. Peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

(3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional BLU dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan Bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu. Gedung dan

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah penuh)**

bangunan dicatat sebagai aset BLU pada saat diterima dan terjadi peralihan hak kepemilikan. Gedung dan bangunan dicatat dengan nilai historis, harga perolehan. Harga perolehan gedung dan bangunan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai gedung dan bangunan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

(4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh BLU serta dikuasai oleh BLU dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan, irigasi dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan.

Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan.

Jalan, Irigasi, Jaringan dicatat sebagai aset BLU saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis/perolehan, yaitu harga perolehan. Harga perolehan jalan, irigasi, jaringan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai Jalan, Irigasi, Jaringan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

(5) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional BLU dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga. Aset tetap lainnya dicatat sebagai aset BLU pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Aset tetap lainnya dicatat

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah penuh)**

dengan harga perolehan. Harga perolehan aset tetap lainnya yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai aset tetap lainnya dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

(6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasi sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

(7) Akumulasi Penyusutan

Depresiasi/penyusutan atas Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus setelah mempertimbangkan nilai residu dan masa manfaat aset.

Rumus perhitungan penyusutan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nilai Perolehan} - (10\% \text{ dari NP})}{\text{Umur Ekonomis}}$$

Umur ekonomis aktiva tetap ditentukan sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Umur Ekonomis
Komputer dan Kendaraan Bermotor	10 Tahun
Peralatan Kantor dan Meubel	5 Tahun
Peralatan / Mesin, dan Peralatan Medis	5 Tahun
Gedung Permanen	25 Tahun
Jalan Irigasi dan Jaringan	10 Tahun

3) ASET LAINNYA

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar,

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah penuh)**

investasi jangka panjang dan aset tetap. Aset lainnya antara lain terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran dan Aset Lain-lain.

(1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset BLU secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara/kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

(2) Aset Lain-lain

Aset Lain-lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif BLU. Aset Lain-lain dicatat dengan nilai nominal dari aset yang bersangkutan. Untuk aset tetap yang diklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain, dicantumkan sebesar nilai perolehannya.

4) KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

(1) Utang Usaha

Utang usaha merupakan utang yang timbul akibat adanya pembelian barang dan atau jasa yang terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh BLU Rumah Sakit seperti utang untuk pembelian obat-obatan dan bahan alat kesehatan (alkes) habis pakai.

(2) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK merupakan utang yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari Surat Perintah Membayar

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah penuh)**

Uang (SPMU) atau dokumen lain yang dipersamakan. Pungutan/potongan PFK dapat berupa potongan/ pungutan luran Taspen, Bapertarum, Askes, juga termasuk pajak-pajak pusat. Perkiraan ini dicatat sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong berdasarkan nilai nominal.

(3) Belanja Yang Masih Harus Dibayar

Merupakan kewajiban yang timbul dari adanya jasa yang diberikan oleh pihak internal maupun eksternal namun belum dilakukan pembayaran oleh RSUD.

(4) Pendapatan Diterima Dimuka

Merupakan saldo uang yang diterima oleh Bendahara Penerimaan dari wajib pajak dan wajib retribusi yang belum merupakan pendapatan karena *"earning process"* nya belum selesai.

(5) Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya, yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu utang jangka pendek diatas, adalah kewajiban yang harus dilunasi oleh RSUD, dan penambahan aset yang diperoleh dari penerimaan hak yang belum saatnya diterima dan akan dipertanggung-jawabkan kemudian. Utang jangka pendek lainnya dibukukan sebesar nilai nominal.

5) EKUITAS

Ekuitas merupakan pos pada neraca RSUD, yang menampung selisih antara aset dan kewajiban RSUD pada akhir tahun. Komponen utama dari kenaikan atau penurunan nilai ekuitas adalah surplus/(defisit) operasional Rumah Sakit pada tahun yang bersangkutan.

B. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1) PENDAPATAN

Pendapatan-LRA pada BLU diakui pada saat pendapatan kas yang diterima oleh Bendahara Penerimaan BLUD-RSUD.

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah penuh)**

pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA-BLUD-RSUD, tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLUD, penambah SiLPA pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai.

Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA-BLUD tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada BLUD dan penambah SAL pada pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai.

Pendapatan-LRA pada BLUD diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Pendapatan-LRA pada BLUD RSUD, merupakan pendapatan Bukan Pajak (BNBP), termasuk pendapatan bukan pajak pada BLUD, adalah:

- (1) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
- (2) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
- (3) Pendapatan hasil kerja sama;
- (4) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
- (5) Pendapatan lainnya.

Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud di atas adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan sebagaimana dimaksud di atas adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahi maupun yang tidak membawahnya.

Pendapatan hasil kerja sama sebagaimana dimaksud di atas adalah perolehan dari kerjasama operasional, sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD-RSUD.

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah penuh)**

Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas sebagaimana dimaksud di atas adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain berupa kas, tanpa adanya kewajiban bagi BLUD untuk menyerahkan barang/jasa.

Pendapatan BLUD lainnya sebagaimana dimaksud di atas antara lain berupa :

- (1) Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
- (2) Jasa giro;
- (3) Pendapatan bunga;
- (4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- (5) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD-RSUD.

Pendapatan Hibah berupa barang/jasa tidak dilaporkan pada LRA karena pengakuan pendapatan berbasis kas. Pendapatan Hibah berupa barang/jasa dilaporkan pada Laporan Operasional yang berbasis akrual.

2) BELANJA

Belanja diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLUD-RSUD, setelah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Belanja pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

Klasifikasi ekonomi untuk BLUD, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja pada BLUD-RSUD, selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.

Transaksi pembiayaan dapat terjadi pada BLUD-RSUD, yang melakukan transaksi perolehan pinjaman dan/atau investasi jangka panjang. Penerimaan pembiayaan terjadi pada saat pinjaman jangka panjang diterima dan/atau divestasi investasi jangka panjang dilaksanakan. Sementara pengeluaran pembiayaan terjadi pada saat pelunasan pinjaman jangka panjang dan/atau pengeluaran investasi jangka panjang.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas yang diterima disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah penuh)**

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Penambahan pokok investasi yang berasal dari pendapatan diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.

Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

C. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Pendapatan-LO pada BLUD-RSUD, diakui pada saat:

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan;
- 2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO pada BLUD yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

Pendapatan-LO pada BLUD yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh BLUD tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Pendapatan-LO pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

Beban pada BLUD diakui pada saat:

- 1) timbulnya kewajiban;
- 2) terjadinya konsumsi aset; dan/atau
- 3) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke BLUD tanpa diikuti keluarnya kas.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional BLUD.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

1. PENDAPATAN LRA

Target dan realisasi pendapatan dan tahun 2025 sebesar Rp 70.000.000.000 terealisasi sebesar Rp 77.593.218.119 atau 110,85%, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian		Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
PENDAPATAN LRA					
-	Pendapatan Layanan Masyarakat	69.391.228.197	77.329.970.301	111,44	73.388.865.790
-	Pendapatan Hasil Kerjasama	403.154.791	117.851.433	29,23	380.972.306
-	Pendapatan Usaha Lainnya	205.617.012	145.396.385	70,71	122.155.522
JUMLAH PENDAPATAN LRA		70.000.000.000	77.593.218.119	110,85	73.891.993.618

1) Jumlah Pendapatan Layanan Masyarakat tahun 2025 dan 2024, sebagai berikut:

Uraian		Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Pendapatan Layanan Masyarakat					
-	Pasien Umum	6.605.172.548	4.473.668.483	67,73	4.029.663.880
-	Pasien JKN	62.786.055.649	72.856.301.818	116,04	69.359.201.910
Jumlah Pendapatan Layanan Masyarakat		69.391.228.197	77.329.970.301	111,44	73.388.865.790

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

2) Jumlah Pendapatan Hasil Kerjasama tahun 2025 dan 2024, dirinci sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Pendapatan Hasil Kerjasama				
- Kerjasama Diklat	54.721.800	50.100.000	91,55	110.100.000
- Kerja Sama Hemodialisa	253.116.578	38.806.320	15,33	216.107.020
- Kerja Sama Apotek Pelengkap	95.316.413	28.945.113	30,37	54.765.286
Jumlah Pendapatan Hasil Kerjasama	403.154.791	117.851.433	29,23	380.972.306

3) Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya tahun 2025 dan 2024, dirinci sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Pendapatan Usaha Lainnya				
- Jasa Giro	158.551.012	120.396.385	75,94	116.539.870
- Penyewaan Sarana & Prasarana	47.066.000	25.000.000	53,12	5.400.000
- Pendapatan Lainnya	0	0	0,00	215.652
Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya	205.617.012	145.396.385	70,71	122.155.522

2. BELANJA LRA

Anggaran dan realisasi belanja LRA tahun 2025 sebesar Rp. 74.367.351.646 realisasinya sebesar Rp. 76.661.151.886 atau 103,08 % dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
BELANJA LRA				
1 BELANJA OPERASI	71.290.953.646	73.695.222.513	103,37	79.371.891.989
2 BELANJA MODAL	3.076.398.000	2.965.929.373	96,41	2.301.861.520
JUMLAH BELANJA LRA	74.367.351.646	76.661.151.886	103,08	81.673.753.509

Rincian Belanja Operasi tahun 2025 adalah:

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
BELANJA OPERASI				
a Belanja Pegawai	47.550.000	44.850.000	94,32	48.950.000
b Belanja Barang	34.483.537.982	34.026.610.971	98,67	36.626.170.116
c Belanja Jasa	36.759.865.664	39.623.761.542	107,79	42.696.771.873
JUMLAH BELANJA OPERASI	71.290.953.646	73.695.222.513	103,37	79.371.891.989

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

a) Jumlah Belanja Pegawai tahun 2025 dan 2024, dirinci sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Belanja Pegawai				
- Belanja Honorarium PPK-BLUD	9.000.000	9.000.000	100,00	9.000.000
- Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	38.550.000	35.850.000	93,00	39.950.000
Jumlah Belanja Pegawai	47.550.000	44.850.000	94,32	48.950.000

b) Jumlah Belanja Barang tahun 2025 dan 2024, dirinci sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Belanja Barang				
- Belanja Bahan Bakar Dan Pelumas	181.000.000	178.921.432	98,85	364.326.111
- Belanja Bahan- Isi Tabung Gas	9.307.020.000	9.303.832.000	99,97	10.036.311.800
- Belanja Alat Kesehatan dan BMHP	14.954.309.987	14.519.799.267	97,09	14.329.726.502
- Belanja Alat Tulis Kantor	200.000.000	199.999.000	100,00	199.999.075
- Belanja Kertas Dan Cover	200.000.000	199.998.500	100,00	204.997.500
- Belanja Bahan Cetak	1.165.460.600	1.165.459.600	100,00	1.439.053.600
- Belanja Obat-Obatan	8.325.127.395	8.318.851.172	99,92	9.915.530.528
- Belanja Makanan/Minuman di Lapangan	147.470.000	136.950.000	92,87	135.350.000
- Belanja Makan Minum Rapat	3.150.000	2.800.000	88,89	875.000
Jumlah Belanja Barang	34.483.537.982	34.026.610.971	98,67	36.626.170.116

c) Jumlah Belanja Jasa tahun 2025 dan 2024, dirinci sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Belanja Jasa				
- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	40.200.000	17.400.000	43,28	25.150.000
- Honorarium Rohaniawan	6.000.000	6.000.000	100,00	6.000.000
- Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	25.638.306.908	29.056.037.309	113,33	30.967.779.107
- Belanja Jasa Tenaga Administrasi	101.700.768	80.524.002	79,18	90.137.976
- Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	955.308.900	952.610.979	99,72	906.566.954
- Belanja Jasa Tenaga Keamanan	389.922.000	387.910.131	99,48	352.059.395
- Belanja Jasa Tenaga Supir	21.187.660	19.079.826	90,05	25.469.994
- Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik	25.425.192	25.425.176	100,00	25.469.994
- Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	50.850.384	44.505.002	87,52	50.939.989
- Belanja Jasa Audit/ Surveillance	45.000.000	45.000.000	100,00	49.000.000
- Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	800.000	750.000	93,75	750.000
- Belanja Jasa Kontribusi	12.000.000	7.090.205	59,09	6.030.000
- Belanja Jasa Kalibrasi	300.000.000	299.807.636	99,94	236.643.590
- Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.177.734.400	1.177.415.573	99,97	1.228.085.000

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

Uraian		Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Belanja Jasa (lanjutan)					
-	Belanja Tagihan Telepon	16.200.000	12.669.923	78,21	15.254.595
-	Belanja Tagihan Air	326.400.000	307.189.000	94,11	302.678.600
-	Belanja Tagihan Listrik	720.000.000	707.973.716	98,33	895.462.959
-	Belanja Faksimili/Internet/Tv Berlangganan	46.713.000	45.201.000	96,76	45.967.000
-	Belanja Pembayaran Pajak, Bea , Dan Perijinan	83.800.000	73.848.847	88,13	30.977.957
-	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Bermotor	80.000.000	71.930.000	89,91	84.372.500
-	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor/RT	85.000.000	84.715.000	99,66	23.977.000
-	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran	1.045.228.000	1.003.334.889	95,99	143.668.914
-	Belanja Pemeliharaan Komputer	16.000.000	16.000.000	100,00	25.000.000
-	Belanja Pemeliharaan Gedung - Bangunan	295.000.000	127.954.433	43,37	190.838.380
-	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Bersih	95.000.000	70.401.000	74,11	90.154.000
-	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Kotor	221.000.000	218.825.289	99,02	270.500.000
-	Belanja Pemeliharaan Instalasi Pembangkit	326.000.000	271.205.395	83,19	68.883.000
-	Belanja Pemeliharaan Telepon/Internet	5.000.000	0	0,00	9.800.000
-	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.760.000	2.040.000	42,86	3.740.000
-	Belanja Perjalanan Dinas Koordinasi	486.670.000	407.345.820	83,70	486.195.335
-	Belanja Jasa Kepada Pihak Ketiga	3.687.778.452	3.684.568.743	99,91	5.551.057.910
-	Belanja Kursus/Pelatihan/Diklat	352.706.000	296.828.648	84,16	344.186.498
-	Belanja Sewa	102.174.000	102.174.000	100,00	108.174.000
-	Belanja Kegiatan e-BLUD	0	0	0,00	35.801.226
	Jumlah Belanja Jasa	36.759.865.664	39.623.761.542	107,79	42.696.771.873

Rincian Belanja Modal tahun 2025 adalah:

Uraian		Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
BELANJA MODAL					
a	Peralatan dan Mesin	2.170.595.000	2.115.022.023	97,44	2.131.842.376
b	Gedung dan Bangunan	219.899.000	165.557.900	75,29	-
c	Jalan, Irigasi dan Jaringan	685.904.000	685.349.450	99,92	170.019.144
	JUMLAH BELANJA MODAL	3.076.398.000	2.965.929.373	96,41	2.301.861.520

a) Jumlah belanja modal untuk Peralatan dan Mesin tahun 2025 dan 2024 terdiri dari:

Uraian		Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Peralatan dan Mesin					
a	Belanja Kendaraan	0	0	0,00	387.800.000
b	Belanja Alat Kantor dan Rumah Tangga	670.595.000	640.404.533	95,50	586.695.000
c	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan	1.500.000.000	1.474.617.490	98,31	1.157.347.376
	Jumlah Peralatan dan Mesin	2.170.595.000	2.115.022.023	97,44	2.131.842.376

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

- b) Jumlah belanja modal untuk Gedung dan Bangunan tahun 2025 dan 2024 terdiri dari:

Uraian		Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Gedung dan Bangunan					
a	Renovasi Ruang Mammografi	219.899.000	165.557.900	75,29	-
Jumlah Gedung dan Bangunan		219.899.000	165.557.900	75,29	-

- c) Jumlah belanja modal untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2025 dan 2024 terdiri dari:

Uraian		Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Jalan, Irigasi dan Jaringan					
a	Jaringan	685.904.000	685.349.450	99,92	170.019.144
Jumlah Jalan, Irigasi dan Jaringan		685.904.000	685.349.450	99,92	170.019.144

4.2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun

Jumlah Saldo Anggaran Lebih awal tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 4.367.351.646,- dan sebesar Rp 12.149.111.537,-.

- b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran

Jumlah Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-.

- c. Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Tahun Berjalan

Jumlah Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Tahun Berjalan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 932.066.233,- berupa SiLPA, dan per 31 Desember 2024 adalah sebesar (Rp 7.781.759.891,-) berupa SiKPA, yang nampak sebagai berikut:.

Uraian		Anggaran 2025	Realisasi 2024
SiLPA/SiKPA Tahun Berjalan			
1)	Realisasi Pendapatan LRA	77.593.218.119	73.891.993.618
2)	Realisasi Belanja	76.661.151.886	81.673.753.509
Jumlah SiLPA/SiKPA Tahun Berjalan		932.066.233	(7.781.759.891)

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah penuh)**

d. Pemindahbukuan ke R/K Kabupaten Manggarai

Jumlah pemindahbukuan ke R/K Kabupaten Manggarai per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0,-- dan Rp 0,--.

e. Koreksi kesalahan tahun sebelumnya berupa salah catat saldo kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp 90,--

f. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Jumlah Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 5.299.417.969,-- dan sebesar Rp 4.367.351.646,--.

4.3. NERACA

4.3.1. ASET

1. ASET LANCAR

a) Kas dan Setara Kas

Saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2025 dan 2024, nampak sebagai berikut:

Keterangan		Tahun 2025	Tahun 2024
-	Bank NTT Bank NTT Ruteng Rek. 006.01.05.001094-7 an. BLUD RSUD dr. Ben Mboi Kab. Manggarai	5.299.417.969	4.367.351.646

Rekening pada Bank NTT Cabang Ruteng sebesar Rp 5.299.417.969,-- dan Rp.4.367.351.646,-- merupakan saldo simpanan disetor oleh bendahara penerimaan ke Bank NTT per 31 Desember 2025 dan 2024.

b) Piutang Pelayanan

Saldo Piutang Pelayanan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp.6.104.672.464,-- dan Rp 7.689.907.925,-- dengan rincian sebagai berikut

Keterangan		Tahun 2025	Tahun 2024
Piutang Pelayanan			
-	Piutang Perorangan	266.900.067	164.279.128
-	Piutang Jaminan Pemda	5.703.283.497	5.703.283.497
-	Piutang BPJS	134.488.900	1.822.345.300
	Jumlah Piutang Pelayanan	6.104.672.464	7.689.907.925

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

Piutang Pelayanan merupakan klaim atau hak yang dimiliki RSUD yang diperoleh dari pelayanan terhadap pasien, pada tanggal neraca belum diterima secara kas.

c) Penyisihan Kerugian Piutang

Saldo Penyisihan Kerugian Piutang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp.5.903.346.522,- dan Rp 5.865.106.395,- dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan		Tahun 2025	Tahun 2024
Penyisihan Piutang Pelayanan			
-	Kategori Lancar 0 s/d 1 bulan (0,5%)	-	-
-	Kategori Kurang Lancar 1 s/d 3 bulan (10%)	-	-
-	Kategori Diragukan 3 s/d 12 bulan (50%)	35.783.897	1.656.330
-	Kategori Macet diatas 12 bulan (100%)	5.867.562.625	5.863.450.065
	Jumlah Penyisihan Kerugian Piutang	5.903.346.522	5.865.106.395

d) Piutang Lain-Lain

Saldo Piutang Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp.198.685.995,- dan Rp 78.074.220,- dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan		Tahun 2025	Tahun 2024
Piutang Lain-Lain			
-	PT. Mina Abadi (Listrik dan Air)	29.854.430	29.854.430
-	PT. Megatama Permai (Listrik dan Air)	37.204.380	37.204.380
-	PT. Kasih Sejati Perkasa (Listrik)	11.015.410	11.015.410
-	PT. Masa Cipta Husada (Hemodialisa)	120.611.775	-
	Jumlah PiutangLain-Lain	198.685.995	78.074.220

Jumlah tersebut merupakan piutang atas pemakaian air dan listrik oleh para kontraktor pelaksana pembangunan di lingkungan RS dan atas kerjasama dengan pihak ketiga, per 31 Desember 2025 dan 2024.

e) Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp.4.857.474.902,- dan Rp 5.261.206.714,- dengan rincian sebagai berikut:

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

Keterangan		Tahun 2025	Tahun 2024
Persediaan			
a	Persediaan Barang Farmasi		
-	Persediaan Obat	1.620.605.914	2.169.092.529
-	Persediaan Alkes dan BMHP	1.905.046.233	1.337.215.419
-	Persediaan Alkes/BMHP Covid 19	18.500.000	86.925.412
-	Persediaan Reagensia	641.235.176	849.527.140
-	Persediaan Radiologi	154.423.200	97.280.400
-	Persediaan Alkes Dental	38.629.119	28.647.631
-	Persediaan Oksigen	-	3.500.000
-	Persediaan CSSD	194.623.064	199.665.713
b	Persediaan Barang Gizi		
-	Persediaan Makan Minum Pasien	76.157.310	260.300
c	Persediaan Barang Rumah Tangga		
-	Persediaan ATK dan Penggandaan	5.741.500	9.282.400
-	Persediaan Cetakan	-	48.110.000
-	Persediaan Kertas dan Cover	-	8.567.500
-	Persediaan Bahan Kebersihan Rutin	4.893.000	10.059.000
-	Persediaan PPI	55.874.625	92.902.750
-	Persediaan Pembersih Laundry	134.405.761	229.370.240
-	Persediaan CAPD	-	86.630.280
-	Persediaan Alat Rumah Tangga	7.340.000	4.170.000
	Jumlah Persediaan	4.857.474.902	5.261.206.714

Persediaan merupakan barang/bahan berwujud yang akan habis pakai namun saat tanggal neraca disusun masih belum habis terpakai.

2. ASET TETAP

Nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp.144.958.521.038,- dan Rp 159.878.705.140,- dengan rincian, nampak sebagai berikut:

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
Aset Tetap		
- Tanah	6.711.250.000	6.711.250.000
- Peralatan dan Mesin	143.101.663.471	140.986.641.448
- Gedung dan Bangunan	119.754.652.019	119.279.283.719
- Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.390.702.314	4.705.352.864
- Konstruksi Dalam Pengerjaan	10.467.114.422	10.467.114.422
Jumlah Aset Tetap	285.425.382.226	282.149.642.453
- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(140.466.861.188)	(122.270.937.312)
Nilai Buku Aset Tetap	144.958.521.038	159.878.705.141

Mutasi aset tetap tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Saldo Awal	Tambah (Kurang)	Saldo Akhir
Nilai Perolehan:			
- Tanah	6.711.250.000	-	6.711.250.000
- Peralatan dan Mesin	140.986.641.448	2.115.022.023	143.101.663.471
- Gedung dan Bangunan	119.279.283.719	475.368.300	119.754.652.019
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.705.352.864	685.349.450	5.390.702.314
- Konstruksi Dlm Pelaksanaan	10.467.114.422	-	10.467.114.422
Sub Jumlah	282.149.642.453	3.275.739.773	285.425.382.226
Akumulasi Penyusutan:			
- Peralatan dan Mesin	99.650.027.023	16.640.617.298	116.290.644.321
- Gedung dan Bangunan	21.146.284.858	1.106.162.231	22.252.447.089
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.474.625.431	449.144.347	1.923.769.778
Sub Jumlah	122.270.937.312	18.195.923.876	140.466.861.188
Nilai Buku:	159.878.705.141		144.958.521.038

Sedangkan mutasi aset tetap tahun sebelumnya (2024) dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Saldo Awal	Tambah (Kurang)	Saldo Akhir
Nilai Perolehan:			
- Tanah	6.711.250.000	-	6.711.250.000
- Peralatan dan Mesin	135.617.637.590	5.369.003.858	140.986.641.448
- Gedung dan Bangunan	119.285.271.447	-5.987.728	119.279.283.719
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.705.352.864	-	4.705.352.864
- Konstruksi Dlm Pelaksanaan	10.467.114.422	-	10.467.114.422
Sub Jumlah	276.786.626.323	5.363.016.130	282.149.642.453

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

Keterangan	Saldo Awal	Tambah (Kurang)	Saldo Akhir
Lanjutan			
Akumulasi Penyusutan:			
- Peralatan dan Mesin	81.634.388.873	18.015.638.150	99.650.027.023
- Gedung dan Bangunan	17.430.643.444	3.715.641.414	21.146.284.858
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.203.713.610	270.911.822	1.474.625.432
Sub Jumlah	100.268.745.927	22.002.191.385	122.270.937.313
Nilai Buku:	176.517.880.396		159.878.705.140

Rincian masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024, terlihat sebagai berikut:

1) Tanah

Tanah sebesar Rp 6.711.250.000 adalah nilai tanah lokasi RSUD Ruteng, Jl. Dr. Soetomo No. 1 Ruteng.

2) Peralatan dan Mesin

Rincian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
Peralatan dan Mesin		
- Alat Besar	49.000.000	49.000.000
- Alat Angkutan	5.455.809.124	5.455.809.124
- Alat Bengkel dan Ukur	1.840.000	1.840.000
- Alat Kantor dan Rumah Tangga	9.602.403.001	8.961.998.468
- Alat Studio dan Komunikasi	205.294.000	205.294.000
- Alat Kedokteran	126.573.750.586	125.350.788.846
- Alat Laboratorium	940.399.760	688.744.010
- Alat Keamanan	273.167.000	273.167.000
Jumlah Peralatan dan Mesin	143.101.663.471	140.986.641.448

3) Gedung dan Bangunan

Rincian Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
Gedung dan Bangunan		
- Bangunan Gedung Kantor/Kesehatan	118.465.926.819	117.990.558.519
- Monumen	1.288.725.200	1.288.725.200
Jumlah Gedung dan Bangunan	119.754.652.019	119.279.283.719

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Keterangan		Tahun 2025	Tahun 2024
Jalan, Irigasi dan Jaringan			
-	Bangunan Air	199.972.476	199.972.476
-	Instalasi/Jaringan	5.190.729.838	4.505.380.388
	Jumlah Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.390.702.314	4.705.352.864

5) Konstruksi Dalam Pelaksanaan

Merupakan nilai pekerjaan gedung CSSD dan Laundry yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 belum selesai 100%, dengan rincian:

Keterangan		Tahun 2025	Tahun 2024
Konstruksi Dalam Pelaksanaan			
-	Progres Fisik	9.820.954.422	9.820.954.422
-	Konsultan Perencanaan	375.843.000	375.843.000
-	Konsultan Pengawasan	270.317.000	270.317.000
	Jumlah Konstruksi Dalam Pelaksanaan	10.467.114.422	10.467.114.422

3. ASET LAINNYA

Jumlah tersebut merupakan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024, terdiri dari:

Keterangan		Tahun 2025	Tahun 2024
Aset Lainnya			
-	Aset tetap rusak tidak digunakan	1.255.726.144	1.255.726.144
-	Software	550.416.000	550.416.000
-	Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	(1.597.442.744)	(1.542.401.144)
	Jumlah Aset Lain-Lain	208.699.400	263.741.000

4.3.2. KEWAJIBAN

1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

1) Utang Usaha

Merupakan kewajiban kepada para rekanan, namun sampai dengan akhir tahun buku belum dilunaskan, terdiri dari:

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
Utang Usaha		
- Utang Kerjasama Apotik Pelengkap	104.877.754	-
- Utang Kerjasama Hemodialisa	228.774.700	98.929.600
- Utang Oxygen	1.432.626.000	63.610.000
- Utang Bahan Cetak	55.300.000	-
- Utang Darah	59.760.000	335.520.000
- Utang Pengangkutan Limbah B3	29.049.440	-
Jumlah Utang Usaha	1.910.387.894	498.059.600

2) Beban Yang Masih Harus Dibayar

Merupakan beban tahun berjalan, namun sampai dengan akhir tahun buku belum dilunaskan, terdiri dari:

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Yang Masih Harus Dibayar		
- Jasa Pelayanan Medis Umum	515.929.748	562.568.977
- Jasa Pelayanan Medis BPJS	3.199.568.015	2.216.514.565
- Jasa Jamkesda Kabupaten Manggarai	1.691.452	1.691.452
Jumlah Beban Yang Masih Harus Dibayar	3.717.189.215	2.780.774.994

2. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

RSUD Ruteng Kabupaten Manggarai tidak memiliki kewajiban jangka panjang.

4.3.3. EKUITAS

Merupakan nilai kekayaan bersih RS per 31 Desember 2025 dan 2024, terdiri dari:

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
Ekuitas		
1) Ekuitas Awal	168.395.045.656	191.535.548.937
2) Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar:		
- Koreksi Piutang BPJS	-	(652.751.700)
- Koreksi beban tahun 2023 dibayar 2024	-	(9.497.799.189)
- Kelebihan Pencatatan Persediaan	(77.565.673)	-
- Setor kembali modal ke Kas Daerah	(4.600.000)	-
- Lebih hitung ak penyusutan gedung TB 202	1.124.608.211	-
- Koreksi Lainnya	(5.999.911)	-
- Surplus/(Defisit) Tahun Berjalan	(19.334.940.146)	(12.989.952.392)
3) Ekuitas Akhir	150.096.548.137	168.395.045.656

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

4.4. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

1. PENDAPATAN LO

Pendapatan LO tahun 2025 dan 2024 terdiri dari:

Keterangan		Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan LO			
1	Pendapatan Layanan Masyarakat	75.744.734.840	69.160.475.945
2	Pendapatan Hasil Kerjasama	238.463.208	332.863.686
3	Pendapatan Hibah	-	1.801.820.000
4	Pendapatan Operasional Lainnya	145.396.385	174.355.522
5	Pendapatan APBD	28.960.709.978	29.007.397.550
Jumlah Pendapatan LO		105.089.304.411	100.476.912.703

Rincian masing-masing akun Pendapatan LO, nampak sebagai berikut:

1) Pendapatan Layanan Masyarakat tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Keterangan		Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Layanan Masyarakat			
-	Pendapatan Layanan Pasien Umum	4.575.517.222	4.028.173.540
-	Pendapatan Layanan Pasien JKN	71.169.217.618	65.132.302.405
Jumlah Pendapatan Pelayanan Masyarakat		75.744.734.840	69.160.475.945

2) Pendapatan Hasil Kerjasama tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Keterangan		Tahun 2025	Tahun 2024 (Reclas)
Pendapatan Hasil Kerjasama			
-	Kerjasama Pelatihan Diklat	50.100.000	66.700.000
-	Kerjasama Hemodialisa (HO) PT. Cipta Husada	159.418.095	216.107.020
-	Kerjasama Apotek Pelengkap	28.945.113	50.056.666
Jumlah Pendapatan Hasil Kerjasama		238.463.208	332.863.686

3) Pendapatan Hibah tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Keterangan		Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Hibah			
-	Hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Jakarta	-	1.801.820.000
Jumlah Pendapatan Hibah		-	1.801.820.000

4) Pendapatan Operasional Lainnya tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut:

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

Keterangan		Tahun 2025	Tahun 2024 (Reclas)
Pendapatan Operasional Lainnya			
-	Pendapatan Jasa Giro	120.396.385	116.539.870
-	Sewa Sarana Prasarana	25.000.000	57.600.000
-	Pendapatan Lainnya	-	215.652
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya		145.396.385	174.355.522

5) Pendapatan APBD tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Keterangan		Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan APBD			
-	Pendapatan dari Belanja Pegawai, Barang & Jasa	28.644.899.578	27.748.062.940
-	Pendapatan dari Belanja Modal	315.810.400	1.259.334.610
Jumlah Pendapatan APBD		28.960.709.978	29.007.397.550

Pendapatan APBD merupakan realisasi SPJ dana APBD yang dikelola SKPD RSUD Ruteng dan telah mendapat pengesahan Badan Keuangan Kabupaten Manggarai.

2. BEBAN LO

Jumlah beban LO tahun 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan		Tahun 2025	Tahun 2024
BEBAN LO			
1	Beban Pegawai	28.239.295.500	27.100.769.325
2	Beban Pemakaian Persediaan	35.507.887.110	34.449.276.542
3	Beban Jasa	41.263.248.134	29.854.732.812
4	Beban Penyusutan, Penyisihan dan Amortisasi	19.413.813.813	22.062.086.414
JUMLAH BEBAN LO		124.424.244.557	113.466.865.093

Rincian masing-masing akun Beban LO, nampak sebagai berikut:

1) Beban Pegawai tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Keterangan		Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Pegawai			
-	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	21.507.088.900	23.846.306.825
-	Beban Honor PPK	2.593.381.600	5.000.000
-	Beban Honor Bendahara/Pembantu	48.150.000	38.100.000
-	Beban Honor Pejabat Pengadaan	46.100.000	48.350.000
-	Beban Honor dan Tamsil Nakes	4.044.575.000	3.163.012.500
Jumlah Beban Pegawai		28.239.295.500	27.100.769.325

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

2) Beban Pemakaian Persediaan tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Keterangan		Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Pemakaian Persediaan			
-	Beban Obat E-Katalog	4.676.363.798	4.340.722.168
-	Beban Obat Non E-Katalog	4.193.049.369	4.127.931.267
-	Beban Bahan/Obat Covid	66.503.492	82.484.940
-	Beban BBM dan Pelumas Incenerator	-	169.780.000
-	Beban BBM dan Pelumas Genset	17.972.500	17.066.750
-	Beban BBM dan Pelumas Kendaraan	160.948.932	177.479.361
-	Belanja Isi Ulang APAR	-	33.620.000
-	Belanja Minyak Tanah dan Gas	157.920.000	151.355.000
-	Beban Oksigen 6 m ³	9.549.708.000	9.922.235.200
-	Beban Oksigen 1 m ³	968.720.000	-
-	Beban Alkes & BMHP e- Kat	2.608.729.621	2.860.802.764
-	Beban Alkes & BMHP Non E-Kat	2.563.129.421	2.384.554.131
-	Beban Alkes & BMHP Dental	29.991.754	22.172.876
-	Beban BMHP Laboratorium	2.607.411.027	2.487.862.315
-	Beban Bahan Radiologi	505.238.700	490.159.350
-	Beban Reagensia PCR	-	6.863.000
-	Beban Penggantian Kebutuhan Darah	1.334.520.000	1.323.000.000
-	Beban Pengadaan CAPD	86.630.280	75.044.880
-	Beban Bahan PPI	607.027.500	599.019.375
-	Beban Bahan Pembersih	170.165.500	170.638.500
-	Beban Bahan Pembersih Laundry	303.259.028	335.890.846
-	Beban Bahan CSSD	263.138.691	153.782.119
-	Beban Bahan Peralatan Rumah Tangga	-	249.616.000
-	Beban Bahan Gorden	196.830.000	210.246.455
-	Beban Bahan Promosi	2.925.000	-
-	Beban Bahan Makanan Pasien	2.347.461.990	2.235.749.100
-	Beban Bahan Makanan Penjaga Malam	262.963.007	262.244.970
-	Beban ATK	197.915.700	200.664.475
-	Beban Kertas dan Cover	208.566.000	209.210.000
-	Beban Penggandaan	387.863.000	306.126.200
-	Beban Bahan Cetakan	883.409.800	698.810.500
-	Beban Konsumsi Kegiatan Audit	4.550.000	4.550.000
-	Beban Konsumsi Penyegaran Ilmiah	7.000.000	8.400.000
-	Beban Konsumsi Dokter Mitra	123.300.000	122.400.000
-	Beban Konsumsi In House Training	2.800.000	-
-	Beban Makan Minum Rapat	3.150.000	1.565.000
-	Beban Perangko dan Meterai	8.725.000	7.229.000
	Jumlah Beban Persediaan	35.507.887.110	34.449.276.542

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

3) Beban Jasa tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Keterangan		Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Jasa			
-	Beban Honor Tim Pelaksana Kegiatan	17.400.000	25.150.000
-	Beban Honor Tim Pelaksana Keg. SIMDA	6.000.000	3.150.000
-	Beban Pelayanan Rohani	4.009.288.250	6.000.000
-	Beban Gaji dan Tunjangan Nakes	25.922.645.075	3.988.732.750
-	Beban Jasa Medis	132.586.416	14.837.696.974
-	Beban Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	6.472.307	164.950.739
-	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan NonASN	8.090.477	8.761.556
-	Beban Iuran Jaminan Kematian Non ASN	77.016.500	10.951.980
-	Beban Gaji Non ASN - Tenaga Adm/PHL	895.694.520	747.465.400
-	Beban Jasa Pihak Kebersihan	365.589.600	880.500.000
-	Beban Jasa Pihak Keamanan	24.321.000	342.000.000
-	Beban Gaji Tenaga Supir	18.240.750	24.321.000
-	Beban Gaji Non ASN - Mekanik dan Listrik	42.561.750	24.321.000
-	Beban Gaji Non ASN - Tenaga Juru Masak	45.000.000	48.642.000
-	Beban Jasa Audit Keuangan	750.000	49.000.000
-	Beban Administrasi Bank	7.090.205	750.000
-	Beban Jasa Kontribusi Pelatihan / Webinar	299.807.636	4.480.000
-	Beban Kalibrasi	1.206.465.013	236.643.590
-	Beban Penguburan Limbah B3	12.669.923	1.228.085.000
-	Beban Telpon	307.189.000	15.254.595
-	Beban Air	707.973.716	276.419.000
-	Beban Listrik	45.201.000	895.462.959
-	Beban Internet	37.656.747	43.867.900
-	Beban Pajak, Bea dan Perijinan	71.930.000	26.177.957
-	Beban Pemeliharaan Alat Angkut	84.715.000	84.372.500
-	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan RT	1.000.034.889	23.977.000
-	Beban Pemeliharaan Alat Kesehatan	16.000.000	139.168.914
-	Beban Pemeliharaan Komputer,	127.954.433	25.000.000
-	Beban Pemeliharaan Gedung/Rudin	70.401.000	190.838.380
-	Beban Pemeliharaan Instalasi Air Bersih	213.453.089	90.154.000
-	Beban Pemeliharaan IPAL	271.205.395	270.500.000
-	Beban Pemeliharaan Pembangkit Listrik	-	68.883.000
-	Beban Pemeliharaan Telepon, Internet	2.040.000	9.800.000
-	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	55.593.104	11.190.000
-	Beban Perjalanan Dinas Antar Jenazah	351.752.716	102.036.662
-	Beban Perjalanan Dinas Biasa	296.828.648	382.708.673
-	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	102.174.000	345.736.498
-	Beban Sewa	1.929.127.200	108.174.000

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
Lanjutan Beban Jasa		
- Beban Kerjasama Hemodialisa	31.828.400	2.229.449.200
- Beban Pemeriksaan Air, Kualitas Udara	1.441.411.997	31.513.200
- Beban Kerjasama Apotek Pelengkap	480.000.000	1.229.602.776
- Beban Kerjasama Dokter PPDS	36.924.000	480.000.000
- Beban Kerjasama Fisikawan Medis	-	36.924.000
- Beban Pengembangan SIMRS	36.192.100	119.325.000
- Beban TL Badge	3.300.000	6.899.100
- Beban Pemantauan Mutu	-	4.500.000
- Beban Kegiatan e-BLUD	-	35.801.226
- Beban Gaji Pegawai THL dan TPPK	427.644.250	
- Beban Jaminan Kesehatan THL/TPPK	14.025.110	
- Biaya iuran jaminan Kecelakaan THL	987.427	
- Biaya iuran jaminan Kematian THL	1.234.291	
- Biaya Bank	781.200	-
- Belum dapat dijelaskan		(60.605.717)
Jumlah Beban Jasa	41.263.248.134	29.854.732.812

4) Beban Penyusutan, Amortisasi dan Penyisihan tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
Penyusutan, Amortisasi dan Penyisihan		
- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	16.640.617.296	17.655.274.152
- Beban Penyusutan Gedung Bangunan	2.230.770.442	4.076.005.412
- Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	449.144.348	270.911.820
- Beban Penyisihan Piutang	38.240.127	55.041.600
- Beban Amortisasi	55.041.600	4.853.430
Jumlah Penyusutan, Amortisasi dan Penyisihan	19.413.813.813	22.062.086.414

4.5. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

1. Ekuitas Awal Tahun

Nilai Ekuitas Awal Tahun per 1 Januari 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp.168.395.045.656,-- dan Rp 191.535.548.937,--.

2. Surplus/Defisit LO

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

Uraian		Tahun 2025	Tahun 2024
Surplus/Defisit LO			
1)	Pendapatan LO	105.089.304.411	100.476.912.703
2)	Beban LO	124.424.244.557	113.466.865.093
Jumlah Surplus/Defisit LO		(19.334.940.146)	(12.989.952.390)

3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar terdiri dari koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi nilai ekuitas. Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.0041.042.627,- dan Rp 10.150.550.889,- dengan rincian sebagai berikut:

Uraian		Tahun 2025	Tahun 2024
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar			
1)	Koreksi Penolakan klaim BPJS	-	(652.751.700)
2)	Koreksi Beban tahun 2024 dibayar tahun 2023	-	(9.497.799.189)
3)	Koreksi salah hitung beban penyusutan gedung tahun 2024	1.124.608.211	-
4)	Koreksi salah catat persediaan	(77.565.673)	-
5)	Koreksi salah catat aset tetap	(6.000.000)	-
6)	Koreksi salah catat saldo kas	89	-
Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		1.041.042.627	(10.150.550.889)

4. Setor ke Kas Daerah

Merupakan setoran ke Kas Daerah tahun 2025 sebesar Rp 4.600.000,-

5. Ekuitas Akhir Tahun

Nilai Ekuitas Akhir Tahun per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp.150.096.548.137,- dan Rp 168.395.045.656,-.

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

4.6. LAPORAN ARUS KAS

1. Arus Kas dari aktifitas operasi, terdiri dari:

Uraian		Tahun 2025	Tahun 2024
Arus Kas dari aktifitas operasi			
Arus Kas Masuk:			
1)	Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan	77.329.970.301	73.388.865.790
2)	Pendapatan Kerjasama	117.851.433	380.972.306
3)	Pendapatan Lainnya	145.396.385	122.155.522
4)	Pendapatan APBD	24.916.134.978	1.998.078.225
	Jumlah Arus Kas Masuk	102.509.353.097	75.890.071.843
Arus Kas Keluar:			
1)	Biaya Pegawai	24.190.129.500	94.600.000
2)	Biaya Barang	34.037.764.971	36.627.960.116
3)	Biaya Jasa	40.073.652.620	43.388.075.488
	Jumlah Arus Kas Keluar	98.301.547.091	80.110.635.604

2. Arus Kas dari aktifitas investasi, terdiri dari:

Uraian		Tahun 2025	Tahun 2024
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
Arus kas masuk dari aktivitas investasi terdiri dari:			
1)	Penerimaan Penjualan Aset Tetap	-	-
2)	Penerimaan Penjualan Aset Lain-Lain	-	-
	Jumlah arus kas masuk dari aktivitas investasi	-	-
Arus kas keluar dari aktivitas investasi terdiri dari:			
1)	Perolehan Peralatan dan Mesin	-	-
	- Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran	1.474.617.490	3.561.196.130
	- Pengadaan Komputer dan perlekapannya	326.999.030	-
	- Upgrade SIM-RS	280.105.503	-
	- Pengadaan Gerobak Sampah	33.300.000	-
2)	Perolehan Gedung dan Bangunan		
	- Renovasi ruangan Mamografi	165.557.900	
	- Renovasi ruangan Cytotoxic	309.810.400	
3)	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		
	- Penambahan Jaringan instalasi Nuse Call	297.500.000	
	- Penambahan Jaringan i-phone Sistem PABX	387.849.450	
	Jumlah arus kas keluar dari aktivitas investasi	3.275.739.773	3.561.196.130

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah penuh)**

3. Arus Kas dari aktifitas Pendanaan, terdiri dari:

Uraian		Tahun 2025	Tahun 2024
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan terdiri dari:			
1) Koreksi kas		90	-
Jumlah arus kas masuk dari aktivitas investasi		90	-
Arus kas keluar dari aktivitas pendanaan terdiri dari:			
1) Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		-	-
2) Setoran ke Kas Pemerintah Kab. Manggarai		-	-
Jumlah arus kas keluar dari aktivitas pendanaan		-	-

5. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat peristiwa setelah tanggal neraca per 31 Desember 2025 yang memerlukan penyesuaian atas penyajian angka - angka laporan keuangan.

6. GOING CONCERN

Tidak terdapat indikasi bahwa keberlangsungan hidup RSUD Ruteng Kabupaten Manggarai di masa yang akan datang diragukan.

7. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Badan Layanan Umum Daerah RSUD Ruteng Kabupaten Manggarai bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Rumah Sakit (Perusahaan). Penyelesaian penyusunan Laporan Keuangan RSUD Ruteng Kabupaten Manggarai bersamaan dengan penerbitan laporan auditor independen tanggal 10 Maret 2026.

LAMPIRAN



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUTENG

DAFTAR ASET TETAP DAN PENYUSUTAN

PER 31 DESEMBER 2025

Kode	Nama Barang	Nilai Perolehan			Akm Penyusutan			Nilai Buku per 31-12-2025
		sd 31-12 2024	2025	sd.31-12-2025	sd 31-12 2024	2025	sd.31-12-2025	
1	Tanah	6.711.250.000	-	6.711.250.000	-	-	-	6.711.250.000
2	Peralatan dan Mesin	140.986.641.448	2.115.022.023	143.101.663.471	99.578.952.024	16.711.692.297	116.290.644.321	26.811.019.150
2.2	Alat-alat berat	49.000.000	-	49.000.000	13.375.000	4.500.000	17.875.000	31.125.000
2.2.1	Alat-Alat Besar Darat	49.000.000	-	49.000.000	13.375.000	4.500.000	17.875.000	31.125.000
	Mesin Proses	4.000.000	-	4.000.000	4.000.000	-	4.000.000	-
	Mesin Pencaca Sampah	45.000.000	-	45.000.000	9.375.000	4.500.000	13.875.000	31.125.000
2.3	Alat-Alat Angkutan	5.455.809.124	-	5.455.809.124	4.244.475.076	391.428.571	4.635.903.647	819.905.477
2.3.1	Alat Angkutan Darat Bermotor	5.455.809.124	-	5.455.809.124	4.244.475.076	391.428.571	4.635.903.647	819.905.477
	Kendaraan Bermotor Penumpang	1.987.865.000	-	1.987.865.000	1.443.078.095	150.900.000	1.593.978.095	393.886.905
	Kendaraan Bermotor khusus	3.251.814.124	-	3.251.814.124	2.638.293.529	227.158.571	2.865.452.100	386.362.024
	Kendaraan Bermotor beroda Dua	216.130.000	-	216.130.000	163.103.452	13.370.000	176.473.452	39.656.548
2.4	Alat-Alat Bengkel dan Alat ukur	1.840.000	-	1.840.000	1.840.000	-	1.840.000	-
	Alat Ukur	1.840.000	-	1.840.000	1.840.000	-	1.840.000	-
	Alat Timbangan/blora	1.840.000	-	1.840.000	1.840.000	-	1.840.000	-
2.5	Alat-Alat Pertanian	-	-	-	-	-	-	-
	Alat Pertanian	-	-	-	-	-	-	-
	Nihil	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Alat Kantor da Rumah Tangga	8.961.998.468	640.404.533	9.602.403.001	6.677.055.280	1.412.351.254	8.089.406.534	1.512.996.467
2.6.1	Alat Kantor	647.315.700	-	647.315.700	504.367.651	56.127.700	560.495.351	86.820.349
	Alat penyimpanan perlengkapan kantor	217.547.200	-	217.547.200	212.401.366	3.000.000	215.401.366	2.145.834
	Alat kantor lainnya	429.768.500	-	429.768.500	291.966.285	53.127.700	345.093.985	84.674.515
2.6.2	Alat Rumah Tangga	4.887.652.268	33.300.000	4.920.952.268	3.622.806.903	711.699.917	4.334.506.820	586.445.448
	Meubeleur	1.491.418.354	-	1.491.418.354	1.153.490.322	147.055.917	1.300.546.239	190.872.115
	Alat pembersih	2.905.635.000	-	2.905.635.000	1.986.717.667	551.984.000	2.538.701.667	366.933.333
	Alat pendingin	102.779.000	-	102.779.000	102.779.000	-	102.779.000	0

Kode	Nama Barang	Nilai Perolehan			Akm Penyusutan			Nilai Buku per 31-12-2025
		sd 31-12 2024	2025	sd.31-12-2025	sd 31-12 2024	2025	sd.31-12-2025	
	Alat Dapur	14.430.550	-	14.430.550	14.430.550	-	14.430.550	-
	Alat Rumah Tangga lainnya	373.389.364	33.300.000	406.689.364	365.389.364	12.660.000	378.049.364	28.640.000
2.6.3	Peralatan Kantor	3.370.195.500	607.104.533	3.977.300.033	2.493.045.725	644.523.638	3.137.569.362	839.730.671
	Personel Komputer	2.571.631.410	607.104.533	3.178.735.943	1.983.662.442	479.235.102	2.462.897.543	715.838.400
	Personal Mini Komputer	67.656.118	-	67.656.118	67.656.118	-	67.656.118	(0)
	Peralatan Personal Komputer	730.907.972	-	730.907.972	441.727.165	165.288.536	607.015.701	123.892.271
2.6.4	Meja dan Kursi kerja/Rapat pejabat	56.835.000	-	56.835.000	56.835.001	-	56.835.001	(1)
	Meja Kerja pejabat	56.835.000	-	56.835.000	56.835.001	-	56.835.001	(1)
2.7	Alat studio dan komunikasi	205.294.000	-	205.294.000	201.077.333	2.200.000	203.277.333	2.016.667
2.7.1	Alat Studio	25.500.000	-	25.500.000	25.500.000	-	25.500.000	-
	Peralatan studio Visual	25.500.000	-	25.500.000	25.500.000	-	25.500.000	-
2.7.2	Alat komunikasi	179.794.000	-	179.794.000	175.577.333	2.200.000	177.777.333	2.016.667
	Alat intercom	11.000.000	-	11.000.000	6.783.333	2.200.000	8.983.333	2.016.667
	Alat Komunikasi Telephone	168.794.000	-	168.794.000	168.794.000	-	168.794.000	-
2.8	Alat-Alat Kedokteran dan Kesehatan	125.350.788.846	1.222.961.740	126.573.750.586	87.683.254.780	14.830.359.120	102.513.613.900	24.060.136.686
2.8.1	Alat Kedokteran	77.401.491.553	1.151.883.740	78.553.375.293	64.852.889.475	6.153.179.450	71.006.068.925	7.547.306.369
	1 Alat Kedokteran umum	61.545.417.816	518.180.000	62.063.597.816	49.241.326.459	5.830.085.580	55.071.412.040	6.992.185.777
	2 Alat kedokteran Bagian penyakit dalam	1.635.782.988	-	1.635.782.988	1.635.782.988	-	1.635.782.988	0
	3 Alat Kedokteran Anak	1.820.580.354	-	1.820.580.354	1.749.505.354	71.075.000	1.820.580.354	(0)
	4 Poliklinik Set	16.790.000	-	16.790.000	16.790.000	-	16.790.000	-
	5 Penderita Cacat Tubuh	7.287.000	-	7.287.000	7.287.000	-	7.287.000	-
	6 Alat kedokteran Jantung	626.146.700	-	626.146.700	626.146.700	-	626.146.700	-
	7 Alat kedoktern gigi	577.713.207	-	577.713.207	577.713.207	-	577.713.207	-
	8 Alat kedokteran gawat Darurat	112.000.000	-	112.000.000	112.000.000	-	112.000.000	-
	9 Alat kedoktern keluarga bencana	100.313.804	-	100.313.804	100.313.804	-	100.313.804	-
	10 Alat kedokteran mata	500.000	-	500.000	500.000	-	500.000	-
	11 Alat kedokteran THT	321.840.674	-	321.840.674	321.840.674	-	321.840.674	(0)
	12 Alat Farmasi	284.627.500	321.684.540	606.312.040	284.627.500	64.336.908	348.964.408	257.347.632

Kode	Nama Barang	Nilai Perolehan			Akm Penyusutan			Nilai Buku per 31-12-2025
		sd 31-12 2024	2025	sd.31-12-2025	sd 31-12 2024	2025	sd.31-12-2025	
	13 Alat kedokteran bedah	8.827.694.409	133.269.200	8.960.963.609	8.654.258.688	151.931.961	8.806.190.649	154.772.960
	14 Alat kesehatan kebidanan dan penyakit k	1.524.797.101	178.750.000	1.703.547.101	1.524.797.101	35.750.000	1.560.547.101	143.000.000
2.8.2	Alat Kesehatan	47.949.297.293	71.078.000	48.020.375.293	22.830.365.305	8.677.179.670	31.507.544.975	16.512.830.318
	1 Alat kesehatan perawatan	47.949.297.293	71.078.000	48.020.375.293	22.830.365.305	8.677.179.670	31.507.544.975	16.512.830.318
	2 Cenral Oksigen	-	-	-	-	-	-	-
2.9	Alat laboratorium	688.744.010	251.655.750	940.399.760	684.821.619	54.253.541	739.075.160	201.324.600
2.9.1	Unit-Unit Laboratorium	666.244.010	251.655.750	917.899.760	662.321.619	54.253.541	716.575.160	201.324.600
	1 Alat laboratorium Microbiologi	10.500.000	251.655.750	262.155.750	10.500.000	50.331.150	60.831.150	201.324.600
	2 Alat laboratorium patologi	127.000.000	-	127.000.000	127.000.000	-	127.000.000	-
	3 Alat laboratorium Microbiologi lainnya	344.361.760	-	344.361.760	344.361.760	-	344.361.760	-
	4 Alat Laboratorium Hematologi	14.500.000	-	14.500.000	14.500.000	-	14.500.000	-
	5 Alat laboratorium Bahan bangunan konst	2.575.000	-	2.575.000	2.575.000	-	2.575.000	-
	6 Alat Laboratorium Mekanik Tanah dan ba	167.307.250	-	167.307.250	163.384.859	3.922.391	167.307.250	0
2.9.2	Alat peraga/praktek sekolah	22.500.000	-	22.500.000	22.500.000	-	22.500.000	-
	Bidang studi: IPA Menengah	22.500.000	-	22.500.000	22.500.000	-	22.500.000	-
2.10	Alat-alat persenjataan keamanan	273.167.000	-	273.167.000	73.052.936	16.599.810	89.652.746	183.514.254
2.10.5	Alat keamanan dan perlindungan	273.167.000	-	273.167.000	73.052.936	16.599.810	89.652.746	183.514.254
	Alat Bantu keamanan	273.167.000	-	273.167.000	73.052.936	16.599.810	89.652.746	183.514.254
	Cctv	273.167.000	-	273.167.000	73.052.936	16.599.810	89.652.746	183.514.254
3	Gedung dan Bangunan	119.279.283.719	475.368.300	119.754.652.019	20.021.676.647	2.230.770.442	22.252.447.089	97.502.204.930
3.11	Bangunan Gedung	117.990.558.519	475.368.300	118.465.926.819	19.713.658.052	2.204.995.938	21.918.653.990	96.547.272.829
3.11.1	Bangunan Gedung Tempat kerja	117.474.608.219	475.368.300	117.949.976.519	19.601.289.068	2.194.676.932	21.795.966.000	96.154.010.519
3.11.1.1	Bangunan Gedung Kantor	1.919.182.677	-	1.919.182.677	350.519.508	38.383.654	388.903.161	1.530.279.516
	Bangunan Gedung Kantor	63.318.670	-	63.318.670	17.834.214	1.266.373	19.100.587	44.218.083
	Bangunan gedung kantor permanen	1.186.364.007	-	1.186.364.007	215.522.794	23.727.280	239.250.074	947.113.933
	Bangunan gedung kantor permanen	669.500.000	-	669.500.000	117.162.500	13.390.000	130.552.500	538.947.500
3.11.1.2	Bangunan Gudang	128.300.000	-	128.300.000	25.873.833	2.566.000	28.439.833	99.860.167
	Bangunan Gudang (Gudang Logistik)	128.300.000	-	128.300.000	25.873.833	2.566.000	28.439.833	99.860.167

Kode	Nama Barang	Nilai Perolehan			Akm Penyusutan			Nilai Buku per 31-12-2025
		sd 31-12 2024	2025	sd.31-12-2025	sd 31-12 2024	2025	sd.31-12-2025	
3.11.1.3	Bangunan Gudang untuk bengkel	1.489.610.000	-	1.489.610.000	181.579.884	29.792.200	211.372.084	1.278.237.916
	Bangunan Ruang Oksigen	75.960.000	-	75.960.000	32.029.800	1.519.200	33.549.000	42.411.000
	Bangunan IPRS/bengkel	100.300.000	-	100.300.000	42.293.167	2.006.000	44.299.167	56.000.833
	Bangunan Genset	1.313.350.000	-	1.313.350.000	107.256.917	26.267.000	133.523.917	1.179.826.083
3.11.1.4	Bangunan Gedung Instalasi	2.666.646.000	-	2.666.646.000	584.325.276	53.332.920	637.658.196	2.028.987.804
	Bangunan gedung IPAL	1.969.730.000	-	1.969.730.000	436.623.483	39.394.600	476.018.083	1.493.711.917
	Bangunan gedung Instalasi Apotik	408.378.000	-	408.378.000	106.858.910	8.167.560	115.026.470	293.351.530
	Bangunan gedung Instalasi sampah	288.538.000	-	288.538.000	40.842.883	5.770.760	46.613.643	241.924.357
3.11.1.5	Bangunan Gedung Laboratorium	116.050.067	-	116.050.067	49.086.346	1.677.588	50.763.934	65.286.133
	Laboratorium RSUD	32.170.667	-	32.170.667	32.170.667	-	32.170.667	-
	Laboratorium IPAL	83.879.400	-	83.879.400	16.915.679	1.677.588	18.593.267	65.286.133
3.11.1.6	Bangunan kesehatan	110.477.212.885	475.368.300	110.952.581.185	18.189.958.143	2.055.372.438	20.245.330.582	90.707.250.603
	Bangunan Laundry	184.850.000	-	184.850.000	77.945.083	3.697.000	81.642.083	103.207.917
	Bangunan kesehatan lainnya	294.280.000	-	294.280.000	124.088.067	5.885.600	129.973.667	164.306.333
	Ruang pertemuan lama	53.690.000	-	53.690.000	22.639.283	1.073.800	23.713.083	29.976.917
	Bangunan Tanki BBM	9.010.000	-	9.010.000	3.799.217	180.200	3.979.417	5.030.583
	Kamar operasi	319.470.000	-	319.470.000	134.709.850	6.389.400	141.099.250	178.370.750
	Ruang isolasi kelas I	277.770.000	-	277.770.000	105.859.683	5.555.400	111.415.083	166.354.917
	Bangunan dapur lama	48.135.167	-	48.135.167	48.135.167	-	48.135.167	-
	Bangunan VIP A	563.052.048	-	563.052.048	171.768.399	11.261.041	183.029.440	380.022.608
	Bangunan Logistik	127.520.000	309.810.400	437.330.400	53.770.933	8.746.608	62.517.541	374.812.859
	Ruang Angrek	384.846.920	-	384.846.920	139.090.478	7.696.938	146.787.416	238.059.504
	Ruang Bedah	311.540.000	-	311.540.000	131.366.033	6.230.800	137.596.833	173.943.167
	Ruang Teratai	239.256.645	-	239.256.645	98.540.933	4.785.133	103.326.066	135.930.579
	Ruang ICU	245.721.883	-	245.721.883	102.820.435	4.914.438	107.734.873	137.987.010
	Rumah Mesin/Genzet	750.000.000	-	750.000.000	271.250.000	15.000.000	286.250.000	463.750.000
	Ruang VIP B	1.014.420.148	-	1.014.420.148	310.854.571	20.288.403	331.142.974	683.277.174
	Selasar UTD &VCT	45.700.000	-	45.700.000	15.614.167	914.000	16.528.167	29.171.833

Kode	Nama Barang	Nilai Perolehan			Akm Penyusutan			Nilai Buku per 31-12-2025
		sd 31-12 2024	2025	sd.31-12-2025	sd 31-12 2024	2025	sd.31-12-2025	
	Ruang Bayi	455.264.000	-	455.264.000	146.443.253	9.105.280	155.548.533	299.715.467
	Dapur Baru	71.298.000	-	71.298.000	71.298.000	-	71.298.000	-
	Gedung kantor RSUD	145.360.000	-	145.360.000	43.850.267	2.907.200	46.757.467	98.602.533
	Gudang obat	333.444.298	-	333.444.298	73.913.486	6.668.886	80.582.372	252.861.926
	IGD	3.582.304.572	-	3.582.304.572	773.866.950	71.646.091	845.513.042	2.736.791.530
	Perluasan gedung Rekam medik	71.573.000	-	71.573.000	14.433.888	1.431.460	15.865.348	55.707.652
	poli Rawat jalan	7.856.035.400	-	7.856.035.400	7.856.035.400	-	7.856.035.400	-
	Kanopi Kamar jenazah	228.490.695	-	228.490.695	228.490.695	-	228.490.695	0
	Kamar jenazah	697.700.500	-	697.700.500	98.840.904	13.954.010	112.794.914	584.905.586
	Bilik batuk	5.000.000	-	5.000.000	2.725.000	500.000	3.225.000	1.775.000
	Gedung Nifas	7.690.958.693	-	7.690.958.693	781.914.134	153.819.174	935.733.308	6.755.225.385
	Gedung OK	11.799.622.495	-	11.799.622.495	1.199.628.287	235.992.450	1.435.620.737	10.364.001.758
	Gedung Rawat Jalan	434.296.000	-	434.296.000	35.467.507	8.685.920	44.153.427	390.142.573
	Kanopi	200.000.000	-	200.000.000	16.333.333	4.000.000	20.333.333	179.666.667
	Rehab Gerbang	76.184.000	-	76.184.000	6.221.693	1.523.680	7.745.373	68.438.627
	Ruangan Covid-19	214.000.000	-	214.000.000	17.476.667	4.280.000	21.756.667	192.243.333
	Ruang Kamar Mandi	53.500.000	-	53.500.000	4.369.167	1.070.000	5.439.167	48.060.833
	Gedung Rawat Anak	11.704.723.250	-	11.704.723.250	955.885.732	234.094.465	1.189.980.197	10.514.743.053
	Gedung Radiologi	9.685.159.046	165.557.900	9.850.716.946	790.954.655	197.014.339	987.968.994	8.862.747.952
	Gedung Farmasi	10.361.657.612	-	10.361.657.612	853.753.738	207.233.152	1.060.986.891	9.300.670.721
	Gedung Rawat Inap	9.751.810.621	-	9.751.810.621	802.512.118	195.036.212	997.548.331	8.754.262.290
	Renovasi Ruang Lab	195.989.700	-	195.989.700	12.086.032	3.919.794	16.005.826	179.983.875
	Bangunan Kesehatan	348.540.000	-	348.540.000	21.493.300	6.970.800	28.464.100	320.075.900
	Bangunan Kesehatan	12.524.713.050	-	12.524.713.050	772.357.305	250.494.261	1.022.851.566	11.501.861.484
	Bangunan Kesehatan	12.546.963.600	-	12.546.963.600	773.729.422	250.939.272	1.024.668.694	11.522.294.906
	Bangunan kesehatan NICU	3.884.126.542	-	3.884.126.542	19.430.612	77.682.531	97.113.143	3.787.013.399
	Rehab Ruangan ICU Lama	344.610.000	-	344.610.000	1.723.050	6.892.200	8.615.250	335.994.750
	Penambahan Aset Ruangan VIP A dan B	60.000.000	-	60.000.000	300.000	1.200.000	1.500.000	58.500.000
	Pemasangan Karet Selasar	149.625.000	-	149.625.000	1.496.250	2.992.500	4.488.750	145.136.250
	Drainase	135.000.000	-	135.000.000	675.000	2.700.000	3.375.000	131.625.000
3.11.1.9	Bangunan Gedung Tempat pertemuan	434.601.590	-	434.601.590	174.564.972	8.692.032	183.257.004	251.344.586
	Ruang Pertemuan	434.601.590	-	434.601.590	174.564.972	8.692.032	183.257.004	251.344.586
3.11.1.13	Bangunan Gedung untuk pos jaga	20.000.000	-	20.000.000	4.833.333	400.000	5.233.333	14.766.667
	Pos Satpam	20.000.000	-	20.000.000	4.833.333	400.000	5.233.333	14.766.667

Kode	Nama Barang	Nilai Perolehan			Akm Penyusutan			Nilai Buku per 31-12-2025
		sd 31-12 2024	2025	sd.31-12-2025	sd 31-12 2024	2025	sd.31-12-2025	
3.11.1.14	Bangunan Gedung Garasi/pool	38.647.000	-	38.647.000	7.793.812	772.940	8.566.752	30.080.248
	Tembok penahan dan lantai rabat	38.647.000	-	38.647.000	7.793.812	772.940	8.566.752	30.080.248
3.11.1.27	Bangunan Gedung kerja Lainnya	139.359.000	-	139.359.000	28.104.065	2.787.180	30.891.245	108.467.755
	Konstruksi Pagar	139.359.000	-	139.359.000	28.104.065	2.787.180	30.891.245	108.467.755
3.11.1.29	Bangunan tempat pembakaran	44.999.000	-	44.999.000	4.649.897	899.980	5.549.877	39.449.123
	Bangunan Pembakaran sampah	44.999.000	-	44.999.000	4.649.897	899.980	5.549.877	39.449.123
3.11.2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	515.950.300	-	515.950.300	112.368.984	10.319.006	122.687.990	393.262.310
3.11.2.3	Rumah Negara Gol III	515.950.300	-	515.950.300	112.368.984	10.319.006	122.687.990	393.262.310
	Rumah dinas	415.950.300	-	415.950.300	92.202.317	8.319.006	100.521.323	315.428.977
	Ruang praktek dokter spesialis bedah	100.000.000	-	100.000.000	20.166.667	2.000.000	22.166.667	77.833.333
3.12	Monumen	1.288.725.200	-	1.288.725.200	308.018.595	25.774.504	333.793.099	954.932.101
3.12.1	Bangunan Bersejarah	1.288.725.200	-	1.288.725.200	308.018.595	25.774.504	333.793.099	954.932.101
3.12.1.1	Istana Peringatan	694.085.000	-	694.085.000	247.563.508	13.881.700	261.445.208	432.639.792
3.12.1.2	Patung dr.Ben Mboi	594.640.200	-	594.640.200	60.455.087	11.892.804	72.347.891	522.292.309
4	Jalan,Irigasi dan Jaringan	4.705.352.864	685.349.450	5.390.702.314	1.474.625.431	449.144.347	1.923.769.778	3.466.932.536
4.14	Bangunan Air/Irigasi	199.972.476	-	199.972.476	113.734.339	16.664.366	130.398.705	69.573.771
4.14.8	Bangunan Air	199.972.476	-	199.972.476	113.734.339	16.664.366	130.398.705	69.573.771
4.14.8.2	Bangunan Air Tawar	199.972.476	-	199.972.476	113.734.339	16.664.366	130.398.705	69.573.771
4.15	Instalasi	4.505.380.388	685.349.450	5.190.729.838	1.360.891.092	432.479.981	1.793.371.073	3.397.358.765
4.15.7	Instalasi pertanahan	4.505.380.388	685.349.450	5.190.729.838	1.360.891.092	432.479.981	1.793.371.073	3.397.358.765
4.15.7.1	Instalasi Radar	2.082.978.488	-	2.082.978.488	1.112.164.249	173.581.471	1.285.745.720	797.232.768
	instalasi jaringan listrik	2.422.401.900	-	2.422.401.900	248.726.843	201.786.078	450.512.922	1.971.888.978
	instalasi jaringanTelepon	-	685.349.450	685.349.450	-	57.112.431	57.112.431	628.237.019
5	Konstruksi dalam pelaksanaan	10.467.114.422	-	10.467.114.422	-	-	-	10.467.114.422
	JUMLAH ASET TETAP	282.149.642.453	3.275.739.773	285.425.382.226	121.075.254.103	19.391.607.086	140.466.861.188	144.958.521.038

Rincian Kas Dana BOSP per 31 Desember 2025

No	Satuan Pendidikan	NO	Nama Sekolah	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5
1	SD	1	UPTD SDI CUNCA LAWIR	45.066,00
		2	UPTD SDI DONGANG	50.000,00
		3	UPTD SDI KAROT	0,00
		4	UPTD SDI KONGGANG	15.800.270,00
		5	UPTD SDI LAO	2.425.432,00
		6	UPTD SDI LEDA	400.623,00
		7	UPTD SDI TENDA	0,00
		8	UPTD SDI WAE RII	33.000,00
		9	UPTD SDI WOANG	2.717.811,44
		10	UPTD SDI BEA KAKOR	5.571.157,00
		11	UPTD SDI BUNG	525.000,00
		12	UPTD SDI KUSU	378.407,00
		13	UPTD SDI LABANG PUNI	0,00
		14	UPTD SDI LAJA	484.872,00
		15	UPTD SDI LONGGO	0,00
		16	UPTD SDI LUMU	315.945,37
		17	UPTD SDI MELER	403.848,00
		18	UPTD SDI NGGAWANG	0,00
		19	UPTD SDI PURANG	0,00
		20	UPTD SDI RAI	4.592.900,00
		21	UPTD SDI RANDONG	2.285.967,00
		22	UPTD SDI SAMA	0,00
		23	UPTD SDI TIL	0,00
		24	UPTD SDI WAE BELANG CANGAR	0,00
		25	UPTD SDI WASE WENGKE	485.400,00
		26	UPTD SDN ANAM	405.098,00
		27	UPTD SDN GULUNG	672.083,00
		28	UPTD SDN PUREK	0,00
		29	UPTD SDN SAMA JAYA	300.027,00
		30	UPTD SDI GELONG	135.052,00
		31	UPTD SDI GONGGONG	994.474,00
		32	UPTD SDI MBOHANG	0,00
		33	UPTD SDI NATI	62.198,00
		34	UPTD SDI WATU WERI	1.635.369,00
		35	UPTD SDI WERI PATENG	361.619,00
		36	UPTD SDN SUBU	58.009.495,00
		37	UPTD SDI DIMPONG	4.986,00
		38	UPTD SDI GOLO TEBO	820.000,00
		39	UPTD SDI LENTENG	497.700,00
		40	UPTD SDI MUWUR	2.181.760,00
		41	UPTD SDI NTALA	568.551,00

Rincian Kas Dana BOSP per 31 Desember 2025

No	Satuan Pendidikan	NO	Nama Sekolah	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5
		42	UPTD SDI PAU	100.000,00
		43	UPTD SDI RANGKANGKALO	1.110.778,00
		44	UPTD SDI WANGKO	0,00
		45	UPTD SDI WATU BENTA	0,00
		46	UPTD SDN WUNIS	250.000,00
		47	UPTD SDN LENGOR	0,00
		48	UPTD SDI. TOPAK	0,00
		49	UPTD SDN WATU LANDO	89.178,00
		50	UPTD SDI KENDA	698.088,02
		51	UPTD SDI LIDANG	191,00
		52	UPTD SDI LING	231.127,00
		53	UPTD SDI MBONGOS	39.162,00
		54	UPTD SDI MENDO	2.029.822,00
		55	UPTD SDI METI	19.357,00
		56	UPTD SDI NORANG	347.829,00
		57	UPTD SDI RANGGI	7.450,00
		58	UPTD SDI ROBO	136.297,00
		59	UPTD SDN RAMPASASA	6.000,00
		60	UPTD SDI TIMUNG	1.211.305,00
		61	UPTD SDI WATU ALO	0,00
		62	UPTD SDI WELONG	1.131.128,00
		63	UPTD SDN WETOK	1.545,00
		64	UPTD SDN WADE	3.600.000,00
		65	UPTD SDN BENGKANG	820.518,00
		66	UPTD SDI JATI	1.334,00
		67	UPTD SDI MAHIMA	50.200,00
		68	UPTD SDI NGGORANG	5.558.467,00
		69	UPTD SDI WAE BELANG	153.513,00
		70	UPTD SDI WATU BAUR	469.637,00
		71	UPTD SDN REO I	0,00
		72	UPTD SDN REO II	886.817,00
		73	UPTD SDN OJANG	58.836,00
		74	UPTD SDN GOLO WETIK	648.873,00
		75	UPTD SDN RABO	0,00
		76	UPTD SDN JENGKALANG	1.820.000,00
		77	UPTD SDI BAJAK RANA	490.042,00
		78	UPTD SDI LEMARANG	0,00
		79	UPTD SDI NGGALAK	4.065.899,96
		80	UPTD SDI TURENG	6.886.195,00
		81	UPTD SDI WAE WUA	13.812.356,00
		82	UPTD SDI WANGKAL	3.718.155,00

Rincian Kas Dana BOSP per 31 Desember 2025

No	Satuan Pendidikan	NO	Nama Sekolah	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5
		83	UPTD SDI WONTONG	30.200,00
		84	UPTD SDN. JONG	0,00
		85	UPTD SDN RABOK	1.061,00
		86	UPTD SDN GOLO GURUNG	0,00
		87	UPTD SDN LEWAR	0,00
		88	UPTD SDI BARANG	0,00
		89	UPTD SDI BEA NONING	3.463.437,36
		90	UPTD SDI KUWU	3.600.000,00
		91	UPTD SDI LANDO	417,00
		92	UPTD SDI LEMPIS	592,00
		93	UPTD SDI LONGKO	33.202.168,00
		94	UPTD SDI LUJANG	7.914,00
		95	UPTD SDI NIMBONG	1.843.924,00
		96	UPTD SDI PERAK	122.153,00
		97	UPTD SDI RAKAS	3.536.475,00
		98	UPTD SDN GUMBANG	73.491,00
		99	UPTD SDN CUMPE	27.253,00
		100	UPTD SDI LIANG WAKAL	0,37
		101	UPTD SDI BEA DENGGER	176.527,00
		102	UPTD SDI HESO	325.863,00
		103	UPTD SDI WAE NAMUT	20.800,00
		104	UPTD SDI WAE PAKU	5.099.375,00
		105	UPTD SDI WAE RENCA	510.720,00
		106	UPTD SDN GOLO MONDO	103.464,00
		107	UPTD SDN CEKOK	126.541,00
		108	UPTD SDN MEDA	498.212,00
		109	UPTD SDI LENDA	0,00
		110	UPTD SDN BEA LAMBA	0,00
		111	UPTD SDN MADONA	6.986,00
		112	UPTD SDI CAMBIR	0,00
		113	UPTD SDI GOLO LAMBO	72.767,00
		114	UPTD SDI ITENG I	0,00
		115	UPTD SDI ITENG II	148.461,00
		116	UPTD SDI KACA	0,00
		117	UPTD SDI KEKA	14.272,00
		118	UPTD SDI LACI	0,00
		119	UPTD SDI LOLANG	1.393.033,00
		120	UPTD SDI MOCOK	378.980,00
		121	UPTD SDI NAMPONG	43.176,00
		122	UPTD SDI PONGMELENG	1.120.537,00
		123	UPTD SDI POPOK	9.668,01

Rincian Kas Dana BOSP per 31 Desember 2025

No	Satuan Pendidikan	NO	Nama Sekolah	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5
		124	UPTD SDI RAPAS	82.100,00
		125	UPTD SDI RUA	356.401,00
		126	UPTD SDI TADO	1.369.655,00
		127	UPTD SDI TAL	249.719,00
		128	UPTD SDI ULUNGALI	0,00
		129	UPTD SDI WUKULAKU	664.087,00
		130	UPTD SDI INENGAJA	0,00
		131	UPTD SDI LADA	3.558.757,00
		132	UPTD SDN ULU BELANG	131.622,00
		133	UPTD SDN WEJANG KALO	377.939,00
		134	UPTD SDN ARA	10.892.304,00
		135	UPTD SDN ULU KOAK	795.447,00
		136	UPTD SDN TADO KEMBO	170.000,00
		137	UPTD SDN MANO	337.126,00
		138	UPTD SDN DAMU	296.000,00
		139	UPTD SDI BANGKAKELI	0,00
		140	UPTD SDN PASIR PUTIH	0,00
		141	UPTD SDI BEA TENGA	3.602,00
		142	UPTD SDI BORIK	29.683,00
		143	UPTD SDI KEKA REJO	6.123.584,00
		144	UPTD SDI KEMBUR	113.007,00
		145	UPTD SDI LABUAN TAUR	1.621.696,00
		146	UPTD SDI LELIT	86.620,00
		147	UPTD SDI LENGGOS	1.734.549,00
		148	UPTD SDI LONGOS	0,00
		149	UPTD SDI PONGPAHAR	200.209,00
		150	UPTD SDI WAE CEPANG	3.305.164,00
		151	UPTD SDI WATU DALI	2.793.051,00
		152	UPTD SDI WONGKA	129.726,00
		153	UPTD SDN PULAU MULES	1.512.000,00
		154	UPTD SDI SATAR LEGANG	119.950,00
		155	UPTD SDI LOKOM	7.063.181,00
		156	UPTD SDN RAHUNG	0,00
		157	UPTD SDI DANTAR	420.394,00
		158	UPTD SDI KENGGU	30.939,00
		159	UPTD SDI RUANG	32.126,00
		160	UPTD SDI PONGWAKAR	3.000.725,00
		161	UPTD SDI WATU WOHE	38.683,00
		162	UPTD SDI MOWOL	0,00
		163	UPTD SDI MANDA	55.560,00
		164	UPTD SDI WEJANG RACI	0,00

Rincian Kas Dana BOSP per 31 Desember 2025

No	Saluan Pendidikan	NO	Nama Sekolah	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5
		105	UPTD SDI BEA SUHANG	178.804,10
		106	UPTD SDI TUNGA	0,00
		107	UPTD SDN RANGING	230.763,00
		108	UPTD SDN SINGKUL	761.568,31
		109	UPTD SDN ROMANG	0,00
			TOTAL SD	263.410.376,02
II	SMP	1	SMP NEGERI 3 SATAR MESE	100,00
		2	SMP NEGERI 1 SATAR MESE	1.085.502,00
		3	SMP NEGERI 5 SATARMESE	3.097,00
		4	SMP NEGERI 10 SATARMESE	17.300,00
		5	SMP NEGERI 12 SATARMESE	1.971.000,00
		6	SMP NEGERI 11 SATARMESE	300.666,00
		7	SD-SMPN SATAP PONG MELENG	1.000.909,00
		8	SMPN 14 SATARMESE	1.171.000,00
		9	SMP NEGERI 15 SATARMESE	0,00
		10	SMP NEGERI 17 SATARMESE	288.802,50
		11	SMP NEGERI 20 SATARMESE	4.204,30
		12	SMP NEGERI 2 LANGKE REMBONG	12.852.447,00
		13	SMP NEGERI 1 LANGKE REMBONG	0,00
		14	SMP NEGERI 4 LANGKE REMBONG	50.000,00
		15	SMP NEGERI 3 LANGKE REMBONG	4.864.090,00
		16	SMP NEGERI 5 LANGKE REMBONG	103.866,00
		17	SMPN 6 LANGKE REMBONG	603.054,00
		18	SMP NEGERI 1 RUTENG CANCAR	0,00
		19	SMP NEGERI 7 RUTENG	2.211.770,00
		20	SMP NEGERI 6 RUTENG	2.950.000,00
		21	SMP NEGERI 9 RUTENG	833.000,00
		22	SMP NEGERI 10 RUTENG	1.154.506,00
		23	SMP NEGERI 11 RUTENG	3.010.000,55
		24	SMP NEGERI 3 CIBAL	1.614.878,31
		25	SMP NEGERI 1 CIBAL	10.535.000,00
		26	SMP NEGERI 4 CIBAL	0,00
		27	SMP NEGERI 7 CIBAL	1.816.000,00
		28	SMP NEGERI 5 CIBAL	196.479,00
		29	SMP NEGERI 8 CIBAL LADUR	3.213.236,00
		30	SMP NEGERI 10 CIBAL	848.025,84
		31	SMP NEGERI 1 REOK	13.055.562,00
		32	SMP NEGERI 4 REOK	288.657,00
		33	SMP NEGERI 3 REOK	20.070,00
		34	SD-SMPN SATAP WAE BELANG	42.532,00
		35	SD - SMP SATU ATAP NEGERI MAHIMA	0,00

Rincian Kas Dana BOSP per 31 Desember 2025

No	Satuan Pendidikan	NO	Nama Sekolah	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5
		36	SMP NEGERI 7 REOK	42.457,00
		37	SMP NEGERI 1 WAE RII	60.080,00
		38	SMP NEGERI 2 WAE RII	262.404,00
		39	SMP NEGERI 3 WAE RII	992.999,00
		40	SMP NEGERI SATU ATAP ROBO	0,00
		41	SMP NEGERI 2 SATAR MESE	5.647.061,00
		42	SMP NEGERI 4 SATARMESE	9.610.356,00
		43	SMP NEGERI 6 SATARMESE	60.386,00
		44	SMP NEGERI 7 SATARMESE	0,00
		45	SMP NEGERI SATAP NUCA MOLAS	208,00
		46	SMP NEGERI 8 SATARMESE	1.439.370,00
		47	SMP NEGERI 9 SATARMESE	2.454.982,00
		48	SMPN 13 SATAR MESE	846,00
		49	SD-SMPN SATAP MOWOL	0,00
		50	SMP NEGERI 16 SATARMESE	0,00
		51	SMP NEGERI 18 SATARMESE	9.477,00
		52	SMP NEGERI 19 SATARMESE	1.631,10
		53	SMP NEGERI 2 RUTENG-BEOKINA	1.140.147,00
		54	SMP NEGERI 3 RUTENG WATU BENTA/BUAR	358.492,00
		55	SMP NEGERI 4 RUTENG	485.423,00
		56	SMP NEGERI SATAP RANGKANG KALO	10.390.475,00
		57	SMP NEGERI 8 RUTENG	404.896,00
		58	SMP NEGERI 12 RUTENG	330.000,00
		59	SMP NEGERI 5 RUTENG	117.397,00
		60	SMP NEGERI 2 REOK	43.167.799,00
		61	SMP NEGERI SATAP LEMARANG	11.510.000,00
		62	SMP NEGERI 5 REOK KILIT	142.746,00
		63	SMP NEGERI 6 REOK	901.241,00
		64	SMP NEGERI 8 REOK	150.000,00
		65	SMP NEGERI 2 CIBAL	636.324,00
		66	SMP NEGERI 6 CIBAL	60.000,00
		67	SMP NEGERI 9 CIBAL GOLO MONDO	66.923,00
		68	SMP NEGERI 9 REOK	3.971.000,00
		69	SMP NEGERI 13 RUTENG	0,00
			TOTAL SMP	161.631.173,49
III	BOP PAUD	1	TK NEGERI CIBAL	8.436,25
		2	TK NEGERI LELAK	0,00
		3	TK NEGERI REO	17.337,06
		4	TK NEGERI RUTENG	0,00
		5	TK NEGERI CIBAL BARAT	30.912,10
		6	TK NEGERI GOLO JAMBU	6.000,00

Rincian Kas Dana BOSP per 31 Desember 2025

No	Satuan Pendidikan	NO	Nama Sekolah	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5
		7	TK NEGERI KAJONG	30.000,00
		8	TK NEGERI WAE RII	0,00
		9	TK NEGERI SATARMESE UTARA	3.289,68
		10	TK NEGERI PAKA	11.140,70
		11	TK NEGERI RAHONG UTARA	44.045,81
		12	PAUD SKB RANDONG	0,00
		13	TK/PAUD SWASTA	0,00
			TOTAL BOP PAUD	151.161,60
IV	BOP Kesetaraan	1	KESETARAAN SKB RANDONG	33.000,00
		2	SKB SWASTA	0,00
			TOTAL BOP Kesetaraan	33.000,00
TOTAL DANA BOS				425.125.711,11

Rincian Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025

No	Uraian	Penyisihan 2025 (Rp)
1	2	3
A	PIUTANG PAJAK	
	Plutang Pajak Hotel	(22.396.092,93)
1	1 Kualitas Lancar	(114.793,43)
	2 Kualitas Kurang Lancar	(2.793.600,00)
	3 Kualitas Ragu-ragu	(13.187.699,50)
	4 Kualitas Macet	(6.300.000,00)
	Plutang Pajak Restoran	(29.688.638,01)
2	1 Kualitas Lancar	(134.186,41)
	2 Kualitas Kurang Lancar	(5.246.701,60)
	3 Kualitas Ragu-ragu	(5.232.750,00)
	4 Kualitas Macet	(19.075.000,00)
	Plutang Pajak Hiburan	(823.000,00)
3	1 Kualitas Lancar	(2.500,00)
	2 Kualitas Macet	(820.500,00)
	Plutang Pajak Reklame	(91.252.348,00)
4	1 Kualitas Lancar	(149.598,00)
	2 Kualitas Kurang Lancar	(1.148.500,00)
	3 Kualitas Ragu-ragu	(29.619.000,00)
	4 Kualitas Macet	(60.335.250,00)
5	Plutang Pajak Penerangan Jalan	(3.338.816,56)
	1 Kualitas Lancar	(3.338.816,56)
	Plutang Pajak Air Tanah	(3.538.901,04)
6	1 Kualitas Lancar	(8.520,04)
	2 Kualitas Kurang Lancar	(3.530.381,00)
	Plutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	(575.711.723,03)
7	1 Kualitas Lancar	(2.743.824,23)
	2 Kualitas Kurang Lancar	(8.635.353,90)
	3 Kualitas Ragu-ragu	(34.618.641,50)
	4 Kualitas Macet	(529.713.903,40)
	Plutang PBB-P2	(11.188.544.198,69)
8	1 Kualitas Lancar	(6.251.718,05)
	2 Kualitas Kurang Lancar	(253.881.413,90)
	3 Kualitas Ragu-ragu	(2.484.062.650,50)
	4 Kualitas Macet	(8.444.348.416,24)
	JUMLAH A	(11.915.293.718,26)
B	PIUTANG RETRIBUSI	
	Plutang Retribusi Rumah Dinas	(232.247.650,00)
1	1 Kualitas Ragu-ragu	(19.911.600,00)
	2 Kualitas Macet	(212.336.050,00)
	Plutang Retribusi Shopping Center	(12.795.225,00)
2	1 Kualitas Kurang Lancar	(2.054.100,00)
	2 Kualitas Ragu-ragu	(1.540.500,00)
	3 Kualitas Macet	(9.200.625,00)
	Plutang Retribusi Pasar	(2.649.719.653,00)
3	1 Kualitas Kurang Lancar	(31.011.885,00)
	2 Kualitas Ragu-ragu	(323.451.760,00)
	3 Kualitas Macet	(2.295.256.008,00)
	Plutang Retribusi Ruko	(88.053.300,00)
4	1 Kualitas Kurang Lancar	(6.883.800,00)
	2 Kualitas Ragu-ragu	(24.328.500,00)
	3 Kualitas Macet	(56.841.000,00)
5	Plutang Retribusi Pasar Rakyat	(40.427.500,00)
	1 Kualitas Kurang Lancar	(2.190.000,00)
	2 Kualitas Ragu-ragu	(7.050.000,00)
	3 Kualitas Macet	(31.187.500,00)

JUMLAH B		(3.023.243.328,00)
C	PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH	
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	(298.966.913,00)
	1 Kualitas Macet	(298.966.913,00)
2	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	(155.403.920,00)
	1 Kualitas Macet	(155.403.920,00)
3	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	(200.960.297,00)
	1 Kualitas Macet	(200.960.297,00)
4	Dinas Perikanan	(14.803.552,00)
	1 Kualitas Macet	(14.803.552,00)
5	Bagian Umum	(21.244.273,00)
	1 Kualitas Macet	(21.244.273,00)
6	Piutang Bunga Deposito TA. 2012 dan TA. 2013	(5.515.068,00)
	1 Kualitas Macet	(5.515.068,00)
7	Piutang dari Penjualan Kendaraan Dinas	(57.078.410,00)
	1 Kualitas Macet	(57.078.410,00)
8	Piutang Sisa Hasil Likuidasi PD Komodo Jaya	(339.494.500,00)
	1 Kualitas Macet	(339.494.500,00)
9	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	(3.919.041,31)
	1 Kualitas Kurang Lancar	(3.919.041,31)
10	Piutang Atas Kelebihan Pembayaran PPh 21 atas Sellsih Perhitungan PT	(2.687.148,40)
	1 Kualitas Kurang Lancar	(2.687.148,40)
11	Piutang BLUD RSUD	(242.085.676,07)
	1 Kualitas Lancar	(1.788.608,07)
	2 Kualitas Ragu-ragu	(2.050.280,00)
	3 Kualitas Macet	(238.240.788,00)
JUMLAH C		(1.341.827.798,78)
D	PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	
1	Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH PBB	(87.493.400,00)
	1 Kualitas Kurang Lancar	(87.493.400,00)
2	Piutang DBH PPh Pasal 21	(141.591.300,00)
	1 Kualitas Kurang Lancar	(141.591.300,00)
3	Piutang DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPON	(36.616.300,00)
	1 Kualitas Kurang Lancar	(36.616.300,00)
4	Piutang DBH-DBH CHT	(12.090.400,00)
	1 Kualitas Kurang Lancar	(12.090.400,00)
5	Piutang DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	(49.477.800,00)
	1 Kualitas Kurang Lancar	(49.477.800,00)
6	Piutang DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	(1.475.600,00)
	1 Kualitas Kurang Lancar	(1.475.600,00)
7	Piutang DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	(142.900,00)
	1 Kualitas Kurang Lancar	(142.900,00)
8	Piutang DBH SDA Kehutanan-PSDH	(282.000,00)
	1 Kualitas Kurang Lancar	(282.000,00)
JUMLAH D		(329.169.700,00)
E	PIUTANG TRANSFER ANTAR DAERAH	
1	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	(3.370.816,11)
	1 Kualitas Lancar	(3.370.816,11)
2	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	(14.257.795,70)
	1 Kualitas Kurang Lancar	(14.257.795,70)
3	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	(954,09)
	1 Kualitas Lancar	(954,09)
JUMLAH E		(17.629.565,90)
TOTAL		(16.627.164.110,94)

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA KOMODO**

Laporan Keuangan
Pada Tanggal 31 Desember 2025
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
Beserta Laporan Auditor Independen
(Mata Uang Indonesia)

Daftar Isi

	Halaman
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain	2
Laporan Perubahan Ekuitas	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5 - 18



**SURAT PERNYATAAN DIREKTUR
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KOMODO**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Marselus Sudirman, SH.
Alamat Kantor : Jln. Pelita No. 17 Ruteng Flores NTT
Nomor Telepon : 0385 21295
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Komodo;
2. Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Komodo telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat di Indonesia;
3. Laporan Keuangan Perusahaan Umum Air Minum Tirta Komodo tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Komodo;

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Ruteng, 26 Maret 2026

Perumda Air Minum Tirta Komodo
Kabupaten Manggarai,



Marselus Sudirman, SH.

Direktur

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No. 00072/3.0410/AU.8/04/2042-1/1/III/2026

Yth.

Dewan Pengawas dan Direksi

Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Komodo

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Komodo ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan, tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Penekanan Suatu Hal

Kami menjelaskan bahwa perusahaan menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat untuk pertama kalinya pada tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025. Sehubungan dengan penerapan tersebut, laporan keuangan tidak terdapat dampak yang material.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Halaman 2

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan (Lanjutan)

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Halaman 3

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kantor Akuntan Publik
Jojo Sunarjo dan Rekan



Dedy Iswani, CPA
No. Izin Akuntan Publik AP.2042

26 Maret 2026



PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KOMODO
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

				1 Januari 2024/ 31 Desember 2023
	Catatan	2025	2024	
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan setara kas	2,5	37.667.260.288	33.475.189.391	28.400.298.277
Piutang usaha bersih	2,6	4.604.615.507	4.807.526.015	5.150.807.790
Persediaan	2,7	1.693.913.798	2.052.644.972	2.730.391.182
Uang muka dan biaya dibayar di muka	2,8	94.225.017	52.937.479	112.718.434
Pajak dibayar di muka	2,16a	42.388.560	-	-
Jumlah Aset Lancar		44.102.403.170	40.388.297.857	36.394.215.683
Aset Tidak Lancar				
Aset tetap – bersih	2, 9	47.079.035.818	49.405.377.582	52.448.236.227
Aset takberwujud - bersih	2, 10	502.975.000	12.500.000	18.750.000
Pembayaran di muka ke Pemda		400.000.000	-	-
Jumlah Aset Tidak Lancar		47.982.010.818	49.417.877.582	52.466.986.227
JUMLAH ASET		92.084.413.988	89.806.175.439	88.861.201.910
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang usaha	2,11	40.000.000	-	-
Beban masih harus dibayar	2,12	325.000.000	-	531.069.195
Utang pajak	2,16b	538.289.806	99.913.221	367.648.586
Jumlah liabilitas jangka pendek		903.289.806	99.913.221	898.717.781
Liabilitas Jangka Panjang				
Kewajiban imbalan pasca kerja		1.368.304.456	1.147.951.605	1.062.189.469
Cadangan dana	13	280.166.173	280.166.173	824.257.613
Jumlah liabilitas jangka panjang		1.648.470.629	1.428.117.778	1.886.447.082
JUMLAH LIABILITAS		2.551.760.435	1.528.030.999	2.785.164.863
EKUITAS				
Modal	14	83.667.047.372	83.667.047.372	83.667.047.372
Cadangan umum	15	292.220.486	292.220.486	292.220.486
Saldo laba		5.573.385.695	4.318.876.582	2.116.769.189
JUMLAH EKUITAS		89.532.653.553	88.278.144.440	86.076.037.047
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		92.084.413.988	89.806.175.439	88.861.201.910

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KOMODO
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
PENDAPATAN	2, 17		
Pendapatan air		22.477.456.500	21.910.612.781
Pendapatan non air		2.351.509.159	2.302.165.158
Jumlah		24.828.965.659	24.212.777.939
BEBAN USAHA	2,18		
Beban sumber air		1.307.426.125	770.224.105
Beban pengolahan air		77.554.302	76.062.265
Beban transmisi dan distribusi		10.599.692.669	11.588.927.546
Jumlah		11.984.673.096	12.435.213.916
LABA KOTOR		12.844.292.563	11.777.564.023
Beban umum dan administrasi	2,19	9.442.669.585	10.379.851.444
LABA USAHA		3.401.622.978	1.397.712.579
Beban keuangan	2,20	(48.290.016)	-
Pendapatan keuangan	2, 20	837.776.114	661.713.511
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		4.191.109.076	2.059.426.090
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN			
Kini	2,16c	(800.644.636)	(354.630.871)
Tangguhan	2	-	-
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH		(800.644.636)	(354.630.871)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		3.390.464.440	1.704.795.219
Penghasilan Komprehensif Lain		(963.880.464)	-
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		2.426.583.976	1.704.795.219

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KOMODO
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Penyertaan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai	Penyertaan Pemerintah Pusat yang Belum Ditentukan Statusnya	Modal Hibah	Cadangan Umum	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
Saldo 1 Januari 2024	60.263.465.396	729.977.987	22.673.603.989	292.220.486	2.116.769.189	86.076.037.047
Koreksi aktuarial	-	-	-	-	103.187.450	103.187.450
Koreksi Saldo Awal 2024	-	-	-	-	394.124.724	394.124.724
Penghasilan Komprehensif 2024	-	-	-	-	1.704.795.219	1.704.795.219
Saldo 31 Desember 2024	60.263.465.396	729.977.987	22.673.603.989	292.220.486	4.318.876.582	88.278.144.440
Koreksi Saldo Awal 2025	-	-	-	-	(1.172.074.863)	(1.172.074.863)
Laba Komprehensif Berjalan	-	-	-	-	2.426.583.976	2.426.583.976
Saldo 31 Desember 2025	60.263.465.396	729.977.987	22.673.603.989	292.220.486	5.573.385.695	89.532.653.553

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KOMODO
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2025
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2025	2024
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS OPERASI		
Laba bersih tahun berjalan	2.426.583.976	1.704.795.219
Penyesuaian untuk rekonsiliasi laba setelah pajak penghasilan untuk kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi:		
Penyusutan aset tetap	4.821.149.680	4.876.835.849
Penyisihan penurunan nilai piutang usaha	449.649.208	-
Amortisasi aset takberwujud	6.250.000	6.250.000
Koreksi saldo laba	(1.172.074.863)	394.124.724
Koreksi aktuarial	-	103.187.450
Laba operasi sebelum perubahan modal kerja	6.525.308.001	7.085.193.242
Perubahan modal kerja:		
Penurunan (kenaikan):		
Piutang usaha - pihak ketiga	(246.738.700)	343.281.775
Persediaan	358.731.174	677.746.210
Uang muka dan biaya dibayar di muka	(41.287.538)	59.780.955
Pajak dibayar di muka	(42.388.560)	-
Pembayaran ke Pemda	(400.000.000)	-
Kenaikan (penurunan):		
Utang usaha - pihak ketiga	40.000.000	-
Biaya masih harus dibayar	325.000.000	(531.069.195)
Utang pajak	438.376.585	(267.735.365)
Kewajiban imbalan pasca kerja	220.352.851	85.762.136
Cadangan dana	-	(544.091.440)
Kas Digunakan untuk Aktivitas Operasi	7.177.353.813	6.908.868.318
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI		
Perolehan aset tetap	(2.488.557.916)	(1.833.977.204)
Perolehan aset tak berwujud	(496.725.000)	-
	(2.985.282.916)	(1.833.977.204)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	4.192.070.897	5.074.891.114
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	33.475.189.391	28.400.298.277
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	37.667.260.288	33.475.189.391

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KOMODO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2025
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian Perusahaan

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Komodo Kabupaten Manggarai didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 5 April 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Dati II Manggarai.

Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Komodo Kabupaten Manggarai dilaksanakan melalui proses alih status dari bentuk Badan Pengelola Air Minum (BPAM) yang didirikan pada tahun 1981 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum, menjadi bentuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sesuai Berita Acara Alih Status BPAM menjadi PDAM pada tanggal 5 November 1991. Dan berdasarkan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 4 tahun 2019 tanggal 2 April 2019, PDAM beralih status menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Komodo Kabupaten Manggarai dan masih dibidang Usaha Air Minum bersih bagi seluruh masyarakat Kabupaten Manggarai.

b. Tujuan Perusahaan

Tujuan pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Tirta Komodo adalah untuk pelayanan umum kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air minum yang sehat serta merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka pengembangan daerah.

c. Tempat Kedudukan

Perumda Air Minum Tirta Komodo Kabupaten Manggarai berkedudukan di Jl. Pelita No. 17 Ruteng Kabupaten Manggarai.

d. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan uraian tugas perusahaan didasarkan pada Peraturan Bupati Manggarai Nomor: 38 Tahun 2021 tanggal 12 Oktober 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Komodo Kabupaten Manggarai, dengan komposisi sebagai berikut:

1. Kuasa Pemilik Modal

Kuasa Pemilik Modal (KPM) Perumda Air Minum Tirta Komodo Kabupaten Manggarai adalah Bupati Manggarai yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota. Dengan itu, ditetapkanlah Herybertus Geradus Laju Nabit, S.E, M.A sebagai Bupati Manggarai/Kuasa Pemilik Modal.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KOMODO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2025
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM (Lanjutan)

d. Struktur Organisasi (Lanjutan)

2. Dewan Pengawas

Pembentukan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Komodo Kabupaten Manggarai ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: HK/5/2024 Periode 2024 - 2027 dengan susunan sebagai berikut, Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai sebagai Dewan Pengawas, Kepala Bagian Adm. Perekonomian Daerah Setda Kabupaten Manggarai sebagai Sekretaris Dewan Pengawas.

3. Direktur

Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Komodo Kabupaten Manggarai Marselus Sudirman, S.H. ditetapkan dengan Keputusan Bupati Manggarai Nomor: HK/273/2021 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Manggarai Periode Tahun 2021 - 2026.

4. Pejabat Struktural

Pejabat Struktural pada Lingkup Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Komodo Kab. Manggarai dengan susunan sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Natalia Kresensiana Bom, S.E	Kepala Bagian Pelayanan Pelanggan
Bernadeta Juita, S.E	Kepala Bagian Administrasi & Keuangan
Wilibrodus D. Jeneo, Amd	Kepala Bagian Teknik
Fransiskus R. Lendo	PLt .Kepala Bagian Satuan Pengawas Intern

5. Data Pegawai

Jumlah pegawai Perumda Air Minum Tirta Komodo Kabupaten Manggarai per 31 Desember 2025 adalah 86 orang dengan status karyawan tetap dan karyawan honor berjumlah 99 orang.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KOMODO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2025
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)

2. PERNYATAAN KEPATUHAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan ini telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) dan mencerminkan kepatuhan penuh terhadap seluruh ketentuan dalam SAK EP. Tahun buku ini merupakan periode penerapan pertama kali SAK EP oleh Entitas.

3. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan keuangan Entitas disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) yang berlaku di Indonesia. Penerapan SAK EP ini merupakan penerapan pertama kali oleh Entitas.

Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang disajikan sebagai angka perbandingan, telah disajikan kembali agar sesuai dengan penerapan SAK EP untuk tujuan perbandingan.

Laporan keuangan diukur berdasarkan biaya perolehan, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut (jika ada). Dasar penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual.

Laporan arus kas tersebut disusun dengan menggunakan metode tidak langsung dimana penerimaan dan pembayaran dari arus kas dikelompokkan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang fungsional dan mata uang penyajian yang digunakan di dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah.

Transaksi - Transaksi Dengan Pihak Berelasi

Entitas mengungkapkan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

- a. Secara langsung atau tidak langsung melalui satu atau lebih perantara, pihak tersebut :
 - mengendalikan, dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama dengan Entitas;
 - memiliki pengaruh signifikan atas Entitas; atau
 - memiliki pengendalian bersama atas Entitas;
- b. Merupakan entitas asosiasi dari Entitas;
- c. Merupakan ventura bersama dimana Entitas merupakan venturer;
- d. Merupakan personil manajemen kunci Entitas atau entitas induknya;
- e. Merupakan anggota keluarga dekat dari individu yang disebutkan pada butir (a) atau (d);
- f. Merupakan entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh individu yang disebutkan pada butir (d) atau (e); atau
- g. Merupakan program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja Entitas atau entitas lain yang mempunyai hubungan istimewa dengan Entitas.

Entitas mengungkapkan saldo dan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, termasuk jenis dan jumlah transaksi, saldo yang ada, syarat dan ketentuan transaksi, sifat pembayaran, serta rincian jaminan yang diberikan atau diterima, jika ada. Hubungan antara entitas induk dan entitas anak diungkapkan, baik terdapat maupun tidak terdapat transaksi antar pihak berelasi.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KOMODO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2025
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)

3. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau masih harus diterima dan disajikan secara bruto, setelah dikurangi diskon penjualan dan potongan volume. Jumlah yang dipungut atas nama pihak ketiga, seperti pajak pertambahan nilai, tidak diakui sebagai pendapatan.

Apabila pendapatan diterima secara tangguh, pendapatan diakui sebesar nilai kini dari seluruh penerimaan masa depan, yang ditentukan dengan menggunakan tingkat bunga yang berlaku (*imputed interest rate*).

Pendapatan Entitas terdiri dari penjualan air dan penjualan jasa, yang diakui sebagai berikut:

Penjualan Jasa

Pendapatan dari penjualan jasa diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian selama periode pelaporan, apabila seluruh kondisi berikut terpenuhi:

- a. jumlah pendapatan dapat diukur secara andal;
- b. besar kemungkinan manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi akan mengalir ke Entitas;
- c. tingkat penyelesaian transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal; dan
- d. biaya yang telah terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi dapat diukur secara andal.

Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual).

Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka merupakan penerimaan atas pendapatan yang belum memenuhi kriteria pengakuan dan akan diakui sebagai pendapatan pada periode ketika kewajiban Entitas telah dipenuhi.

Pajak Penghasilan

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak yang akan mengakibatkan jumlah kena pajak pada periode mendatang pada saat jumlah tercatat aset atau liabilitas tersebut dipulihkan atau diselesaikan.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang terdapat kemungkinan besar bahwa laba kena pajak di masa depan akan tersedia sehingga perbedaan temporer tersebut dapat dimanfaatkan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan diturunkan apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar bahwa laba kena pajak yang memadai akan tersedia untuk memulihkan aset pajak tangguhan tersebut.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KOMODO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2025
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)

3. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, kas di bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya dan tidak dipergunakan sebagai jaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

Kas dan setara kas dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau tujuan lainnya.

Piutang Usaha dan Piutang Lainnya

Sebagian besar penjualan dilakukan berdasarkan persyaratan kredit normal dan piutang tersebut tidak dikenakan bunga. Jika kredit diperpanjang melebihi persyaratan kredit normal, piutang dikur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pada akhir setiap periode pelaporan, jumlah tercatat piutang usaha dan piutang lain ditelaah untuk menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa jumlah tersebut tidak dapat dipulihkan. Jika demikian, kerugian penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi.

Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual. Biaya perolehan ditentukan dengan metode *First in First Out*. Penyisihan persediaan usang ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan masing-masing persediaan pada akhir tahun.

Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka

Uang Muka

Uang muka pada awalnya dicatat sebesar biaya transaksi, dan selanjutnya dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi kerugian penurunan nilai, jika ada.

Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

Aset Tetap

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, jika ada.

Penyusutan, kecuali tanah yang tidak disusutkan, dihitung sejak aset tersebut siap digunakan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset dengan rincian sebagai berikut:

	<u>Masa manfaat</u>
Kendaraan	12 Tahun 6 Bulan
Peralatan kantor	4 Tahun

Estimasi masa manfaat, nilai residu, jika ada, dan metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan dampak dari setiap perubahan estimasi tersebut (jika ada) diterapkan secara prospektif.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KOMODO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2025
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)

3. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

Aset Tetap (lanjutan)

Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai selisih antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat aset tetap) diakui dalam laporan laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Aset Tak berwujud

Aset takberwujud merupakan aset perangkat lunak komputer dan aplikasi jaringan perpipaan (GIS) yang dibeli dan dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Aset takberwujud diamortisasi berdasarkan estimasi masa manfaat. Aset takberwujud diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset takberwujud 4 tahun. Jika terdapat indikasi bahwa telah terjadi perubahan signifikan dalam tingkat amortisasi, umur manfaat atau nilai residual aset takberwujud, amortisasi direvisi secara prospektif untuk mencerminkan perkiraan yang baru.

Penurunan Nilai Aset

Pada setiap tanggal pelaporan, aset tetap dan aset takberwujud ditelaah kembali untuk menentukan

apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami kerugian penurunan nilai. Jika terdapat indikasi kemungkinan penurunan nilai, jumlah terpulihkan dari aset yang terpengaruh (atau kelompok aset terkait) diestimasi dan dibandingkan dengan jumlah tercatatnya. Jika jumlah terpulihkan estimasian adalah lebih rendah, maka jumlah tercatat akan dikurangi ke jumlah terpulihkan estimasian dan kerugian penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi.

Serupa dengan hal tersebut, pada setiap tanggal pelaporan, persediaan dinilai untuk penurunan nilai dengan membandingkan jumlah tercatat setiap item persediaan (atau kelompok item serupa) dengan harga jualnya dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual. Jika item persediaan (atau kelompok item serupa) mengalami penurunan nilai, jumlah tercatatnya dikurangi ke harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual, dan kerugian penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi.

Jika suatu kerugian penurunan nilai kemudian dibalik, maka jumlah tercatat aset (atau kelompok aset terkait) ditingkatkan ke estimasi revisian atas jumlah terpulihkannya (harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual, dalam kasus persediaan), tetapi tidak melebihi jumlah yang akan ditentukan seandainya tidak ada kerugian penurunan nilai yang diakui untuk aset tersebut (kelompok aset terkait) pada tahun-tahun sebelumnya. Pembalikan kerugian penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi.

Utang Usaha dan Utang lainnya

Utang usaha dan utang lainnya adalah kewajiban yang timbul dari kegiatan normal Perusahaan kepada Pihak Ketiga maupun kepada pihak lain yang mempunyai hubungan istimewa dan tidak dikenakan bunga. Utang usaha dan utang lainnya dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal pelaporan. Keuntungan atau kerugian selisih kurs termasuk sebagai penghasilan lain atau beban lain.

Sewa

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika persyaratan sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset sewaan. Seluruh sewa lainnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KOMODO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2025
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)

3. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

Sewa (lanjutan)

Hak atas aset yang dimiliki dalam sewa pembiayaan diakui sebagai aset Grup pada nilai wajar aset sewaan (atau, jika lebih rendah, pada nilai sekarang pembayaran sewa minimum) pada insepse sewa. Liabilitas kepada pesewa tercakup dalam laporan posisi keuangan sebagai kewajiban sewa pembiayaan. Pembayaran sewa dialokasikan antara biaya keuangan dan pengurangan kewajiban sewa sehingga tercapai suatu tingkat bunga konstan atas sisa saldo liabilitas. Beban keuangan dibebankan dalam mengukur laba atau rugi. Aset yang dikuasai dalam sewa pembiayaan termasuk dalam aset tetap, dan depresiasi dan dinilai untuk kerugian penurunan nilai dengan cara yang sama seperti aset yang dimiliki.

Utang sewa dalam sewa operasi dibebankan ke laba rugi dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama jangka waktu sewa yang bersangkutan.

4. SUMBER UTAMA DARI KETIDAKPASTIAN ESTIMASI

Dalam penyusunan laporan keuangan, Perusahaan membuat pertimbangan, estimasi, dan asumsi yang memengaruhi penerapan kebijakan akuntansi serta jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan, termasuk pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal pelaporan. Estimasi dan asumsi tersebut didasarkan pada pengalaman historis dan berbagai faktor lain yang dipandang relevan, termasuk ekspektasi atas peristiwa masa depan yang diyakini wajar pada saat laporan keuangan disusun.

Perseroan meninjau kembali estimasi dan asumsi tersebut secara berkelanjutan. Perubahan atas estimasi akuntansi diakui pada periode terjadinya perubahan, dan pada periode mendatang jika perubahan tersebut memengaruhi periode berjalan dan periode mendatang. Realisasi hasil aktual dapat berbeda dari jumlah yang diestimasi dan perbedaan tersebut dapat berdampak material terhadap laporan keuangan pada periode terjadinya.

Berikut ini adalah pertimbangan signifikan manajemen dan sumber utama ketidakpastian estimasi yang memiliki risiko signifikan menyebabkan penyesuaian material atas jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya. Terkait penyajian jumlah tercatat dan mutasi saldo masing-masing akun disajikan pada catatan yang relevan.

Penurunan nilai piutang usaha/piutang lain-lain

Perseroan menetapkan cadangan kerugian penurunan nilai piutang berdasarkan estimasi kerugian kredit ekspektasian yang mempertimbangkan profil risiko pelanggan, pengalaman historis tingkat gagal bayar, umur piutang, status penagihan, serta informasi forward-looking yang relevan. Perubahan kondisi ekonomi dan kemampuan bayar pelanggan dapat memengaruhi jumlah cadangan yang dibentuk.

Penurunan nilai aset non-keuangan

Perseroan menilai pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat indikasi penurunan nilai aset non-keuangan. Dalam menentukan jumlah terpulihkan, manajemen menggunakan estimasi atas arus kas masa depan, tingkat pertumbuhan, tingkat diskonto, dan asumsi kunci lainnya. Perubahan signifikan pada asumsi-asumsi tersebut dapat menyebabkan penyesuaian material atas jumlah tercatat aset terkait.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KOMODO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2025
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)

4. SUMBER UTAMA DARI KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

Penyusutan aset tetap dan aset tak berwujud

Biaya perolehan aset tetap dan aset takberwujud disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tersebut antara 1 sampai 5 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset dan, karenanya, biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Jumlah tercatat aset tetap Perusahaan pada tanggal pelaporan diungkapkan pada Catatan 15 atas laporan keuangan.

Pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan diperlukan dalam menentukan provisi pajak kini, termasuk interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku dan hasil pemeriksaan pajak. Aset pajak tangguhan diakui sejauh besar kemungkinan dapat dipulihkan melalui laba kena pajak masa depan. Estimasi atas proyeksi laba kena pajak masa depan dan strategi perencanaan pajak dapat memengaruhi jumlah aset pajak tangguhan yang diakui.

5. KAS DAN SETARA KAS

Akun ini terdiri dari:

	2025	2024
Kas kecil	500.000	500.000
Sub-jumlah	500.000	500.000
Kas di bank		
Bank BPD NTT	4.779.115.360	13.129.007.092
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4.378.393.350	8.282.109.381
Bank Negara Indonesia	1.955.109.792	609.133.067
Bank Mandiri	164.227.589	70.358.347
Sub-jumlah	11.276.846.091	22.090.607.887
Deposito		
Bank BRI Cabang Ruteng	13.500.000.000	4.500.000.000
Bank BPD Cabang Ruteng	12.889.914.197	6.884.081.504
Sub-jumlah	26.389.914.197	11.384.081.504
Jumlah	37.667.260.288	33.475.189.391

6. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA - BERSIH

Akun ini terdiri dari:

	2025	2024
Piutang rekening air	5.324.468.100	5.077.729.400
Penyisihan piutang	(719.852.593)	(270.203.385)
Jumlah	4.604.615.507	4.807.526.015

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai piutang usaha cukup memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian atas penurunan nilai piutang usaha berdasarkan historis pembayaran dan komitmen pelanggan.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KOMODO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2025
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)

7. PERSEDIAAN

Akun ini terdiri dari:

	2025	2024
Persediaan bahan instalasi	1.693.913.798	2.052.644.972
Jumlah	1.693.913.798	2.052.644.972

Berdasarkan penelaahan terhadap keadaan persediaan pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan tidak terdapat indikasi persediaan usang dan penurunan nilai persediaan.

8. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DI MUKA

Akun ini terdiri dari:

	2025	2024
<u>Uang muka</u>		
Uang muka kepada Pemda (PAD)	400.000.000	-
Uang muka sewa RD. Direktur	16.000.000	16.666.600
Uang muka sewa Kantor Bangka La'o	10.500.000	2.216.662
Uang muka sewa Kantor Pong Pahar	9.200.000	2.216.662
Uang muka sewa Kantor unit kenda	8.300.000	1.458.370
Uang muka sewa Kantor Unit Poco Leok	7.400.000	1.833.336
Uang muka sewa Kantor Golowoi	6.050.000	458.341
Uang muka sewa Kantor Unit Golowatu	6.050.000	370.841
Uang muka sewa Kantor Unit Poka	6.000.000	-
Uang muka sewa Kantor Unit Timung	6.000.000	-
Uang muka sewa Kantor Unit Dintor	5.500.000	-
Uang muka sewa Kantor Unit Rado	4.600.000	-
Uang muka sewa Kantor IKK Langke Majok	2.291.673	7.791.669
Uang muka sewa Kantor Pong Umpu	2.166.672	5.416.668
Uang muka sewa Kantor iteng	2.166.672	5.416.668
Uang muka sewa Kantor Unit Satar Lenda	2.000.000	5.000.000
Uang muka sewa Kantor IKK Pagal	-	1.875.000
Uang muka sewa Kantor Goloworong	-	2.216.662
Jumlah	494.225.017	52.937.479

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KOMODO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2025
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)

9. ASET TETAP

Rincian dan mutasi aset tetap adalah sebagai berikut:

2025				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Biaya Perolehan				
Tanah	1.804.732.850	70.000.000	-	1.874.732.850
Instalasi sumber air	6.676.514.066	1.199.530.418	-	7.876.044.484
Instalasi pompa	1.344.064.750	27.516.825	-	1.371.581.575
Pengolahan	19.164.546	-	-	19.164.546
Transmisi distribusi	81.149.618.457	1.065.329.750	-	82.214.948.207
Bangunan Gedung	4.950.743.280	5.844.000	8.096.077	4.948.491.203
Peralatan / perlengkapan	601.748.571	30.756.000	-	632.504.571
Kendaraan Dinas	3.754.347.694	-	-	3.754.347.694
Inventaris / Perabot Kantor	1.326.968.950	97.677.000	-	1.424.645.950
Jumlah	101.627.903.164	2.496.653.993	8.096.077	104.116.461.080
Akumulasi Penyusutan				
Instalasi sumber air	(2.211.392.008)	(287.452.458)	-	(2.498.844.466)
Instalasi pompa	(720.220.510)	(77.554.302)	-	(797.774.812)
Pengolahan	(19.164.540)	-	-	(19.164.540)
Transmisi distribusi	(43.674.650.092)	(3.776.658.473)	-	(47.451.308.565)
Bangunan Gedung	(1.255.239.316)	(229.529.363)	-	(1.484.768.679)
Peralatan / perlengkapan	(469.513.174)	(25.300.802)	-	(494.813.976)
Kendaraan Dinas	(2.842.232.283)	(286.723.985)	-	(3.128.956.268)
Inventaris / Perabot Kantor	(1.030.113.659)	(131.680.297)	-	(1.161.793.956)
Jumlah	(52.222.525.582)	(4.814.899.680)	-	(57.037.425.262)
Nilai Buku Bersih	49.405.377.582			47.079.035.818

2024				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Biaya Perolehan				
Tanah	1.717.732.850	87.000.000	-	1.804.732.850
Instalasi sumber air	6.519.777.039	156.737.027	-	6.676.514.066
Instalasi pompa	1.305.114.750	38.950.000	-	1.344.064.750
Pengolahan	19.164.546	-	-	19.164.546
Transmisi distribusi	79.958.366.980	1.191.251.477	-	81.149.618.457
Bangunan Gedung	4.896.743.280	54.000.000	-	4.950.743.280
Peralatan / perlengkapan	457.393.071	144.355.500	-	601.748.571
Kendaraan Dinas	3.754.347.694	-	-	3.754.347.694
Inventaris / Perabot Kantor	1.165.285.750	161.683.200	-	1.326.968.950
Jumlah	99.793.925.960	1.833.977.204	-	101.627.903.164
Akumulasi Penyusutan				
Instalasi sumber air	(2.149.652.824)	(61.739.184)	-	(2.211.392.008)
Instalasi pompa	(644.158.244)	(76.062.266)	-	(720.220.510)
Pengolahan	(19.164.540)	-	-	(19.164.540)
Transmisi distribusi	(39.736.194.407)	(3.938.455.685)	-	(43.674.650.092)
Bangunan Gedung	(1.017.906.074)	(237.333.242)	-	(1.255.239.316)
Peralatan / perlengkapan	(393.012.023)	(76.501.151)	-	(469.513.174)
Kendaraan Dinas	(2.521.789.135)	(320.443.148)	-	(2.842.232.283)
Inventaris / Perabot Kantor	(863.812.486)	(166.301.173)	-	(1.030.113.659)
Jumlah	(47.345.689.733)	(4.876.835.849)	-	(52.222.525.582)
Nilai Buku Bersih	52.448.236.227			49.405.377.582

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2025
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)

10. ASET TIDAK BERWUJUD

Akun ini terdiri dari:

	2025	2024
Aplikasi survey jaringan	496.725.000	-
SIM-PDAM under windows	25.000.000	25.000.000
Amortisasi	(18.750.000)	(12.500.000)
Jumlah	502.975.000	12.500.000

11. UTANG USAHA

Akun ini terdiri dari:

	2025	2024
Utang usaha	40.000.000	-
Jumlah	40.000.000	-

12. BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR

Akun ini terdiri dari:

	2025	2024
Beban yang masih harus dibayar	325.000.000	-
Jumlah	325.000.000	-

13. CADANGAN DANA PEMBAGIAN LABA

Akun ini terdiri dari:

	2025	2024
Cadangan dana	280.166.173	280.166.173
Jumlah	280.166.173	280.166.173

14. MODAL

	2025	2024
Modal hibah untuk MBR	22.673.603.989	22.673.603.989
Penyertaan Pemerintah Pusat YBDS	729.977.987	729.977.987
Penyertaan modal Pemda Kab. Manggarai	60.263.465.396	60.263.465.396
Jumlah	83.667.047.372	83.667.047.372

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KOMODO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2025
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)

15. CADANGAN DANA

Akun ini terdiri dari:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Cadangan dana umum	292.220.486	292.220.486
Jumlah	<u>292.220.486</u>	<u>292.220.486</u>

16. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar Dimuka

Akun ini terdiri dari:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
PPh Pasal 25	42.388.560	-
Jumlah	<u>42.388.560</u>	<u>-</u>

b. Utang Pajak

Akun ini terdiri dari:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Pajak penghasilan Pasal 29	538.289.806	99.913.221
Jumlah	<u>538.289.806</u>	<u>99.913.221</u>

c. Pajak Penghasilan Badan

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan taksiran penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi	4.191.109.076	2.059.426.090.
Beban Sumbangan	17.589.000	12.795.600
Biaya Representasi	167.318.800	170.000.000
Bunga Deposito dan Jasa Giro	(830.748.053)	(632.932.171)
Taksiran penghasilan kena pajak	3.545.268.823	1.609.289.519
Taksiran penghasilan kena pajak (pembulatan)	<u>3.545.269.000</u>	<u>1.609.290.000</u>
Beban pajak penghasilan kini	800.644.636	354.630.871
Dikurangi pajak dibayar di muka:		
Pasal 22	-	-
Pasal 23	-	-
Pasal 25	262.354.830	-
Jumlah pajak dibayar di muka:	262.354.830	-
Taksiran Utang Pajak Penghasilan Pasal 29	<u>538.289.806</u>	<u>354.630.871</u>

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KOMODO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2025
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)

17. PENDAPATAN

Rincian pendapatan adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Pendapatan air	22.477.456.500	21.910.612.781
Pendapatan non – air	2.351.509.159	2.302.165.158
Jumlah	24.828.965.659	24.212.777.939

18. BEBAN USAHA

Rincian beban usaha adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Beban pegawai transmisi dan distribusi	5.227.739.154	6.336.745.534
Beban penyusutan	4.141.665.233	4.076.257.132
Beban pemeliharaan	1.969.439.835	1.429.391.508
Beban operasional dan bahan baku air	645.828.874	592.819.742
Jumlah	11.984.673.096	12.435.213.916

19. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Rincian beban umum dan administrasi adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Beban pegawai	4.959.696.070	5.825.820.527
Beban penyusutan	679.484.446	806.828.751
Beban pemeliharaan instalasi NPA	533.347.311	658.728.521
Beban penyisihan piutang	449.649.208	-
Beban operasi lainnya	2.820.492.550	3.112.596.903
Jumlah	9.442.669.585	10.403.974.702

20. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN - BERSIH

	2025	2024
Pendapatan lain-lain		
Bunga tabungan deposito	381.341.026	319.769.436
Bunga tabungan giro	449.407.027	313.162.735
Pendapatan lainnya	7.028.061	28.781.340
Sub-jumlah	837.776.114	661.713.511
Beban lain-lain		
Administrasi bank	(48.290.016)	-
Sub-jumlah	(48.290.016)	-
Jumlah	789.486.098	661.713.511

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KOMODO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2025
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)

21. PENERAPAN PERTAMA KALI SAK EP

a. Latar Belakang

Perusahaan menerapkan SAK EP untuk pertama kalinya pada laporan keuangan tahun berjalan. Sebelumnya, laporan keuangan disusun berdasarkan SAK ETAP. Laporan keuangan tahun sebelumnya yang disajikan sebagai angka pembanding telah disajikan kembali agar sesuai dengan SAK EP.

b. Dampak terhadap Laporan Keuangan

Penerapan pertama kali SAK EP tidak menimbulkan dampak material terhadap posisi keuangan, dan arus kas Perusahaan. Penyesuaian yang dilakukan terutama terkait penyesuaian kebijakan akuntansi dan/atau penyajian agar sesuai dengan SAK EP. Laporan keuangan tahun 2024 yang disajikan sebagai angka pembanding telah disajikan kembali untuk tujuan perbandingan dan mengakibatkan perubahan material atas jumlah yang sebelumnya dilaporkan.

22. TANGGAL PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan Perusahaan ini telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Perusahaan, selaku pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan pada tanggal 26 Maret 2026.

PT. MANGGARAI MULTI INVESTASI, KABUPATEN MANGGARAI
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2024
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Alamat : Jl. Sukarno, Kelurahan Pau, - Ruteng
email: manggaraimultiinvestasi@yahoo.co.id

Opini Auditor Nomor : 00083/2.0925/AU.8/05/1881-2/1/IV/2026





BADAN USAHA MILIK DAERAH
PT. MANGGARAI MULTI INVESTASI
KABUPATEN MANGGARAI

Jl. Soekarno-Ruteng, Kelurahan Pau, Kode Pos 86516, email : manggaraimultiinvestasi@yahoo.co.id

DAFTAR ISI

Halaman

Surat Pernyataan Direksi

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Perubahan Ekuitas.....	2
Laporan Arus Kas.....	3
Laporan Laba/Rugi.....	4
Catatan Atas Laporan Keuangan	5

Lampiran



Surat Pernyataan Direksi





PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
BUMD. PT. MANGGARAI MULTI INVESTASI

Jl. SUKARNO, KELURAHAN PAU, KECAMATAN LANGKE REMBONG, FLORES, NTT

KODE POS 88516

EMAIL: MANGGARAIMULTIINVESTASI@YAHOO.CO.ID



SURAT PERNYATAAN DIREKTUR
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PT. MANGGARAI MULTI INVESTASI KABUPATEN MANGGARAI
UNTUK PERIODE DUA BELAS BULAN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Jahang Fansi Aldus
Alamat Kantor : Jalan Sukarno, Kelurahan Pau, Kec. Langke Rembong, Ruteng
Alamat Rumah : -
Nomor Identitas : -
Jabatan : Direktur Utama (Plt)

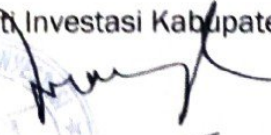
Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan PT. Manggarai Multi Investasi Kabupaten Manggarai tahun buku 2025;
2. Laporan Keuangan PT. Manggarai Multi Investasi Kabupaten Manggarai tahun buku 2025 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan - Entitas Privat (SAK EP);
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan PT. Manggarai Multi Investasi Kabupaten Manggarai tahun buku 2025 telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan Keuangan PT. Manggarai Multi Investasi Kabupaten Manggarai tahun buku 2025 tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung Jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan;

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Ruteng, 27 April 2026

PT. Manggarai Multi Investasi Kabupaten Manggarai



Drs. Jahang Fansi Aldus
Direktur Utama (Plt)

Laporan Auditor Independen



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No.: 00083/2.0925/AU.8/05/1881-2/1/IV/2026

Kepada Yth,
Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Manggarai Multi Investasi

Opini Wajar dengan Pengecualian

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Manggarai Multi Investasi ("Entitas"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf basis untuk opini wajar dengan pengecualian pada laporan kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Entitas tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP).

Dasar Opini Wajar dengan Pengecualian

Sebagaimana diungkapkan pada Catatan ... atas laporan keuangan terlampir, Entitas belum menerapkan SAK EP Bab 28 "Imbalan Kerja" dalam laporan keuangan. Pengakuan kewajiban tersebut diperlukan agar laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan sesuai SAK EP. Dampak terhadap laporan keuangan atas tidak diterapkannya standar tersebut tidak dapat ditentukan secara praktis.

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam bagian Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan dalam laporan kami.

Kami independen terhadap Entitas sesuai dengan ketentuan etika yang relevan dalam pelaksanaan audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya sesuai dengan ketentuan tersebut.

Kami meyakini bahwa bukti audit yang kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu dasar bagi opini audit kami.

Penekanan Suatu Hal (*Emphasis of Matter*)

Kami menarik perhatian pada Catatan atas dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi, yang menjelaskan bahwa Entitas menerapkan SAK EP untuk pertama kalinya pada tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025. Sehubungan dengan penerapan pertama kali tersebut, Entitas telah melakukan penyajian kembali (*restatement*) atas angka-angka komparatif/periode sebelumnya agar sesuai dengan penerapan SAK EP, sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 7.

Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan hal tersebut.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat, serta atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN **(Lanjutan)**

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan - Lanjutan

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan dasar akuntansi kelangsungan usaha kecuali manajemen bermaksud untuk melikuidasi Entitas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melakukannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Entitas.

Tanggung Jawab Auditor Terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan tingkat keyakinan yang tinggi, namun bukan merupakan jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI akan selalu mendeteksi salah saji material ketika hal itu ada. Salah saji dapat timbul dari kecurangan atau kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun agregat, secara wajar diharapkan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional sepanjang audit. Kami juga:

1. Mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, merancang dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan suatu dasar bagi opini kami;
2. Memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk merancang prosedur audit yang tepat dalam kondisi tersebut, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian internal Entitas;
3. Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi serta pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen;
4. Menyimpulkan ketepatan penggunaan dasar akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material terkait peristiwa atau kondisi yang dapat menimbulkan keraguan signifikan atas kemampuan Entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya;
5. Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, antara lain, ruang lingkup dan waktu audit yang direncanakan, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi selama audit kami.



Tangerang, 27 April 2026



Pande Putu Agus Eka Pertama, Ak., M.Acc., CPA.

Nomor Izin Akuntan Publik: AP. 1881

Laporan Keuangan



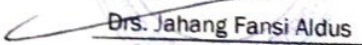
PT. MANGGARAI MULTI INVESTASI, KABUPATEN MANGGARAI
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	2A.1.1, 4a	2,640,414	40,820,095
Piutang Usaha	2A.1.3, 4b	534,210,082	927,383,216
Piutang Lain-Lain		4,000,000	-
Sewa Dibayar Dimuka	2A.1.3, 4c	-	3,956,000
Persediaan	2A.1.8, 4d	580,132,152	616,631,721
Jumlah Aset Lancar		<u>1,120,982,647</u>	<u>1,588,791,032</u>
ASET TETAP			
Nilai Perolehan Aset Tetap	2A.2, 4e	636,419,459	636,419,459
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(566,567,949)	(536,842,699)
Nilai Buku Aset Tetap		<u>69,851,510</u>	<u>99,576,760</u>
ASET LAIN-LAIN			
Piutang Usaha Macet	2A.3, 4f	7,130,940,614	6,811,955,964
Cad. Kerugian Piutang Usaha Macet		(1,426,188,123)	(1,362,391,193)
		<u>5,704,752,491</u>	<u>5,449,564,771</u>
JUMLAH ASET		<u>6,895,586,648</u>	<u>7,137,932,563</u>
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	2A.4	272,278,281	2,738,700
Utang Lain-Lain		263,271,942	235,527,561
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		<u>535,550,223</u>	<u>238,266,261</u>
EKUITAS			
Modal Saham Disetor		10,200,000,000	10,200,000,000
Saldo Laba Ditahan		(3,300,333,698)	(1,724,414,114)
Saldo Laba Tahun Berjalan		(539,629,875)	(1,575,919,584)
Jumlah Ekuitas		<u>6,360,036,427</u>	<u>6,899,666,302</u>
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		<u>6,895,586,649</u>	<u>7,137,932,563</u>

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan
Yang Merupakan Bagian Tak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan

Ruteng, 27 April 2026


PT. Manggarai Multi Investasi,


Drs. Jahang Fansi Aldus
Plt. Direktur Utama

PT. MANGGARAI MULTI INVESTASI, KABUPATEN MANGGARAI
LAPORAN LABA - RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
 Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	Tahun 2025	Tahun 2024
PENDAPATAN	2B, 1		
- Pendapatan Hasil Penjualan		27,316,000	439,705,500
- Pendapatan Jasa		-	1,595,000
Jumlah Pendapatan		27,316,000	441,300,500
BEBAN HARGA POKOK PENJUALAN		18,854,869	688,769,886
LABA KOTOR		8,461,131	(247,469,386)
BEBAN USAHA	2B, 2		
- Beban Penjualan		3,850,000	471,000
- Beban Umum dan Administrasi		544,130,330	1,333,852,317
Jumlah Beban Operasional		547,980,330	1,334,323,317
LABA USAHA		(539,519,199)	(1,581,792,703)
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
- Pendapatan Lain-Lain		136,000	6,273,141
- Beban Lain-Lain		(246,675)	(400,022)
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain		(110,676)	5,873,119
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		(539,629,875)	(1,575,919,584)
BEBAN PAJAK PENGHASILAN			
- Pajak Kini		-	-
- Beban Pajak Ditangguhan		-	-
Jumlah Pajak		-	-
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		(539,629,875)	(1,575,919,584)
(KERUGIAN) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi:			
- Surplus Revaluasi Tanah/ Aset Tidak Lancar		-	-
Jumlah (Kerugian) Penghasilan Komprehensif Lain		-	-
JUMLAH LABA/(RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		(539,629,875)	(1,575,919,584)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan
 Yang Merupakan Bagian Tak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan

Ruteng, 27 April 2026

PT. Manggarai Multi Investasi,

Drs. Jahang Fansi Aldus
 Plt. Direktur Utama

PT. MANGGARAI MULTI INVESTASI, KABUPATEN MANGGARAI

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Modal Saham	Modal Hibah	Laba/(Rugi) sd. Tahun Lalu	Laba/(Rugi) Tahun Berjalan	Total Ekuitas
Saldo per 31 Desember 2023	10,200,000,000	-	457,463,696	(2,031,576,988)	8,625,886,708
Koreksi Laba/ (Rugi) Tahun Lalu	-	-	(150,300,822)	-	(150,300,822)
Mutasi Tahun 2024 :					
Laba/(Rugi) Tahun 2024	-	-	-	(1,575,919,584)	(1,575,919,584)
Penambahan Modal	-	-	-	-	-
Pengurangan Modal	-	-	-	-	-
Pembagian Dividen	-	-	-	-	-
Saldo per 31 Desember 2024	10,200,000,000	-	(1,724,414,114)	(1,575,919,584)	6,899,666,302
Pembayaran Divien	-	-	-	-	-
Mutasi Tahun 2025:					
Laba/(Rugi) Tahun 2025	-	-	-	(539,629,875)	(539,629,875)
Penambahan Modal	-	-	-	-	-
Pengurangan Modal	-	-	-	-	-
Cadangan Dana	-	-	-	-	-
Saldo per 31 Desember 2025	10,200,000,000	-	(3,300,333,698)	(539,629,875)	6,360,036,427

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan
Yang Merupakan Bagian Tak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan

Ruteng, 27 April 2026

PT. Manggarai Multi Investasi,

Drs. Jahang Fansi Aldus
Plt. Direktur Utama

PT. MANGGARAI MULTI INVESTASI, KABUPATEN MANGGARAI

LAPORAN ARUS KAS

Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	Tahun 2025 Rp	Tahun 2024 Rp
A ARUS KAS OPERASI		
I PENERIMAAN		
1 Penerimaan dari Penjualan	27,316,000	441,300,500
2 Penerimaan dari Penagihan Piutang	110,034,000	441,571,200
3 Penerimaan dari Jasa Giro Bank	34,073	447,140
4 Penerimaan Lain-Lain	413,244	5,825,188
JUMLAH PENERIMAAN	137,797,317	889,144,028
II PENGELUARAN :		
1 Beban Gaji Pegawai	117,924,322	322,438,809
2 Beban Lembur	4,040,000	354,000
3 Pembelian Barang Dagang	-	459,252,200
4 Beban Kendaraan	4,600,000	35,740,508
5 Beban Audit	14,000,000	30,000,000
6 Beban Promosi dan Penjualan	3,850,000	-
7 Beban Perjalanan Dinas	3,300,000	2,500,000
8 Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja	-	10,589,310
9 Pengobatan Pegawai	-	9,000,000
10 Beban Kantor	3,016,000	13,425,575
11 Beban Pemeriksaan Kasus	13,000,000	20,000,000
12 Pembayaran Dividen	-	150,300,822
13 Pemberian Pinjaman	4,000,000	141,996,581
14 Pembayaran Sewa	-	10,250,000
15 Beban Biaya Bank dan Pajak Jasa Giro	246,675	939,750
16 Beban Rupa-Rupa	8,000,000	20,528,000
JUMLAH PENGELUARAN	175,976,997	1,227,315,555
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	(38,179,681)	(338,171,527)
B ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penambahan Aset Tetap	-	-
Arus Kas Bersih digunakan Aktivitas Investasi	-	-
C ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penambahan PMP	-	-
ARUS KAS BERSIH UNTUK AKTIVITAS PENDANAAN	-	-
D KENAIKAN/BERKURANG BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(38,179,681)	(338,171,527)
E SALDO KAS SETARA KAS AWAL TAHUN	40,820,095	378,991,622
F SALDO KAS SETARA KAS AKHIR TAHUN	2,640,414	40,820,095

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan
Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan

Ruteng, 27 April 2026

PT. Manggarai Multi Investasi

Drs. Jahang Fansi Aldus
Pit. Direktur Utama

Catatan Atas Laporan Keuangan



PT. MANGGARAI MULTI INVESTASI
KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN POKOK
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah)

1. UMUM

1.1. Sejarah Berdiri dan Tempat Kedudukan

PT. Manggarai Multi Investasi (Perseroan) adalah badan usaha milik daerah Kabupaten Manggarai, didirikan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Manggarai Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 30 April 2012 yang kemudian didaftarkan sesuai akta Nomor 2 tanggal 2 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Notaris J. Mambaitfeto, Sarjana Hukum, Notaris di Kupang. Akta pendirian Perseroan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-47882.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 11 September 2013, dan mengalami perubahan dengan akta perubahan Nomor 01 tanggal 04 Maret 2021 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0047616.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 15 Maret 2021.

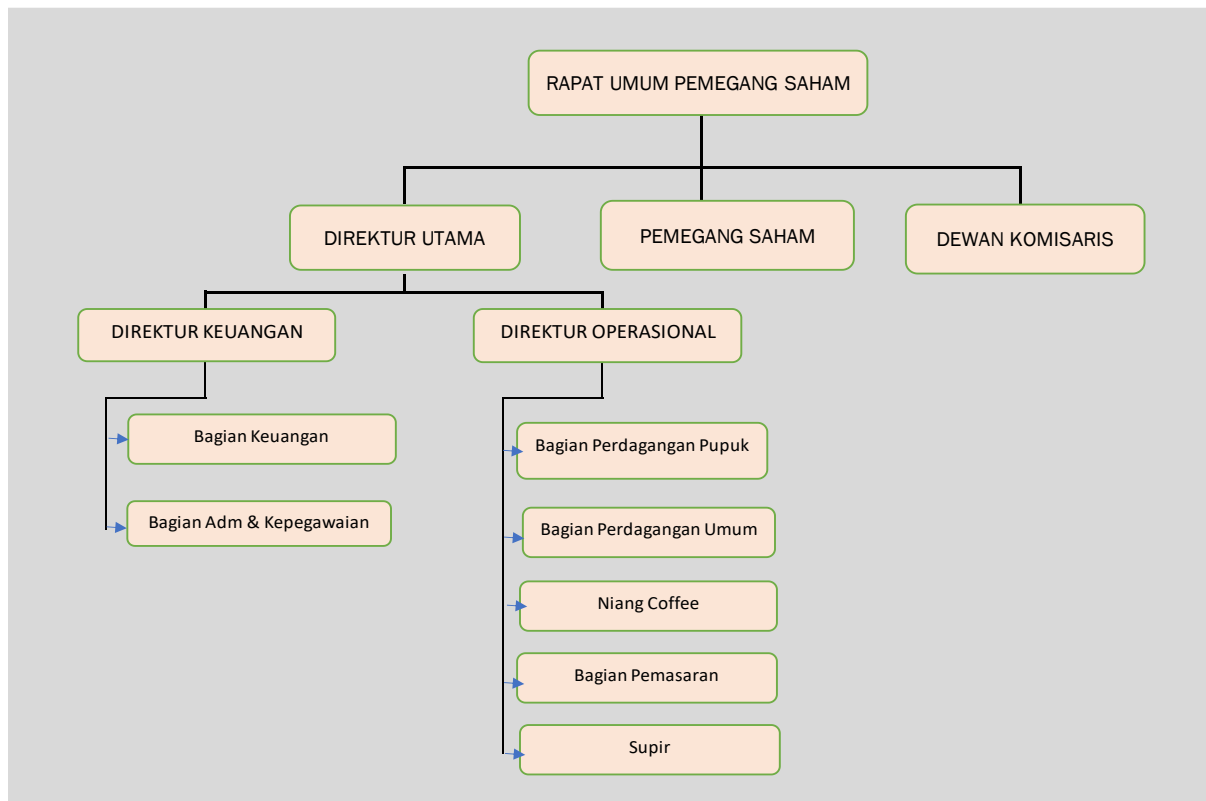
Perseroan telah memiliki beberapa perijinan antara lain sebagai berikut:

- Tanda Daftar Perusahaan Perseroan terbatas dari Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, dengan Nomor TDP 24.05.3.46.00601 tertanggal 10 Oktober 2013 dan berlaku sampai dengan 10 Oktober 2018.
- NPWP dengan Nomor 03.110.738.6-924.000 terdaftar tanggal 23 April 2013.
- Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari Pemerintah Kabupaten Manggarai, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan Nomor : 503/KPPTSP/212/SIUP/SB/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013.
- Surat Izin Usaha Tempat Usaha dari Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan Nomor : 503/KPPTSP/0100/SITU/SB/IV/2013 tanggal 17 April 2013.

Perseroan berkedudukan di Jl. Soekarno, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Ruteng, Kabupaten Manggarai.

1.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi PT. MMI disusun berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 30-10-2021 adalah sebagai berikut:



Berdasarkan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Manggarai Multi Investasi No. 05 tertanggal 30 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Theresia Sunita Nurak, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Ruteng, dan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat nomor : AHU-AH.01.03-0468822 Tahun 2021 tanggal 03 November 2021 mengenai perubahan Direksi dan Komisaris, Peralihan Saham, Ganti Nama Pemegang Saham, Pengangkatan Kembali, menyetujui antara lain :

- Pengunduran diri Bapak Hilarius Mantara dari komisaris pertanggal 6 Januari 2021;

-
- Pemberhentian Bapak Viktor Madur sebagai Komisaris Utama dan pemberhentian bapak Hilarius Mantara sebagai Komisaris dan pengangkatan Bapak Heribertus Ngabut, Sarjana Hukum sebagai Komisaris Utama dan Monika Ambang sebagai Komisaris.
 - Pemberhentian Bapak Heribertus Junaidi dan pemberhentian Bapak Leonardus Candra dari Pemegang Saham.

Selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Manggarai Multi Investasi terakhir berdasarkan RUPS Luar Biasa tersebut adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama : Heribertus Ngabut, Sarjana Hukum
- Komisaris : Drs. Fany Aldus Jahang
- Komisaris : Moni Ambang

Dewan Direksi:

- Direksi Utama : Drs. Yustinus Mahu, MM.
- Direktur Keuangan : Maksimus Man, SE
- Direktur Operasional : Maksimilianus Haryatman, SE

Sehubungan dengan pengunduran diri Drs. Yustinus Mahu, MM. sebagai Direktur Utama PT. Manggarai Multi Investasi, melalui surat Bupati Manggarai nomor Ek.019.1/127/VII/2021 tertanggal 27 Juli 2021 yang ditujukan kepada Direktur Keuangan PT. MMI dan tembusan Komisaris Utama, maka dalam rangka pengisian kekosongan jabatan Direktur Utama PT. Manggarai Multi Investasi, Maksimus Man, SE ditunjuk untuk melaksanakan tugas (Plt) Direktur Utama terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2021 sampai ditetapkannya Direktur Utama yang defenitif.

Pada tahun 2024 Maksimus Man, SE sebagai Plt. Direktur meninggal dunia. Jabatan Direktur Utama selanjutnya diemban Drs. Jahang Fany Aldus, sebagai Pelaksana Tugas berdasarkan Surat Bupati Manggarai nomor 117/500.4.4.10/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024 perihal Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT. MMI, ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai.

Pada saat audit, Jabatan Direktur Utama diemban Drs. Jahang Fany Aldus.

1.3 Maksud dan Tujuan Perusahaan

Maksud dan tujuan perusahaan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah pendirian perusahaan, adalah:

a. Maksud

Mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah.

b. Tujuan

- Memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk menanamkan modalnya
- Meningkatkan daya saing perusahaan dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional maupun global
- Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan
- Mencari laba dan menyelenggarakan kemanfaatan umum.

1.4. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

RUPS Luar Biasa tanggal 30-10-2021 menetapkan Dewan Direksi terdiri dari Direktur Utama dan Direktur Keuangan serta Direktur Operasional, namun sejak tahun 2021 hingga saat audit, jabatan Direktur Keuangan dan Direktur Operasional lowong dan tidak terisi.

Direktur Keuangan membawahi Bagian Keuangan dan Bagian Administrasi Kepegawaian, sedangkan Direktur Operasional membawahi Bagian Perdagangan Pupuk, Bagian Perdagangan Umum, Niang Coffe dan Pemasaran.

Sumberdaya manusia pada PT. Manggarai Multi Investasi per 31 Desember 2024 sebanyak 16 orang. Sebanyak 10 orang berstatus pegawai tetap dan 6 orang berstatus pegawai kontrak. Ke-10 orang pegawai tetap dengan tingkat pendidikan: S₁ 4 orang, D₃ 1 orang dan SMA 5 orang.

1.5. Aktivitas Pengendalian Internal

Perusahaan mengelola administrasi dan keuangan secara manual menggunakan beberapa unit personal komputer, tidak terintegrasi dalam satu jaringan layanan. Masing-masing bagian mengolah datanya, dan kemudian diverifikasi oleh bagian akuntansi sebelum dituangkan dalam laporan keuangan perusahaan.

2. PERNYATAAN KEPATUHAN TERHADAP STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN - ENTITAS PRIVAT

Setelah Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK-EP) yang berlaku efektif tahun buku 2025, Laporan Keuangan PT. Manggarai Multi Investasi per 31 Desember 2025 disusun menerapkan SAK-EP, menggantikan Standar Akuntansi Keuangan - Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang diterapkan tahun sebelumnya.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

2.1. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akrua (*accrual basis*) untuk penyusunan Neraca dan Laporan Operasional. Aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan perumda, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Laporan Arus Kas disusun dengan metode tidak langsung, mencerminkan arus kas dari aktivitas operasi, arus kas investasi dan pendanaan.

2.2. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

2.3. Penetapan Kebijakan Akuntansi Yang Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Keuangan – Entitas Privat (SAK-EP)

Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

A. POSISI KEUANGAN

1. ASET LANCAR

Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi.

1.1 Kas dan Setara Kas

Kas mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas bendahara berupa uang logam, uang kertas dan lain-lain kas. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara. Kas di Bendahara dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral (BI) pada tanggal neraca.

Setara kas mencakup saldo uang di bank yang siap setiap saat digunakan, dan tidak dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan perusahaan. Setara Kas juga meliputi deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal penempatan, dan tidak dijamin atas utang.

1.2 Investasi Jangka Pendek

Merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam satu periode akuntansi. Investasi jangka pendek ini merupakan investasi non permanen seperti investasi dalam Surat Utang Negara (SUN) dan Deposito.

1.3 Piutang Usaha

Piutang usaha merupakan piutang yang diakui atas jumlah yang belum terbayar sebesar nilai rupiah dari penjualan yang belum dilunasi berdasarkan bukti penetapan penjualan. Perkiraan piutang usaha dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah dari layanan yang belum dilunasi.

1.4 Penyisihan Piutang Usaha

Perusahaan membentuk cadangan penyisihan kerugian piutang untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang usaha, khususnya piutang usaha tidak dijamin dengan jaminan memadai, dengan persentasi dan kelompok umur sebagai berikut:

<u>Umur</u>	<u>Kategori</u>	<u>Persentase</u>
- 0 sd 12 bulan	Lancar	0 %
- 12 sd 24 bulan	Tidak Lancar	5 %
- 24 sd 36 bulan	Diragukan	10 %
- Di atas 36 bulan	Macet	20 %

Semua piutang usaha berumur di atas 36 bulan, baik dengan jaminan maupun tidak, dikategorikan sebagai piutang macet dan disajikan pada kelompok Aset Lain-Lain.

1.5 Belanja Dibayar Dimuka

Belanja dibayar di muka merupakan penurunan aktiva yang digunakan untuk uang muka pembelian barang atau jasa dan belanja yang maksud penggunaan aktivitya akan dipertanggungjawabkan kemudian.

1.6 Piutang Pajak

Piutang pajak dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah pajak-pajak yang telah dibayar.

1.7 Piutang Lainnya

Akun Piutang Lainnya digunakan antara lain untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pinjaman pegawai, pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi. Piutang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

1.8 Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Saldo persediaan adalah jumlah persediaan yang masih ada pada tanggal

neraca. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

2. ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan. Perkiraan (Akun) aset tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Mesin dan Peralatan, Kendaraan/Alat Angkut, dan Inventaris/Perabot serta Akumulasi Penyusutan. Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi aset agar tetap dapat digunakan tidak dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan, sedangkan biaya rehabilitasi yang menambah umur dan manfaat dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan.

2.1 Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan dan jaringan. Tanah diakui sebagai aset pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Biaya ini meliputi harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Jika tidak tersedia data secara memadai, maka tanah dicatat dengan estimasi harga perolehan.

2.2 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan, dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan Bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung kantor, gudang dan bangunan lainnya. Gedung dan bangunan dicatat sebagai aset perusahaan pada saat diterima dan terjadi peralihan hak kepemilikan. Gedung dan bangunan dicatat dengan nilai historis, harga perolehan. Harga perolehan gedung dan bangunan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan

baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai gedung dan bangunan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

2.3 Mesin dan Peralatan, Kendaraan/Alat Angkut dan Inventaris/Perabot

Aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional perusahaan dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap ini di neraca antara lain meliputi peralatan perlengkapan kerja, kendaraan bermotor dan tidak bermotor dan inventaris/perabot kantor. Aset tetap ini dicatat sebagai aset perusahaan pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Aset tetap ini dicatat dengan harga perolehan. Harga perolehan aset tetap ini yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai aset tetap ini dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

2.4 Akumulasi Penyusutan

Aset tetap disusutkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang secara rinci diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 96/KMK.03/2009 tanggal 21 Mei 2009 secara garis lurus (*straight line method*) dengan persentase dan penggolongan aset tetap, sebagai berikut :

Uraian	Umur	Persentase
Bukan Bangunan		
– Kelompok 1	< 4 tahun	25%
– Kelompok 2	4 – 8 tahun	12,50%
– Kelompok 3	8 – 16 tahun	6,25%
– Kelompok 4	> 16 tahun	5%
Bangunan Permanen	20 tahun	5%
Bangunan Semi Permanen	10 tahun	10%

3. ASET LAIN-LAIN

Aset lain-lain adalah aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap. Aset lain-lain antara lain terdiri dari aktiva tidak berwujud, biaya organisasi, franchise, software dan piutang macet.

Untuk aset yang diklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain, dicantumkan sebesar nilai perolehannya dan nilai amortisasinya.

4. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup Utang Usaha/Rekanan, Utang Bunga, Beban Yang Masih Harus Dibayar dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

4.1 Utang Usaha

Utang usaha merupakan utang yang timbul akibat adanya pembelian barang dan atau jasa yang terkait langsung dengan pengadaan barang/jasa oleh perusahaan seperti utang untuk pembelian barang persediaan dan bahan habis pakai.

4.2 Beban Yang Masih Harus Dibayar

Merupakan kewajiban yang timbul dari adanya beban/jasa yang diberikan oleh pihak internal maupun pihak eksternal namun belum dilakukan pembayaran oleh perusahaan.

4.3 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya, yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu utang jangka pendek diatas, adalah kewajiban yang harus dilunasi oleh perusahaan, dan penambahan aset yang diperoleh dari penerimaan hak yang belum saatnya diterima dan akan dipertanggungjawabkan kemudian. Utang jangka pendek lainnya dibukukan sebesar nilai nominal.

5. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban jangka panjang perusahaan kepada pihak pemberi pinjaman, yang sesuai perjanjian akan dikembalikan setelah masa tenggang (*grace period*) yang lamanya lebih dari 12 bulan, baik

secara angsuran maupun sekaligus.

6. EKUITAS

Ekuitas merupakan pos pada neraca, yang menampung selisih antara aset dan kewajiban perusahaan pada akhir tahun. Komponen utama dari kenaikan atau penurunan nilai ekuitas adalah laba/(rugi) perusahaan pada tahun yang bersangkutan.

B. LAPORAN LABA/(RUGI)

1) PENDAPATAN

Pendapatan diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan;
- b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

Pendapatan yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh perusahaan tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

2) BEBAN

Beban diakui pada saat:

- a. timbulnya kewajiban;
- b. terjadinya konsumsi aset; dan/atau
- c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke perusahaan tanpa diikuti keluarnya kas.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional perusahaan.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

4. PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Komparatif PT. Manggarai Multi Investasi per 31 Desember 2025 telah menerapkan Standar Akuntansi Keuangan - Entitas Publik (SAK-EP).

5. PENJELASAN POS-POS NERACA

a. Kas dan Setara Kas

Rincian Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut:

	Per 31-12-2025		Per 31-12-2024	
- Kas	Rp	0	Rp	0
- Bank	Rp	0	Rp	40.820.095
Jumlah Kas dan Setara Kas	Rp	0	Rp	40.820.095
Rincian Saldo Bank, terdiri dari:				
- Giro Bank NTT Ruteng Rek. No. 00601090000999	Rp	2.150.662	Rp	34.413.366
- Giro BRI Ruteng Rek. No. 027301002041308	Rp	489.752	Rp	6.406.729
Jumlah Bank	Rp	2.640.414	Rp	40.820.095

Saldo kas sesuai dengan administrasi.

Saldo rekening Tabungan dan Giro Bank telah sesuai dengan rekening koran dari masing-masing bank per 31 Desember 2025.

b. Piutang Usaha

Piutang usaha timbul dari penjualan barang dagangan secara kredit. Saldo piutang usaha per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

	Per 31-12-2025	Per 31-12-2024
– Piutang Usaha Lancar (bruto)	Rp 568.626.992	Rp 993.509.642
<u>Dikurangi:</u>		
– Cadangan Kerugian Piutang Lancar	(Rp 34.416.910)	(Rp 66.126.426)
Jumlah Piutang Usaha (neto)	<u>Rp 534.210.082</u>	<u>Rp 927.383.216</u>

Berdasarkan umurnya, piutang berumur sampai dengan 1 tahun dikategorikan sebagai piutang “lancar”, 2 tahun sebagai “tidak lancar” dan 3 tahun sebagai “diragukan”. Ketiganya disajikan pada kelompok Aset Lancar, sedangkan berumur di atas 3 tahun dikategorikan sebagai piutang “macet” dan disajikan pada kelompok Aset Lain-Lain.

Berdasarkan kelompok umur, piutang usaha per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Kelompok (Umur)	Per 31-12-2025	Per 31-12-2024
– Lancar (0 sd. 1 tahun)	Rp 114.358.000	Rp 159.698.781
– Tidak Lancar (1 sd. 2 tahun)	Rp 220.199.781	Rp 345.093.211
– Diragukan (2 sd. 3 tahun)	<u>Rp 234.069.211</u>	<u>Rp 488.717.650</u>
Jumlah Piutang Usaha (bruto)	<u>Rp 568.626.992</u>	<u>Rp 993.509.642</u>

Perusahaan meyakini jumlah cadangan kerugian yang disisihkan per 31 Desember 2025 sebesar Rp 34.416.910,– dan 2024 sebesar Rp 66.126.426,– dapat menutupi kemungkinan kerugian piutang usaha.

c. Sewa Dibayar Dimuka

Saldo biaya dibayar dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari:

	Per 31-12-2025	Per 31-12-2024
– Sewa kantor beban Tahun 2025	Rp 0	Rp 3.956.000
Jumlah Biaya Dibayar Dimuka	Rp 0	Rp 3.956.000

d. Piutang Lain-Lain

Saldo piutang lain-lain per 31 Desember 2025 adalah pinjaman sementara yang diberikan kepada Pramuka Gugus Kabupaten Manggarai.

e. Persediaan

Merupakan persediaan barang dagangan per 31 Desember 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut:

	Per 31-12-2025	Per 31-12-2024
– Persediaan Alat Tulis Kantor	Rp 130.512.698	Rp 130.622.829
– Persediaan Bahan Bangunan	Rp 407.678.154	Rp 425.381.892
– Persediaan Kopi	Rp 42.415.000	Rp 42.540.000
– Persediaan Barang Covid-19	Rp 18.087.000	Rp 18.087.000
Jumlah Persediaan Bruto	Rp 598.692.852	Rp 616.631.721
– Cadangan Penurunan Nilai	(Rp 18.560.700)	(Rp 0)
Jumlah Persediaan Netto	Rp 580.132.152	Rp 616.631.721

Persediaan barang dagangan perusahaan diamankan di 3 (tiga) gudang yaitu di Cancar (pupuk/kopi), Gereja Redong (bahan bangunan) dan kantor (ATK, bibit dan bahan Covid-19).

Perusahaan membentuk cadangan penurunan nilai persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp 18.560.700,–, untuk menutup kerugian persediaan barang covid, sedangkan persediaan lain dianggap siap dijual dengan harga wajar.

f. Aktiva Tetap

Rincian aktiva tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

	Per 31-12-2025	Per 31-12-2024
Nilai Perolehan:		
– Gedung dan Bangunan	Rp 26.002.500	Rp 26.002.500
– Mesin dan Peralatan	Rp 260.245.859	Rp 260.245.859
– Kendaraan	Rp 195.000.000	Rp 195.000.000
– Perabot Kantor	Rp 155.171.100	Rp 155.171.100
Jumlah Nilai Perolehan	Rp 636.419.459	Rp 636.419.459
Akumulasi Penyusutan:	Rp	
– Gedung dan Bangunan	Rp 10.401.000	Rp 7.800.750
– Mesin dan Peralatan	Rp 254.745.849	Rp 251.995.849
– Kendaraan	Rp 146.250.000	Rp 121.875.000
– Perabot Kantor	Rp 155.171.100	Rp 155.171.100
Jumlah Akumulasi Penyusutan	Rp 566.567.949	Rp 536.842.699
Nilai Buku	Rp 69.851.511	Rp 99.576.760

Rincian aset tetap lihat lampiran.

g. Aktiva Lain-Lain

Saldo aktiva lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari :

	Per 31-12-2025	Per 31-12-2024
– Biaya Organisasi	Rp 130.680.000	Rp 130.680.000
– Ak. Amortisasi Biaya Organisasi	(Rp 130.680.000)	(Rp 130.680.000)
– Biaya Franchise Fee Primagama	Rp 201.776.585	Rp 201.776.585
– Ak. Amortisasi Biaya Organisasi	(Rp 201.776.585)	(Rp 201.776.585)
– Piutang Usaha Macet	Rp 7.130.940.614	Rp 6.811.955.964
– Cad. Kerugian Piutang Macet	(Rp 1.426.188.123)	(Rp 1.362.391.193)
Jumlah Aktiva Lain-Lain	Rp 5.704.752.491	Rp 5.449.564.771

Perusahaan memiliki piutang usaha sulit ditagih (macet) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sejumlah Rp 7.130.940.614,– dan Rp. 6.811.955.964,– atas 116 debitur. Beberapa debitur, menyerahkan jaminan berupa tanah/lahan dan BPKB kendaraan. Dokumen kepemilikannya dikuasai perusahaan.

Selain jaminan berupa BPKB kendaraan, penyerahan jaminan juga antara lain berupa tanah SHM Nomor 25/Gorontalo tanggal 13-12-2002 seluas 7.630 m² di Kota Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat, yang diperkuat dengan pernyataan melalui akte Nomor 15 tanggal 12-4-2022 dari Notaris Theresia Sunita Nurah, SH. M.Kn. Jumlah piutang yang dijamin oleh tanah tersebut sebesar Rp 4.000.000.000,– (empat milyar rupiah) dengan nilai NJOP saat itu sebesar Rp 7.630.000.000,– (tujuh milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah). Pernyataan melalui notaris tersebut dilanjutkan dengan Kuasa Menjual melalui akte Nomor 16 tanggal 12-4-2022 dari notaris yang sama, oleh pemilik tanah kepada Maksimus Man, SE, jabatan Plt. Direktur Utama PT. Manggarai Multi Investasi.

Pada saat ini Maksimus Man, SE telah meninggal dunia, perusahaan dalam proses menindaklanjuti surat kuasa menjual.

h. Beban Yang Masih Harus Dibayar

Jumlah beban yang masih harus dibayar Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 272.278.281,– dan Rp 2.738.700,– dengan rincian :

	Per 31-12-2025	Per 31-12-2024
– Utang BPJS Kesehatan	Rp 2.738.700	Rp 2.738.700
– Utang Gaji Pegawai	Rp 253.539.581	Rp 0
– Utang Fee Audit KAP	Rp 16.000.000	Rp 0
Jumlah Utang Lain-Lain	Rp 272.278.281	Rp 2.738.700

i. Utang Lain-Lain

Saldo utang lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024, terdiri dari:

	Per 31-12-2025	Per 31-12-2024
– Utang Dana Sosial	Rp 19.283.419	Rp 19.283.419
– Utang Dana Pendidikan	Rp 29.483.419	Rp 29.483.419
– Utang Dana Purnabakti	Rp 39.730.580	Rp 39.730.580
– Utang Dana CSR	Rp 12.480.028	Rp 12.480.028
– Utang Dividen	Rp 87.520.432	Rp 59.776.051
– Utang Belum Jelas Debitur	Rp 74.774.064	Rp 74.774.064

Jumlah Utang Lain-Lain

Rp 263.271.942

Rp 235.527.561

j. Modal

Berdasarkan Akta No.05 tertanggal 30 Oktober 2021, yang dibuat dihadapan Theresia Sunita Nurak, Sarjana Hukum, Magister Kenotarian, Notaris di Kabupaten Manggarai, modal saham terdiri dari 80.000 lembar saham @Rp 250.000,- = Rp.20.000.000.000,- dan telah ditempatkan sebanyak 40.800 lembar @Rp.250.000,-. = Rp 10.200.000.000,-

Saham yang telah ditempatkan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:.

Pemegang Saham	Persentase Kepemilikan	Modal Disetor
– Pemerintah Kab. Manggarai	98,04%	Rp 10.000.000.000
– Ibu Monika Ambang	1,47%	Rp 150.000.000
– Bapak Hilarius Mantara	0,49%	Rp 50.000.000
Jumlah	100%	Rp 10.200.000.000

k. Laba/(rugi) Ditahan

Jumlah tersebut merupakan saldo laba/(rugi) ditahan per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut:

	Per 31-12-2025	Per 31-12-2024
– Saldo awal tahun	(Rp 1.724.414.114)	Rp 464.188.196
– Koreksi L/(R) Tahun Lalu	(Rp)	(Rp 6.724.500)
– Pembayaran Dividen	(Rp)	(Rp 150.300.822)
– Laba/(Rugi) Tahun Lalu	(Rp(1.575.919.584))	(Rp 2.031.576.988)
Jumlah Laba/(Rugi) Ditahan	(Rp 3.300.333.698)	(Rp 1.724.414.114)

I. Laba/(rugi) Tahun Berjalan

Jumlah tersebut merupakan saldo laba (rugi) bersih sebelum pajak penghasilan badan tahun 2025 dan 2024, masing-masing sebesar (Rp 539.629.875,-) dan (Rp.1.575.919.584,-).

6. PENJELASAN POS-POS LABA/(RUGI)

a. Pendapatan

Merupakan pendapatan penjualan tahun 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut :

	Per 31-12-2025	Per 31-12-2024
- Penjualan Bahan Bangunan	Rp 27.316.000	Rp 4.663.000
- Penjualan Kopi	Rp 0	Rp 1.600.000
- Penjualan Pupuk	Rp 0	Rp 433.442.500
- Pendapatan Niang Coffee	Rp 0	Rp 1.595.000
Jumlah Pendapatan	Rp 27.316.000	Rp 441.300.500

b. Beban Harga Pokok Penjualan

Merupakan perhitungan harga pokok penjualan atas produk-produk yang dijual tahun 2025 dan 2024, sebagai berikut:

	Per 31-12-2025	Per 31-12-2024
- Persediaan awal	Rp 616.631.721	Rp 847.176.607
<u>Ditambah:</u>		
- Pembelian	Rp 916.000	Rp 458.225.000
- Tersedia untuk dijual	Rp 617.547.721	Rp 1.305.401.607
<u>Dikurang:</u>	Rp	
- Persediaan akhir	Rp 598.692.852	Rp 616.631.721
Harga Pokok Penjualan	Rp 18.854.869	Rp 688.769.886

Rincian perhitungan harga pokok penjualan per produk, terlampir. Lihat Lampiran 4.

c. Beban Penjualan

Jumlah tersebut merupakan beban penjualan dan pemasaran tahun 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :

	Per 31-12-2025	Per 31-12-2024
– Beban Promosi	Rp 3.600.000	Rp 0
– Baban Transportasi	Rp 250.000	Rp 471.000
Jumlah Beban Penjualan	Rp 3.850.000	Rp 471.000

d. Beban Umum dan Administrasi

Jumlah tersebut merupakan beban umum dan administrasi tahun 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :

	Per 31-12-2025	Per 31-12-2024 (Direklass)
Beban Gaji dan Tunjangan	Rp 386.930.585	Rp 305.700.559
– Beban Lembur	Rp 4.040.000	Rp 354.000
– Beban Pengobatan Pegawai	Rp 0	Rp 9.000.000
– Beban BPJS Tenaga Kerja	Rp 0	Rp 10.589.310
– Beban BPJS Kesehatan	Rp 0	Rp 2.738.700
– Beban Pajak PPh 23	Rp 0	Rp 540.541
– Beban ATK dan Perleng. Kantor	Rp 0	Rp 1.861.500
– Beban Rumah Tangga Kantor	Rp 0	Rp 420.000
– Beban Wifi/Inernet	Rp 0	Rp 2.395.700
– Beban Air dan Listrik	Rp 300.000	Rp 1.120.375
– Beban Rapat dan Tamu	Rp 0	Rp 3.220.000
– Beban Makan-Minum	Rp 0	Rp 8.495.000
– Beban Sewa	Rp 0	Rp 26.072.000
– Beban Upah Buruh	Rp 0	Rp 73.000
– Beban Perjalanan Dinas	Rp 3.300.000	Rp 2.500.000
– Beban Sumbangan	Rp 0	Rp 2.000.000
– Beban Jasa Profesional	Rp 30.000.000	Rp 50.000.000
– Beban Kopi Niang	Rp 0	Rp 1.027.200
– Beban BBM Kendaraan	Rp 3.000.000	Rp 28.347.508

– Beban Pemelih. Alat Kantor	Rp	0	Rp	1.300.000
– Beban Pemelih. Kendaraan	Rp	1.600.000	Rp	7.393.000
– Beban Penyusutan	Rp	75.894.330	Rp	29.725.250
– Beban Penyisihan Rugi Piutang	Rp	32.087.415	Rp	837.676.773
– Beban Kerugian Piutang	Rp	0	Rp	1.301.901
– Beban Lain2 Umum & Adm.	Rp	6.978.000	Rp	0
Jumlah Beban Umum dan Adm.	Rp	544.130.330	Rp	1.333.852.317

e. Pendapatan/(Beban) Lain-Lain

Jumlah tersebut merupakan pendapatan/(beban) lain-lain tahun 2025 dan 2024, terdiri dari:

	Per 31-12-2025	Per 31-12-2024
<u>Pendapatan Lain-Lain:</u>		
– Jasa Giro	Rp 136.000	Rp 447140
– Selisih Kas	Rp 0	Rp 5.826.001
Jumlah Pendapatan Lain-Lain	Rp 136.000	Rp 6.273.141
<u>Beban Lain-Lain:</u>		
– Biaya Bank	Rp 240.000	Rp 310.813
– PPH Jasa giro/bunga deposito	Rp 6.676	Rp 89.209
Jumlah Beban Lain-Lain	Rp 246.676	Rp 400.022
Jumlah Pendapatan/(Beban) Lain2	(Rp 110.676)	Rp 5.873.119

7. PENERAPAN PERTAMA KALI SAK EP

a. Latar Belakang

Entitas menerapkan SAK EP untuk pertama kalinya pada laporan keuangan tahun berjalan. Sebelumnya laporan keuangan disusun berdasarkan SAK ETAP. Laporan keuangan tahun sebelumnya yang disajikan sebagai angka pembanding, telah disajikan kembali agar sesuai dengan SAK EP.

b. Dampak Terhadap Laporan Keuangan

Penerapan pertamakali SAK EP tidak menimbulkan dampak material terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas perusahaan. Penyesuaian dilakukan terkait penyelarasan kebijakan akuntansi dan/atau penyajian agar sesuai dengan

perbandingan dan tidak mengakibatkan perubahan material atas jumlah yang sebelumnya dilaporkan.

1) Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain SAK ETAP ke SAK EP

	Tahun 2024	Penyajian Kembali	Tahun 2024 (Disajikan Kembali)
PENDAPATAN			
- Pendapatan Hasil Penjualan	439.705.500		439.705.500
- Pendapatan Jasa	1.595.000		1.595.000
Jumlah Pendapatan	441.300.500		441.300.500
BEBAN HARGA POKOK PENJUALAN	688.769.886		688.769.886
LABA KOTOR	(247.469.386)		(247.469.386)
BEBAN USAHA			
- Beban Penjualan	471.000		471.000
- Beban Umum dan Administrasi	1.333.852.317		1.333.852.317
Jumlah Beban Operasional	1.334.323.317		1.334.323.317
LABA USAHA	(1.581.792.703)		(1.581.792.703)
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
- Pendapatan Lain-Lain	6.273.141		6.273.141
- Beban Lain-Lain	(400.022)		(400.022)
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain	5.873.119		5.873.119
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	(1.575.919.584)		(1.575.919.584)
BEBAN PAJAK PENGHASILAN			
- Pajak Kini	-		-
- Beban Pajak Ditangguhan	-		-
Jumlah Pajak	-		-
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	(1.575.919.584)		(1.575.919.584)
(KERUGIAN) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi:			
- Surplus Revaluasi Tanah/ Aset Tidak Lancar	-		-
Jumlah (Kerugian) Penghasilan Komprehensif Lain	-		-
JUMLAH LABA/(RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	(1.575.919.584)	0	(1.575.919.584)

2) Rekonsiliasi Laporan Posisi Keuangan SAK ETAP ke SAK EP

		31 Desember 2024	Penyajian Kembali	12/31/2024(Disajikan Kembali)
ASET				
ASET LANCAR				
	Kas dan Setara Kas	40.820.095		40.820.095
	Piutang Usaha Bruto			
	Cad. Kerugian Piutang Usaha	-		-
	Piutang Usaha	927.383.216		927.383.216
	Piutang Lain-Lain	-		-
	Sewa Dibayar Dimuka	3.956.000		3.956.000
	Persediaan Bruto	616.631.721		616.631.721
	Cad. Penurunan Nilai Persediaan	(17.111.250)		(17.111.250)
	Persediaan	616.631.721		616.631.721
	Jumlah Aset Lancar	1.588.791.032		1.588.791.032
ASET TETAP				
	Bangunan Gedung	26.002.500		26.002.500
	Mesin dan Peralatan	260.245.859		260.245.859
	Kendaraan	195.000.000		195.000.000
	Perabot Kantor	155.171.100		155.171.100
	Nilai Perolehan Aset Tetap	636.419.459		636.419.459
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(536.842.699)		(536.842.699)
	Nilai Buku Aset Tetap	99.576.760		99.576.760
ASET LAIN-LAIN				
	Biaya Organisasi	130.680.000		130.680.000
	Amortisasi Biaya Organisasi	(130.680.000)		(130.680.000)
	Biaya Franchise Fee Primagama	201.776.585		201.776.585
	Amortisasi Biaya Franchise	(201.776.585)		(201.776.585)
	Piutang Usaha Macet	6.811.955.964		6.811.955.964
	Cad. Kerugian Piutang Usaha Macet	(1.362.391.193)		(1.362.391.193)
		5.449.564.771		5.449.564.771
JUMLAH ASET		7.137.932.563		7.137.932.563
KEWAJIBAN DAN EKUITAS				
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	2.738.700		2.738.700
	Utang Lain-Lain	235.527.561		235.527.561
	Jumlah Kewajiban Jangka Per	238.266.261		238.266.261
EKUITAS				
	Modal Saham Disetor	10.200.000.000		10.200.000.000
	Saldo Laba Ditahan	(1.724.414.114)		(1.724.414.114)
	Saldo Laba Tahun Berjalan	(1.575.919.584)		(1.575.919.584)
	Jumlah Ekuitas	6.899.666.302		6.899.666.302
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		7.137.932.563	-	7.137.932.563

8. KELANGSUNGAN USAHA

Perusahaan mempunyai akumulasi kerugian sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 3.839.963.573,- atau negatif 37,65% dari modal yang disetor sebesar Rp.10.200.000.000,-. Perusahaan juga mempunyai piutang macet yang sulit ditagih per 31 Desember 2025 sejumlah Rp 7.130.940.614,- atau 69,91% dari modal yang disetor sebesar Rp.10.200.000.000,-. Sebagaimana telah diungkap pada penjelasan pos Aset Lain-lain, piutang macet senilai Rp 4.000.000.000,- dijamin dengan tanah seluas 7.630 m² di Kota Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat, yang diperkuat dengan Kuasa Menjual dari pemilik tanah kepada mantan Plt. Direktur Utama, namun penjualannya belum berhasil hingga penerima kuasa meninggal dunia tahun 2024 lalu.

Dalam tahun buku 2025, penjualan perusahaan rendah, hanya mencapai sebesar Rp.27.316.000,- atau 6,19% dari tahun sebelumnya sebesar Rp 441.300.500,-.

Kondisi di atas menempatkan perusahaan pada posisi kesulitan likuiditas yang dapat mengancam keberlangsungan usaha (*going concern*) di masa mendatang.

Tidak nampak upaya nyata dari pemegang saham untuk menekan saldo piutang macet dan mengatasi tren penurunan penjualan.

9. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat peristiwa setelah tanggal neraca yang berdampak pada penyesuaian laporan keuangan.

10. PENYELESAIAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Manajemen perusahaan bertanggungjawab atas penyusunan laporan keuangan yang diselesaikan dan diotorisasi pada tanggal 27 April 2026.

Lampiran



PT. MANGGARAI MULTI INVESTASI DAFTAR SALDO PIUTANG USAHA KATEGORI LANCAR Per 31 Desember 2025		
No. Urut	Nama Debitur	Jumlah
1	Agustinus Tandur	60.000.000
2	Aldi Waru	500.000
3	Antonius Robert	7.784.000
4	Bagian Hukum	5.127.000
5	Bagian Pemerintahan	500.000
6	BPBD Manggarai	342.697
7	CV. Anak Muria	114.334.000
8	David Kantor	964.000
9	Delviana Naluk	2.000.300
10	Encyk	7.336.000
11	Fansi Aldus J.	21.500.000
12	Frans Baur	1.650.000
13	Gonsa Agur	5.720.000
14	Hendrik Tamu	6.230.000
15	Herman Lolang	1.130.000
16	Ica	9.863.000
17	Ino Pemasaran	1.160.000
18	Irma	9.777.900
19	Ivan wangarry	2.535.000
20	Katarina Malus	2.130.000
21	Kosmas Banggut	600.000
22	Lorens Adur	9.915.000
23	Maksimilianus Haryatman	4.250.000
24	Maksimus Man	221.260.762
25	Marsel Megong	1.000.000
26	Naldo barut	3.101.000
27	Naldo Jeramu	1.856.000
28	PKMB Cahyo Timur	3.333.333
29	Ramli Dedy	100.000
30	Sebastianus Pande	2.000.000
31	Alfred Ngabut	10.562.000
32	Dede Hartono	1.200.000
33	Elis Kurniadi	11.100.000
34	Jina	1.115.000
35	Karya Muda	25.300.000
36	Pramuka	4.000.000
37	Rian H. Wea	7.350.000
	Jumlah Piutang Lancar	568.626.992

PT. MANGGARAI MULTI INVESTASI DAFTAR SALDO PIUTANG USAHA KATEGORI MACET Per 31 Desember 2025		
No Urut	Nama Debitur	Jumlah
1	Abel Jehudu	8.300.000
2	Acik Nanu	6.813.000
3	Agustinus Pancur	78.365.500
4	Albertus Sareng	2.712.000
5	Anang	2.325.000
6	Antonius Robert	21.862.000
7	Ardi Tomy	22.024.000
8	Ardy Tampo	111.673.000
9	Ardyanto	29.966.500
10	Bagian Pemerintahan	500.000
11	Bagian Umum	23.000.000
12	Blasius Dambur	37.550.000
13	Blasius/ CV. Wae Linang	5.585.000
14	Budi Janggat	153.871.580
15	CV. Anak Muria	1.209.021.560
16	CV. Karya Pratama/Pengadaan Buku Pelajaran/ferdi wan	123.190.354
17	CV. Patrada	1.419.777.328
18	Delviana Naluk	46.591.000
19	Densy	2.800.000
20	Desa Ceka Luju	11.150.000
21	Desa Kakor	602.000
22	Dinas Pertanian	5.760.000
23	Donatus Saka	700.000
24	Elsi	1.650.000
25	Encyk	3.307.300
26	Ernes	4.770.000
27	Evi/ CV. Tiwu Tuang	1.795.000
28	Evodia/ CV. Karya Pratama	8.253.000
29	Fansi Aldus J.	165.000.000
30	Febri	3.136.000
31	Florentinus Syukur	20.000.000
32	Flory Kampur	5.420.000
33	Frans Dalo	1.163.000
34	Fridus Sastra/ CV. Tunas Cendana	10.819.340
35	Gereja Redong	16.700.000
36	Gonsa Agur	12.120.000
37	Haji Ali	5.005.000
38	Heri Gon	4.799.000
39	Hery jeramu	10.994.000
40	Hironimus Anggul	54.300.000
41	Hironimus Bambar	800.000
42	Horten D.Darusman	640.000
43	Ica	8.054.800

No Urut	Nama Debitur	Jumlah
44	Ino Endo	74.868.000
45	Inosius Eventus	600.000
46	Irma	2.963.400
47	Iron	1.710.000
48	Ivan wangarry	58.600.000
49	Jefri Mbembot/ Cv Pelita Setia	72.000.000
50	Jhon Nabu	9.870.000
51	John Hibur	10.600.000
52	Kamarudin	11.524.000
53	Kanis Garat	17.920.000
54	Karolus Jaya	1.200.000
55	Kasmir Jarung	3.500.000
56	Kons Janggat	190.327.763
57	Kosmas S Kadim	21.000.000
58	Lasarus Juru	180.000
59	Lasarus Ngeot	950.000
60	Lorens Adur	4.292.500
61	Lorens Santu	10.400.000
62	Ludofikus	5.874.500
63	M Mitak Bernardinus	55.284.000
64	Maju	15.000.000
65	Maksi Marsiono	18.987.000
66	Maksimilianus Haryatman	181.137.500
67	Maksimus Man	121.875.980
68	Marsel Damat	6.500.000
69	Marsel Gambang	4.500.000
70	Marsel Harum	6.500.000
71	Marsel Megong	5.884.000
72	Marselinus Fj	2.000.000
73	Mateus Duru	9.388.000
74	Medy	11.310.000
75	Mikael Urus	16.580.000
76	Monika Ambang	150.000.000
77	Monika Jangkong	3.925.000
78	Naldo barut	22.433.000
79	Naldo Jeramu	6.808.000
80	Nobertus Wolo	4.680.000
81	Oce Mbakung	110.030.188
82	Osy Gandut	21.900.000
83	Paskalis Gonggas	7.000.000
84	Paul Helmon	2.040.000
85	Paul Jebarus	39.300.000
86	Paulus Budiman	175.300.000
87	Paulus So	5.250.000
88	PDAM Tirta Komodo	17.299.897
89	Petrus Ngambut	14.174.500
90	Pice Pagur	3.700.000

No Urut	Nama Debitur	Jumlah
91	Piter	1.270.000
92	Rafael Y. Karjon	13.700.000
93	Ramli Dedy	25.100.000
94	Rely Endo	7.500.000
95	Remigius Nalas	5.600.000
96	Rensi Lendo	1.800.000
97	Rikar Sitepu	3.000.000
98	Rino	1.230.000
99	Rita Lega	24.886.300
100	Robertus Aka	1.902.000
101	Rocky Borong	2.179.000
102	Roki	231.000
103	Rudolf B Jaya	16.026.000
104	Rudy Wiguna	423.636.000
105	Salesiu Samsudin/ SD Kusu	2.368.500
106	Savio Tarang	3.355.000
107	SD Paka	804.000
108	SDN Sama Jaya	1.125.000
109	Sebastianus Pande	1.200.000
110	Sensi Gatas	4.000.000
111	Sipri Pandur	2.760.000
112	Siprianus Lasa	12.320.000
113	Sony Darung	137.673.136
114	Stefanus (Pasir Wade)	17.000.000
115	Tamsi	4.800.000
116	Tani karya Muda	8.695.000
117	Tani Watu Wuli	2.300.000
118	Tedy	2.400.000
119	Tedy	1.870.000
120	Tedy Harmin	5.000.000
121	Tian Jemahi	3.384.000
122	Titus Mbetuk	4.550.000
123	Toni Hagul	7.800.000
124	UD Desto	7.733.000
125	UD Selek	3.841.000
126	Venansius Burhan	4.440.000
127	Venansius Hambut	38.250.000
128	Veronika Diut	12.164.000
129	Vian	7.270.000
130	Vinsen Karot	6.680.000
131	Vitalis Jebaru	9.015.000
132	Wilem Nasem	72.860.000
133	Wilem Poka	3.400.000
134	Wulandari	9.318.000
135	Yohanes Kurniadi	11.100.000
	Jumlah Piutang Usaha Macet	6.137.569.426

PT. MANGGARAI MULTI INVESTASI
DAFTAR ASET TETAP DAN PENYUSUTANNYA
PER 31 DESEMBER 2025

No.	Nama Barang			Nilai Perolehan			Akumulasi Penyusutan			Nilai Buku
				Per 31-12-2024	Tahun 2025	Per 31-12-2025	Per 31-12-2024	Tahun 2025	Per 31-12-2025	Per 31-12-2025
1.	Tanah			-	-	-	-	-	-	-
2.	Gedung dan Bangunan		10%	26.002.500	-	26.002.500	7.800.750	2.600.250	10.401.000	15.601.500
3.	Peralatan dan Mesin			260.245.859	-	260.245.859	251.995.849	2.750.000	254.745.849	5.500.010
	- Mesin Grender Niang Coffe	2013	25%	3.540.999	-	3.540.999	3.540.999	-	3.540.999	1
	- Mesin Fotocopy	2015	12,5%	72.000.000	-	72.000.000	71.999.999	-	71.999.999	1
	- Mesin Fotocopy	2021	12,5%	22.000.000	-	22.000.000	13.750.000	2.750.000	16.500.000	5.500.000
	- Mesin Kasir	2018	25%	1.200.000	-	1.200.000	1.199.999	-	1.199.999	1
	- Mesin Rosting	2018	25%	8.500.000	-	8.500.000	8.499.999	-	8.499.999	1
	- Mesin Pemanggang Roti	2018	25%	850.000	-	850.000	849.999	-	849.999	1
	- Mesin Kopi Kapsul	2018	25%	3.050.000	-	3.050.000	3.049.999	-	3.049.999	1
	- Mesin espresso	2019	12,5%	60.200.000	-	60.200.000	60.199.999	-	60.199.999	1
	- Mesin goreng kopi	2018	12,5%	80.000.000	-	80.000.000	79.999.999	-	79.999.999	1
	- Grinder V60	2018	25%	3.800.000	-	3.800.000	3.799.999	-	3.799.999	1
	- Grender Latina	2018	25%	2.268.000	-	2.268.000	2.267.999	-	2.267.999	1
	- Generator	2018	25%	2.836.860	-	2.836.860	2.836.859	-	2.836.859	1
4.	Kendaraan/Alat Angkut			195.000.000	-	195.000.000	121.875.000	24.375.000	146.250.000	48.750.000
	Mobil Mitsubishi L-300			195.000.000	-	195.000.000	121.875.000	24.375.000	146.250.000	48.750.000
5.	Perabot Kantor/Inventaris			155.171.100	-	155.171.100	155.171.100	-	155.171.100	-
	KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA									
	Laptop Accer	2018	25%	5.700.000	-	5.700.000	5.700.000	-	5.700.000	-
	Laptop Accer	2019	25%	5.600.000	-	5.600.000	5.600.000	-	5.600.000	-
	Laptop Toshiba	2016	25%	7.500.000	-	7.500.000	7.500.000	-	7.500.000	-
	Laptop lenovo (2 bh)	2021	25%	11.400.000	-	11.400.000	11.400.000	-	11.400.000	-
	Komputer	2014	25%	15.163.000	-	15.163.000	15.163.000	-	15.163.000	-
	Notebook Accer	2021	25%	3.500.000	-	3.500.000	3.500.000	-	3.500.000	-
	Sub Jumlah			48.863.000	-	48.863.000	48.863.000	-	48.863.000	-

No.	Nama Barang			Nilai Perolehan			Akumulasi Penyusutan			Nilai Buku
				Per 31-12-2024	Tahun 2025	Per 31-12-2025	Per 31-12-2024	Tahun 2025	Per 31-12-2025	Per 31-12-2025
MEUBELER										
	Lemari Kayu (3 bh)	2014	25%	15.600.000	-	15.600.000	15.600.000	-	15.600.000	-
	Lemari Besi	2014	25%	2.000.000	-	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000	-
	Meja (2 bh)	2020	25%	18.894.000	-	18.894.000	18.894.000	-	18.894.000	-
	Meja Pleffod (7 bh)	2014	25%	4.200.000	-	4.200.000	4.200.000	-	4.200.000	-
	Kursi Citos (110 bh)	2016	25%	55.880.000	-	55.880.000	55.880.000	-	55.880.000	-
	Alat print Epson L3110	2020	25%	3.500.000	-	3.500.000	3.500.000	-	3.500.000	-
	Alat print Epson L360	2018	25%	1.200.000	-	1.200.000	1.200.000	-	1.200.000	-
	Kursi Direktur (2 bh)	2017	25%	5.034.100	-	5.034.100	5.034.100	-	5.034.100	-
	Sub Jumlah			106.308.100	-	106.308.100	106.308.100	-	106.308.100	-
TOTAL ASET TETAP				636.419.459	-	636.419.459	536.842.699	29.725.250	566.567.949	69.851.511

Rincian Aset Tetap Tanah pada SKPD Per 31 Desember 2025

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	2	3
1	Sekretariat Daerah	22.147.302.071,00
2	Sekretariat DPRD	2.003.000.000,00
3	Inspektorat Daerah	101.250.000,00
4	Badan Pendapatan Daerah	4.223.234.000,00
5	Badan Keuangan dan Aset Daerah	000.000.000,00
6	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	465.200.000,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	190.340.000,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	119.750.000,00
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	115.295.777.876,67
10	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	80.114.890.548,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	5.729.018.000,00
12	Dinas Perhubungan	4.790.451.552,00
13	Dinas Kesehatan	4.127.487.830,00
14	Dinas Peternakan	2.313.350.000,00
15	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.169.788.783,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	1.313.886.142,00
17	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	982.430.000,00
18	Dinas Sosial	763.200.001,00
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	499.250.000,00
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	497.710.000,00
21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	409.250.000,00
22	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	248.310.000,00
23	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	212.703.718,00
24	Dinas Perikanan	183.220.001,00
25	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	18.678.000,00
26	Kecamatan Ruteng	951.050.000,00
27	Kecamatan Cibal	621.340.000,00
28	Kecamatan Wae Rii	481.632.987,00
29	Kecamatan Langke Rembong	334.136.003,00
30	Kecamatan Satar Mese Utara	220.850.000,00
31	Kecamatan Satar Mese Barat	199.619.001,00
32	Kecamatan Reok	200.040.000,00
33	Kelurahan Pagal	96.700.000,00
34	Kecamatan Lelak	96.113.501,00
35	Kecamatan Rahong Utara	32.683.901,00
36	Kelurahan Wangkung	15.000.000,00
37	Kelurahan Wae Belang	6.650.001,00
38	Kecamatan Reok Barat	5.675.350,00
39	Kecamatan Cibal Barat	3.900.350,00
40	Kecamatan Satar Mese	2.560.000,00
41	Kelurahan Reo	1.830.000,00
42	Kelurahan Mata Air	630.000,00
43	Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng	6.711.250.000,00
Jumlah		260.452.768.224,67

Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada SKPD per 31 Desember 2025

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	2	3
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	110.859.002.207,00
2	Dinas Kesehatan	104.705.371.200,33
3	Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng	119.307.054.108,00
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	107.905.520,00
5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	9.137.076.575,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	9.851.100.410,00
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.874.162.425,00
8	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.351.620.555,00
9	Dinas Perhubungan	9.452.317.237,08
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.169.053.312,00
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	764.834.233,00
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.148.058.474,00
13	Dinas Perikanan	1.887.744.067,00
14	Dinas Poternakan	1.919.464.376,00
15	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.197.117.060,34
16	Sekretariat DPRD	3.672.426.155,99
17	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	1.691.319.752,00
18	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.549.445.239,00
19	Badan Pendapatan Daerah	1.209.932.231,00
20	Badan Kependidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.733.895.541,00
21	Inspektoral	1.314.591.510,00
22	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	18.805.663.573,00
23	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.923.295.435,00
24	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3.495.249.465,00
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.825.886.178,00
26	Dinas Sosial	890.231.000,00
27	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	883.687.293,00
28	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	880.995.338,00
29	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.295.699.580,00
30	Bagian Pemerintahan	3.069.470.880,00
31	Bagian Kesejahteraan Rakyat	198.421.667,00
32	Bagian Administrasi Pembangunan	148.915.906,00
33	Bagian Organisasi	203.682.570,00
34	Bagian Hukum	424.545.000,00
35	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	785.169.419,00
36	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	751.690.137,00
37	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	242.167.000,00
38	Bagian Umum	11.735.149.596,00
39	Bagian Kerja Sama	26.660.088,00
40	Kecamatan Langke Rembong	3.036.433.819,00
41	Kecamatan Ruteng	700.279.634,00
42	Kecamatan Reok	966.410.533,00
43	Kecamatan Satar Mese	456.940.682,00
44	Kecamatan Cibal	678.341.788,00
45	Kecamatan Wae Rii	608.894.304,00
46	Kecamatan Satar Mese Barat	563.398.879,00
47	Kecamatan Rahong Utara	485.881.878,00
48	Kecamatan Lelak	613.145.182,00
49	Kecamatan Reok Barat	593.608.660,00
50	Kecamatan Cibal Barat	588.384.207,00
51	Kecamatan Satar Mese Utara	429.235.394,00
52	Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah	1.123.347.583,00
Jumlah		517.394.610.085,43

Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada SKPD per 31 Desember 2025

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	2	3
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	407.907.448.288,27
2	Dinas Kesehatan	226.417.602.300,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng	116.556.911.501,19
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	9.489.006.116,72
5	Dinas Pertanian dan Kelahanan Pangan	13.069.420.495,45
6	Dinas Perhubungan	17.465.154.535,00
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.109.143.261,00
8	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	10.954.124.271,66
9	Dinas Perikanan	10.765.772.379,28
10	Dinas Peternakan	15.248.357.458,41
11	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	415.587.570,00
12	Saluran Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	513.770.000,00
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	591.532.777,00
14	Dinas Sosial	715.760.954,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	5.258.760.876,00
16	Dinas Lingkungan Hidup	3.736.894.700,00
17	Dinas Kependudukan dan Pencalalan Sipil	2.487.815.441,00
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	671.604.500,00
19	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.450.789.943,00
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.896.014.114,00
21	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	8.042.772.735,55
22	Sekretariat DPRD	5.742.727.458,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	1.212.218.000,00
24	Badan Keuangan dan Aset Daerah	867.924.909,51
25	Badan Pendapatan Daerah	5.520.758.906,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.311.105.035,00
27	Inspektorat	1.282.072.602,00
28	Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	169.763.000,00
29	Bagian Umum	31.288.913.938,00
30	Bagian Pemerintahan	4.172.080.000,00
31	Kecamatan Ruteng	483.230.000,00
32	Kecamatan Langke Rembong	3.289.881.775,69
33	Kecamatan Reok	2.398.215.886,00
34	Kecamatan Satar Mese	1.080.830.000,00
35	Kecamatan Cibal	2.209.812.840,00
36	Kecamatan Wae Rii	605.270.000,00
37	Kecamatan Satar Mese Barat	1.753.651.553,00
38	Kecamatan Rahong Utara	1.652.507.500,00
39	Kecamatan Lelak	1.672.741.000,00
40	Kecamatan Reok Barat	2.214.753.509,00
41	Kecamatan Cibal Barat	2.248.707.848,00
42	Kecamatan Satar Mese Utara	2.403.928.000,00
43	Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah	255.026.000,00
Jumlah		932.600.363.988,33

Rincian Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan pada SKPD per 31 Desember 2025

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	2	3
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	25.464.558.415,81
2	Dinas Kesehatan	19.342.896.548,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng	5.727.567.314,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2.112.797.006.710,16
5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3.981.556.849,00
6	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	72.300.000,00
7	Dinas Perhubungan	17.695.347.568,00
8	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	4.417.411.347,00
9	Dinas Perikanan	10.633.569.775,00
10	Dinas Peternakan	4.331.655.153,00
11	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.185.000.000,00
12	Dinas Sosial	128.744.451,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	22.499.988,00
14	Dinas Lingkungan Hidup	18.771.670.020,00
15	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	11.272.736.025,00
16	Badan Pendapatan Daerah	418.362.618,00
17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	4.528.800,00
18	Inspektorat	30.000.000,00
19	Bagian Umum	2.336.162.600,00
20	Bagian Pemerintahan	211.630.000,00
21	Kecamatan Langke Rembong	11.055.275.720,00
22	Kecamatan Ruteng	2.324.963.018,00
23	Kecamatan Reok	4.195.941.321,15
24	Kecamatan Cibal	2.517.558.752,00
25	Kecamatan Salar Mese	1.167.112.000,00
26	Kecamatan Wae Rü	1.057.228.033,00
27	Kecamatan Salar Mese Barat	1.222.542.947,00
28	Kecamatan Rahong Utara	1.241.341.000,00
29	Kecamatan Lelak	1.241.663.000,00
30	Kecamatan Reok Bara	1.175.383.600,00
31	Kecamatan Cibal Barat	18.020.580,00
32	Kecamatan Salar Mese Utara	14.000.000,00
Total		2.266.076.234.153,12

Rincian Aset Tetap Lainnya pada SKPD per 31 Desember 2025

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	2	3
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	20.396.130.930,68
2	Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng	296.110.168,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	53.927.040.092,00
4	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	438.656.500,00
6	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	807.391.348,00
0	Dinas Perikanan	3.495.500,00
7	Dinas Peternakan	578.150.000,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	77.800.000,00
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	573.700,00
10	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2.000.000,00
11	Inspektorat	4.365.800,00
12	Bagian Kesejahteraan Rakyat	300.000,00
13	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	33.000.000,00
14	Bagian Hukum	19.164.100,00
Jumlah		76.584.278.156,68

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan pada SKPD per 31 Desember 2025

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	2	3
1	Oras Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	189.331.622,70
2	Oras Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	22.710.728.452,81
3	Rumah Sakit Umum Ruteng	10.487.114.422,00
5	Oras Perhubungan	51.220.000,00
6	Oras Perumahan dan Kebudayaan	29.031.700,00
7	Oras Peternakan	100.577.712,00
	Jumlah	33.903.003.970,37

Rincian Aset Tidak Berwujud pada SKPD per 31 Desember 2025

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	2	3
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	307.013.020,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.163.061.286,00
3	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	390.500.000,00
4	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	472.320.000,00
0	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	102.001.000,00
0	Badan Keuangan dan Aset Daerah	40.990.000,00
7	Badan Pendapatan Daerah	100.400.000,00
0	Bagian Organisasi	140.000.000,00
Jumlah		3.030.310.000,00